



LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Wawancara Awal

Narasumber I : Komang Devi Mahardiani, SH

Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan

Lokasi : Ruangan Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan (PTIP) Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B

Transkrip Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban Narasumber
1	Apa saja peran teknologi informasi dalam mendukung kegiatan operasional di Pengadilan Negeri Singaraja?	Teknologi informasi sangat mendukung pekerjaan sehari-hari, seperti penggunaan sistem e-Court, SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara), dan aplikasi lainnya untuk layanan publik.
2	Apakah selama ini sudah ada audit atau evaluasi khusus terkait tata kelola teknologi informasi?	Belum ada audit khusus yang mendalam terkait pengelolaan teknologi informasi, baik perangkat keras (hardware) maupun perangkat lunak (software). Biasanya hanya sebatas pemeliharaan rutin.
3	Bagaimana proses pencatatan aset teknologi informasi, seperti perangkat keras dan perangkat lunak?	Pencatatan aset dilakukan melalui tim administrasi dan sistem inventaris barang milik negara. Namun, belum semua aset terdokumentasi secara detail dan rutin diperbarui.
4	Apakah ada kendala atau masalah yang sering dihadapi terkait pengelolaan aset teknologi informasi?	Beberapa kendala umum seperti keterlambatan perbaikan atau pengadaan perangkat rusak, kurangnya evaluasi berkala terhadap software, serta kurangnya anggaran pemeliharaan.
5	Siapa saja pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan teknologi informasi di sini?	Dibagian PTIP dan bagian umum. Namun, belum ada peran khusus yang menangani audit TI.
6	Apakah ada dokumen kebijakan atau pedoman terkait pengelolaan aset TI di Pengadilan Negeri Singaraja?	Ada kebijakan pengelolaan aset secara umum, tetapi belum ada pedoman spesifik untuk manajemen aset TI
7	Bagaimana tanggapan Ibu jika saya ingin melakukan penelitian terkait audit tata kelola TI di sini?	Kami sangat mendukung, apalagi jika hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan rekomendasi untuk meningkatkan pengelolaan TI di Pengadilan Negeri Singaraja.

No	Pertanyaan	Jawaban Narasumber
8	Apakah memungkinkan untuk melakukan wawancara dan pengumpulan data langsung dengan tim yang terkait?	Tentu saja, selama prosesnya terkoordinasi dengan baik dan mengikuti prosedur yang berlaku di Pengadilan Negeri Singaraja.
9	Apakah ada area khusus yang perlu mendapat perhatian lebih dalam audit TI, seperti software tertentu atau hardware yang sering bermasalah?	Fokus utama mungkin pada software layanan publik seperti SIPP dan e-Court, serta perangkat keras seperti komputer, printer, dan jaringan yang sering digunakan.

Narasumber II : Ni Nyoman Triwahyuningsih, S.Ak.

Jabatan : Operator – Penata Pelayanan Operasional

Lokasi : Ruang Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B

Transkrip Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban Narasumber
1	Berapa banyak total perangkat keras (hardware) yang ada di Pengadilan Negeri Singaraja?	Saat ini, jumlah perangkat keras seperti PC, laptop, printer, scanner, dan server kurang lebih 100 unit.
2	Apakah Bapak/Ibu memiliki data terkait perangkat keras yang rusak dan rusak berat?	Ada, kami memiliki daftar aset yang mencatat perangkat keras berdasarkan kondisi: baik, rusak ringan, dan rusak berat.
3	Boleh saya melihat data aset hardware yang rusak berat selama 5 tahun terakhir?	Boleh, saya kirimkan excel data nya
4	Apa saja jenis perangkat keras yang paling sering mengalami kerusakan?	Perangkat yang paling sering rusak adalah PC, laptop, dan printer, karena pemakaian yang intensif setiap hari untuk kegiatan operasional.
5	Apa penyebab utama perangkat keras menjadi rusak atau rusak berat?	Penyebab utama antara lain pemakaian terus-menerus, kurangnya pemeliharaan rutin, serta usia perangkat yang sudah lama.
6	Bagaimana proses pencatatan jika ada perangkat keras yang mengalami kerusakan?	Kami mencatat kerusakan di buku inventaris dan melaporkannya ke bagian administrasi untuk ditindaklanjuti, seperti perbaikan atau penggantian.

No	Pertanyaan	Jawaban Narasumber
7	Berapa lama biasanya proses perbaikan atau penggantian perangkat keras yang rusak berat?	Proses perbaikan biasanya memakan waktu 1-2 minggu. Namun, untuk penggantian perangkat baru sering kali memakan waktu 3-6 bulan karena proses pengadaan yang cukup panjang.
8	Apakah ada prosedur khusus untuk menangani perangkat keras yang sudah rusak berat?	Ya, perangkat yang rusak berat harus melalui proses penilaian teknis dan diajukan untuk penghapusan aset, kemudian barulah bisa dianggarkan penggantian.
9	Apakah perangkat yang rusak berat langsung diganti, atau ada kendala dalam pengadaan?	Tidak selalu langsung diganti. Ada kendala dalam anggaran dan prosedur penghapusan aset, yang memerlukan waktu cukup lama sebelum penggantian dilakukan.
10	Apakah Anda memiliki rekomendasi agar pengelolaan perangkat keras dapat lebih optimal?	Mungkin bisa dilakukan perawatan rutin yang lebih terjadwal, pembaruan perangkat secara bertahap, dan evaluasi aset setiap 6 bulan sekali.

Narasumber III : I Gede Mahardika, S.H

Jabatan : Sekretaris

Lokasi : Ruang Sekretaris di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB

Transkrip Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban Narasumber
1	Bagaimana pengadilan mengelola risiko yang terkait dengan teknologi, seperti kehilangan data atau gangguan sistem?	Kami ingin risiko teknologi dapat dikelola dengan lebih baik. Semua risiko perlu didokumentasikan dan langkah pencegahan harus dilakukan agar tidak mengganggu layanan pengadilan.
2	Apa kendala utama yang saat ini dihadapi dalam mengelola risiko teknologi di pengadilan?	Kami sudah mengidentifikasi beberapa risiko, tetapi pengelolaannya belum optimal. Masih ada masalah seperti kurangnya dokumentasi dan keterbatasan dalam langkah mitigasi.
3	Apakah pengadilan memiliki rencana yang jelas untuk	Kami ingin ada perencanaan yang lebih baik agar teknologi tidak hanya digunakan sebagai alat pendukung, tetapi

No	Pertanyaan	Jawaban Narasumber
	penggunaan teknologi jangka panjang?	juga menjadi bagian penting dalam mencapai tujuan pengadilan.
4	Bagaimana pengadilan memastikan bahwa teknologi mendukung kebutuhan harian dan jangka panjang?	Saat ini integrasi antara teknologi dan kebutuhan pengadilan masih terbatas. Teknologi lebih banyak digunakan untuk pekerjaan harian, belum untuk perencanaan strategis.
5	Bagaimana cara pengadilan menjaga agar semua perangkat teknologi tetap dalam kondisi baik dan terawasi?	Kami ingin pengelolaan aset teknologi lebih rapi. Semua perangkat harus dipantau, dirawat secara rutin, dan diganti jika sudah tidak layak digunakan.
6	Apakah saat ini ada kesulitan dalam mengelola perangkat teknologi di pengadilan?	Pemeliharaan perangkat masih dilakukan jika ada kerusakan. Pemantauan secara berkala belum diterapkan karena keterbatasan sumber daya dan prosedur yang jelas.
7	Bagaimana pengadilan melindungi data dan sistem dari serangan atau ancaman, seperti hacker atau virus?	Kami ingin memastikan sistem keamanan lebih baik agar data pengadilan aman. Kebijakan keamanan sudah ada, tetapi pelaksanaannya perlu ditingkatkan.
8	Apa yang menjadi tantangan utama dalam menjaga keamanan teknologi di pengadilan?	Beberapa ancaman sudah teridentifikasi, tetapi tindakan untuk mencegahnya belum maksimal. Kami juga perlu waktu lebih cepat dalam merespons ancaman baru.
9	Bagaimana pengadilan memantau apakah teknologi yang digunakan bekerja dengan baik dan sesuai aturan?	Kami ingin ada pemantauan rutin agar teknologi selalu mendukung tugas pengadilan dan semua aturan dipatuhi. Saat ini pemantauan lebih banyak dilakukan jika ada masalah saja.
10	Apakah pengadilan memiliki sistem untuk menilai apakah penggunaan teknologi sudah sesuai tujuan?	Kami belum memiliki sistem yang teratur untuk mengevaluasi. Biasanya kami hanya mengecek ketika ada kendala, sehingga sulit memastikan efektivitas teknologi secara keseluruhan.

Lampiran 2. Surat Ijin Penelitian

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA FAKULTAS TEKNIK DAN KEJURUAN Jalan Udayana Nomor 11 Singaraja Bali Laman: http://fkk.undiksha.ac.id
Nomor : 132/UN48.11.1/KM/2025	Singaraja, 17 Januari 2025
Perihal : Surat Permohonan Data	
Yth. Kepala Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB di tempat	
Dengan hormat, sehubungan dengan proses penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, maka melalui surat ini kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan data yang terkait dengan data yang dibutuhkan. Adapun mahasiswa yang akan melakukan pengambilan data seperti tersebut di bawah ini:	
Nama :	Putu Diah Maharany
NIM :	2115091017
Program Studi :	Sistem Informasi
Jurusan :	Teknik Informatika
Data yang dibutuhkan :	Terkait dengan data pengelolaan asset di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB
Judul Skripsi :	Evaluasi Tata Kelola Manajemen Aset Teknologi Informasi dengan Cobit 2019 Pada Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.	
	
Wakil Dekan Bidang Akademik, Made Winda Antara Kesiman NIP. 19820111200812100108	
	

 MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA Jl. Kartini No. 2 Singaraja Website : pn-singaraja.go.id, e-Mail : prsingaraja@yahoo.co.id			
LEMBAR DISPOSISI			
TANGGAL REGISTER	28/02/2025	TK KEAMANAN	Penting
NOMOR AGENDA	406/2025	TANGGAL PENYELESAIAN	
TANGGAL SURAT	16/01/2025		
NOMOR SURAT	18/UN46.11.3/KM/2025		
PENGIRIM	Universitas Pendidikan Ganesha		
KEPADA	Ketua Pengadilan		
RINGKASAN	Perat Pemohonan Pengambilan Data		
DISPOSISI	DITERUSKAN KEPADA	KETERANGAN	
Ketua Pengadilan I MADE BAGIARTA, S.H.,M.H.	Panitera SJARIFUDIN RASJID, S.H.	TGL: 28/02/2025 WAKTU: 14.49.35 indak lanjut	
Panitera SJARIFUDIN RASJID, S.H.	Panitera Muda Hukum I Nengah Karyasa, S.H.	TGL: 28/02/2025 WAKTU: 14.49.35 indak lanjut	
Panitera Muda Hukum I Nengah Karyasa, S.H.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan KOMANG DEVI MAHARDIANI, S.H.	TGL: 28/02/2025 WAKTU: 14.49.35 dikembalikan	



Lampiran 3. Uji Ahli Kuisisioner 1

UJI AHLI KUESIONER PENELITIAN SKRIPSI

EVALUASI TATA KELOLA MANAJEMEN ASET DAN LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT 2019 PADA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA

Nama Mahasiswa : Putu Diah Maharanny
NIM : 2115091017
Program Studi : Sistem Informasi
Jurusan/Fakultas : Teknik Informatika/Teknik dan Kejuruan

1. Domain BAI09 Managed Assets (Aset yang Dikelola) Revisi pada Capability Level 1

3	Verify that the assets are fit for purpose (i.e., in a useful condition).	Verifikasi bahwa aset sesuai dengan tujuannya (yaitu, dalam kondisi yang berguna).	Pengadilan Negeri Singaraja melakukan pengecekan rutin untuk memastikan aset dalam kondisi baik dan dapat digunakan.	✓	mohon diperhatikan kembali: i.e dgn waktu
8.	Source, receive, verify, test and record all assets in a controlled manner, including physical labeling as required.	Sumber, terima, verifikasi, uji dan catat semua aset secara terkendali, termasuk pelabelan fisik sebagaimana diperlukan.	Pengadilan Negeri Singaraja melakukan pencatatan, verifikasi, dan pelabelan aset secara sistematis sebelum digunakan.	✓	perhatikan huruf translate
10	Maintain a register of all purchased software licenses and associated license agreements.	Menyimpan daftar semua lisensi perangkat lunak yang dibeli dan perjanjian lisensi terkait.	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki daftar lengkap semua lisensi perangkat lunak yang telah dibeli beserta dokumen perjanjiannya	✓	Perhatikan

Revisi pada *Capability Level 2*

3	Verify that the assets are fit for purpose (i.e., in a useful condition).	Verifikasi bahwa aset sesuai dengan tujuannya (yaitu, dalam kondisi yang berguna).	Pengadilan Negeri Singaraja secara rutin melakukan pengecekan kondisi aset untuk memastikan kelayakannya.	✓	Perhatikan hasil translate
---	---	--	---	---	----------------------------

8	Source, receive, verify, test and record all assets in a controlled manner, including physical labeling as required.	Sumber, terima, verifikasi, uji dan catat semua aset secara terkendali, termasuk pelabelan fisik sebagaimana diperlukan.	Pengadilan Negeri Singaraja memastikan aset yang diterima telah diuji, diverifikasi, dan diberi label sesuai ketentuan	✓	Perhatikan hasil translate
---	--	--	--	---	----------------------------

Revisi Pada *Capability Level 3*

Level 3	1	Ensure accounting for all assets.	Memastikan akuntansi untuk semua aset	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki sistem pencatatan akuntansi untuk semua aset yang dimiliki.	✓	Perhatikan hasil translate
	2	Incorporate planned downtime in an overall production schedule. Schedule the	Memasukkan downtime (sistem tidak berfungsi) terencana dalam jadwal produksi keseluruhan dan	Pengadilan Negeri Singaraja menjadwalkan pemeliharaan aset secara terencana untuk	✓	Perhatikan hasil translate

HASIL REVISI

1. Domain BAI09 *Managed Assets* (Aset yang Dikelola)

Revisi Pada *Capability Level 1*

Level Capability	No	Activities	Aktivitas	Instrument Item Pernyataan	Sesuai	Tidak Sesuai	Catatan
Level 1	3	Verify that the assets	Verifikasi bahwa aset	Pengadilan Negeri			

Level Capability	No	Activities	Aktivitas	Instrument Item Pernyataan	Sesuai	Tidak Sesuai	Catatan
		are fit for purpose (i.e., in a useful condition).	sesuai dengan tujuan penggunaannya (misalnya, dalam kondisi yang layak untuk digunakan).	Singaraja melakukan pengecekan rutin untuk memastikan aset dalam kondisi layak dan siap digunakan sesuai dengan tujuannya.			
	8.	Source, receive, verify, test and record all assets in a controlled manner, including physical labeling as required.	Mendapatkan, menerima, memverifikasi, menguji, dan mencatat semua aset secara terkendali, termasuk pelabelan fisik sesuai kebutuhan.	Pengadilan Negeri Singaraja melakukan pencatatan, verifikasi, pengujian, dan pelabelan aset secara sistematis sebelum digunakan.			
	10	Maintain a register of all purchased software licenses and associated license agreements.	Menjaga daftar semua lisensi perangkat lunak yang telah dibeli beserta perjanjian lisensi yang terkait.	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki dan memelihara daftar lengkap semua lisensi perangkat lunak yang telah dibeli, termasuk perjanjian lisensinya.			

Revisi Pada *Capability Level 2*

Level Capability	No	Activities	Aktivitas	Instrument Item Pernyataan	Sesuai	Tidak Sesuai	Catatan
Level 2	3	Verify that the assets are fit for purpose (i.e., in a useful condition).	Memastikan bahwa aset sesuai dengan tujuan penggunaannya (misalnya, dalam kondisi yang layak pakai).	Pengadilan Negeri Singaraja secara rutin melakukan pemeriksaan aset untuk memastikan bahwa aset tersebut masih layak digunakan sesuai dengan fungsinya.			
	8	Source, receive, verify, test and record all assets in a controlled manner, including physical labeling as required.	Mendapatkan, menerima, memverifikasi, menguji, dan mencatat semua aset secara terkendali, termasuk melakukan pelabelan fisik sesuai kebutuhan.	Pengadilan Negeri Singaraja memastikan bahwa setiap aset yang diperoleh telah melalui proses penerimaan, verifikasi, pengujian, pencatatan, serta diberikan label fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.			

Revisi pada *Capability Level 3*

Level Capability	No	Activities	Aktivitas	Instrument Item Pernyataan	Sesuai	Tidak Sesuai	Catatan
Level 3	1	Ensure accounting for all assets.	Memastikan pencatatan akuntansi untuk semua aset.	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki sistem pencatatan akuntansi yang mencakup seluruh aset yang dimiliki dan digunakan.			
	2	Incorporate planned downtime in an overall production schedule. Schedule the maintenance activities to minimize the adverse impact on business processes.	Memasukkan waktu henti (downtime) yang telah direncanakan dalam jadwal operasional secara keseluruhan serta menjadwalkan kegiatan pemeliharaan agar dampaknya terhadap proses bisnis dapat diminimalkan.	Pengadilan Negeri Singaraja merencanakan jadwal downtime dan pemeliharaan aset secara terstruktur untuk mengurangi dampak terhadap layanan peradilan.			

2. Domain EDM02 *Ensured Benefits Delivery* (Memastikan Nilai (value))

Revisi pada *Capability Level 4*

5.	Define and communicate enterprise-level value delivery goals and outcome measures to enable effective monitoring.	Menentukan dan mengkomunikasikan tujuan penyampaian nilai tingkat organisasi dan hasil ukuran untuk memungkinkan pemantauan yang efektif	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki mekanisme untuk mengukur dan mengawasi pencapaian manfaat dari investasi TI.	✓		
6	Define a balanced set of performance	Menentukan serangkaian tujuan kinerja,	Pengadilan Negeri Singaraja menggunakan			

objectives, metrics, targets and benchmarks. Metrics should cover activity and outcome measures, including lead and lag indicators for outcomes, as well as an appropriate balance of financial and nonfinancial measures. Review and agree on them with IT and other business functions, and other relevant stakeholders.	target, tolok ukur yang seimbang, ukuran aktivitas dan hasil, serta keseimbangan ukuran finansial dan nonfinansial yang sesuai	indikator kinerja yang mencakup aspek finansial dan nonfinansial dalam evaluasi TI.	✓	lebih baik hasil transparansi	
--	--	---	---	--	--

Hasil Revisi :

Level Capability	No	Activities	Aktivitas	Instrument Item Pernyataan	Sesuai	Tidak Sesuai	Catatan
Level 4	6	Define a balanced set of performance objectives, metrics, targets and benchmarks. Metrics should cover activity and outcome measures, including lead and lag indicators for outcomes, as well as an appropriate balance of financial and nonfinancial measures. Review and agree on them with IT and other business functions, and other relevant stakeholders.	Menentukan serangkaian tujuan kinerja, metrik, target, dan tolok ukur yang seimbang. Metrik harus mencakup ukuran aktivitas dan hasil, termasuk indikator awal dan akhir untuk hasil, serta keseimbangan yang sesuai antara ukuran finansial dan nonfinansial. Tinjau dan sepakati dengan TI, fungsi bisnis lainnya, serta pemangku kepentingan terkait.	Pengadilan Negeri Singaraja menetapkan dan meninjau tujuan kinerja, metrik, serta tolok ukur yang mencakup indikator awal dan akhir untuk mengukur keseimbangan aspek finansial dan nonfinansial dalam evaluasi TI bersama dengan pihak terkait.			

				meningkatkan efektivitas kontrol dalam proses bisnis.			
--	--	--	--	--	--	--	--

Uji Ahli Pertama
Singaraja, 20 Februari 2015


Gede Arna Jude Saskara, S.T.,M.T
NIP 199105152020121003



Lampiran 4. Uji Ahli Kuisisioner Mitra

UJI AHLI KUESIONER PENELITIAN SKRIPSI

EVALUASI TATA KELOLA MANAJEMEN ASET DAN LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT 2019 PADA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA

Nama Mahasiswa : Putu Diah Maharanny
NIM : 2115091017
Program Studi : Sistem Informasi
Jurusan/Fakultas : Teknik Informatika/Teknik dan Kejuruan

1. Domain MEA01 Monitor, Evaluate, and Assess Performance and Conformance (Penentuan Kinerja dan Kesesuaian Terkelola)

7	Evaluate whether the goals and metrics are adequate, that is, specific, measurable, achievable, relevant and time-bound (SMART).	Mengevaluasi tujuan dan ukuran penilaian (metric) apakah sudah memadai dilihat dari <i>specific, measurable, achievable, relevant and time-bound</i> (SMART) atau spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan batas waktu	Pengadilan telah memastikan bahwa tujuan dan ukuran kinerja telah sesuai dengan prinsip SMART.	✓			
---	--	---	--	---	--	--	--

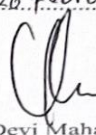
Hasil Revisi :

Level Capability	No	Activities	Aktivitas	Instrument Item Pernyataan	Sesuai	Tidak Sesuai	Catatan
Level 2	7	Evaluate whether the goals and metrics are adequate, that is, specific, measurable, achievable, relevant	Mengevaluasi apakah tujuan dan metrik sudah memadai, yaitu spesifik, terukur, dapat dicapai,	Pengadilan Negeri Singaraja telah memastikan bahwa tujuan dan ukuran kinerja telah sesuai dengan prinsip SMART,			

		and time-bound (SMART).	relevan, dan terikat waktu (SMART).	seperti dalam penetapan target penyelesaian perkara yang ditetapkan secara spesifik, memiliki indikator pengukuran yang jelas, realistis untuk dicapai, relevan dengan peningkatan pelayanan publik, dan memiliki batas waktu penyelesaian yang telah ditentukan.			
--	--	-------------------------	-------------------------------------	---	--	--	--

		meningkatkan efektivitas kontrol dalam proses bisnis.			
--	--	---	--	--	--

Uji Ahli Mitra
Singaraja, 28 Februari 2025


Komang Devi Mahardiani, SH.
NIP 199006192009122001

Lampiran 5. Kuisoner Penelitian

KUESIONER PENELITIAN

EVALUASI TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI (TI) MENGUNAKAN FRAMEWORK COBIT 2019 PADA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS 1B

Kuesioner ini disusun sebagai bagian dari penelitian tugas akhir oleh mahasiswa atas nama Putu Diah Maharanny dari Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Teknik dan Kejuruan, Universitas Pendidikan Ganesha. Tujuan dari kuesioner ini adalah untuk memperoleh data yang akurat terkait kondisi Tata Kelola Teknologi Informasi saat ini di lingkungan Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B, serta menilai tingkat kapabilitas organisasi berdasarkan framework COBIT 2019. Instrumen dalam kuesioner ini mengacu pada pedoman yang terdapat dalam buku COBIT 2019 *Governance and Management Objectives* yang diterbitkan oleh ISACA pada tahun 2019. Partisipasi Bapak/Ibu dalam mengisi kuesioner ini sangat berharga demi kelengkapan data penelitian. Mohon untuk mengisi kuesioner ini dengan memberikan tanda centang (✓) pada pilihan yang sesuai dengan kondisi nyata yang terjadi di unit kerja Bapak/Ibu.

Penilaian didasarkan atas kondisi berikut:

- Yes : Bernilai 1 (Menyatakan adanya aktivitas)
- No : Bernilai 0 (Menyatakan tidak adanya aktivitas)
- Keterangan : Diisi keterangan dokumen pendukung yang mendukung adanya aktivitas tersebut

Nama Responden :

Jabatan :

1. Domain BAI09 Managed Assets (Aset yang Dikelola)

Level Capability	No	Aktifitas	Yes	No	Keterangan
Level 2	1	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki daftar aset yang mencatat seluruh aset yang dimiliki beserta statusnya.			
	2	Pengadilan Negeri Singaraja telah mengidentifikasi dan mematuhi semua peraturan hukum dan kontrak terkait pengelolaan aset.			
	3	Pengadilan Negeri Singaraja melakukan pengecekan rutin untuk memastikan aset dalam kondisi layak dan siap digunakan sesuai dengan tujuannya.			
	4	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki daftar aset kritis yang diperlukan untuk kelancaran layanan peradilan.			
	5	Pengadilan Negeri Singaraja melakukan evaluasi berkala terhadap risiko kerusakan atau penggantian aset kritis.			
	6	Pengadilan Negeri Singaraja menginformasikan kepada pengguna mengenai dampak dari pemeliharaan aset, seperti pembatasan penggunaan sementara.			
	7	Pengadaan aset di Pengadilan Negeri Singaraja dilakukan berdasarkan permintaan yang telah disetujui dan mengikuti kebijakan yang berlaku.			
	8.	Pengadilan Negeri Singaraja memastikan bahwa setiap aset yang diperoleh telah melalui proses penerimaan, verifikasi, pengujian, pencatatan, serta diberikan label fisik sesuai			

Level Capability	No	Aktifitas	Yes	No	Keterangan
		dengan ketentuan yang berlaku.			
	9	Proses pembayaran aset di Pengadilan Negeri Singaraja dilakukan sesuai dengan perjanjian kontrak dengan pemasok.			
	10	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki dan memelihara daftar lengkap semua lisensi perangkat lunak yang telah dibeli, termasuk perjanjian lisensinya.			
Level 3	1	Pengadilan Negeri Singaraja mencatat seluruh aset yang dimiliki dan digunakan dalam sistem akuntansi untuk memastikan pengelolaan yang terstruktur dan terdokumentasi dengan baik.			
	2	Pengadilan Negeri Singaraja menjadwalkan downtime saat sistem akan diperbarui dan melakukan pemeliharaan aset secara terstruktur untuk mengurangi dampak terhadap layanan peradilan.			
	3	Pengadilan Negeri Singaraja melakukan pemeliharaan rutin terhadap aset kritis dan menyediakan alternatif jika terjadi kegagalan.			
	4	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki rencana perawatan preventif untuk perangkat keras berdasarkan rekomendasi vendor dan analisis risiko.			
	5	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki kontrak layanan pemeliharaan dengan pihak ketiga yang mencakup aspek keamanan dan privasi.			
	6	Pengadilan Negeri Singaraja membatasi akses jarak jauh hanya untuk kebutuhan			

Level Capability	No	Aktifitas	Yes	No	Keterangan
		pemeliharaan dan diagnosis tertentu.			
	7	Pengadilan Negeri Singaraja menerapkan standar implementasi aset dengan proses pengujian penerimaan sebelum digunakan.			
	8	Setiap aset yang dialokasikan di Pengadilan Negeri Singaraja harus mendapatkan persetujuan dan pengguna bertanggung jawab atas penggunaannya.			
	9	Pengadilan Negeri Singaraja melakukan alokasi ulang aset jika tidak lagi digunakan untuk mengoptimalkan pemanfaatannya.			
	10	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki dokumentasi terkait penghapusan atau penghentian aset sesuai peraturan yang berlaku.			
	11	Pengadilan Negeri Singaraja memastikan pembuangan aset dilakukan dengan aman untuk mencegah kebocoran data dan dampak lingkungan.			
	12	Pengadilan Negeri Singaraja melakukan evaluasi berkala terhadap aset untuk memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan operasional.			
	13	Pengadilan Negeri Singaraja secara berkala mengaudit perangkat lunak berlisensi untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi.			
Level 4	1	Pengadilan Negeri Singaraja melakukan pemeriksaan berkala terhadap aset yang dimiliki untuk memastikan keberadaannya.			
	2	Pengadilan Negeri Singaraja mengevaluasi apakah aset			

Level Capability	No	Aktifitas	Yes	No	Keterangan
		masih memberikan manfaat dan memperkirakan masa manfaatnya.			
	3	Pengadilan Negeri Singaraja melakukan pemantauan rutin terhadap aset penting dan mengambil tindakan perbaikan jika diperlukan.			
	4	Pengadilan Negeri Singaraja memastikan pembuangan aset dilakukan sesuai dengan regulasi dan mempertimbangkan dampak lingkungan.			
	5.	Pengadilan Negeri Singaraja melakukan analisis biaya pemeliharaan dan mempertimbangkan opsi yang lebih hemat.			
	6	Pengadilan Negeri Singaraja melakukan audit perangkat lunak secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap lisensi.			
	7	Pengadilan Negeri Singaraja mengevaluasi kebutuhan terhadap lisensi yang tidak digunakan untuk efisiensi biaya.			
	8	Pengadilan Negeri Singaraja memastikan kepatuhan terhadap lisensi dengan mencopot perangkat lunak yang tidak diperlukan atau membeli lisensi tambahan jika dibutuhkan.			
Level 5	1	Pengadilan Negeri Singaraja melakukan evaluasi jaminan aset dan mempertimbangkan strategi yang memberikan nilai terbaik.			
	2	Pengadilan Negeri Singaraja mengevaluasi aset yang kurang dimanfaatkan untuk optimalisasi biaya dan operasional.			

Level Capability	No	Aktifitas	Yes	No	Keterangan
	3	Pengadilan Negeri Singaraja melakukan analisis terhadap aset untuk mencari peluang standarisasi guna efisiensi biaya.			
	4	Pengadilan Negeri Singaraja mengevaluasi penggunaan teknologi baru atau strategi alternatif untuk efisiensi operasional.			
	5	Pengadilan Negeri Singaraja meninjau apakah peningkatan produk atau lisensi dapat memberikan manfaat yang lebih besar.			

2. Domain EDM02 Ensured Benefits Delivery (Memastikan Nilai (value))

Level Capability	No	Aktifitas	Yes	No	Keterangan
Level 1	1	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki dokumen perencanaan investasi TI yang mendukung strategi organisasi.			
	2	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki pemahaman yang jelas tentang bagaimana investasi TI mendukung tujuan bisnis dan strategis organisasi.			
	3	Pengadilan Negeri Singaraja mengidentifikasi dan mendokumentasikan berbagai aset dan sumber daya TI yang diperlukan untuk mendukung strategi organisasi.			
	4	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki proses persetujuan formal untuk rencana investasi TI yang mempertimbangkan hubungan dengan strategi organisasi.			

Level Capability	No	Aktifitas	Yes	No	Keterangan
	5	Pengadilan Negeri Singaraja memahami dan mengelola isu-isu strategis terkait TI serta dampaknya terhadap organisasi.			
	6	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki mekanisme pelaporan dan komunikasi yang jelas terkait investasi TI dan kriteria evaluasinya.			
Level 3	1	Pengadilan Negeri Singaraja menetapkan investasi TI dengan mempertimbangkan keuntungan jangka pendek dan panjang, serta potensi risiko.			
	2	Pengadilan Negeri Singaraja memahami prinsip-prinsip tata kelola TI yang diperlukan untuk mencapai nilai optimal bagi organisasi.			
	3	Pengadilan Negeri Singaraja melakukan evaluasi berkala terhadap peluang inovasi teknologi dan dampaknya terhadap proses bisnis.			
	4	Pengadilan Negeri Singaraja melakukan evaluasi berkala terhadap peluang inovasi teknologi dan dampaknya terhadap proses bisnis.			
	5	Pengadilan Negeri Singaraja menerapkan proses evaluasi bertahap dalam setiap keputusan investasi TI untuk mengelola risiko secara optimal.			
	6	Pengadilan Negeri Singaraja mendorong pemanfaatan TI untuk meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing organisasi.			
	7	Pengadilan Negeri Singaraja memastikan adanya distribusi tanggung jawab yang jelas			

Level Capability	No	Aktifitas	Yes	No	Keterangan
		dalam pengelolaan investasi TI dan layanan bisnis.			
	8	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki mekanisme penyesuaian rencana investasi berdasarkan perubahan kebutuhan organisasi.			
	9	Pengadilan Negeri Singaraja secara aktif mengevaluasi inovasi teknologi dan potensi peningkatan operasional untuk meningkatkan nilai bisnis.			
Level 4	1	Pengadilan Negeri Singaraja melakukan evaluasi terhadap efektivitas strategi TI dalam pencapaian nilai organisasi.			
	2	Pengadilan Negeri Singaraja mempertimbangkan dampak investasi TI sejalan dengan nilai organisasi dan manajemen keuangan.			
	3	Pengadilan Negeri Singaraja mempertimbangkan bagaimana investasi TI mendukung nilai organisasi dan manajemen keuangan.			
	4	Pengadilan Negeri Singaraja memastikan investasi TI sejalan dengan tujuan strategis, efektivitas, efisiensi, serta risiko organisasi.			
	5.	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki mekanisme untuk mengukur dan mengawasi pencapaian manfaat dari investasi TI.			
	6	Pengadilan Negeri Singaraja menetapkan dan meninjau tujuan kinerja serta indikator pengukuran yang mencakup berbagai aspek, baik keuangan maupun nonkeuangan, untuk memastikan evaluasi TI dilakukan secara seimbang dan sesuai dengan kebutuhan organisasi.			

Level Capability	No	Aktifitas	Yes	No	Keterangan
	7	Pengadilan Negeri Singaraja mengumpulkan data kinerja TI untuk mendukung pengambilan keputusan strategis.			
	8	Pengadilan Negeri Singaraja memastikan adanya laporan berkala terkait kinerja TI dan pencapaian tujuan organisasi.			
Level 5	1	Pengadilan Negeri Singaraja memastikan tindakan korektif dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kinerja TI.			
	2	Pengadilan Negeri Singaraja memastikan manajemen bertindak secara proaktif dalam mengoptimalkan manfaat investasi TI.			

3. Domain APO02 Managed Strategy (Strategi yang Dikelola)

Level Capability	No	Aktifitas	Yes	No	Keterangan
Level 1	1	Pengadilan Negeri Singaraja memahami dan memantau faktor eksternal yang dapat memengaruhi strategi dan operasional TI.			
	2	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki pemahaman yang jelas tentang cara kerja organisasi saat ini, termasuk operasional, teknologi, dan tantangan yang dihadapi.			
	3	Pengadilan Negeri Singaraja telah mendefinisikan arah strategis dan tingkat ambisi digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan.			
	4	Pengadilan Negeri Singaraja telah mengidentifikasi pemangku kepentingan utama dan memahami kebutuhan mereka terkait strategi TI.			

Level Capability	No	Aktifitas	Yes	No	Keterangan
	5	Pengadilan Negeri Singaraja telah mengidentifikasi kemampuan dan layanan TI yang dimiliki serta menilai layanan eksternal yang digunakan.			
	6	Pengadilan Negeri Singaraja telah menyusun ringkasan strategi organisasi dan menentukan aspek TI yang mendukung pencapaian tujuan strategis.			
	7	Pengadilan Negeri Singaraja telah mendefinisikan tujuan dan sasaran TI serta memastikan kontribusinya terhadap pencapaian strategi organisasi.			
Level 3	1	Pengadilan telah melakukan penilaian terhadap kematangan digital di berbagai aspek, termasuk kesiapan kepemimpinan dalam memanfaatkan teknologi.			
	2	Pengadilan telah mengidentifikasi layanan dan produk IT yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan strategisnya.			
	3	Pengadilan telah menentukan metode pengembangan yang sesuai untuk mendukung pencapaian tujuan IT.			
	4	Pengadilan telah mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan.			
	5	Pengadilan telah mendefinisikan perubahan utama dalam arsitektur perusahaan untuk mendukung strategi IT.			
	6	Pengadilan telah melakukan analisis dampak perubahan IT terhadap bisnis dan model operasional.			

Level Capability	No	Aktifitas	Yes	No	Keterangan
	7	Pengadilan telah mengidentifikasi inisiatif strategis untuk menjembatani kesenjangan antara kondisi saat ini dan target.			
	8	Pengadilan memiliki peta jalan yang jelas untuk implementasi strategi IT.			
	9	Pengadilan telah mempertimbangkan peran mitra eksternal dalam mendukung implementasi strategi IT.			
	10	Pengadilan telah mengelompokkan inisiatif strategis menjadi program atau proyek dengan tujuan yang jelas.			
	11	Pengadilan telah mengidentifikasi prioritas proyek berdasarkan dampak dan ketergantungan antar proyek.			
	12	Pengadilan telah menyusun peta jalan final untuk pelaksanaan strategi IT.			
	13	Pengadilan telah menetapkan pemimpin transformasi digital untuk memastikan keberhasilan strategi IT.			
	14	Pengadilan telah mendapatkan dukungan dari pemangku kepentingan terhadap strategi IT.			
	15	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki strategi komunikasi yang jelas untuk menyampaikan rencana pengendalian proses bisnis menggunakan media dan teknologi yang tersedia.			
	16	Pengadilan telah menyiapkan strategi komunikasi untuk menyampaikan rencana implementasi strategi IT.			

Level Capability	No	Aktifitas	Yes	No	Keterangan
	17	Pengadilan telah membangun jaringan pendukung untuk implementasi strategi IT.			
Level 4	1	Pengadilan telah mengevaluasi manfaat potensial dan risiko jika perubahan tidak dilakukan.			
	2	Pengadilan telah menyusun pernyataan nilai yang jelas mengenai manfaat lingkungan sasaran.			
	3	Pengadilan telah mengidentifikasi metrik dan target yang relevan untuk mengukur keberhasilan implementasi strategi IT.			
	4	Pengadilan telah mengintegrasikan umpan balik dari pemangku kepentingan untuk menyempurnakan rencana komunikasi.			

4. Domain MEA01 Monitor, Evaluate, and Assess Performance and Conformance (Penentuan Kinerja dan Kesesuaian Terkelola)

Level Capability	No	Aktifitas	Yes	No	Keterangan
Level 1	1	Pengadilan telah mengidentifikasi pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses pemantauan dan evaluasi kinerja serta kesesuaian.			
	2	Pengadilan telah melibatkan stakeholder dalam penyampaian tujuan dan persyaratan pemantauan kinerja serta kesesuaian dengan menggunakan terminologi yang jelas dan umum digunakan.			
	3	Pengadilan telah menyelaraskan metode			

Level Capability	No	Aktifitas	Yes	No	Keterangan
		pemantauan dan evaluasi dengan pendekatan yang digunakan dalam organisasi serta telah menetapkan alat bantu yang digunakan untuk pengumpulan dan pelaporan data.			
	4	Pengadilan telah menetapkan jenis tujuan, ukuran kinerja, serta sistem penyimpanan data yang mendukung proses pemantauan dan evaluasi.			
	5	Pengadilan telah mengalokasikan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung proses pemantauan dan evaluasi dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi.			
	6	Pengadilan telah menetapkan tujuan dan ukuran kinerja serta melakukan tinjauan berkala bersama stakeholder untuk memastikan kelayakan target.			
	7	Pengadilan Negeri Singaraja memastikan bahwa setiap tujuan dan indikator kinerja telah ditetapkan secara jelas, dapat diukur, realistis, relevan dengan kebutuhan organisasi, dan memiliki batas waktu yang jelas untuk dicapai.			
	8.	Pengadilan telah menginformasikan kepada stakeholder utama mengenai perubahan yang diusulkan terhadap target dan toleransi kinerja.			
	9	Pengadilan telah mendistribusikan informasi perubahan target dan toleransi kinerja kepada pengguna terkait.			
	10	Pengadilan telah melakukan pengumpulan data kinerja			

Level Capability	No	Aktifitas	Yes	No	Keterangan
		secara terstruktur, termasuk melalui sistem otomatis jika memungkinkan.			
	11	Pengadilan telah mengevaluasi efisiensi dan kegunaan data yang dikumpulkan serta memastikan integritas data tersebut.			
	12	Pengadilan telah mengelola data agregat untuk mendukung pengukuran kinerja secara menyeluruh.			
	13	Pengadilan telah melakukan evaluasi terhadap respons manajemen serta opsi yang diusulkan dalam menangani penyimpangan kinerja.			
	14	Pengadilan telah memastikan bahwa setiap tindakan korektif memiliki penanggung jawab yang jelas.			
	15	Pengadilan telah melakukan pemantauan terhadap hasil dari tindakan korektif yang telah diimplementasikan.			
	16	Pengadilan telah menyusun dan menyampaikan laporan hasil tindakan korektif kepada stakeholder terkait.			
Level 3	1	Pendekatan yang digunakan dalam pemantauan dan evaluasi kinerja di Pengadilan Negeri Singaraja telah divalidasi secara berkala, serta pemangku kepentingan, persyaratan, dan sumber daya yang baru atau berubah telah diidentifikasi			
	2	Terdapat proses manajemen siklus hidup dan pengendalian perubahan yang telah disepakati di Pengadilan Negeri Singaraja untuk pemantauan dan pelaporan			

Level Capability	No	Aktifitas	Yes	No	Keterangan
		kinerja, termasuk perbaikan dalam pelaporan, metrik, pendekatan, baseline, dan benchmarking.			
	3	Data agregat dalam sistem informasi Pengadilan Negeri Singaraja telah diselaraskan dengan pendekatan dan tujuan pelaporan yang ditetapkan, untuk memastikan akurasi dan konsistensi dalam evaluasi kinerja.			
	4	Laporan kinerja proses di Pengadilan Negeri Singaraja telah dirancang secara ringkas, mudah dipahami, dan disesuaikan dengan kebutuhan pimpinan serta pemangku kepentingan, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang efektif dan tepat waktu.			
	5	Laporan kinerja di Pengadilan Negeri Singaraja telah didistribusikan kepada pemangku kepentingan yang relevan sesuai dengan kebijakan dan prosedur pelaporan yang berlaku.			
Level 4	1	Pengadilan Negeri Singaraja telah menggunakan alat dan sistem yang sesuai untuk pemrosesan dan analisis data guna mendukung evaluasi kinerja secara akurat dan efektif.			
	2	Penyebab penyimpangan terhadap target kinerja di Pengadilan Negeri Singaraja telah dianalisis, serta tindakan perbaikan telah ditetapkan dengan tanggung jawab yang jelas dan terdokumentasi dengan baik.			
	3	Sasaran kinerja individu di Pengadilan Negeri Singaraja			

Level Capability	No	Aktifitas	Yes	No	Keterangan
		telah mengintegrasikan aspek kinerja dan kepatuhan, serta pencapaian target kinerja dikaitkan dengan sistem penghargaan organisasi.			
	4	Hasil kinerja Pengadilan Negeri Singaraja telah dibandingkan dengan target internal serta, jika memungkinkan, dengan standar industri atau pengadilan lain sebagai tolok ukur eksternal.			
	5.	Tren kinerja dan kepatuhan di Pengadilan Negeri Singaraja telah dianalisis secara berkala, serta tindakan yang sesuai telah diambil untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional.			
Level 5	1	Pengadilan Negeri Singaraja secara berkala mengevaluasi sasaran dan metrik kinerja serta memberikan rekomendasi perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pemantauan dan evaluasi.			

5. Domain DSS06 Managed Business Process Controls (Pengendalian Proses Bisnis Terkelola)

Level Capability	No	Aktifitas	Yes	No	Keterangan
Level 1	1	Pengadilan Negeri Singaraja telah mengidentifikasi dan mendokumentasikan aktivitas pengendalian untuk memastikan proses bisnis utama sesuai dengan tujuan strategis, operasional, pelaporan, dan kepatuhan.			
	2	Pengadilan Negeri Singaraja menetapkan prioritas			

Level Capability	No	Aktifitas	Yes	No	Keterangan
		pengendalian berdasarkan risiko yang ada serta mengidentifikasi kontrol utama yang diperlukan.			
	3	Pengadilan Negeri Singaraja menetapkan pemilik tanggung jawab untuk setiap aktivitas pengendalian utama guna memastikan akuntabilitas.			
	4	Setiap transaksi di Pengadilan Negeri Singaraja diautentikasi dan diverifikasi untuk memastikan bahwa hanya individu yang berwenang yang dapat memulai transaksi.			
	5	Pengadilan Negeri Singaraja menerapkan pemisahan tugas antara inisiasi dan persetujuan transaksi untuk menghindari konflik kepentingan.			
	6	Setiap peran dalam Pengadilan Negeri Singaraja dialokasikan sesuai dengan deskripsi pekerjaan dan aktivitas proses bisnis yang telah ditetapkan.			
	7	Kewenangan persetujuan transaksi, batas transaksi, dan keputusan lainnya dalam Pengadilan Negeri Singaraja ditetapkan berdasarkan peran pekerjaan yang telah disetujui.			
	8.	Dalam aktivitas sensitif, Pengadilan Negeri Singaraja menetapkan peran yang berbeda untuk memastikan pemisahan tugas secara jelas.			
	9	Kesalahan, pengecualian, dan penyimpangan dalam proses bisnis di Pengadilan Negeri Singaraja ditinjau secara berkala.			
	10	Dokumen sumber dan transaksi yang mengalami kesalahan diperbaiki, disetujui kembali, dan dikirim ulang			

Level Capability	No	Aktifitas	Yes	No	Keterangan
		oleh Pengadilan Negeri Singaraja.			
	11	Pengadilan Negeri Singaraja menyimpan bukti semua tindakan perbaikan yang telah dilakukan untuk memastikan akuntabilitas.			
	12	Semua informasi sumber, bukti pendukung, dan catatan transaksi terdokumentasi dengan baik di Pengadilan Negeri Singaraja.			
	13	Akses informasi di Pengadilan Negeri Singaraja dibatasi sesuai dengan klasifikasi dan tingkat kerahasiaan yang ditetapkan.			
	14	Pengadilan Negeri Singaraja memberikan pelatihan dan sosialisasi mengenai penggunaan sistem dan informasi yang sesuai dengan kebijakan organisasi.			
Level 3	1	Pengadilan Negeri Singaraja telah menerapkan kontrol otomatis untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam proses bisnis.			
	2	Setiap transaksi diverifikasi melalui kontrol otomatis dan manual untuk memastikan akurasi, kelengkapan, dan validitasnya.			
	3	Kesalahan dalam transaksi dikoreksi dan diajukan ulang tanpa mengubah tingkat otorisasi aslinya.			
	4	Sistem di Pengadilan Negeri Singaraja memastikan transaksi yang valid tetap berjalan meskipun ada kesalahan dalam transaksi lainnya.			
	5	Dokumen hasil proses bisnis dikirimkan dengan metode yang aman dan diverifikasi			

Level Capability	No	Aktifitas	Yes	No	Keterangan
		sebelum diserahkan kepada penerima.			
	6	Sistem memiliki mekanisme pemulihan data untuk memastikan data tetap valid setelah kegagalan sistem.			
	7	Data transaksi diperiksa sebelum diteruskan untuk memastikan alamat, keaslian, dan integritasnya.			
	8	Hak akses diberikan hanya sesuai kebutuhan pekerjaan, dan segera dicabut jika peran pekerjaan berubah.			
	9	Pelatihan berkala diberikan kepada staf mengenai peran mereka dalam kontrol bisnis dan keamanan data.			
	10	Hak administratif dikelola dengan ketat dan diaudit secara berkala untuk mencegah penyalahgunaan			
	11	Ada prosedur jelas untuk menangani kesalahan, pengecualian, dan ketidakseimbangan dalam proses bisnis.			
	12	Dokumen dan data disimpan sesuai dengan kebijakan retensi yang telah ditetapkan.			
	13	Data yang tidak diperlukan lagi dimusnahkan sesuai kebijakan retensi dan keamanan informasi.			
	14	Informasi diklasifikasikan berdasarkan tingkat kepentingan dan dilindungi dengan kebijakan keamanan yang sesuai.			
	15	Proses dan alat audit digunakan untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan regulasi.			
Level 4	1	Pengadilan Negeri Singaraja secara berkala memantau kontrol bisnis untuk			

Level Capability	No	Aktifitas	Yes	No	Keterangan
		mengidentifikasi area yang dapat ditingkatkan.			
	2	Hak akses diperiksa secara rutin untuk memastikan hanya staf yang berwenang yang memiliki akses ke informasi tertentu.			
	3	Kesalahan dalam proses bisnis dilaporkan dan dianalisis untuk menemukan pola dan penyebab utama.			
	4	Setiap pelanggaran dan penyimpangan dalam proses bisnis didokumentasikan dan dilaporkan kepada manajemen serta pemangku kepentingan terkait.			
Level 5	1	Pengadilan Negeri Singaraja secara aktif mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas kontrol dalam proses bisnis.			

Singaraja,.....2025

(.....)

Lampiran 6. Hasil Kuesioner 1

Nama Responden : Yakobus Manu, S.H.

Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan

1. Domain APO02 Managed Strategy (Strategi yang Dikelola)

Level Capability	No	Aktifitas	Yes	No	Keterangan
Level 0	1	Pengadilan Negeri Singaraja belum memiliki bukti yang cukup terkait pencapaian tujuan proses dalam pengelolaan strategi TI.		✓	
Level 1	1	Pengadilan Negeri Singaraja memahami dan memantau faktor eksternal yang dapat memengaruhi strategi dan operasional TI.	✓		
	2	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki pemahaman yang jelas tentang cara kerja organisasi saat ini, termasuk operasional, teknologi, dan tantangan yang dihadapi.	✓		
	3	Pengadilan Negeri Singaraja telah mendefinisikan arah strategis dan tingkat ambisi digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan.	✓		
	4	Pengadilan Negeri Singaraja telah mengidentifikasi pemangku kepentingan utama dan memahami kebutuhan mereka terkait strategi TI.	✓		
	5	Pengadilan Negeri Singaraja telah mengidentifikasi kemampuan dan layanan TI yang dimiliki serta menilai layanan eksternal yang digunakan.	✓		
	6	Pengadilan Negeri Singaraja telah menyusun ringkasan strategi organisasi dan menentukan aspek TI yang mendukung pencapaian tujuan strategis.	✓		
	7	Pengadilan Negeri Singaraja telah mendefinisikan tujuan dan sasaran TI serta memastikan kontribusinya	✓		



		terhadap pencapaian strategi organisasi.			
Level 2	1	Pengadilan Negeri Singaraja memahami dan memantau faktor eksternal yang dapat memengaruhi strategi dan operasional TI.	✓		
	2	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki pemahaman yang jelas tentang cara kerja organisasi saat ini, termasuk operasional, teknologi, dan tantangan yang dihadapi.	✓		
	3	Pengadilan Negeri Singaraja telah mendefinisikan arah strategis dan tingkat ambisi digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan.	✓		
	4	Pengadilan Negeri Singaraja telah mengidentifikasi pemangku kepentingan utama dan memahami kebutuhan mereka terkait strategi TI.	✓		
	5	Pengadilan Negeri Singaraja telah mengidentifikasi kemampuan dan layanan TI yang dimiliki serta menilai layanan eksternal yang digunakan.	✓		
	6	Pengadilan Negeri Singaraja telah menyusun ringkasan strategi organisasi dan menentukan aspek TI yang mendukung pencapaian tujuan strategis.	✓		
	7	Pengadilan Negeri Singaraja telah mendefinisikan tujuan dan sasaran TI serta memastikan kontribusinya terhadap pencapaian strategi organisasi.	✓		
Level 3	1	Pengadilan telah melakukan penilaian terhadap kematangan digital di berbagai aspek, termasuk kesiapan kepemimpinan dalam memanfaatkan teknologi.	✓		
	2	Pengadilan telah mengidentifikasi layanan dan produk I&T yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan strategisnya.	✓		



3	Pengadilan telah menentukan metode pengembangan yang sesuai untuk mendukung pencapaian tujuan I&T.	✓		
4	Pengadilan telah mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan.	✓		
5	Pengadilan telah mendefinisikan perubahan utama dalam arsitektur perusahaan untuk mendukung strategi I&T.	✓		
6	Pengadilan telah melakukan analisis dampak perubahan I&T terhadap bisnis dan model operasional.	✓		
7	Pengadilan telah mengidentifikasi inisiatif strategis untuk menjembatani kesenjangan antara kondisi saat ini dan target.	✓		
8	Pengadilan memiliki peta jalan yang jelas untuk implementasi strategi I&T.	✓		
9	Pengadilan telah mempertimbangkan peran mitra eksternal dalam mendukung implementasi strategi I&T.	✓		
10	Pengadilan telah mengelompokkan inisiatif strategis menjadi program atau proyek dengan tujuan yang jelas.	✓		
11	Pengadilan telah mengidentifikasi prioritas proyek berdasarkan dampak dan ketergantungan antar proyek.			
12	Pengadilan telah menyusun peta jalan final untuk pelaksanaan strategi I&T.			
13	Pengadilan telah menetapkan pemimpin transformasi digital untuk memastikan keberhasilan strategi I&T.	✓		
14	Pengadilan telah mendapatkan dukungan dari pemangku kepentingan terhadap strategi I&T.	✓		
15	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki strategi komunikasi yang jelas untuk menyampaikan rencana	✓		



		pengendalian proses bisnis menggunakan media dan teknologi yang tersedia.			
	16	Pengadilan telah menyiapkan strategi komunikasi untuk menyampaikan rencana implementasi strategi I&T.	✓		
	17	Pengadilan telah membangun jaringan pendukung untuk implementasi strategi I&T.	✓		
Level 4	1	Pengadilan telah mengevaluasi manfaat potensial dan risiko jika perubahan tidak dilakukan.	✓		
	2	Pengadilan telah menyusun pernyataan nilai yang jelas mengenai manfaat lingkungan sasaran.	✓		
	3	Pengadilan telah mengidentifikasi metrik dan target yang relevan untuk mengukur keberhasilan implementasi strategi I&T.		✓	
	4	Pengadilan telah mengintegrasikan umpan balik dari pemangku kepentingan untuk menyempurnakan rencana komunikasi.		✓	
Level 5	1	Tidak ada instrumen pernyataan yang relevan pada level ini.		✓	

2. Domain MEA01 Monitor, Evaluate, and Assess Performance and Conformance (Penentuan Kinerja dan Kesesuaian Terkelola)

Level Capability	No	Aktifitas	Yes	No	Keterangan
Level 0	1	Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa organisasi telah menerapkan proses pemantauan dan evaluasi kinerja serta kesesuaian.		✓	
	2	Pengadilan telah mengidentifikasi pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses pemantauan dan evaluasi kinerja serta kesesuaian.	✓		
Level 1	1	Pengadilan telah melibatkan stakeholder dalam penyampaian	✓		
	2	Pengadilan telah melibatkan stakeholder dalam penyampaian	✓		



		tujuan dan persyaratan pemantauan kinerja serta kesesuaian dengan menggunakan terminologi yang jelas dan umum digunakan.			
3		Pengadilan telah menyelaraskan metode pemantauan dan evaluasi dengan pendekatan yang digunakan dalam organisasi serta telah menetapkan alat bantu yang digunakan untuk pengumpulan dan pelaporan data.	✓		
4		Pengadilan telah menetapkan jenis tujuan, ukuran kinerja, serta sistem penyimpanan data yang mendukung proses pemantauan dan evaluasi.	✓		
5		Pengadilan telah mengalokasikan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung proses pemantauan dan evaluasi dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi.	✓		
6		Pengadilan telah menetapkan tujuan dan ukuran kinerja serta melakukan tinjauan berkala bersama stakeholder untuk memastikan kelayakan target.	✓		
7		Pengadilan telah memastikan bahwa tujuan dan ukuran kinerja telah sesuai dengan prinsip SMART.	✓		
8		Pengadilan telah menginformasikan kepada stakeholder utama mengenai perubahan yang diusulkan terhadap target dan toleransi kinerja.			
9		Pengadilan telah mendistribusikan informasi perubahan target dan toleransi kinerja kepada pengguna terkait.	✓		
10		Pengadilan telah melakukan pengumpulan data kinerja secara terstruktur, termasuk melalui sistem otomatis jika memungkinkan.	✓		
11		Pengadilan telah mengevaluasi efisiensi dan kegunaan data yang dikumpulkan serta memastikan integritas data tersebut.	✓		



	12	Pengadilan telah mengelola data agregat untuk mendukung pengukuran kinerja secara menyeluruh.	✓		
	13	Pengadilan telah melakukan evaluasi terhadap respons manajemen serta opsi yang diusulkan dalam menangani penyimpangan kinerja.	✓		
	14	Pengadilan telah memastikan bahwa setiap tindakan korektif memiliki penanggung jawab yang jelas.	✓		
	15	Pengadilan telah melakukan pemantauan terhadap hasil dari tindakan korektif yang telah diimplementasikan.	✓		
	16	Pengadilan telah menyusun dan menyampaikan laporan hasil tindakan korektif kepada stakeholder terkait.	✓		
Level 2	1	Pengadilan telah mengidentifikasi pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses pemantauan dan evaluasi kinerja serta kesesuaian.	✓		
	2	Pengadilan telah melibatkan stakeholder dalam penyampaian tujuan dan persyaratan pemantauan kinerja serta kesesuaian dengan menggunakan terminologi yang jelas dan umum digunakan.	✓		
	3	Pengadilan telah menyelaraskan metode pemantauan dan evaluasi dengan pendekatan yang digunakan dalam organisasi serta telah menetapkan alat bantu yang digunakan untuk pengumpulan dan pelaporan data.	✓		
	4	Pengadilan telah menetapkan jenis tujuan, ukuran kinerja, serta sistem penyimpanan data yang mendukung proses pemantauan dan evaluasi.	✓		
	5	Pengadilan telah mengalokasikan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung proses pemantauan dan evaluasi dengan	✓		



	mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi.			
6	Pengadilan telah menetapkan tujuan dan ukuran kinerja serta melakukan tinjauan berkala bersama stakeholder untuk memastikan kelayakan target.	✓		
7	Pengadilan telah memastikan bahwa tujuan dan ukuran kinerja telah sesuai dengan prinsip SMART.	✓		
8	Pengadilan telah menginformasikan kepada stakeholder utama mengenai perubahan yang diusulkan terhadap target dan toleransi kinerja.			
9	Pengadilan telah mendistribusikan informasi perubahan target dan toleransi kinerja kepada pengguna terkait.	✓		
10	Pengadilan telah melakukan pengumpulan data kinerja secara terstruktur, termasuk melalui sistem otomatis jika memungkinkan.	✓		
11	Pengadilan telah mengevaluasi efisiensi dan kegunaan data yang dikumpulkan serta memastikan integritas data tersebut.	✓		
12	Pengadilan telah mengelola data agregat untuk mendukung pengukuran kinerja secara menyeluruh.	✓		
13	Pengadilan telah melakukan evaluasi terhadap respons manajemen serta opsi yang diusulkan dalam menangani penyimpangan kinerja.	✓		
14	Pengadilan telah memastikan bahwa setiap tindakan korektif memiliki penanggung jawab yang jelas.	✓		
15	Pengadilan telah melakukan pemantauan terhadap hasil dari tindakan korektif yang telah diimplementasikan.	✓		



	16	Pengadilan telah menyusun dan menyampaikan laporan hasil tindakan korektif kepada stakeholder terkait.	✓		
Level 3	1	Pendekatan yang digunakan dalam pemantauan dan evaluasi kinerja di Pengadilan Negeri Singaraja telah divalidasi secara berkala, serta pemangku kepentingan, persyaratan, dan sumber daya yang baru atau berubah telah diidentifikasi	✓		
	2	Terdapat proses manajemen siklus hidup dan pengendalian perubahan yang telah disepakati di Pengadilan Negeri Singaraja untuk pemantauan dan pelaporan kinerja, termasuk perbaikan dalam pelaporan, metrik, pendekatan, baseline, dan benchmarking.	✓		
	3	Data agregat dalam sistem informasi Pengadilan Negeri Singaraja telah diselaraskan dengan pendekatan dan tujuan pelaporan yang ditetapkan, untuk memastikan akurasi dan konsistensi dalam evaluasi kinerja.	✓		
	4	Laporan kinerja proses di Pengadilan Negeri Singaraja telah dirancang secara ringkas, mudah dipahami, dan disesuaikan dengan kebutuhan pimpinan serta pemangku kepentingan, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang efektif dan tepat waktu.	✓		
	5	Laporan kinerja di Pengadilan Negeri Singaraja telah didistribusikan kepada pemangku kepentingan yang relevan sesuai dengan kebijakan dan prosedur pelaporan yang berlaku.	✓		
Level 4	1	Pengadilan Negeri Singaraja telah menggunakan alat dan sistem yang sesuai untuk pemrosesan dan analisis data guna mendukung evaluasi kinerja secara akurat dan efektif.	✓		



	2	Penyebab penyimpangan terhadap target kinerja di Pengadilan Negeri Singaraja telah dianalisis, serta tindakan perbaikan telah ditetapkan dengan tanggung jawab yang jelas dan terdokumentasi dengan baik.	✓		
	3	Sasaran kinerja individu di Pengadilan Negeri Singaraja telah mengintegrasikan aspek kinerja dan kepatuhan, serta pencapaian target kinerja dikaitkan dengan sistem penghargaan organisasi.	✓		
	4	Hasil kinerja Pengadilan Negeri Singaraja telah dibandingkan dengan target internal serta, jika memungkinkan, dengan standar industri atau pengadilan lain sebagai tolok ukur eksternal.	✓		
	5.	Tren kinerja dan kepatuhan di Pengadilan Negeri Singaraja telah dianalisis secara berkala, serta tindakan yang sesuai telah diambil untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional.	✓		
Level 5	1	Pengadilan Negeri Singaraja secara berkala mengevaluasi sasaran dan metrik kinerja serta memberikan rekomendasi perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pemantauan dan evaluasi.	✓	.	

3. Domain DSS06 Managed Business Process Controls (Pengendalian Proses Bisnis Terkelola)

Level Capability	No	Aktifitas	Yes	No	Keterangan
Level 0	1	Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa organisasi telah menerapkan proses pengendalian proses bisnis yang terkelola		✓	
Level 1	1	Pengadilan Negeri Singaraja telah mengidentifikasi dan mendokumentasikan aktivitas	✓		



		pengendalian untuk memastikan proses bisnis utama sesuai dengan tujuan strategis, operasional, pelaporan, dan kepatuhan.	✓		
2		Pengadilan Negeri Singaraja menetapkan prioritas pengendalian berdasarkan risiko yang ada serta mengidentifikasi kontrol utama yang diperlukan.	✓		
3		Pengadilan Negeri Singaraja menetapkan pemilik tanggung jawab untuk setiap aktivitas pengendalian utama guna memastikan akuntabilitas.	✓		
4		Setiap transaksi di Pengadilan Negeri Singaraja diautentikasi dan diverifikasi untuk memastikan bahwa hanya individu yang berwenang yang dapat memulai transaksi.	✓		
5		Pengadilan Negeri Singaraja menerapkan pemisahan tugas antara inisiasi dan persetujuan transaksi untuk menghindari konflik kepentingan.	✓		
6		Setiap peran dalam Pengadilan Negeri Singaraja dialokasikan sesuai dengan deskripsi pekerjaan dan aktivitas proses bisnis yang telah ditetapkan.	✓		
7		Kewenangan persetujuan transaksi, batas transaksi, dan keputusan lainnya dalam Pengadilan Negeri Singaraja ditetapkan berdasarkan peran pekerjaan yang telah disetujui.	✓		
8		Dalam aktivitas sensitif, Pengadilan Negeri Singaraja menetapkan peran yang berbeda untuk memastikan pemisahan tugas secara jelas.	✓		
9		Kesalahan, pengecualian, dan penyimpangan dalam proses bisnis di Pengadilan Negeri Singaraja ditinjau secara berkala.	✓		
10		Dokumen sumber dan transaksi yang mengalami kesalahan diperbaiki, disetujui kembali, dan	✓		



		dikirim ulang oleh Pengadilan Negeri Singaraja.			
	11	Pengadilan Negeri Singaraja menyimpan bukti semua tindakan perbaikan yang telah dilakukan untuk memastikan akuntabilitas.	✓		
	12	Semua informasi sumber, bukti pendukung, dan catatan transaksi terdokumentasi dengan baik di Pengadilan Negeri Singaraja.	✓		
	13	Akses informasi di Pengadilan Negeri Singaraja dibatasi sesuai dengan klasifikasi dan tingkat kerahasiaan yang ditetapkan.	✓		
	14	Pengadilan Negeri Singaraja memberikan pelatihan dan sosialisasi mengenai penggunaan sistem dan informasi yang sesuai dengan kebijakan organisasi.	✓		
Level 2	1	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki dokumentasi aktivitas pengendalian yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan strategis, operasional, pelaporan, dan kepatuhan.	✓		
	2	Pengadilan Negeri Singaraja melakukan analisis risiko untuk menentukan prioritas aktivitas pengendalian dan mengidentifikasi kontrol utama yang diperlukan.	✓		
	3	Setiap aktivitas pengendalian utama memiliki penanggung jawab yang ditetapkan di Pengadilan Negeri Singaraja.	✓		
	4	Setiap transaksi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Singaraja diverifikasi untuk memastikan bahwa hanya pihak yang berwenang yang dapat memulainya.	✓		
	5	Pengadilan Negeri Singaraja menerapkan pemisahan tugas yang jelas antara pembuatan dan persetujuan transaksi.	✓		
	6	Peran dan tanggung jawab dalam proses bisnis dialokasikan berdasarkan deskripsi pekerjaan	✓		



		yang telah disetujui di Pengadilan Negeri Singaraja.			
	7	Kewenangan persetujuan transaksi di Pengadilan Negeri Singaraja ditetapkan berdasarkan peran pekerjaan yang telah disetujui dan terstruktur dengan baik.	✓		
	8	Dalam aktivitas yang bersifat sensitif, Pengadilan Negeri Singaraja menetapkan pemisahan tugas secara jelas untuk menghindari potensi konflik kepentingan.	✓		
	9	Setiap kesalahan, pengecualian, dan penyimpangan dalam proses bisnis direview secara berkala di Pengadilan Negeri Singaraja.	✓		
	10	Dokumen sumber dan transaksi yang mengalami kesalahan diperbaiki, disetujui ulang, dan diserahkan kembali dengan prosedur yang jelas di Pengadilan Negeri Singaraja.	✓		
	11	Bukti tindakan perbaikan atas setiap penyimpangan dalam proses bisnis terdokumentasi dengan baik di Pengadilan Negeri Singaraja.	✓		
	12	Informasi sumber, bukti pendukung, dan catatan transaksi terdokumentasi dengan baik untuk memastikan akuntabilitas di Pengadilan Negeri Singaraja.	✓		
	13	Akses terhadap informasi dibatasi sesuai dengan klasifikasinya untuk menjaga kerahasiaan di Pengadilan Negeri Singaraja.	✓		
	14	Pelatihan dan sosialisasi mengenai penggunaan sistem dan informasi yang sesuai dengan kebijakan organisasi diberikan secara berkala di Pengadilan Negeri Singaraja.	✓		
Level 3	1	Pengadilan Negeri Singaraja telah menerapkan kontrol otomatis untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam proses bisnis.	✓		



2	Setiap transaksi diverifikasi melalui kontrol otomatis dan manual untuk memastikan akurasi, kelengkapan, dan validitasnya.	✓		
3	Kesalahan dalam transaksi dikoreksi dan diajukan ulang tanpa mengubah tingkat otorisasi aslinya.	✓		
4	Sistem di Pengadilan Negeri Singaraja memastikan transaksi yang valid tetap berjalan meskipun ada kesalahan dalam transaksi lainnya.	✓		
5	Dokumen hasil proses bisnis dikirimkan dengan metode yang aman dan diverifikasi sebelum diserahkan kepada penerima.	✓		
6	Sistem memiliki mekanisme pemulihan data untuk memastikan data tetap valid setelah kegagalan sistem.	✓		
7	Data transaksi diperiksa sebelum diteruskan untuk memastikan alamat, keaslian, dan integritasnya.	✓		
8	Hak akses diberikan hanya sesuai kebutuhan pekerjaan, dan segera dicabut jika peran pekerjaan berubah.	✓		
9	Pelatihan berkala diberikan kepada staf mengenai peran mereka dalam kontrol bisnis dan keamanan data.	✓		
10	Hak administratif dikelola dengan ketat dan diaudit secara berkala untuk mencegah penyalahgunaan	✓		
11	Ada prosedur jelas untuk menangani kesalahan, pengecualian, dan ketidakseimbangan dalam proses bisnis.	✓		
12	Dokumen dan data disimpan sesuai dengan kebijakan retensi yang telah ditetapkan.	✓		
13	Data yang tidak diperlukan lagi dimusnahkan sesuai kebijakan retensi dan keamanan informasi.	✓		
14	Informasi diklasifikasikan berdasarkan tingkat kepentingan	✓		



		dan dilindungi dengan kebijakan keamanan yang sesuai.			
	15	Proses dan alat audit digunakan untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan regulasi.	✓		
Level 4	1	Pengadilan Negeri Singaraja secara berkala memantau kontrol bisnis untuk mengidentifikasi area yang dapat ditingkatkan.	✓		
	2	Hak akses diperiksa secara rutin untuk memastikan hanya staf yang berwenang yang memiliki akses ke informasi tertentu.	✓		
	3	Kesalahan dalam proses bisnis dilaporkan dan dianalisis untuk menemukan pola dan penyebab utama.	✓		
	4	Setiap pelanggaran dan penyimpangan dalam proses bisnis didokumentasikan dan dilaporkan kepada manajemen serta pemangku kepentingan terkait.	✓		
Level 5	1	Pengadilan Negeri Singaraja secara aktif mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas kontrol dalam proses bisnis.	✓		

4. Domain EDM02 Ensured Benefits Delivery (Memastikan Nilai (value))

Level Capability	No	Aktifitas	Yes	No	Keterangan
Level 0	1	Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa organisasi telah menerapkan proses memastikan nilai (value)		✓	
Level 1	1	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki dokumen perencanaan investasi TI yang mendukung strategi organisasi.	✓		
	2	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki pemahaman yang jelas tentang bagaimana investasi TI mendukung tujuan bisnis dan strategis organisasi.	✓		



	3	Pengadilan Negeri Singaraja mengidentifikasi dan mendokumentasikan berbagai aset dan sumber daya TI yang diperlukan untuk mendukung strategi organisasi.	✓		
	4	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki proses persetujuan formal untuk rencana investasi TI yang mempertimbangkan hubungan dengan strategi organisasi.	✓		
	5	Pengadilan Negeri Singaraja memahami dan mengelola isu-isu strategis terkait TI serta dampaknya terhadap organisasi.	✓		
	6	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki mekanisme pelaporan dan komunikasi yang jelas terkait investasi TI dan kriteria evaluasinya.	✓		
Level 2	1	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki dokumen perencanaan investasi TI yang mendukung strategi organisasi.	✓		
	2	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki pemahaman yang jelas tentang bagaimana investasi TI mendukung tujuan bisnis dan strategis organisasi.	✓		
	3	Pengadilan Negeri Singaraja mengidentifikasi dan mendokumentasikan berbagai aset dan sumber daya TI yang diperlukan untuk mendukung strategi organisasi.	✓		
	4	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki proses persetujuan formal untuk rencana investasi TI yang mempertimbangkan hubungan dengan strategi organisasi.	✓		
	5	Pengadilan Negeri Singaraja memahami dan mengelola isu-isu	✓		



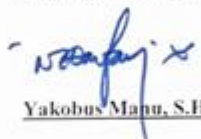
		strategis terkait TI serta dampaknya terhadap organisasi.			
	6	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki mekanisme pelaporan dan komunikasi yang jelas terkait investasi TI dan kriteria evaluasinya.	✓		
Level 3	1	Pengadilan Negeri Singaraja menetapkan investasi TI dengan mempertimbangkan keuntungan jangka pendek dan panjang, serta potensi risiko.	✓		
	2	Pengadilan Negeri Singaraja memahami prinsip-prinsip tata kelola TI yang diperlukan untuk mencapai nilai optimal bagi organisasi.	✓		
	3	Pengadilan Negeri Singaraja melakukan evaluasi berkala terhadap peluang inovasi teknologi dan dampaknya terhadap proses bisnis.	✓		
	4	Pengadilan Negeri Singaraja melakukan evaluasi berkala terhadap peluang inovasi teknologi dan dampaknya terhadap proses bisnis.	✓		
	5	Pengadilan Negeri Singaraja menerapkan proses evaluasi bertahap dalam setiap keputusan investasi TI untuk mengelola risiko secara optimal.	✓		
	6	Pengadilan Negeri Singaraja mendorong pemanfaatan TI untuk meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing organisasi.	✓		
	7	Pengadilan Negeri Singaraja memastikan adanya distribusi tanggung jawab yang jelas dalam pengelolaan investasi TI dan layanan bisnis.	✓		
	8	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki mekanisme penyesuaian rencana investasi berdasarkan perubahan kebutuhan organisasi.	✓		



	9	Pengadilan Negeri Singaraja secara aktif mengevaluasi inovasi teknologi dan potensi peningkatan operasional untuk meningkatkan nilai bisnis.	✓		
Level 4	1	Pengadilan Negeri Singaraja melakukan evaluasi terhadap efektivitas strategi TI dalam pencapaian nilai organisasi.	✓		
	2	Pengadilan Negeri Singaraja mempertimbangkan dampak investasi TI sejalan dengan nilai organisasi dan manajemen keuangan.	✓		
	3	Pengadilan Negeri Singaraja mempertimbangkan bagaimana investasi TI mendukung nilai organisasi dan manajemen keuangan.	✓		
	4	Pengadilan Negeri Singaraja memastikan investasi TI sejalan dengan tujuan strategis, efektivitas, efisiensi, serta risiko organisasi.	✓		
	5	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki mekanisme untuk mengukur dan mengawasi pencapaian manfaat dari investasi TI.	✓		
	6	Pengadilan Negeri Singaraja menggunakan indikator kinerja yang mencakup aspek finansial dan nonfinansial dalam evaluasi TI.	✓		
	7	Pengadilan Negeri Singaraja mengumpulkan data kinerja TI untuk mendukung pengambilan keputusan strategis.	✓		
	8	Pengadilan Negeri Singaraja memastikan adanya laporan berkala terkait kinerja TI dan pencapaian tujuan organisasi.	✓		
Level 5	1	Pengadilan Negeri Singaraja memastikan tindakan korektif dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kinerja TI.	✓		

	2	Pengadilan Negeri Singaraja memastikan manajemen bertindak secara proaktif dalam mengoptimalkan manfaat investasi TI.	✓		
--	---	---	---	--	--

Singaraja, 3 Maret 2015



Yakobus Manu, S.H.

Lampiran 7. Hasil Kuesioner 2

Nama Responden : I Gede Mahardika, S.H.

Jabatan : Sekretaris Pengadilan

1. Domain EDM02 Ensured Benefits Delivery (Memastikan Nilai (value))

Level Capability	No	Aktifitas	Yes	No	Keterangan
Level 0	1	Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa organisasi telah menerapkan proses memastikan nilai (value)			
Level 1	1	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki dokumen perencanaan investasi TI yang mendukung strategi organisasi.	✓		
	2	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki pemahaman yang jelas tentang bagaimana investasi TI mendukung tujuan bisnis dan strategis organisasi.	✓		
	3	Pengadilan Negeri Singaraja mengidentifikasi dan mendokumentasikan berbagai aset dan sumber daya TI yang diperlukan untuk mendukung strategi organisasi.	✓		
	4	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki proses persetujuan formal untuk rencana investasi TI yang mempertimbangkan hubungan dengan strategi organisasi.	✓		
	5	Pengadilan Negeri Singaraja memahami dan mengelola isu-isu strategis terkait TI serta dampaknya terhadap organisasi.		✓	
	6	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki mekanisme pelaporan dan komunikasi yang jelas terkait investasi TI dan kriteria evaluasinya.	✓		
Level 2	1	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki dokumen perencanaan investasi TI yang mendukung strategi organisasi.	✓		



	2	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki pemahaman yang jelas tentang bagaimana investasi TI mendukung tujuan bisnis dan strategis organisasi.	✓		
	3	Pengadilan Negeri Singaraja mengidentifikasi dan mendokumentasikan berbagai aset dan sumber daya TI yang diperlukan untuk mendukung strategi organisasi.	✓		
	4	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki proses persetujuan formal untuk rencana investasi TI yang mempertimbangkan hubungan dengan strategi organisasi.	✓		
	5	Pengadilan Negeri Singaraja memahami dan mengelola isu-isu strategis terkait TI serta dampaknya terhadap organisasi.	✓		
	6	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki mekanisme pelaporan dan komunikasi yang jelas terkait investasi TI dan kriteria evaluasinya.	✓		
Level 3	1	Pengadilan Negeri Singaraja menetapkan investasi TI dengan mempertimbangkan keuntungan jangka pendek dan panjang, serta potensi risiko.		✓	
	2	Pengadilan Negeri Singaraja memahami prinsip-prinsip tata kelola TI yang diperlukan untuk mencapai nilai optimal bagi organisasi.		✓	
	3	Pengadilan Negeri Singaraja melakukan evaluasi berkala terhadap peluang inovasi teknologi dan dampaknya terhadap proses bisnis.	✓		
	4	Pengadilan Negeri Singaraja melakukan evaluasi berkala terhadap peluang inovasi teknologi dan dampaknya terhadap proses bisnis.	✓		



	5	Pengadilan Negeri Singaraja menerapkan proses evaluasi bertahap dalam setiap keputusan investasi TI untuk mengelola risiko secara optimal.	✓		
	6	Pengadilan Negeri Singaraja mendorong pemanfaatan TI untuk meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing organisasi.	✓		
	7	Pengadilan Negeri Singaraja memastikan adanya distribusi tanggung jawab yang jelas dalam pengelolaan investasi TI dan layanan bisnis.		✓	
	8	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki mekanisme penyesuaian rencana investasi berdasarkan perubahan kebutuhan organisasi.	✓		
	9	Pengadilan Negeri Singaraja secara aktif mengevaluasi inovasi teknologi dan potensi peningkatan operasional untuk meningkatkan nilai bisnis.	✓		
Level 4	1	Pengadilan Negeri Singaraja melakukan evaluasi terhadap efektivitas strategi TI dalam pencapaian nilai organisasi.	✓		
	2	Pengadilan Negeri Singaraja mempertimbangkan dampak investasi TI sejalan dengan nilai organisasi dan manajemen keuangan.		✓	
	3	Pengadilan Negeri Singaraja mempertimbangkan bagaimana investasi TI mendukung nilai organisasi dan manajemen keuangan.		✓	
	4	Pengadilan Negeri Singaraja memastikan investasi TI sejalan dengan tujuan strategis, efektivitas, efisiensi, serta risiko organisasi.	✓		
	5	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki mekanisme untuk mengukur dan mengawasi pencapaian manfaat dari investasi TI.		✓	



	6	Menentukan serangkaian tujuan kinerja, metrik, target, dan tolok ukur yang seimbang. Metrik harus mencakup ukuran aktivitas dan hasil, termasuk indikator awal dan akhir untuk hasil, serta keseimbangan yang sesuai antara ukuran finansial dan nonfinansial. Tinjau dan sepakati dengan TI, fungsi bisnis lainnya, serta pemangku kepentingan terkait.		✓	
	7	Pengadilan Negeri Singaraja mengumpulkan data kinerja TI untuk mendukung pengambilan keputusan strategis.		✓	
	8	Pengadilan Negeri Singaraja memastikan adanya laporan berkala terkait kinerja TI dan pencapaian tujuan organisasi.	✓		
Level 5	1	Pengadilan Negeri Singaraja memastikan tindakan korektif dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kinerja TI.		✓	
	2	Pengadilan Negeri Singaraja memastikan manajemen bertindak secara proaktif dalam mengoptimalkan manfaat investasi TI.		✓	

2. Domain APO02 Managed Strategy (Strategi yang Dikelola)

Level Capability	No	Aktifitas	Yes	No	Keterangan
Level 0	1	Pengadilan Negeri Singaraja belum memiliki bukti yang cukup terkait pencapaian tujuan proses dalam pengelolaan strategi TI.			
	2	Pengadilan Negeri Singaraja belum memiliki pemahaman yang jelas tentang cara kerja organisasi saat ini.			
Level 1	1	Pengadilan Negeri Singaraja memahami dan memantau faktor eksternal yang dapat memengaruhi strategi dan operasional TI.	✓		
	2	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki pemahaman yang jelas tentang cara kerja organisasi saat ini.			



		ini, termasuk operasional, teknologi, dan tantangan yang dihadapi.	✓		
	3	Pengadilan Negeri Singaraja telah mendefinisikan arah strategis dan tingkat ambisi digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan.	✓		
	4	Pengadilan Negeri Singaraja telah mengidentifikasi pemangku kepentingan utama dan memahami kebutuhan mereka terkait strategi TI.	✓		
	5	Pengadilan Negeri Singaraja telah mengidentifikasi kemampuan dan layanan TI yang dimiliki serta menilai layanan eksternal yang digunakan.	✓		
	6	Pengadilan Negeri Singaraja telah menyusun ringkasan strategi organisasi dan menentukan aspek TI yang mendukung pencapaian tujuan strategis.	✓		
	7	Pengadilan Negeri Singaraja telah mendefinisikan tujuan dan sasaran TI serta memastikan kontribusinya terhadap pencapaian strategi organisasi.	✓		
Level 2	1	Pengadilan Negeri Singaraja memahami dan memantau faktor eksternal yang dapat memengaruhi strategi dan operasional TI.	✓		
	2	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki pemahaman yang jelas tentang cara kerja organisasi saat ini, termasuk operasional, teknologi, dan tantangan yang dihadapi.	✓		
	3	Pengadilan Negeri Singaraja telah mendefinisikan arah strategis dan tingkat ambisi digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan.	✓		
	4	Pengadilan Negeri Singaraja telah mengidentifikasi pemangku kepentingan utama dan memahami kebutuhan mereka terkait strategi TI.	✓		



	5	Pengadilan Negeri Singaraja telah mengidentifikasi kemampuan dan layanan TI yang dimiliki serta menilai layanan eksternal yang digunakan.	✓		
	6	Pengadilan Negeri Singaraja telah menyusun ringkasan strategi organisasi dan menentukan aspek TI yang mendukung pencapaian tujuan strategis.	✓		
	7	Pengadilan Negeri Singaraja telah mendefinisikan tujuan dan sasaran TI serta memastikan kontribusinya terhadap pencapaian strategi organisasi.	✓		
Level 3	1	Pengadilan telah melakukan penilaian terhadap kematangan digital di berbagai aspek, termasuk kesiapan kepemimpinan dalam memanfaatkan teknologi.	✓		
	2	Pengadilan telah mengidentifikasi layanan dan produk I&T yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan strategisnya.	✓		
	3	Pengadilan telah menentukan metode pengembangan yang sesuai untuk mendukung pencapaian tujuan I&T.	✓	.	
	4	Pengadilan telah mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan.	✓		
	5	Pengadilan telah mendefinisikan perubahan utama dalam arsitektur perusahaan untuk mendukung strategi I&T.	✓	.	
	6	Pengadilan telah melakukan analisis dampak perubahan I&T terhadap bisnis dan model operasional.	✓		
	7	Pengadilan telah mengidentifikasi inisiatif strategis untuk menjembatani kesenjangan antara kondisi saat ini dan target.	✓	.	
	8	Pengadilan memiliki peta jalan yang jelas untuk implementasi strategi I&T.		✓	



	9	Pengadilan telah mempertimbangkan peran mitra eksternal dalam mendukung implementasi strategi I&T.	✓		
	10	Pengadilan telah mengelompokkan inisiatif strategis menjadi program atau proyek dengan tujuan yang jelas.	✓		
	11	Pengadilan telah mengidentifikasi prioritas proyek berdasarkan dampak dan ketergantungan antar proyek.		✓	
	12	Pengadilan telah menyusun peta jalan final untuk pelaksanaan strategi I&T.		✓	
	13	Pengadilan telah menetapkan pemimpin transformasi digital untuk memastikan keberhasilan strategi I&T.	✓		
	14	Pengadilan telah mendapatkan dukungan dari pemangku kepentingan terhadap strategi I&T.	✓		
	15	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki strategi komunikasi yang jelas untuk menyampaikan rencana pengendalian proses bisnis menggunakan media dan teknologi yang tersedia.	✓		
Level 4	16	Pengadilan telah menyiapkan strategi komunikasi untuk menyampaikan rencana implementasi strategi I&T.	✓		
	17	Pengadilan telah membangun jaringan pendukung untuk implementasi strategi I&T.		✓	
	1	Pengadilan telah mengevaluasi manfaat potensial dan risiko jika perubahan tidak dilakukan.		✓	
	2	Pengadilan telah menyusun pernyataan nilai yang jelas mengenai manfaat lingkungan sasaran.		✓	
	3	Pengadilan telah mengidentifikasi metrik dan target yang relevan untuk mengukur keberhasilan implementasi strategi I&T.	.	✓	



	4	Pengadilan telah mengintegrasikan umpan balik dari pemangku kepentingan untuk menyempurnakan rencana komunikasi.	✓		
Level 5	1	Tidak ada instrumen pernyataan yang relevan pada level ini.			

3. Domain MEA01 Monitor, Evaluate, and Assess Performance and Conformance (Penentuan Kinerja dan Kesesuaian Terkelola)

Level Capability	No	Aktifitas	Yes	No	Keterangan
Level 0	1	Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa organisasi telah menerapkan proses pemantauan dan evaluasi kinerja serta kesesuaian.			
Level 1	1	Pengadilan telah mengidentifikasi pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses pemantauan dan evaluasi kinerja serta kesesuaian.	✓		
	2	Pengadilan telah melibatkan stakeholder dalam penyampaian tujuan dan persyaratan pemantauan kinerja serta kesesuaian dengan menggunakan terminologi yang jelas dan umum digunakan.	✓		
	3	Pengadilan telah menklaraskan metode pemantauan dan evaluasi dengan pendekatan yang digunakan dalam organisasi serta telah menetapkan alat bantu yang digunakan untuk pengumpulan dan pelaporan data.	✓		
	4	Pengadilan telah menetapkan jenis tujuan, ukuran kinerja, serta sistem penyimpanan data yang mendukung proses pemantauan dan evaluasi.	✓		
	5	Pengadilan telah mengalokasikan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung proses pemantauan dan evaluasi dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi.	✓		



6	Pengadilan telah menetapkan tujuan dan ukuran kinerja serta melakukan tinjauan berkala bersama stakeholder untuk memastikan kelayakan target.	✓		
7	Pengadilan telah memastikan bahwa tujuan dan ukuran kinerja telah sesuai dengan prinsip SMART.	✓		
8	Pengadilan telah menginformasikan kepada stakeholder utama mengenai perubahan yang diusulkan terhadap target dan toleransi kinerja.	✓		
9	Pengadilan telah mendistribusikan informasi perubahan target dan toleransi kinerja kepada pengguna terkait.	✓		
10	Pengadilan telah melakukan pengumpulan data kinerja secara terstruktur, termasuk melalui sistem otomatis jika memungkinkan.	✓		
11	Pengadilan telah mengevaluasi efisiensi dan kegunaan data yang dikumpulkan serta memastikan integritas data tersebut.	✓		
12	Pengadilan telah mengelola data agregat untuk mendukung pengukuran kinerja secara menyeluruh.		✓	
13	Pengadilan telah melakukan evaluasi terhadap respons manajemen serta opsi yang diusulkan dalam menangani penyimpangan kinerja.	✓		
14	Pengadilan telah memastikan bahwa setiap tindakan korektif memiliki penanggung jawab yang jelas.	✓		
15	Pengadilan telah melakukan pemantauan terhadap hasil dari tindakan korektif yang telah diimplementasikan.	✓		
16	Pengadilan telah menyusun dan menyampaikan laporan hasil tindakan korektif kepada stakeholder terkait.	✓		



Level 2	1	Pengadilan telah mengidentifikasi pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses pemantauan dan evaluasi kinerja serta kesesuaian.	✓		
	2	Pengadilan telah melibatkan stakeholder dalam penyampaian tujuan dan persyaratan pemantauan kinerja serta kesesuaian dengan menggunakan terminologi yang jelas dan umum digunakan.	✓		
	3	Pengadilan telah menjabarkan metode pemantauan dan evaluasi dengan pendekatan yang digunakan dalam organisasi serta telah menetapkan alat bantu yang digunakan untuk pengumpulan dan pelaporan data.	✓		
	4	Pengadilan telah menetapkan jenis tujuan, ukuran kinerja, serta sistem penyimpanan data yang mendukung proses pemantauan dan evaluasi.	✓		
	5	Pengadilan telah mengalokasikan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung proses pemantauan dan evaluasi dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi.	✓		
	6	Pengadilan telah menetapkan tujuan dan ukuran kinerja serta melakukan tinjauan berkala bersama stakeholder untuk memastikan kelayakan target.	✓		
	7	Pengadilan telah memastikan bahwa tujuan dan ukuran kinerja telah sesuai dengan prinsip SMART.	✓		
	8	Pengadilan telah menginformasikan kepada stakeholder utama mengenai perubahan yang diusulkan terhadap target dan toleransi kinerja.	✓		
	9	Pengadilan telah mendistribusikan informasi perubahan target dan toleransi kinerja kepada pengguna terkait.	✓		
	10	Pengadilan telah melakukan pengumpulan data kinerja secara	✓		



		terstruktur, termasuk melalui sistem otomatis jika memungkinkan.			
	11	Pengadilan telah mengevaluasi efisiensi dan kegunaan data yang dikumpulkan serta memastikan integritas data tersebut.	✓		
	12	Pengadilan telah mengelola data agregat untuk mendukung pengukuran kinerja secara menyeluruh.	✓	.	
	13	Pengadilan telah melakukan evaluasi terhadap respons manajemen serta opsi yang diusulkan dalam menangani penyimpangan kinerja.	✓		
	14	Pengadilan telah memastikan bahwa setiap tindakan korektif memiliki penanggung jawab yang jelas.	✓		
	15	Pengadilan telah melakukan pemantauan terhadap hasil dari tindakan korektif yang telah diimplementasikan.	✓		
	16	Pengadilan telah menyusun dan menyampaikan laporan hasil tindakan korektif kepada stakeholder terkait.	✓		
Level 3	1	Pendekatan yang digunakan dalam pemantauan dan evaluasi kinerja di Pengadilan Negeri Singaraja telah divalidasi secara berkala, serta pemangku kepentingan, persyaratan, dan sumber daya yang baru atau berubah telah diidentifikasi	✓		
	2	Terdapat proses manajemen siklus hidup dan pengendalian perubahan yang telah disepakati di Pengadilan Negeri Singaraja untuk pemantauan dan pelaporan kinerja, termasuk perbaikan dalam pelaporan, metrik, pendekatan, baseline, dan benchmarking.		✓	



	3	Data agregat dalam sistem informasi Pengadilan Negeri Singaraja telah diselaraskan dengan pendekatan dan tujuan pelaporan yang ditetapkan, untuk memastikan akurasi dan konsistensi dalam evaluasi kinerja.		✓	
	4	Laporan kinerja proses di Pengadilan Negeri Singaraja telah dirancang secara ringkas, mudah dipahami, dan disesuaikan dengan kebutuhan pimpinan serta pemangku kepentingan, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang efektif dan tepat waktu.	✓		
	5	Laporan kinerja di Pengadilan Negeri Singaraja telah didistribusikan kepada pemangku kepentingan yang relevan sesuai dengan kebijakan dan prosedur pelaporan yang berlaku.	✓		
Level 4	1	Pengadilan Negeri Singaraja telah menggunakan alat dan sistem yang sesuai untuk pemrosesan dan analisis data guna mendukung evaluasi kinerja secara akurat dan efektif.	✓		
	2	Penyebab penyimpangan terhadap target kinerja di Pengadilan Negeri Singaraja telah dianalisis, serta tindakan perbaikan telah ditetapkan dengan tanggung jawab yang jelas dan terdokumentasi dengan baik.		✓	
	3	Sasaran kinerja individu di Pengadilan Negeri Singaraja telah mengintegrasikan aspek kinerja dan kepatuhan, serta pencapaian target kinerja dikaitkan dengan sistem penghargaan organisasi.	✓		
	4	Hasil kinerja Pengadilan Negeri Singaraja telah dibandingkan dengan target internal serta, jika memungkinkan, dengan standar industri atau pengadilan lain sebagai tolok ukur eksternal.		✓	
	5.	Tren kinerja dan kepatuhan di Pengadilan Negeri Singaraja telah	✓		



		dianalisis secara berkala, serta tindakan yang sesuai telah diambil untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional.			
Level 5	1	Pengadilan Negeri Singaraja secara berkala mengevaluasi sasaran dan metrik kinerja serta memberikan rekomendasi perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pemantauan dan evaluasi.		✓	

4. Domain DSS06 Managed Business Process Controls (Pengendalian Proses Bisnis Terkelola)

Level Capability	No	Aktifitas	Yes	No	Keterangan
Level 0	1	Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa organisasi telah menerapkan proses pengendalian proses bisnis yang terkelola			
Level 1	1	Pengadilan Negeri Singaraja telah mengidentifikasi dan mendokumentasikan aktivitas pengendalian untuk memastikan proses bisnis utama sesuai dengan tujuan strategis, operasional, pelaporan, dan kepatuhan.	✓		
	2	Pengadilan Negeri Singaraja menetapkan prioritas pengendalian berdasarkan risiko yang ada serta mengidentifikasi kontrol utama yang diperlukan.	✓		
	3	Pengadilan Negeri Singaraja menetapkan pemilik tanggung jawab untuk setiap aktivitas pengendalian utama guna memastikan akuntabilitas.	✓		
	4	Setiap transaksi di Pengadilan Negeri Singaraja diautentikasi dan diverifikasi untuk memastikan bahwa hanya individu yang berwenang yang dapat memulai transaksi.	✓		



5	Pengadilan Negeri Singaraja menerapkan pemisahan tugas antara inisiasi dan persetujuan transaksi untuk menghindari konflik kepentingan.	✓		
6	Setiap peran dalam Pengadilan Negeri Singaraja dialokasikan sesuai dengan deskripsi pekerjaan dan aktivitas proses bisnis yang telah ditetapkan.	✓		
7	Kewenangan persetujuan transaksi, batas transaksi, dan keputusan lainnya dalam Pengadilan Negeri Singaraja ditetapkan berdasarkan peran pekerjaan yang telah disetujui.	✓		
8	Dalam aktivitas sensitif, Pengadilan Negeri Singaraja menetapkan peran yang berbeda untuk memastikan pemisahan tugas secara jelas.	✓		
9	Kesalahan, pengecualian, dan penyimpangan dalam proses bisnis di Pengadilan Negeri Singaraja ditinjau secara berkala.	✓		
10	Dokumen sumber dan transaksi yang mengalami kesalahan diperbaiki, disetujui kembali, dan dikirim ulang oleh Pengadilan Negeri Singaraja.	✓		
11	Pengadilan Negeri Singaraja menyimpan bukti semua tindakan perbaikan yang telah dilakukan untuk memastikan akuntabilitas.	✓		
12	Semua informasi sumber, bukti pendukung, dan catatan transaksi terdokumentasi dengan baik di Pengadilan Negeri Singaraja.	✓		
13	Akses informasi di Pengadilan Negeri Singaraja dibatasi sesuai dengan klasifikasi dan tingkat kerahasiaan yang ditetapkan.	✓		
14	Pengadilan Negeri Singaraja memberikan pelatihan dan sosialisasi mengenai penggunaan sistem dan informasi yang sesuai dengan kebijakan organisasi.	✓		



Level 2	1	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki dokumentasi aktivitas pengendalian yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan strategis, operasional, pelaporan, dan kepatuhan.	✓		
	2	Pengadilan Negeri Singaraja melakukan analisis risiko untuk menentukan prioritas aktivitas pengendalian dan mengidentifikasi kontrol utama yang diperlukan.	✓		
	3	Setiap aktivitas pengendalian utama memiliki penanggung jawab yang ditetapkan di Pengadilan Negeri Singaraja.	✓		
	4	Setiap transaksi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Singaraja diverifikasi untuk memastikan bahwa hanya pihak yang berwenang yang dapat memulainya.	✓		
	5	Pengadilan Negeri Singaraja menerapkan pemisahan tugas yang jelas antara pembuatan dan persetujuan transaksi.	✓		
	6	Peran dan tanggung jawab dalam proses bisnis dialokasikan berdasarkan deskripsi pekerjaan yang telah disetujui di Pengadilan Negeri Singaraja.	✓		
	7	Kewenangan persetujuan transaksi di Pengadilan Negeri Singaraja ditetapkan berdasarkan peran pekerjaan yang telah disetujui dan terstruktur dengan baik.	✓		
	8	Dalam aktivitas yang bersifat sensitif, Pengadilan Negeri Singaraja menetapkan pemisahan tugas secara jelas untuk menghindari potensi konflik kepentingan.	✓		
	9	Setiap kesalahan, pengecualian, dan penyimpangan dalam proses bisnis direview secara berkala di Pengadilan Negeri Singaraja.	✓		
	10	Dokumen sumber dan transaksi yang mengalami kesalahan	✓		



		diperbaiki, disetujui ulang, dan diserahkan kembali dengan prosedur yang jelas di Pengadilan Negeri Singaraja.	✓		
	11	Bukti tindakan perbaikan atas setiap penyimpangan dalam proses bisnis terdokumentasi dengan baik di Pengadilan Negeri Singaraja.	✓		
	12	Informasi sumber, bukti pendukung, dan catatan transaksi terdokumentasi dengan baik untuk memastikan akuntabilitas di Pengadilan Negeri Singaraja.	✓		
	13	Akses terhadap informasi dibatasi sesuai dengan klasifikasinya untuk menjaga kerahasiaan di Pengadilan Negeri Singaraja.	✓		
	14	Pelatihan dan sosialisasi mengenai penggunaan sistem dan informasi yang sesuai dengan kebijakan organisasi diberikan secara berkala di Pengadilan Negeri Singaraja.	✓		
Level 3	1	Pengadilan Negeri Singaraja telah menerapkan kontrol otomatis untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam proses bisnis.	✓		
	2	Setiap transaksi diverifikasi melalui kontrol otomatis dan manual untuk memastikan akurasi, kelengkapan, dan validitasnya.	✓		
	3	Kesalahan dalam transaksi dikoreksi dan diajukan ulang tanpa mengubah tingkat otorisasi aslinya.	✓	.	
	4	Sistem di Pengadilan Negeri Singaraja memastikan transaksi yang valid tetap berjalan meskipun ada kesalahan dalam transaksi lainnya.	✓	.	
	5	Dokumen hasil proses bisnis dikirimkan dengan metode yang aman dan diverifikasi sebelum diserahkan kepada penerima.	✓		
	6	Sistem memiliki mekanisme pemulihan data untuk memastikan data tetap valid setelah kegagalan sistem.	✓		



	7	Data transaksi diperiksa sebelum diteruskan untuk memastikan alamat, keaslian, dan integritasnya.	✓		
	8	Hak akses diberikan hanya sesuai kebutuhan pekerjaan, dan segera dicabut jika peran pekerjaan berubah.	✓		
	9	Pelatihan berkala diberikan kepada staf mengenai peran mereka dalam kontrol bisnis dan keamanan data.	✓		
	10	Hak administratif dikelola dengan ketat dan diaudit secara berkala untuk mencegah penyalahgunaan	✓		
	11	Ada prosedur jelas untuk menangani kesalahan, pengecualian, dan ketidakseimbangan dalam proses bisnis.		✓	
	12	Dokumen dan data disimpan sesuai dengan kebijakan retensi yang telah ditetapkan.	✓		
	13	Data yang tidak diperlukan lagi dimusnahkan sesuai kebijakan retensi dan keamanan informasi.	✓		
	14	Informasi diklasifikasikan berdasarkan tingkat kepentingan dan dilindungi dengan kebijakan keamanan yang sesuai.	✓		
	15	Proses dan alat audit digunakan untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan regulasi.	✓		
Level 4	1	Pengadilan Negeri Singaraja secara berkala memantau kontrol bisnis untuk mengidentifikasi area yang dapat ditingkatkan.	✓		
	2	Hak akses diperiksa secara rutin untuk memastikan hanya staf yang berwenang yang memiliki akses ke informasi tertentu.	✓		
	3	Kesalahan dalam proses bisnis dilaporkan dan dianalisis untuk menemukan pola dan penyebab utama.	✓		
	4	Setiap pelanggaran dan penyimpangan dalam proses bisnis didokumentasikan dan dilaporkan		✓	



		kepada manajemen serta pemangku kepentingan terkait.	✓		
Level 5	1	Pengadilan Negeri Singaraja secara aktif mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas kontrol dalam proses bisnis.	✓		

5. Domain BAI09 Managed Assets (Aset yang Dikelola)

Level Capability	No	Aktifitas	Yes	No	Catatan
Level 0	1	Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa organisasi telah menerapkan proses aset yang terkelola dengan baik			
Level 1	1	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki daftar aset yang mencatat seluruh aset yang dimiliki beserta statusnya.	✓		
	2	Pengadilan Negeri Singaraja telah mengidentifikasi dan mematuhi semua peraturan hukum dan kontrak terkait pengelolaan aset.	✓		
	3	Pengadilan Negeri Singaraja melakukan pengecekan rutin untuk memastikan aset dalam kondisi layak dan siap digunakan sesuai dengan tujuannya.	✓		
	4	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki daftar aset kritis yang diperlukan untuk kelancaran layanan peradilan.	✓		
	5	Pengadilan Negeri Singaraja melakukan evaluasi berkala terhadap risiko kerusakan atau penggantian aset kritis.	✓		
	6	Pengadilan Negeri Singaraja menginformasikan kepada pengguna mengenai dampak dari pemeliharaan aset, seperti pembatasan penggunaan sementara.	✓		
	7	Pengadaan aset di Pengadilan Negeri Singaraja dilakukan berdasarkan permintaan yang telah	✓		



		disetujui dan mengikuti kebijakan yang berlaku.			
	8.	Pengadilan Negeri Singaraja melakukan pencatatan, verifikasi, pengujian, dan pelabelan aset secara sistematis sebelum digunakan	✓		
	9	Proses pembayaran aset di Pengadilan Negeri Singaraja dilakukan sesuai dengan perjanjian kontrak dengan pemasok.	✓		
	10	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki dan memelihara daftar lengkap semua lisensi perangkat lunak yang telah dibeli, termasuk perjanjian lisensinya.	✓		
Level 2	1	Pengadilan Negeri Singaraja memastikan daftar aset selalu diperbarui dan selaras dengan sistem manajemen perubahan dan konfigurasi.	✓		
	2	Pengadilan Negeri Singaraja memastikan semua aset dikelola sesuai dengan regulasi dan kontrak yang berlaku.	•	✓	
	3	Pengadilan Negeri Singaraja secara rutin melakukan pemeriksaan aset untuk memastikan bahwa aset tersebut masih layak digunakan sesuai dengan fungsinya.	✓		
	4	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki daftar aset yang sangat penting dalam mendukung operasional peradilan.	✓		
	5	Pengadilan Negeri Singaraja melakukan evaluasi risiko untuk menentukan kebutuhan penggantian aset yang sudah tidak layak.	✓		
	6	Pengadilan Negeri Singaraja selalu memberitahukan kepada pengguna mengenai dampak dari perawatan atau pemeliharaan aset.	✓		
	7	Pengadilan Negeri Singaraja melakukan pengadaan aset dengan mengikuti prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan.	✓		



		aset dengan proses pengujian penerimaan sebelum digunakan.			
	8	Setiap aset yang dialokasikan di Pengadilan Negeri Singaraja harus mendapatkan persetujuan dan pengguna bertanggung jawab atas penggunaannya.	✓		
	9	Pengadilan Negeri Singaraja melakukan alokasi ulang aset jika tidak lagi digunakan untuk mengoptimalkan pemanfaatannya.	✓		
	10	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki dokumentasi terkait penghapusan atau penghentian aset sesuai peraturan yang berlaku.	✓		
	11	Pengadilan Negeri Singaraja memastikan pembuangan aset dilakukan dengan aman untuk mencegah kebocoran data dan dampak lingkungan.	✓		
	12	Pengadilan Negeri Singaraja melakukan evaluasi berkala terhadap aset untuk memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan operasional.	✓		
	13	Pengadilan Negeri Singaraja secara berkala mengaudit perangkat lunak berlisensi untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi.	✓		
Level 4	1	Pengadilan Negeri Singaraja melakukan pemeriksaan berkala terhadap aset yang dimiliki untuk memastikan keberadaannya.	✓		
	2	Pengadilan Negeri Singaraja mengevaluasi apakah aset masih memberikan manfaat dan memperkirakan masa manfaatnya.	✓		
	3	Pengadilan Negeri Singaraja melakukan pemantauan rutin terhadap aset penting dan mengambil tindakan perbaikan jika diperlukan.	✓		
	4	Pengadilan Negeri Singaraja memastikan pembuangan aset dilakukan sesuai dengan regulasi	✓		



		dan mempertimbangkan dampak lingkungan.			
	5.	Pengadilan Negeri Singaraja melakukan analisis biaya pemeliharaan dan mempertimbangkan opsi yang lebih hemat.	✓		
	6	Pengadilan Negeri Singaraja melakukan audit perangkat lunak secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap lisensi.	✓		
	7	Pengadilan Negeri Singaraja mengevaluasi kebutuhan terhadap lisensi yang tidak digunakan untuk efisiensi biaya.		✓	
	8	Pengadilan Negeri Singaraja memastikan kepatuhan terhadap lisensi dengan mencopot perangkat lunak yang tidak diperlukan atau membeli lisensi tambahan jika dibutuhkan.		✓	
Level 5	1	Pengadilan Negeri Singaraja melakukan evaluasi jaminan aset dan mempertimbangkan strategi yang memberikan nilai terbaik.	✓		
	2	Pengadilan Negeri Singaraja mengevaluasi aset yang kurang dimanfaatkan untuk optimalisasi biaya dan operasional.	✓		
	3	Pengadilan Negeri Singaraja melakukan analisis terhadap aset untuk mencari peluang standarisasi guna efisiensi biaya.		✓	
	4	Pengadilan Negeri Singaraja mengevaluasi penggunaan teknologi baru atau strategi alternatif untuk efisiensi operasional.	✓		
	5	Pengadilan Negeri Singaraja meninjau apakah peningkatan produk atau lisensi dapat memberikan manfaat yang lebih besar.		✓	



Lampiran 8. Hasil Kuesioner 3

Nama Responden : Komang Devi Mahardiani, S.H.

Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan

1. Domain APO02 Managed Strategy (Strategi yang Dikelola)

Level Capability	No	Aktifitas	Yes	No	Keterangan
Level 0	1	Pengadilan Negeri Singaraja belum memiliki bukti yang cukup terkait pencapaian tujuan proses dalam pengelolaan strategi TI.		✓	
Level 1	1	Pengadilan Negeri Singaraja memahami dan memantau faktor eksternal yang dapat memengaruhi strategi dan operasional TI.	✓		
	2	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki pemahaman yang jelas tentang cara kerja organisasi saat ini, termasuk operasional, teknologi, dan tantangan yang dihadapi.	✓		
	3	Pengadilan Negeri Singaraja telah mendefinisikan arah strategis dan tingkat ambisi digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan.	✓		
	4	Pengadilan Negeri Singaraja telah mengidentifikasi pemangku kepentingan utama dan memahami kebutuhan mereka terkait strategi TI.	✓		
	5	Pengadilan Negeri Singaraja telah mengidentifikasi kemampuan dan layanan TI yang dimiliki serta menilai layanan eksternal yang digunakan.	✓		
	6	Pengadilan Negeri Singaraja telah menyusun ringkasan strategi organisasi dan menentukan aspek TI yang mendukung pencapaian tujuan strategis.	✓		
	7	Pengadilan Negeri Singaraja telah mendefinisikan tujuan dan sasaran	✓		



		TI serta memastikan kontribusinya terhadap pencapaian strategi organisasi.			
Level 2	1	Pengadilan Negeri Singaraja memahami dan memantau faktor eksternal yang dapat memengaruhi strategi dan operasional TI.	✓		
	2	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki pemahaman yang jelas tentang cara kerja organisasi saat ini, termasuk operasional, teknologi, dan tantangan yang dihadapi.	✓		
	3	Pengadilan Negeri Singaraja telah mendefinisikan arah strategis dan tingkat ambisi digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan.	✓		
	4	Pengadilan Negeri Singaraja telah mengidentifikasi pemangku kepentingan utama dan memahami kebutuhan mereka terkait strategi TI.	✓		
	5	Pengadilan Negeri Singaraja telah mengidentifikasi kemampuan dan layanan TI yang dimiliki serta menilai layanan eksternal yang digunakan.	✓		
	6	Pengadilan Negeri Singaraja telah menyusun ringkasan strategi organisasi dan menentukan aspek TI yang mendukung pencapaian tujuan strategis.	✓		
	7	Pengadilan Negeri Singaraja telah mendefinisikan tujuan dan sasaran TI serta memastikan kontribusinya terhadap pencapaian strategi organisasi.	✓		
Level 3	1	Pengadilan telah melakukan penilaian terhadap kematangan digital di berbagai aspek, termasuk kesiapan kepemimpinan dalam memanfaatkan teknologi.	✓		
	2	Pengadilan telah mengidentifikasi layanan dan produk I&T yang	✓		



	dibutuhkan untuk mencapai tujuan strategisnya.			
3	Pengadilan telah menentukan metode pengembangan yang sesuai untuk mendukung pencapaian tujuan I&T.	✓		
4	Pengadilan telah mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan.		✓	
5	Pengadilan telah mendefinisikan perubahan utama dalam arsitektur perusahaan untuk mendukung strategi I&T.	✓		
6	Pengadilan telah melakukan analisis dampak perubahan I&T terhadap bisnis dan model operasional.		✓	
7	Pengadilan telah mengidentifikasi inisiatif strategis untuk menjembatani kesenjangan antara kondisi saat ini dan target.	✓		
8	Pengadilan memiliki peta jalan yang jelas untuk implementasi strategi I&T.	✓		
9	Pengadilan telah mempertimbangkan peran mitra eksternal dalam mendukung implementasi strategi I&T.	✓		
10	Pengadilan telah mengelompokkan inisiatif strategis menjadi program atau proyek dengan tujuan yang jelas.	✓		
11	Pengadilan telah mengidentifikasi prioritas proyek berdasarkan dampak dan ketergantungan antar proyek.	✓		
12	Pengadilan telah menyusun peta jalan final untuk pelaksanaan strategi I&T.	✓		
13	Pengadilan telah menetapkan pemimpin transformasi digital untuk memastikan keberhasilan strategi I&T.	✓		
14	Pengadilan telah mendapatkan dukungan dari pemangku kepentingan terhadap strategi I&T.	✓		



	15	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki strategi komunikasi yang jelas untuk menyampaikan rencana pengendalian proses bisnis menggunakan media dan teknologi yang tersedia.	✓		
	16	Pengadilan telah menyiapkan strategi komunikasi untuk menyampaikan rencana implementasi strategi I&T.	✓		
	17	Pengadilan telah membangun jaringan pendukung untuk implementasi strategi I&T.	✓		
Level 4	1	Pengadilan telah mengevaluasi manfaat potensial dan risiko jika perubahan tidak dilakukan.	✓		
	2	Pengadilan telah menyusun pernyataan nilai yang jelas mengenai manfaat lingkungan sasaran.	✓		
	3	Pengadilan telah mengidentifikasi metrik dan target yang relevan untuk mengukur keberhasilan implementasi strategi I&T.	✓		
	4	Pengadilan telah mengintegrasikan umpan balik dari pemangku kepentingan untuk menyempurnakan rencana komunikasi.	✓		
Level 5	1	Tidak ada instrumen pernyataan yang relevan pada level ini.	✓		

2. Domain MEA01 Monitor, Evaluate, and Assess Performance and Conformance (Penentuan Kinerja dan Kesesuaian Terkelola)

Level Capability	No	Aktifitas	Yes	No	Keterangan
Level 0	1	Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa organisasi telah menerapkan proses pemantauan dan evaluasi kinerja serta kesesuaian.	✗	✓	
Level 1	1	Pengadilan telah mengidentifikasi pihak-pihak yang berkepentingan	✓		



		dalam proses pemantauan dan evaluasi kinerja serta kesesuaian.			
2		Pengadilan telah melibatkan stakeholder dalam penyampaian tujuan dan persyaratan pemantauan kinerja serta kesesuaian dengan menggunakan terminologi yang jelas dan umum digunakan.	✓		
3		Pengadilan telah menyelaraskan metode pemantauan dan evaluasi dengan pendekatan yang digunakan dalam organisasi serta telah menetapkan alat bantu yang digunakan untuk pengumpulan dan pelaporan data.	✓		
4		Pengadilan telah menetapkan jenis tujuan, ukuran kinerja, serta sistem penyimpanan data yang mendukung proses pemantauan dan evaluasi.	✓		
5		Pengadilan telah mengalokasikan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung proses pemantauan dan evaluasi dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi.	✓		
6		Pengadilan telah menetapkan tujuan dan ukuran kinerja serta melakukan tinjauan berkala bersama stakeholder untuk memastikan kelayakan target.	✓		
7		Pengadilan telah memastikan bahwa tujuan dan ukuran kinerja telah sesuai dengan prinsip SMART.	✓		
8		Pengadilan telah menginformasikan kepada stakeholder utama mengenai perubahan yang diusulkan terhadap target dan toleransi kinerja.	✓		
9		Pengadilan telah mendistribusikan informasi perubahan target dan toleransi kinerja kepada pengguna terkait.	✓		
10		Pengadilan telah melakukan pengumpulan data kinerja secara terstruktur, termasuk melalui sistem otomatis jika memungkinkan.	✓		



	11	Pengadilan telah mengevaluasi efisiensi dan kegunaan data yang dikumpulkan serta memastikan integritas data tersebut.		✓	
	12	Pengadilan telah mengelola data agregat untuk mendukung pengukuran kinerja secara menyeluruh.		✓	
	13	Pengadilan telah melakukan evaluasi terhadap respons manajemen serta opsi yang diusulkan dalam menangani penyimpangan kinerja.	✓		
	14	Pengadilan telah memastikan bahwa setiap tindakan korektif memiliki penanggung jawab yang jelas.	✓		
	15	Pengadilan telah melakukan pemantauan terhadap hasil dari tindakan korektif yang telah diimplementasikan.	✓		
	16	Pengadilan telah menyusun dan menyampaikan laporan hasil tindakan korektif kepada stakeholder terkait.	✓		
Level 2	1	Pengadilan telah mengidentifikasi pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses pemantauan dan evaluasi kinerja serta kesesuaian.	✓		
	2	Pengadilan telah melibatkan stakeholder dalam penyampaian tujuan dan persyaratan pemantauan kinerja serta kesesuaian dengan menggunakan terminologi yang jelas dan umum digunakan.		✓	
	3	Pengadilan telah menyelaraskan metode pemantauan dan evaluasi dengan pendekatan yang digunakan dalam organisasi serta telah menetapkan alat bantu yang digunakan untuk pengumpulan dan pelaporan data.		✓	
	4	Pengadilan telah menetapkan jenis tujuan, ukuran kinerja, serta sistem penyimpanan data yang mendukung proses pemantauan dan evaluasi.	✓		



5	Pengadilan telah mengalokasikan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung proses pemantauan dan evaluasi dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi.	✓		
6	Pengadilan telah menetapkan tujuan dan ukuran kinerja serta melakukan tinjauan berkala bersama stakeholder untuk memastikan kelayakan target.	✓		
7	Pengadilan telah memastikan bahwa tujuan dan ukuran kinerja telah sesuai dengan prinsip SMART.	✓		
8	Pengadilan telah menginformasikan kepada stakeholder utama mengenai perubahan yang diusulkan terhadap target dan toleransi kinerja.	✓		
9	Pengadilan telah mendistribusikan informasi perubahan target dan toleransi kinerja kepada pengguna terkait.	✓		
10	Pengadilan telah melakukan pengumpulan data kinerja secara terstruktur, termasuk melalui sistem otomatis jika memungkinkan.	✓		
11	Pengadilan telah mengevaluasi efisiensi dan kegunaan data yang dikumpulkan serta memastikan integritas data tersebut.		✓	
12	Pengadilan telah mengelola data agregat untuk mendukung pengukuran kinerja secara menyeluruh.		✓	
13	Pengadilan telah melakukan evaluasi terhadap respons manajemen serta opsi yang diusulkan dalam menangani penyimpangan kinerja.	✓		
14	Pengadilan telah memastikan bahwa setiap tindakan korektif memiliki penanggung jawab yang jelas.	✓		
15	Pengadilan telah melakukan pemantauan terhadap hasil dari	✓		



		tindakan korektif yang telah diimplementasikan.			
	16	Pengadilan telah menyusun dan menyampaikan laporan hasil tindakan korektif kepada stakeholder terkait.	✓		
Level 3	1	Pendekatan yang digunakan dalam pemantauan dan evaluasi kinerja di Pengadilan Negeri Singaraja telah divalidasi secara berkala, serta pemangku kepentingan, persyaratan, dan sumber daya yang baru atau berubah telah diidentifikasi	✓		
	2	Terdapat proses manajemen siklus hidup dan pengendalian perubahan yang telah disepakati di Pengadilan Negeri Singaraja untuk pemantauan dan pelaporan kinerja, termasuk perbaikan dalam pelaporan, metrik, pendekatan, baseline, dan benchmarking.		✓	
	3	Data agregat dalam sistem informasi Pengadilan Negeri Singaraja telah diselaraskan dengan pendekatan dan tujuan pelaporan yang ditetapkan, untuk memastikan akurasi dan konsistensi dalam evaluasi kinerja.		✓	
	4	Laporan kinerja proses di Pengadilan Negeri Singaraja telah dirancang secara ringkas, mudah dipahami, dan disesuaikan dengan kebutuhan pimpinan serta pemangku kepentingan, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang efektif dan tepat waktu.	✓		
	5	Laporan kinerja di Pengadilan Negeri Singaraja telah didistribusikan kepada pemangku kepentingan yang relevan sesuai dengan kebijakan dan prosedur pelaporan yang berlaku.	✓		
Level 4	1	Pengadilan Negeri Singaraja telah menggunakan alat dan sistem yang sesuai untuk pemrosesan dan	✓		



		analisis data guna mendukung evaluasi kinerja secara akurat dan efektif.			
	2	Penyebab penyimpangan terhadap target kinerja di Pengadilan Negeri Singaraja telah dianalisis, serta tindakan perbaikan telah ditetapkan dengan tanggung jawab yang jelas dan terdokumentasi dengan baik.	✓		
	3	Sasaran kinerja individu di Pengadilan Negeri Singaraja telah mengintegrasikan aspek kinerja dan kepatuhan, serta pencapaian target kinerja dikaitkan dengan sistem penghargaan organisasi.	✓		
	4	Hasil kinerja Pengadilan Negeri Singaraja telah dibandingkan dengan target internal serta, jika memungkinkan, dengan standar industri atau pengadilan lain sebagai tolok ukur eksternal.		✓	
	5.	Tren kinerja dan kepatuhan di Pengadilan Negeri Singaraja telah dianalisis secara berkala, serta tindakan yang sesuai telah diambil untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional.	✓		
Level 5	1	Pengadilan Negeri Singaraja secara berkala mengevaluasi sasaran dan metrik kinerja serta memberikan rekomendasi perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pemantauan dan evaluasi.		✓	

3. Domain DSS06 Managed Business Process Controls (Pengendalian Proses Bisnis Terkelola)

Level Capability	No	Aktifitas	Yes	No	Keterangan
Level 0	1	Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa organisasi telah menerapkan proses pengendalian proses bisnis yang terkelola			



Level 1	1	Pengadilan Negeri Singaraja telah mengidentifikasi dan mendokumentasikan aktivitas pengendalian untuk memastikan proses bisnis utama sesuai dengan tujuan strategis, operasional, pelaporan, dan kepatuhan.	✓		
	2	Pengadilan Negeri Singaraja menetapkan prioritas pengendalian berdasarkan risiko yang ada serta mengidentifikasi kontrol utama yang diperlukan.	✓		
	3	Pengadilan Negeri Singaraja menetapkan pemilik tanggung jawab untuk setiap aktivitas pengendalian utama guna memastikan akuntabilitas.	✓		
	4	Setiap transaksi di Pengadilan Negeri Singaraja diautentikasi dan diverifikasi untuk memastikan bahwa hanya individu yang berwenang yang dapat memulai transaksi.	✓		
	5	Pengadilan Negeri Singaraja menerapkan pemisahan tugas antara inisiasi dan persetujuan transaksi untuk menghindari konflik kepentingan.		✓	
	6	Setiap peran dalam Pengadilan Negeri Singaraja dialokasikan sesuai dengan deskripsi pekerjaan dan aktivitas proses bisnis yang telah ditetapkan.	✓		
	7	Kewenangan persetujuan transaksi, batas transaksi, dan keputusan lainnya dalam Pengadilan Negeri Singaraja ditetapkan berdasarkan peran pekerjaan yang telah disetujui.	✓		
	8	Dalam aktivitas sensitif, Pengadilan Negeri Singaraja menetapkan peran yang berbeda untuk memastikan pemisahan tugas secara jelas.	✓		
	9	Kesalahan, pengecualian, dan penyimpangan dalam proses bisnis di Pengadilan Negeri Singaraja ditinjau secara berkala.	✓		



	10	Dokumen sumber dan transaksi yang mengalami kesalahan diperbaiki, disetujui kembali, dan dikirim ulang oleh Pengadilan Negeri Singaraja.	✓		
	11	Pengadilan Negeri Singaraja menyimpan bukti semua tindakan perbaikan yang telah dilakukan untuk memastikan akuntabilitas.	.	✓	
	12	Semua informasi sumber, bukti pendukung, dan catatan transaksi terdokumentasi dengan baik di Pengadilan Negeri Singaraja.	✓		
	13	Akses informasi di Pengadilan Negeri Singaraja dibatasi sesuai dengan klasifikasi dan tingkat kerahasiaan yang ditetapkan.	✓		
	14	Pengadilan Negeri Singaraja memberikan pelatihan dan sosialisasi mengenai penggunaan sistem dan informasi yang sesuai dengan kebijakan organisasi.	✓		
Level 2	1	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki dokumentasi aktivitas pengendalian yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan strategis, operasional, pelaporan, dan kepatuhan.	✓		
	2	Pengadilan Negeri Singaraja melakukan analisis risiko untuk menentukan prioritas aktivitas pengendalian dan mengidentifikasi kontrol utama yang diperlukan.	✓		
	3	Setiap aktivitas pengendalian utama memiliki penanggung jawab yang ditetapkan di Pengadilan Negeri Singaraja.	✓		
	4	Setiap transaksi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Singaraja diverifikasi untuk memastikan bahwa hanya pihak yang berwenang yang dapat memulainya.	✓		
	5	Pengadilan Negeri Singaraja menerapkan pemisahan tugas yang jelas antara pembuatan dan persetujuan transaksi.		✓	



	6	Peran dan tanggung jawab dalam proses bisnis dialokasikan berdasarkan deskripsi pekerjaan yang telah disetujui di Pengadilan Negeri Singaraja.	✓		
	7	Kewenangan persetujuan transaksi di Pengadilan Negeri Singaraja ditetapkan berdasarkan peran pekerjaan yang telah disetujui dan terstruktur dengan baik.	✓		
	8	Dalam aktivitas yang bersifat sensitif, Pengadilan Negeri Singaraja menetapkan pemisahan tugas secara jelas untuk menghindari potensi konflik kepentingan.	✓		
	9	Setiap kesalahan, pengecualian, dan penyimpangan dalam proses bisnis direview secara berkala di Pengadilan Negeri Singaraja.	✓		
	10	Dokumen sumber dan transaksi yang mengalami kesalahan diperbaiki, disetujui ulang, dan diserahkan kembali dengan prosedur yang jelas di Pengadilan Negeri Singaraja.	✓		
	11	Bukti tindakan perbaikan atas setiap penyimpangan dalam proses bisnis terdokumentasi dengan baik di Pengadilan Negeri Singaraja.	✓		
	12	Informasi sumber, bukti pendukung, dan catatan transaksi terdokumentasi dengan baik untuk memastikan akuntabilitas di Pengadilan Negeri Singaraja.	✓		
	13	Akses terhadap informasi dibatasi sesuai dengan klasifikasinya untuk menjaga kerahasiaan di Pengadilan Negeri Singaraja.	✓		
	14	Pelatihan dan sosialisasi mengenai penggunaan sistem dan informasi yang sesuai dengan kebijakan organisasi diberikan secara berkala di Pengadilan Negeri Singaraja.	✓		
Level 3	1	Pengadilan Negeri Singaraja telah menerapkan kontrol otomatis untuk	✓		



	meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam proses bisnis.			
2	Setiap transaksi diverifikasi melalui kontrol otomatis dan manual untuk memastikan akurasi, kelengkapan, dan validitasnya.	✓		
3	Kesalahan dalam transaksi dikoreksi dan diajukan ulang tanpa mengubah tingkat otorisasi aslinya.	✓		
4	Sistem di Pengadilan Negeri Singaraja memastikan transaksi yang valid tetap berjalan meskipun ada kesalahan dalam transaksi lainnya.	✓		
5	Dokumen hasil proses bisnis dikirimkan dengan metode yang aman dan diverifikasi sebelum diserahkan kepada penerima.	✓		
6	Sistem memiliki mekanisme pemulihan data untuk memastikan data tetap valid setelah kegagalan sistem.	✓		
7	Data transaksi diperiksa sebelum diteruskan untuk memastikan alamat, keaslian, dan integritasnya.	✓		
8	Hak akses diberikan hanya sesuai kebutuhan pekerjaan, dan segera dicabut jika peran pekerjaan berubah.	✓		
9	Pelatihan berkala diberikan kepada staf mengenai peran mereka dalam kontrol bisnis dan keamanan data.	✓		
10	Hak administratif dikelola dengan ketat dan diaudit secara berkala untuk mencegah penyalahgunaan	✓		
11	Ada prosedur jelas untuk menangani kesalahan, pengecualian, dan ketidakseimbangan dalam proses bisnis.		✓	
12	Dokumen dan data disimpan sesuai dengan kebijakan retensi yang telah ditetapkan.	✓		
13	Data yang tidak diperlukan lagi dimusnahkan sesuai kebijakan retensi dan keamanan informasi.	✓		



	14	Informasi diklasifikasikan berdasarkan tingkat kepentingan dan dilindungi dengan kebijakan keamanan yang sesuai.	✓		
	15	Proses dan alat audit digunakan untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan regulasi.	✓		
Level 4	1	Pengadilan Negeri Singaraja secara berkala memantau kontrol bisnis untuk mengidentifikasi area yang dapat ditingkatkan.	✓		
	2	Hak akses diperiksa secara rutin untuk memastikan hanya staf yang berwenang yang memiliki akses ke informasi tertentu.	✓		
	3	Kesalahan dalam proses bisnis dilaporkan dan dianalisis untuk menemukan pola dan penyebab utama.		✓	
	4	Setiap pelanggaran dan penyimpangan dalam proses bisnis didokumentasikan dan dilaporkan kepada manajemen serta pemangku kepentingan terkait.		✓	
Level 5	1	Pengadilan Negeri Singaraja secara aktif mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas kontrol dalam proses bisnis.	✓		

4. Domain BAI09 Managed Assets (Aset yang Dikelola)

Level Capability	No	Aktifitas	Yes	No	Catatan
Level 0	1	Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa organisasi telah menerapkan proses aset yang terkelola dengan baik			
Level 1	1	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki daftar aset yang mencatat seluruh aset yang dimiliki beserta statusnya.	✓		
	2	Pengadilan Negeri Singaraja telah mengidentifikasi dan mematuhi semua peraturan hukum dan kontrak terkait pengelolaan aset.	✓		



	3	Pengadilan Negeri Singaraja melakukan pengecekan rutin untuk memastikan aset dalam kondisi layak dan siap digunakan sesuai dengan tujuannya.	✓		
	4	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki daftar aset kritis yang diperlukan untuk kelancaran layanan peradilan.	✓		
	5	Pengadilan Negeri Singaraja melakukan evaluasi berkala terhadap risiko kerusakan atau penggantian aset kritis.	✓		
	6	Pengadilan Negeri Singaraja menginformasikan kepada pengguna mengenai dampak dari pemeliharaan aset, seperti pembatasan penggunaan sementara.		✓	
	7	Pengadaan aset di Pengadilan Negeri Singaraja dilakukan berdasarkan permintaan yang telah disetujui dan mengikuti kebijakan yang berlaku.	✓		
	8.	Pengadilan Negeri Singaraja melakukan pencatatan, verifikasi, pengujian, dan pelabelan aset secara sistematis sebelum digunakan	✓		
	9	Proses pembayaran aset di Pengadilan Negeri Singaraja dilakukan sesuai dengan perjanjian kontrak dengan pemasok.	✓		
	10	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki dan memelihara daftar lengkap semua lisensi perangkat lunak yang telah dibeli, termasuk perjanjian lisensinya.	✓		
Level 2	1	Pengadilan Negeri Singaraja memastikan daftar aset selalu diperbarui dan selaras dengan sistem manajemen perubahan dan konfigurasi.	✓		
	2	Pengadilan Negeri Singaraja memastikan semua aset dikelola sesuai dengan regulasi dan kontrak yang berlaku.	✓		



	3	Pengadilan Negeri Singaraja secara rutin melakukan pemeriksaan aset untuk memastikan bahwa aset tersebut masih layak digunakan sesuai dengan fungsinya.	✓		
	4	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki daftar aset yang sangat penting dalam mendukung operasional peradilan.	✓		
	5	Pengadilan Negeri Singaraja melakukan evaluasi risiko untuk menentukan kebutuhan penggantian aset yang sudah tidak layak.	✓		
	6	Pengadilan Negeri Singaraja selalu memberitahukan kepada pengguna mengenai dampak dari perawatan atau pemeliharaan aset.		✓	
	7	Pengadilan Negeri Singaraja melakukan pengadaan aset dengan mengikuti prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan.	✓		
	8	Pengadilan Negeri Singaraja memastikan bahwa setiap aset yang diperoleh telah melalui proses penerimaan, verifikasi, pengujian, pencatatan, serta diberikan label fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	✓		
	9	Pengadilan Negeri Singaraja menyelesaikan pembayaran kepada pemasok sesuai dengan ketentuan dalam kontrak yang berlaku.	✓		
	10	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki pencatatan lengkap mengenai lisensi perangkat lunak dan peranjaniannya.	✓		
	1	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki sistem pencatatan akuntansi yang mencakup seluruh aset yang dimiliki dan digunakan.	✓		
	2	Pengadilan Negeri Singaraja merencanakan jadwal downtime dan pemeliharaan aset secara terstruktur untuk mengurangi dampak terhadap layanan peradilan.		✓	
Level 3					



3	Pengadilan Negeri Singaraja melakukan pemeliharaan rutin terhadap aset kritis dan menyediakan alternatif jika terjadi kegagalan.	✓		
4	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki rencana perawatan preventif untuk perangkat keras berdasarkan rekomendasi vendor dan analisis risiko.		✓	
5	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki kontrak layanan pemeliharaan dengan pihak ketiga yang mencakup aspek keamanan dan privasi.	✓		
6	Pengadilan Negeri Singaraja membatasi akses jarak jauh hanya untuk kebutuhan pemeliharaan dan diagnosis tertentu.		✓	
7	Pengadilan Negeri Singaraja menerapkan standar implementasi aset dengan proses pengujian penerimaan sebelum digunakan.	✓		
8	Setiap aset yang dialokasikan di Pengadilan Negeri Singaraja harus mendapatkan persetujuan dan pengguna bertanggung jawab atas penggunaannya.	✓		
9	Pengadilan Negeri Singaraja melakukan alokasi ulang aset jika tidak lagi digunakan untuk mengoptimalkan pemanfaatannya.	✓		
10	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki dokumentasi terkait penghapusan atau penghentian aset sesuai peraturan yang berlaku.	✓		
11	Pengadilan Negeri Singaraja memastikan pembuangan aset dilakukan dengan aman untuk mencegah kebocoran data dan dampak lingkungan.	✓		
12	Pengadilan Negeri Singaraja melakukan evaluasi berkala terhadap aset untuk memastikan	✓		



		kesesuaiannya dengan kebutuhan operasional.			
	13	Pengadilan Negeri Singaraja secara berkala mengaudit perangkat lunak berlisensi untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi.	✓		
Level 4	1	Pengadilan Negeri Singaraja melakukan pemeriksaan berkala terhadap aset yang dimiliki untuk memastikan keberadaannya.	✓		
	2	Pengadilan Negeri Singaraja mengevaluasi apakah aset masih memberikan manfaat dan memperkirakan masa manfaatnya.	✓		
	3	Pengadilan Negeri Singaraja melakukan pemantauan rutin terhadap aset penting dan mengambil tindakan perbaikan jika diperlukan.	✓		
	4	Pengadilan Negeri Singaraja memastikan pembuangan aset dilakukan sesuai dengan regulasi dan mempertimbangkan dampak lingkungan.	✓		
	5.	Pengadilan Negeri Singaraja melakukan analisis biaya pemeliharaan dan mempertimbangkan opsi yang lebih hemat.	✓		
	6	Pengadilan Negeri Singaraja melakukan audit perangkat lunak secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap lisensi.	✓		
	7	Pengadilan Negeri Singaraja mengevaluasi kebutuhan terhadap lisensi yang tidak digunakan untuk efisiensi biaya.		✓	
	8	Pengadilan Negeri Singaraja memastikan kepatuhan terhadap lisensi dengan mencopot perangkat lunak yang tidak diperlukan atau membeli lisensi tambahan jika dibutuhkan.		✓	
Level 5	1	Pengadilan Negeri Singaraja melakukan evaluasi jaminan aset		✓	



		dan mempertimbangkan strategi yang memberikan nilai terbaik.			
2	Pengadilan Negeri Singaraja	mengevaluasi aset yang kurang dimanfaatkan untuk optimalisasi biaya dan operasional.	✓		
3	Pengadilan Negeri Singaraja	melakukan analisis terhadap aset untuk mencari peluang standarisasi guna efisiensi biaya.		✓	
4	Pengadilan Negeri Singaraja	mengevaluasi penggunaan teknologi baru atau strategi alternatif untuk efisiensi operasional.		✓	
5	Pengadilan Negeri Singaraja	meninjau apakah peningkatan produk atau lisensi dapat memberikan manfaat yang lebih besar.		✓	

Singaraja, 28 Februari 2021



Komang Devi Mahardiani, S.H.



Lampiran 9. Hasil Kuesioner 4

Nama Responden : Ahbabta Shohi, S.E.I

Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan

1. Domain MEA01 Monitor, Evaluate, and Assess Performance and Conformance (Penentuan Kinerja dan Kesesuaian Terkelola)

Level Capability	No	Instrument (Item Pernyataan)	Yes	No	Keterangan
Level 0	1	Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa organisasi telah menerapkan proses pemantauan dan evaluasi kinerja serta kesesuaian.		✓	
Level 1	1	Pengadilan telah mengidentifikasi pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses pemantauan dan evaluasi kinerja serta kesesuaian.	✓		
	2	Pengadilan telah melibatkan stakeholder dalam penyampaian tujuan dan persyaratan pemantauan kinerja serta kesesuaian dengan menggunakan terminologi yang jelas dan umum digunakan.	✓		
	3	Pengadilan telah menyelaraskan metode pemantauan dan evaluasi dengan pendekatan yang digunakan dalam organisasi serta telah menetapkan alat bantu yang digunakan untuk pengumpulan dan pelaporan data.	✓		
	4	Pengadilan telah menetapkan jenis tujuan, ukuran kinerja, serta sistem penyimpanan data yang mendukung proses pemantauan dan evaluasi.	✓		
	5	Pengadilan telah mengalokasikan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung proses pemantauan dan evaluasi dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi.	✓		
	6	Pengadilan telah menetapkan tujuan dan ukuran kinerja serta melakukan tinjauan berkala bersama	✓		



	stakeholder untuk memastikan kelayakan target.			
7	Pengadilan telah memastikan bahwa tujuan dan ukuran kinerja telah sesuai dengan prinsip SMART.	✓		
8	Pengadilan telah menginformasikan kepada stakeholder utama mengenai perubahan yang diusulkan terhadap target dan toleransi kinerja.	✓		
9	Pengadilan telah mendistribusikan informasi perubahan target dan toleransi kinerja kepada pengguna terkait.	✓		
10	Pengadilan telah melakukan pengumpulan data kinerja secara terstruktur, termasuk melalui sistem otomatis jika memungkinkan.	✓		
11	Pengadilan telah mengevaluasi efisiensi dan kegunaan data yang dikumpulkan serta memastikan integritas data tersebut.		✓	
12	Pengadilan telah mengelola data agregat untuk mendukung pengukuran kinerja secara menyeluruh.		✓	
13	Pengadilan telah melakukan evaluasi terhadap respons manajemen serta opsi yang diusulkan dalam menangani penyimpangan kinerja.	✓		
14	Pengadilan telah memastikan bahwa setiap tindakan korektif memiliki penanggung jawab yang jelas.	✓		
15	Pengadilan telah melakukan pemantauan terhadap hasil dari tindakan korektif yang telah diimplementasikan.	✓		
16	Pengadilan telah menyusun dan menyampaikan laporan hasil tindakan korektif kepada stakeholder terkait.	✓		



Level 2	1	Pengadilan telah mengidentifikasi pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses pemantauan dan evaluasi kinerja serta kesesuaian.	✓		
	2	Pengadilan telah melibatkan stakeholder dalam penyampaian tujuan dan persyaratan pemantauan kinerja serta kesesuaian dengan menggunakan terminologi yang jelas dan umum digunakan.	✓		
	3	Pengadilan telah menyelaraskan metode pemantauan dan evaluasi dengan pendekatan yang digunakan dalam organisasi serta telah menetapkan alat bantu yang digunakan untuk pengumpulan dan pelaporan data.	✓		
	4	Pengadilan telah menetapkan jenis tujuan, ukuran kinerja, serta sistem penyimpanan data yang mendukung proses pemantauan dan evaluasi.	✓		
	5	Pengadilan telah mengalokasikan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung proses pemantauan dan evaluasi dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi.	✓		
	6	Pengadilan telah menetapkan tujuan dan ukuran kinerja serta melakukan tinjauan berkala bersama stakeholder untuk memastikan kelayakan target.	✓		
	7	Pengadilan telah memastikan bahwa tujuan dan ukuran kinerja telah sesuai dengan prinsip SMART.	✓		
	8	Pengadilan telah menginformasikan kepada stakeholder utama mengenai perubahan yang diusulkan terhadap target dan toleransi kinerja.	✓		
	9	Pengadilan telah mendistribusikan informasi perubahan target dan toleransi kinerja kepada pengguna terkait.	✓		
	10	Pengadilan telah melakukan pengumpulan data kinerja secara	✓		



		terstruktur, termasuk melalui sistem otomatis jika memungkinkan.			
	11	Pengadilan telah mengevaluasi efisiensi dan kegunaan data yang dikumpulkan serta memastikan integritas data tersebut.		✓	
	12	Pengadilan telah mengelola data agregat untuk mendukung pengukuran kinerja secara menyeluruh.		✓	
	13	Pengadilan telah melakukan evaluasi terhadap respons manajemen serta opsi yang diusulkan dalam menangani penyimpangan kinerja.	✓		
	14	Pengadilan telah memastikan bahwa setiap tindakan korektif memiliki penanggung jawab yang jelas.	✓		
	15	Pengadilan telah melakukan pemantauan terhadap hasil dari tindakan korektif yang telah diimplementasikan.	✓		
	16	Pengadilan telah menyusun dan menyampaikan laporan hasil tindakan korektif kepada stakeholder terkait.	✓		
Level 3	1	Pendekatan yang digunakan dalam pemantauan dan evaluasi kinerja di Pengadilan Negeri Singaraja telah divalidasi secara berkala, serta pemangku kepentingan, persyaratan, dan sumber daya yang baru atau berubah telah diidentifikasi	✓		
	2	Terdapat proses manajemen siklus hidup dan pengendalian perubahan yang telah disepakati di Pengadilan Negeri Singaraja untuk pemantauan dan pelaporan kinerja, termasuk perbaikan dalam pelaporan, metrik, pendekatan, baseline, dan benchmarking.	✓	✓	



	3	Data agregat dalam sistem informasi Pengadilan Negeri Singaraja telah diselaraskan dengan pendekatan dan tujuan pelaporan yang ditetapkan, untuk memastikan akurasi dan konsistensi dalam evaluasi kinerja.	✓	.	
	4	Laporan kinerja proses di Pengadilan Negeri Singaraja telah dirancang secara ringkas, mudah dipahami, dan disesuaikan dengan kebutuhan pimpinan serta pemangku kepentingan, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang efektif dan tepat waktu.	✓		
	5	Laporan kinerja di Pengadilan Negeri Singaraja telah didistribusikan kepada pemangku kepentingan yang relevan sesuai dengan kebijakan dan prosedur pelaporan yang berlaku.	✓		
Level 4	1	Pengadilan Negeri Singaraja telah menggunakan alat dan sistem yang sesuai untuk pemrosesan dan analisis data guna mendukung evaluasi kinerja secara akurat dan efektif.	✓		
	2	Penyebab penyimpangan terhadap target kinerja di Pengadilan Negeri Singaraja telah dianalisis, serta tindakan perbaikan telah ditetapkan dengan tanggung jawab yang jelas dan terdokumentasi dengan baik.	✓	.	
	3	Sasaran kinerja individu di Pengadilan Negeri Singaraja telah mengintegrasikan aspek kinerja dan kepatuhan, serta pencapaian target kinerja dikaitkan dengan sistem penghargaan organisasi.	✓	.	
	4	Hasil kinerja Pengadilan Negeri Singaraja telah dibandingkan dengan target internal serta, jika memungkinkan, dengan standar industri atau pengadilan lain sebagai tolok ukur eksternal.	✓		



	5.	Tren kinerja dan kepatuhan di Pengadilan Negeri Singaraja telah dianalisis secara berkala, serta tindakan yang sesuai telah diambil untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional.	✓		
Level 5	1	Pengadilan Negeri Singaraja secara berkala mengevaluasi sasaran dan metrik kinerja serta memberikan rekomendasi perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pemantauan dan evaluasi.	✓		

2. Domain DSS06 Managed Business Process Controls (Pengendalian Proses Bisnis Terkelola)

Level Capability	No	Instrument (Item Pernyataan)	Yes	No	Keterangan
Level 0	1	Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa organisasi telah menerapkan proses pengendalian proses bisnis yang terkelola		✓	
Level 1	1	Pengadilan Negeri Singaraja telah mengidentifikasi dan mendokumentasikan aktivitas pengendalian untuk memastikan proses bisnis utama sesuai dengan tujuan strategis, operasional, pelaporan, dan kepatuhan.	✓		
	2	Pengadilan Negeri Singaraja menetapkan prioritas pengendalian berdasarkan risiko yang ada serta mengidentifikasi kontrol utama yang diperlukan.	✓		
	3	Pengadilan Negeri Singaraja menetapkan pemilik tanggung jawab untuk setiap aktivitas pengendalian utama guna memastikan akuntabilitas.	✓		
	4	Setiap transaksi di Pengadilan Negeri Singaraja diautentikasi dan diverifikasi untuk memastikan bahwa hanya individu yang	✓		



	berwenang yang dapat memulai transaksi.			
5	Pengadilan Negeri Singaraja menerapkan pemisahan tugas antara inisiasi dan persetujuan transaksi untuk menghindari konflik kepentingan.	✓		
6	Setiap peran dalam Pengadilan Negeri Singaraja dialokasikan sesuai dengan deskripsi pekerjaan dan aktivitas proses bisnis yang telah ditetapkan.	✓		
7	Kewenangan persetujuan transaksi, batas transaksi, dan keputusan lainnya dalam Pengadilan Negeri Singaraja ditetapkan berdasarkan peran pekerjaan yang telah disetujui.	✓		
8.	Dalam aktivitas sensitif, Pengadilan Negeri Singaraja menetapkan peran yang berbeda untuk memastikan pemisahan tugas secara jelas.	✓		
9	Kesalahan, pengecualian, dan penyimpangan dalam proses bisnis di Pengadilan Negeri Singaraja ditinjau secara berkala.	✓		
10	Dokumen sumber dan transaksi yang mengalami kesalahan diperbaiki, disetujui kembali, dan dikirim ulang oleh Pengadilan Negeri Singaraja.	✓		
11	Pengadilan Negeri Singaraja menyimpan bukti semua tindakan perbaikan yang telah dilakukan untuk memastikan akuntabilitas.	✓		
12	Semua informasi sumber, bukti pendukung, dan catatan transaksi terdokumentasi dengan baik di Pengadilan Negeri Singaraja.	✓		
13	Akses informasi di Pengadilan Negeri Singaraja dibatasi sesuai dengan klasifikasi dan tingkat kerahasiaan yang ditetapkan.	✓		
14	Pengadilan Negeri Singaraja memberikan pelatihan dan sosialisasi mengenai penggunaan	✓		



		sistem dan informasi yang sesuai dengan kebijakan organisasi.			
Level 2	1	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki dokumentasi aktivitas pengendalian yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan strategis, operasional, pelaporan, dan kepatuhan.	✓		
	2	Pengadilan Negeri Singaraja melakukan analisis risiko untuk menentukan prioritas aktivitas pengendalian dan mengidentifikasi kontrol utama yang diperlukan.	✓		
	3	Setiap aktivitas pengendalian utama memiliki penanggung jawab yang ditetapkan di Pengadilan Negeri Singaraja.	✓		
	4	Setiap transaksi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Singaraja diverifikasi untuk memastikan bahwa hanya pihak yang berwenang yang dapat memulainya.	✓		
	5	Pengadilan Negeri Singaraja menerapkan pemisahan tugas yang jelas antara pembuatan dan persetujuan transaksi.	✓		
	6	Peran dan tanggung jawab dalam proses bisnis dialokasikan berdasarkan deskripsi pekerjaan yang telah disetujui di Pengadilan Negeri Singaraja.	✓		
	7	Kewenangan persetujuan transaksi di Pengadilan Negeri Singaraja ditetapkan berdasarkan peran pekerjaan yang telah disetujui dan terstruktur dengan baik.	✓		
	8	Dalam aktivitas yang bersifat sensitif, Pengadilan Negeri Singaraja menetapkan pemisahan tugas secara jelas untuk menghindari potensi konflik kepentingan.	✓		
	9	Setiap kesalahan, pengecualian, dan penyimpangan dalam proses bisnis direview secara berkala di Pengadilan Negeri Singaraja.	✓		



	10	Dokumen sumber dan transaksi yang mengalami kesalahan diperbaiki, disetujui ulang, dan diserahkan kembali dengan prosedur yang jelas di Pengadilan Negeri Singaraja.	✓		
	11	Bukti tindakan perbaikan atas setiap penyimpangan dalam proses bisnis terdokumentasi dengan baik di Pengadilan Negeri Singaraja.	✓		
	12	Informasi sumber, bukti pendukung, dan catatan transaksi terdokumentasi dengan baik untuk memastikan akuntabilitas di Pengadilan Negeri Singaraja.	✓		
	13	Akses terhadap informasi dibatasi sesuai dengan klasifikasinya untuk menjaga kerahasiaan di Pengadilan Negeri Singaraja.	✓		
	14	Pelatihan dan sosialisasi mengenai penggunaan sistem dan informasi yang sesuai dengan kebijakan organisasi diberikan secara berkala di Pengadilan Negeri Singaraja.	✓		
Level 3	1	Pengadilan Negeri Singaraja telah menerapkan kontrol otomatis untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam proses bisnis.	✓		
	2	Setiap transaksi diverifikasi melalui kontrol otomatis dan manual untuk memastikan akurasi, kelengkapan, dan validitasnya.	✓		
	3	Kesalahan dalam transaksi dikoreksi dan diajukan ulang tanpa mengubah tingkat otorisasi aslinya.	✓		
	4	Sistem di Pengadilan Negeri Singaraja memastikan transaksi yang valid tetap berjalan meskipun ada kesalahan dalam transaksi lainnya.	✓		
	5	Dokumen hasil proses bisnis dikirimkan dengan metode yang aman dan diverifikasi sebelum diserahkan kepada penerima.	✓		
	6	Sistem memiliki mekanisme pemulihan data untuk memastikan	✓		



		data tetap valid setelah kegagalan sistem.			
	7	Data transaksi diperiksa sebelum diteruskan untuk memastikan alamat, keaslian, dan integritasnya.	✓		
	8	Hak akses diberikan hanya sesuai kebutuhan pekerjaan, dan segera dicabut jika peran pekerjaan berubah.	✓		
	9	Pelatihan berkala diberikan kepada staf mengenai peran mereka dalam kontrol bisnis dan keamanan data.	✓		
	10	Hak administratif dikelola dengan ketat dan diaudit secara berkala untuk mencegah penyalahgunaan	✓		
	11	Ada prosedur jelas untuk menangani kesalahan, pengecualian, dan ketidakseimbangan dalam proses bisnis.	✓	.	
	12	Dokumen dan data disimpan sesuai dengan kebijakan retensi yang telah ditetapkan.	✓		
	13	Data yang tidak diperlukan lagi dimusnahkan sesuai kebijakan retensi dan keamanan informasi.	✓		
	14	Informasi diklasifikasikan berdasarkan tingkat kepentingan dan dilindungi dengan kebijakan keamanan yang sesuai.	✓		
	15	Proses dan alat audit digunakan untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan regulasi.	✓		
Level 4	1	Pengadilan Negeri Singaraja secara berkala memantau kontrol bisnis untuk mengidentifikasi area yang dapat ditingkatkan.	✓		
	2	Hak akses diperiksa secara rutin untuk memastikan hanya staf yang berwenang yang memiliki akses ke informasi tertentu.	✓		
	3	Kesalahan dalam proses bisnis dilaporkan dan dianalisis untuk menemukan pola dan penyebab utama.	✓	.	



	4	Setiap pelanggaran dan penyimpangan dalam proses bisnis didokumentasikan dan dilaporkan kepada manajemen serta pemangku kepentingan terkait.	✓		
Level 5	1	Pengadilan Negeri Singaraja secara aktif mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas kontrol dalam proses bisnis.	✓		

3. Domain BAI09 Managed Assets (Aset yang Dikelola)

Level Capability	No	Instrument (Item Pernyataan)	Yes	No	Catatan
Level 0	1	Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa organisasi telah menerapkan proses aset yang terkelola dengan baik		✓	
Level 1	1	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki daftar aset yang mencatat seluruh aset yang dimiliki beserta statusnya.	✓		
	2	Pengadilan Negeri Singaraja telah mengidentifikasi dan mematuhi semua peraturan hukum dan kontrak terkait pengelolaan aset.	✓		
	3	Pengadilan Negeri Singaraja melakukan pengecekan rutin untuk memastikan aset dalam kondisi layak dan siap digunakan sesuai dengan tujuannya.	✓		
	4	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki daftar aset kritis yang diperlukan untuk kelancaran layanan peradilan.	✓		
	5	Pengadilan Negeri Singaraja melakukan evaluasi berkala terhadap risiko kerusakan atau penggantian aset kritis.	✓		
	6	Pengadilan Negeri Singaraja menginformasikan kepada pengguna mengenai dampak dari pemeliharaan aset, seperti pembatasan penggunaan sementara.	✓		



	7	Pengadaan aset di Pengadilan Negeri Singaraja dilakukan berdasarkan permintaan yang telah disetujui dan mengikuti kebijakan yang berlaku.	✓		
	8	Pengadilan Negeri Singaraja melakukan pencatatan, verifikasi, pengujian, dan pelabelan aset secara sistematis sebelum digunakan.	✓		
	9	Proses pembayaran aset di Pengadilan Negeri Singaraja dilakukan sesuai dengan perjanjian kontrak dengan pemasok.	✓		
	10	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki dan memelihara daftar lengkap semua lisensi perangkat lunak yang telah dibeli, termasuk perjanjian lisensinya.	✓		
Level 2	1	Pengadilan Negeri Singaraja memastikan daftar aset selalu diperbarui dan selaras dengan sistem manajemen perubahan dan konfigurasi.	✓		
	2	Pengadilan Negeri Singaraja memastikan semua aset dikelola sesuai dengan regulasi dan kontrak yang berlaku.	✓		
	3	Pengadilan Negeri Singaraja secara rutin melakukan pemeriksaan aset untuk memastikan bahwa aset tersebut masih layak digunakan sesuai dengan fungsinya.	✓		
	4	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki daftar aset yang sangat penting dalam mendukung operasional peradilan.	✓		
	5	Pengadilan Negeri Singaraja melakukan evaluasi risiko untuk menentukan kebutuhan penggantian aset yang sudah tidak layak.	✓		
	6	Pengadilan Negeri Singaraja selalu memberitahukan kepada pengguna mengenai dampak dari perawatan atau pemeliharaan aset.	✓		
	7	Pengadilan Negeri Singaraja melakukan pengadaan aset dengan	✓		



		mengikuti prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan.			
	8	Pengadilan Negeri Singaraja memastikan bahwa setiap aset yang diperoleh telah melalui proses penerimaan, verifikasi, pengujian, pencatatan, serta diberikan label fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	✓		
	9	Pengadilan Negeri Singaraja menyelesaikan pembayaran kepada pemasok sesuai dengan ketentuan dalam kontrak yang berlaku.	✓		
	10	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki pencatatan lengkap mengenai lisensi perangkat lunak dan perjanjiannya.	✓		
Level 3	1	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki sistem pencatatan akuntansi yang mencakup seluruh aset yang dimiliki dan digunakan.	✓		
	2	Pengadilan Negeri Singaraja merencanakan jadwal downtime dan pemeliharaan aset secara terstruktur untuk mengurangi dampak terhadap layanan peradilan.		✓	
	3	Pengadilan Negeri Singaraja melakukan pemeliharaan rutin terhadap aset kritis dan menyediakan alternatif jika terjadi kegagalan.	✓		
	4	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki rencana perawatan preventif untuk perangkat keras berdasarkan rekomendasi vendor dan analisis risiko.		✓	
	5	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki kontrak layanan pemeliharaan dengan pihak ketiga yang mencakup aspek keamanan dan privasi.	✓		
	6	Pengadilan Negeri Singaraja membatasi akses jarak jauh hanya untuk kebutuhan pemeliharaan dan diagnosis tertentu.		✓	

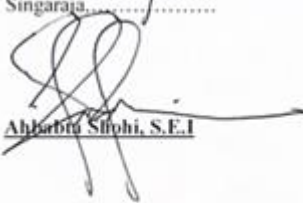


	7	Pengadilan Negeri Singaraja menerapkan standar implementasi aset dengan proses pengujian penerimaan sebelum digunakan.	✓		
	8	Setiap aset yang dialokasikan di Pengadilan Negeri Singaraja harus mendapatkan persetujuan dan pengguna bertanggung jawab atas penggunaannya.	✓		
	9	Pengadilan Negeri Singaraja melakukan alokasi ulang aset jika tidak lagi digunakan untuk mengoptimalkan pemanfaatannya.	✓		
	10	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki dokumentasi terkait penghapusan atau penghentian aset sesuai peraturan yang berlaku.	✓		
	11	Pengadilan Negeri Singaraja memastikan pembuangan aset dilakukan dengan aman untuk mencegah kebocoran data dan dampak lingkungan.	✓		
	12	Pengadilan Negeri Singaraja melakukan evaluasi berkala terhadap aset untuk memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan operasional.	✓		
	13	Pengadilan Negeri Singaraja secara berkala mengaudit perangkat lunak berlisensi untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi.	✓		
Level 4	1	Pengadilan Negeri Singaraja melakukan pemeriksaan berkala terhadap aset yang dimiliki untuk memastikan keberadaannya.	✓		
	2	Pengadilan Negeri Singaraja mengevaluasi apakah aset masih memberikan manfaat dan memperkirakan masa manfaatnya.	✓		
	3	Pengadilan Negeri Singaraja melakukan pemantauan rutin terhadap aset penting dan mengambil tindakan perbaikan jika diperlukan.	✓		
	4	Pengadilan Negeri Singaraja memastikan pembuangan aset	✓		



		dilakukan sesuai dengan regulasi dan mempertimbangkan dampak lingkungan.	✓		
	5.	Pengadilan Negeri Singaraja melakukan analisis biaya pemeliharaan dan mempertimbangkan opsi yang lebih hemat.	✓		
	6	Pengadilan Negeri Singaraja melakukan audit perangkat lunak secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap lisensi.	✓		
	7	Pengadilan Negeri Singaraja mengevaluasi kebutuhan terhadap lisensi yang tidak digunakan untuk efisiensi biaya.		✓	
	8	Pengadilan Negeri Singaraja memastikan kepatuhan terhadap lisensi dengan mencopot perangkat lunak yang tidak diperlukan atau membeli lisensi tambahan jika dibutuhkan.		✓	
Level 5	1	Pengadilan Negeri Singaraja melakukan evaluasi jaminan aset dan mempertimbangkan strategi yang memberikan nilai terbaik.		✓	
	2	Pengadilan Negeri Singaraja mengevaluasi aset yang kurang dimanfaatkan untuk optimalisasi biaya dan operasional.	✓		
	3	Pengadilan Negeri Singaraja melakukan analisis terhadap aset untuk mencari peluang standarisasi guna efisiensi biaya.	✓	✓	
	4	Pengadilan Negeri Singaraja mengevaluasi penggunaan teknologi baru atau strategi alternatif untuk efisiensi operasional.	✓	✓	
	5	Pengadilan Negeri Singaraja meninjau apakah peningkatan produk atau lisensi dapat memberikan manfaat yang lebih besar.	✓	✓	

Singaraja, 28 Februari 2025



Ahlulhuda Sihohi, S.E.I

Lampiran 10. Hasil Kuesioner 5

Nama Responden : Gede Sugeng Darmawan, S.H.

Jabatan : Kepala Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana

1. Domain EDM02 Ensured Benefits Delivery (Memastikan Nilai (value))

Level Capability	No	Aktifitas	Yes	No	Keterangan
Level 0	1	Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa organisasi telah menerapkan proses memastikan nilai (value)		✓	
Level 1	1	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki dokumen perencanaan investasi TI yang mendukung strategi organisasi.	✓		
	2	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki pemahaman yang jelas tentang bagaimana investasi TI mendukung tujuan bisnis dan strategis organisasi.	✓		
	3	Pengadilan Negeri Singaraja mengidentifikasi dan mendokumentasikan berbagai aset dan sumber daya TI yang diperlukan untuk mendukung strategi organisasi.	✓		
	4	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki proses persetujuan formal untuk rencana investasi TI yang mempertimbangkan hubungan dengan strategi organisasi.	✓		
	5	Pengadilan Negeri Singaraja memahami dan mengelola isu-isu strategis terkait TI serta dampaknya terhadap organisasi.	✓		
	6	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki mekanisme pelaporan dan komunikasi yang jelas terkait investasi TI dan kriteria evaluasinya.	✓		



Level 2	1	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki dokumen perencanaan investasi TI yang mendukung strategi organisasi.	✓		
	2	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki pemahaman yang jelas tentang bagaimana investasi TI mendukung tujuan bisnis dan strategis organisasi.	✓		
	3	Pengadilan Negeri Singaraja mengidentifikasi dan mendokumentasikan berbagai aset dan sumber daya TI yang diperlukan untuk mendukung strategi organisasi.	✓		
	4	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki proses persetujuan formal untuk rencana investasi TI yang mempertimbangkan hubungan dengan strategi organisasi.	✓		
	5	Pengadilan Negeri Singaraja memahami dan mengelola isu-isu strategis terkait TI serta dampaknya terhadap organisasi.	✓		
	6	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki mekanisme pelaporan dan komunikasi yang jelas terkait investasi TI dan kriteria evaluasinya.	✓		
Level 3	1	Pengadilan Negeri Singaraja menetapkan investasi TI dengan mempertimbangkan keuntungan jangka pendek dan panjang, serta potensi risiko.	✓		
	2	Pengadilan Negeri Singaraja memahami prinsip-prinsip tata kelola TI yang diperlukan untuk mencapai nilai optimal bagi organisasi.	✓		
	3	Pengadilan Negeri Singaraja melakukan evaluasi berkala terhadap peluang inovasi teknologi dan dampaknya terhadap proses bisnis.	✓		



	4	Pengadilan Negeri Singaraja melakukan evaluasi berkala terhadap peluang inovasi teknologi dan dampaknya terhadap proses bisnis.	✓		
	5	Pengadilan Negeri Singaraja menerapkan proses evaluasi bertahap dalam setiap keputusan investasi TI untuk mengelola risiko secara optimal.	✓		
	6	Pengadilan Negeri Singaraja mendorong pemanfaatan TI untuk meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing organisasi.	✓		
	7	Pengadilan Negeri Singaraja memastikan adanya distribusi tanggung jawab yang jelas dalam pengelolaan investasi TI dan layanan bisnis.	✓		
	8	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki mekanisme penyesuaian rencana investasi berdasarkan perubahan kebutuhan organisasi.	✓		
	9	Pengadilan Negeri Singaraja secara aktif mengevaluasi inovasi teknologi dan potensi peningkatan operasional untuk meningkatkan nilai bisnis.	✓		
Level 4	1	Pengadilan Negeri Singaraja melakukan evaluasi terhadap efektivitas strategi TI dalam pencapaian nilai organisasi.	✓		
	2	Pengadilan Negeri Singaraja mempertimbangkan dampak investasi TI sejalan dengan nilai organisasi dan manajemen keuangan.	✓		
	3	Pengadilan Negeri Singaraja mempertimbangkan bagaimana investasi TI mendukung nilai organisasi dan manajemen keuangan.	✓		
	4	Pengadilan Negeri Singaraja memastikan investasi TI sejalan dengan tujuan strategis, efektivitas, efisiensi, serta risiko organisasi.	✓		



	5.	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki mekanisme untuk mengukur dan mengawasi pencapaian manfaat dari investasi TI.	✓		
	6	Pengadilan Negeri Singaraja menggunakan indikator kinerja yang mencakup aspek finansial dan nonfinansial dalam evaluasi TI.	✓		
	7	Pengadilan Negeri Singaraja mengumpulkan data kinerja TI untuk mendukung pengambilan keputusan strategis.	✓		
	8	Pengadilan Negeri Singaraja memastikan adanya laporan berkala terkait kinerja TI dan pencapaian tujuan organisasi.	✓		
Level 5	1	Pengadilan Negeri Singaraja memastikan tindakan korektif dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kinerja TI.	✓		
	2	Pengadilan Negeri Singaraja memastikan manajemen bertindak secara proaktif dalam mengoptimalkan manfaat investasi TI.	✓		

2. Domain MEA01 Monitor, Evaluate, and Assess Performance and Conformance (Penentuan Kinerja dan Kesesuaian Terkelola)

Level Capability	No	Aktifitas	Yes	No	Keterangan
Level 0	1	Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa organisasi telah menerapkan proses pemantauan dan evaluasi kinerja serta kesesuaian.		✓	
Level 1	1	Pengadilan telah mengidentifikasi pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses pemantauan dan evaluasi kinerja serta kesesuaian.	✓		



2	Pengadilan telah melibatkan stakeholder dalam penyampaian tujuan dan persyaratan pemantauan kinerja serta kesesuaian dengan menggunakan terminologi yang jelas dan umum digunakan.	✓		
3	Pengadilan telah menyelaraskan metode pemantauan dan evaluasi dengan pendekatan yang digunakan dalam organisasi serta telah menetapkan alat bantu yang digunakan untuk pengumpulan dan pelaporan data.	✓		
4	Pengadilan telah menetapkan jenis tujuan, ukuran kinerja, serta sistem penyimpanan data yang mendukung proses pemantauan dan evaluasi.	✓		
5	Pengadilan telah mengalokasikan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung proses pemantauan dan evaluasi dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi.	✓		
6	Pengadilan telah menetapkan tujuan dan ukuran kinerja serta melakukan tinjauan berkala bersama stakeholder untuk memastikan kelayakan target.	✓		
7	Pengadilan telah memastikan bahwa tujuan dan ukuran kinerja telah sesuai dengan prinsip SMART.	✓		
8.	Pengadilan telah menginformasikan kepada stakeholder utama mengenai perubahan yang diusulkan terhadap target dan toleransi kinerja.		✓	
9	Pengadilan telah mendistribusikan informasi perubahan target dan toleransi kinerja kepada pengguna terkait.	✓		
10	Pengadilan telah melakukan pengumpulan data kinerja secara terstruktur, termasuk melalui sistem otomatis jika memungkinkan.	✓		
11	Pengadilan telah mengevaluasi efisiensi dan kegunaan data yang		,	



		dikumpulkan serta memastikan integritas data tersebut.	✓		
	12	Pengadilan telah mengelola data agregat untuk mendukung pengukuran kinerja secara menyeluruh.	✓	•	
	13	Pengadilan telah melakukan evaluasi terhadap respons manajemen serta opsi yang diusulkan dalam menangani penyimpangan kinerja.	✓		
	14	Pengadilan telah memastikan bahwa setiap tindakan korektif memiliki penanggung jawab yang jelas.	✓		
	15	Pengadilan telah melakukan pemantauan terhadap hasil dari tindakan korektif yang telah diimplementasikan.	✓		
	16	Pengadilan telah menyusun dan menyampaikan laporan hasil tindakan korektif kepada stakeholder terkait.	✓		
Level 2	1	Pengadilan telah mengidentifikasi pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses pemantauan dan evaluasi kinerja serta kesesuaian.	✓		
	2	Pengadilan telah melibatkan stakeholder dalam penyampaian tujuan dan persyaratan pemantauan kinerja serta kesesuaian dengan menggunakan terminologi yang jelas dan umum digunakan.		✓	
	3	Pengadilan telah menyelaraskan metode pemantauan dan evaluasi dengan pendekatan yang digunakan dalam organisasi serta telah menetapkan alat bantu yang digunakan untuk pengumpulan dan pelaporan data.		✓	
	4	Pengadilan telah menetapkan jenis tujuan, ukuran kinerja, serta sistem penyimpanan data yang mendukung proses pemantauan dan evaluasi.	✓		
	5	Pengadilan telah mengalokasikan sumber daya yang diperlukan untuk			



	mendukung proses pemantauan dan evaluasi dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi.	✓		
6	Pengadilan telah menetapkan tujuan dan ukuran kinerja serta melakukan tinjauan berkala bersama stakeholder untuk memastikan kelayakan target.	✓		
7	Pengadilan telah memastikan bahwa tujuan dan ukuran kinerja telah sesuai dengan prinsip SMART.	✓		
8	Pengadilan telah menginformasikan kepada stakeholder utama mengenai perubahan yang diusulkan terhadap target dan toleransi kinerja.	✓	.	
9	Pengadilan telah mendistribusikan informasi perubahan target dan toleransi kinerja kepada pengguna terkait.		✓	
10	Pengadilan telah melakukan pengumpulan data kinerja secara terstruktur, termasuk melalui sistem otomatis jika memungkinkan.	✓		
11	Pengadilan telah mengevaluasi efisiensi dan kegunaan data yang dikumpulkan serta memastikan integritas data tersebut.	✓	.	
12	Pengadilan telah mengelola data agregat untuk mendukung pengukuran kinerja secara menyeluruh.	✓	.	
13	Pengadilan telah melakukan evaluasi terhadap respons manajemen serta opsi yang diusulkan dalam menangani penyimpangan kinerja.	✓		
14	Pengadilan telah memastikan bahwa setiap tindakan korektif memiliki penanggung jawab yang jelas.	✓		
15	Pengadilan telah melakukan pemantauan terhadap hasil dari	✓		



		tindakan korektif yang telah diimplementasikan.			
	16	Pengadilan telah menyusun dan menyampaikan laporan hasil tindakan korektif kepada stakeholder terkait.	✓		
Level 3	1	Pendekatan yang digunakan dalam pemantauan dan evaluasi kinerja di Pengadilan Negeri Singaraja telah divalidasi secara berkala, serta pemangku kepentingan, persyaratan, dan sumber daya yang baru atau berubah telah diidentifikasi	✓		
	2	Terdapat proses manajemen siklus hidup dan pengendalian perubahan yang telah disepakati di Pengadilan Negeri Singaraja untuk pemantauan dan pelaporan kinerja, termasuk perbaikan dalam pelaporan, metrik, pendekatan, baseline, dan benchmarking.	✓		
	3	Data agregat dalam sistem informasi Pengadilan Negeri Singaraja telah diselaraskan dengan pendekatan dan tujuan pelaporan yang ditetapkan, untuk memastikan akurasi dan konsistensi dalam evaluasi kinerja.	✓		
	4	Laporan kinerja proses di Pengadilan Negeri Singaraja telah dirancang secara ringkas, mudah dipahami, dan disesuaikan dengan kebutuhan pimpinan serta pemangku kepentingan, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang efektif dan tepat waktu.	✓		
	5	Laporan kinerja di Pengadilan Negeri Singaraja telah didistribusikan kepada pemangku kepentingan yang relevan sesuai dengan kebijakan dan prosedur pelaporan yang berlaku.	✓		
Level 4	1	Pengadilan Negeri Singaraja telah menggunakan alat dan sistem yang sesuai untuk pemrosesan dan	✓		



		analisis data guna mendukung evaluasi kinerja secara akurat dan efektif.			
	2	Penyebab penyimpangan terhadap target kinerja di Pengadilan Negeri Singaraja telah dianalisis, serta tindakan perbaikan telah ditetapkan dengan tanggung jawab yang jelas dan terdokumentasi dengan baik.	✓		
	3	Sasaran kinerja individu di Pengadilan Negeri Singaraja telah mengintegrasikan aspek kinerja dan kepatuhan, serta pencapaian target kinerja dikaitkan dengan sistem penghargaan organisasi.	✓		
	4	Hasil kinerja Pengadilan Negeri Singaraja telah dibandingkan dengan target internal serta, jika memungkinkan, dengan standar industri atau pengadilan lain sebagai tolok ukur eksternal.	✓	.	
	5.	Tren kinerja dan kepatuhan di Pengadilan Negeri Singaraja telah dianalisis secara berkala, serta tindakan yang sesuai telah diambil untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional.	✓		
Level 5	1	Pengadilan Negeri Singaraja secara berkala mengevaluasi sasaran dan metrik kinerja serta memberikan rekomendasi perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pemantauan dan evaluasi.	✓	.	

3. Domain DSS06 Managed Business Process Controls (Pengendalian Proses Bisnis Terkelola)

Level Capability	No	Aktifitas	Yes	No	Keterangan
Level 0	1	Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa organisasi telah menerapkan proses pengendalian proses bisnis yang terkelola	✗	✓	



Level 1	1	Pengadilan Negeri Singaraja telah mengidentifikasi dan mendokumentasikan aktivitas pengendalian untuk memastikan proses bisnis utama sesuai dengan tujuan strategis, operasional, pelaporan, dan kepatuhan.	✓		
	2	Pengadilan Negeri Singaraja menetapkan prioritas pengendalian berdasarkan risiko yang ada serta mengidentifikasi kontrol utama yang diperlukan.	✓		
	3	Pengadilan Negeri Singaraja menetapkan pemilik tanggung jawab untuk setiap aktivitas pengendalian utama guna memastikan akuntabilitas.	✓		
	4	Setiap transaksi di Pengadilan Negeri Singaraja diautentikasi dan diverifikasi untuk memastikan bahwa hanya individu yang berwenang yang dapat memulai transaksi.	✓		
	5	Pengadilan Negeri Singaraja menerapkan pemisahan tugas antara inisiasi dan persetujuan transaksi untuk menghindari konflik kepentingan.	✓		
	6	Setiap peran dalam Pengadilan Negeri Singaraja dialokasikan sesuai dengan deskripsi pekerjaan dan aktivitas proses bisnis yang telah ditetapkan.	✓		
	7	Kewenangan persetujuan transaksi, batas transaksi, dan keputusan lainnya dalam Pengadilan Negeri Singaraja ditetapkan berdasarkan peran pekerjaan yang telah disetujui.	✓		
	8	Dalam aktivitas sensitif, Pengadilan Negeri Singaraja menetapkan peran yang berbeda untuk memastikan pemisahan tugas secara jelas.	✓		
	9	Kesalahan, pengecualian, dan penyimpangan dalam proses bisnis di Pengadilan Negeri Singaraja ditinjau secara berkala.	✓		



	10	Dokumen sumber dan transaksi yang mengalami kesalahan diperbaiki, disetujui kembali, dan dikirim ulang oleh Pengadilan Negeri Singaraja.	✓		
	11	Pengadilan Negeri Singaraja menyimpan bukti semua tindakan perbaikan yang telah dilakukan untuk memastikan akuntabilitas.	✓		
	12	Semua informasi sumber, bukti pendukung, dan catatan transaksi terdokumentasi dengan baik di Pengadilan Negeri Singaraja.	✓		
	13	Akses informasi di Pengadilan Negeri Singaraja dibatasi sesuai dengan klasifikasi dan tingkat kerahasiaan yang ditetapkan.	✓		
	14	Pengadilan Negeri Singaraja memberikan pelatihan dan sosialisasi mengenai penggunaan sistem dan informasi yang sesuai dengan kebijakan organisasi.	✓		
Level 2	1	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki dokumentasi aktivitas pengendalian yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan strategis, operasional, pelaporan, dan kepatuhan.	✓		
	2	Pengadilan Negeri Singaraja melakukan analisis risiko untuk menentukan prioritas aktivitas pengendalian dan mengidentifikasi kontrol utama yang diperlukan.	✓		
	3	Setiap aktivitas pengendalian utama memiliki penanggung jawab yang ditetapkan di Pengadilan Negeri Singaraja.	✓		
	4	Setiap transaksi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Singaraja diverifikasi untuk memastikan bahwa hanya pihak yang berwenang yang dapat memulainya.	✓		
	5	Pengadilan Negeri Singaraja menerapkan pemisahan tugas yang jelas antara pembuatan dan persetujuan transaksi.	✓		



	6	Peran dan tanggung jawab dalam proses bisnis dialokasikan berdasarkan deskripsi pekerjaan yang telah disetujui di Pengadilan Negeri Singaraja.	✓		
	7	Kewenangan persetujuan transaksi di Pengadilan Negeri Singaraja ditetapkan berdasarkan peran pekerjaan yang telah disetujui dan terstruktur dengan baik.	✓		
	8	Dalam aktivitas yang bersifat sensitif, Pengadilan Negeri Singaraja menetapkan pemisahan tugas secara jelas untuk menghindari potensi konflik kepentingan.	✓		
	9	Setiap kesalahan, pengecualian, dan penyimpangan dalam proses bisnis direview secara berkala di Pengadilan Negeri Singaraja.	✓		
	10	Dokumen sumber dan transaksi yang mengalami kesalahan diperbaiki, disetujui ulang, dan diserahkan kembali dengan prosedur yang jelas di Pengadilan Negeri Singaraja.	✓		
	11	Bukti tindakan perbaikan atas setiap penyimpangan dalam proses bisnis terdokumentasi dengan baik di Pengadilan Negeri Singaraja.	✓		
	12	Informasi sumber, bukti pendukung, dan catatan transaksi terdokumentasi dengan baik untuk memastikan akuntabilitas di Pengadilan Negeri Singaraja.	✓		
	13	Akses terhadap informasi dibatasi sesuai dengan klasifikasinya untuk menjaga kerahasiaan di Pengadilan Negeri Singaraja.	✓		
	14	Pelatihan dan sosialisasi mengenai penggunaan sistem dan informasi yang sesuai dengan kebijakan organisasi diberikan secara berkala di Pengadilan Negeri Singaraja.	✓		
Level 3	1	Pengadilan Negeri Singaraja telah menerapkan kontrol otomatis untuk	✓		

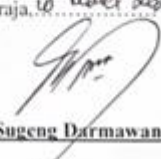


	meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam proses bisnis.			
2	Setiap transaksi diverifikasi melalui kontrol otomatis dan manual untuk memastikan akurasi, kelengkapan, dan validitasnya.	✓		
3	Kesalahan dalam transaksi dikoreksi dan diajukan ulang tanpa mengubah tingkat otorisasi aslinya.	✓		
4	Sistem di Pengadilan Negeri Singaraja memastikan transaksi yang valid tetap berjalan meskipun ada kesalahan dalam transaksi lainnya.		✓	
5	Dokumen hasil proses bisnis dikirimkan dengan metode yang aman dan diverifikasi sebelum diserahkan kepada penerima.	✓		
6	Sistem memiliki mekanisme pemulihan data untuk memastikan data tetap valid setelah kegagalan sistem.	✓		
7	Data transaksi diperiksa sebelum diteruskan untuk memastikan alamat, keaslian, dan integritasnya.	✓		
8	Hak akses diberikan hanya sesuai kebutuhan pekerjaan, dan segera dicabut jika peran pekerjaan berubah.	✓		
9	Pelatihan berkala diberikan kepada staf mengenai peran mereka dalam kontrol bisnis dan keamanan data.	✓		
10	Hak administratif dikelola dengan ketat dan diaudit secara berkala untuk mencegah penyalahgunaan	✓		
11	Ada prosedur jelas untuk menangani kesalahan, pengecualian, dan ketidakseimbangan dalam proses bisnis.	✓		
12	Dokumen dan data disimpan sesuai dengan kebijakan retensi yang telah ditetapkan.	✓		
13	Data yang tidak diperlukan lagi dimusnahkan sesuai kebijakan retensi dan keamanan informasi.	✓		



	14	Informasi diklasifikasikan berdasarkan tingkat kepentingan dan dilindungi dengan kebijakan keamanan yang sesuai.	✓		
	15	Proses dan alat audit digunakan untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan regulasi.	✓		
Level 4	1	Pengadilan Negeri Singaraja secara berkala memantau kontrol bisnis untuk mengidentifikasi area yang dapat ditingkatkan.	✓		
	2	Hak akses diperiksa secara rutin untuk memastikan hanya staf yang berwenang yang memiliki akses ke informasi tertentu.		✓	
	3	Kesalahan dalam proses bisnis dilaporkan dan dianalisis untuk menemukan pola dan penyebab utama.	✓		
	4	Setiap pelanggaran dan penyimpangan dalam proses bisnis didokumentasikan dan dilaporkan kepada manajemen serta pemangku kepentingan terkait.	✓		
Level 5	1	Pengadilan Negeri Singaraja secara aktif mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas kontrol dalam proses bisnis.	✓		

Singaraja, 10 Maret 2025


Gede Sugeng Darmawan, S.H.



Lampiran 11. Hasil Kuesioner 6

Nama Responden : Mareta Pramesti Ayuningtyas, A.Md.

Jabatan : Arsiparis Pelaksana

1. Domain DSS06 Managed Business Process Controls (Pengendalian Proses Bisnis Terkelola)

Level Capability	No	Aktivitas	Yes	No	Keterangan
Level 0	1	Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa organisasi telah menerapkan proses pengendalian proses bisnis yang terkelola			
Level 1	1	Pengadilan Negeri Singaraja telah mengidentifikasi dan mendokumentasikan aktivitas pengendalian untuk memastikan proses bisnis utama sesuai dengan tujuan strategis, operasional, pelaporan, dan kepatuhan.	✓		
	2	Pengadilan Negeri Singaraja menetapkan prioritas pengendalian berdasarkan risiko yang ada serta mengidentifikasi kontrol utama yang diperlukan.	✓		
	3	Pengadilan Negeri Singaraja menetapkan pemilik tanggung jawab untuk setiap aktivitas pengendalian utama guna memastikan akuntabilitas.	✓		
	4	Setiap transaksi di Pengadilan Negeri Singaraja diautentikasi dan diverifikasi untuk memastikan bahwa hanya individu yang berwenang yang dapat memulai transaksi.	✓		
	5	Pengadilan Negeri Singaraja menerapkan pemisahan tugas antara inisiasi dan persetujuan transaksi untuk menghindari konflik kepentingan.	✓	,	
	6	Setiap peran dalam Pengadilan Negeri Singaraja dialokasikan sesuai dengan deskripsi pekerjaan	✓		



		dan aktivitas proses bisnis yang telah ditetapkan.			
	7	Kewenangan persetujuan transaksi, batas transaksi, dan keputusan lainnya dalam Pengadilan Negeri Singaraja ditetapkan berdasarkan peran pekerjaan yang telah disetujui.	✓		
	8.	Dalam aktivitas sensitif, Pengadilan Negeri Singaraja menetapkan peran yang berbeda untuk memastikan pemisahan tugas secara jelas.	✓		
	9	Kesalahan, pengecualian, dan penyimpangan dalam proses bisnis di Pengadilan Negeri Singaraja ditinjau secara berkala.	✓		
	10	Dokumen sumber dan transaksi yang mengalami kesalahan diperbaiki, disetujui kembali, dan dikirim ulang oleh Pengadilan Negeri Singaraja.	✓		
	11	Pengadilan Negeri Singaraja menyimpan bukti semua tindakan perbaikan yang telah dilakukan untuk memastikan akuntabilitas.	✓		
	12	Semua informasi sumber, bukti pendukung, dan catatan transaksi terdokumentasi dengan baik di Pengadilan Negeri Singaraja.	✓		
	13	Akses informasi di Pengadilan Negeri Singaraja dibatasi sesuai dengan klasifikasi dan tingkat kerahasiaan yang ditetapkan.	✓		
	14	Pengadilan Negeri Singaraja memberikan pelatihan dan sosialisasi mengenai penggunaan sistem dan informasi yang sesuai dengan kebijakan organisasi.	✓		
Level 2	1	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki dokumentasi aktivitas pengendalian yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan strategis, operasional, pelaporan, dan kepatuhan.	✓		
	2	Pengadilan Negeri Singaraja melakukan analisis risiko untuk menentukan prioritas aktivitas	✓		



	pengendalian dan mengidentifikasi kontrol utama yang diperlukan.			
3	Setiap aktivitas pengendalian utama memiliki penanggung jawab yang ditetapkan di Pengadilan Negeri Singaraja.	✓		
4	Setiap transaksi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Singaraja diverifikasi untuk memastikan bahwa hanya pihak yang berwenang yang dapat memulainya.	✓		
5	Pengadilan Negeri Singaraja menerapkan pemisahan tugas yang jelas antara pembuatan dan persetujuan transaksi.	✓	.	
6	Peran dan tanggung jawab dalam proses bisnis dialokasikan berdasarkan deskripsi pekerjaan yang telah disetujui di Pengadilan Negeri Singaraja.	✓		
7	Kewenangan persetujuan transaksi di Pengadilan Negeri Singaraja ditetapkan berdasarkan peran pekerjaan yang telah disetujui dan terstruktur dengan baik.	✓		
8	Dalam aktivitas yang bersifat sensitif, Pengadilan Negeri Singaraja menetapkan pemisahan tugas secara jelas untuk menghindari potensi konflik kepentingan.	✓		
9	Setiap kesalahan, pengecualian, dan penyimpangan dalam proses bisnis direview secara berkala di Pengadilan Negeri Singaraja.	✓		
10	Dokumen sumber dan transaksi yang mengalami kesalahan diperbaiki, disetujui ulang, dan diserahkan kembali dengan prosedur yang jelas di Pengadilan Negeri Singaraja.	✓		
11	Bukti tindakan perbaikan atas setiap penyimpangan dalam proses bisnis terdokumentasi dengan baik di Pengadilan Negeri Singaraja.	✓		



	12	Informasi sumber, bukti pendukung, dan catatan transaksi terdokumentasi dengan baik untuk memastikan akuntabilitas di Pengadilan Negeri Singaraja.	✓		
	13	Akses terhadap informasi dibatasi sesuai dengan klasifikasinya untuk menjaga kerahasiaan di Pengadilan Negeri Singaraja.	✓		
	14	Pelatihan dan sosialisasi mengenai penggunaan sistem dan informasi yang sesuai dengan kebijakan organisasi diberikan secara berkala di Pengadilan Negeri Singaraja.	✓		
Level 3	1	Pengadilan Negeri Singaraja telah menerapkan kontrol otomatis untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam proses bisnis.	✓		
	2	Setiap transaksi diverifikasi melalui kontrol otomatis dan manual untuk memastikan akurasi, kelengkapan, dan validitasnya.	✓		
	3	Kesalahan dalam transaksi dikoreksi dan diajukan ulang tanpa mengubah tingkat otorisasi aslinya.	✓		
	4	Sistem di Pengadilan Negeri Singaraja memastikan transaksi yang valid tetap berjalan meskipun ada kesalahan dalam transaksi lainnya.	✓	.	
	5	Dokumen hasil proses bisnis dikirimkan dengan metode yang aman dan diverifikasi sebelum diserahkan kepada penerima.	✓		
	6	Sistem memiliki mekanisme pemulihan data untuk memastikan data tetap valid setelah kegagalan sistem.	✓		
	7	Data transaksi diperiksa sebelum diteruskan untuk memastikan alamat, keaslian, dan integritasnya.	✓		
	8	Hak akses diberikan hanya sesuai kebutuhan pekerjaan, dan segera dicabut jika peran pekerjaan berubah.	✓		



	9	Pelatihan berkala diberikan kepada staf mengenai peran mereka dalam kontrol bisnis dan keamanan data.	✓		
	10	Hak administratif dikelola dengan ketat dan diaudit secara berkala untuk mencegah penyalahgunaan	✓		
	11	Ada prosedur jelas untuk menangani kesalahan, pengecualian, dan ketidakseimbangan dalam proses bisnis.	✓	.	
	12	Dokumen dan data disimpan sesuai dengan kebijakan retensi yang telah ditetapkan.	✓		
	13	Data yang tidak diperlukan lagi dimusnahkan sesuai kebijakan retensi dan keamanan informasi.	✓		
	14	Informasi diklasifikasikan berdasarkan tingkat kepentingan dan dilindungi dengan kebijakan keamanan yang sesuai.	✓		
	15	Proses dan alat audit digunakan untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan regulasi.	✓		
Level 4	1	Pengadilan Negeri Singaraja secara berkala memantau kontrol bisnis untuk mengidentifikasi area yang dapat ditingkatkan.	✓		
	2	Hak akses diperiksa secara rutin untuk memastikan hanya staf yang berwenang yang memiliki akses ke informasi tertentu.	✓		
	3	Kesalahan dalam proses bisnis dilaporkan dan dianalisis untuk menemukan pola dan penyebab utama.	✓		
	4	Setiap pelanggaran dan penyimpangan dalam proses bisnis didokumentasikan dan dilaporkan kepada manajemen serta pemangku kepentingan terkait.	✓	.	
Level 5	1	Pengadilan Negeri Singaraja secara aktif mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas kontrol dalam proses bisnis.	✓		

Singaraja, 10 Maret 2025


Mareta Pramesti Ayuningtyas, A.Md.

Lampiran 12. Hasil Kuesioner 7

Nama Responden : Ketut Sumawan, S.H.

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

1. Domain EDM02 Ensured Benefits Delivery (Memastikan Nilai (value))

Level Capability	No	Aktifitas	Yes	No	Keterangan
Level 0	1	Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa organisasi telah menerapkan proses memastikan nilai (value)	✓		
Level 1	1	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki dokumen perencanaan investasi TI yang mendukung strategi organisasi.	✓		
	2	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki pemahaman yang jelas tentang bagaimana investasi TI mendukung tujuan bisnis dan strategis organisasi.	✓		
	3	Pengadilan Negeri Singaraja mengidentifikasi dan mendokumentasikan berbagai aset dan sumber daya TI yang diperlukan untuk mendukung strategi organisasi.	✓		
	4	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki proses persetujuan formal untuk rencana investasi TI yang mempertimbangkan hubungan dengan strategi organisasi.	✓		
	5	Pengadilan Negeri Singaraja memahami dan mengelola isu-isu strategis terkait TI serta dampaknya terhadap organisasi.	✓		
	6	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki mekanisme pelaporan dan komunikasi yang jelas terkait investasi TI dan kriteria evaluasinya.	✓		



Level 2	1	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki dokumen perencanaan investasi TI yang mendukung strategi organisasi.	✓		
	2	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki pemahaman yang jelas tentang bagaimana investasi TI mendukung tujuan bisnis dan strategis organisasi.	✓		
	3	Pengadilan Negeri Singaraja mengidentifikasi dan mendokumentasikan berbagai aset dan sumber daya TI yang diperlukan untuk mendukung strategi organisasi.	✓		
	4	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki proses persetujuan formal untuk rencana investasi TI yang mempertimbangkan hubungan dengan strategi organisasi.	✓		
	5	Pengadilan Negeri Singaraja memahami dan mengelola isu-isu strategis terkait TI serta dampaknya terhadap organisasi.	✓		
	6	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki mekanisme pelaporan dan komunikasi yang jelas terkait investasi TI dan kriteria evaluasinya.	✓		
Level 3	1	Pengadilan Negeri Singaraja menetapkan investasi TI dengan mempertimbangkan keuntungan jangka pendek dan panjang, serta potensi risiko.	✓		
	2	Pengadilan Negeri Singaraja memahami prinsip-prinsip tata kelola TI yang diperlukan untuk mencapai nilai optimal bagi organisasi.	✓		
	3	Pengadilan Negeri Singaraja melakukan evaluasi berkala terhadap peluang inovasi teknologi dan dampaknya terhadap proses bisnis.	✓		



	4	Pengadilan Negeri Singaraja melakukan evaluasi berkala terhadap peluang inovasi teknologi dan dampaknya terhadap proses bisnis.	✓		
	5	Pengadilan Negeri Singaraja menerapkan proses evaluasi bertahap dalam setiap keputusan investasi TI untuk mengelola risiko secara optimal.	✓		
	6	Pengadilan Negeri Singaraja mendorong pemanfaatan TI untuk meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing organisasi.	✓		
	7	Pengadilan Negeri Singaraja memastikan adanya distribusi tanggung jawab yang jelas dalam pengelolaan investasi TI dan layanan bisnis.	✓		
	8	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki mekanisme penyesuaian rencana investasi berdasarkan perubahan kebutuhan organisasi.	✓		
	9	Pengadilan Negeri Singaraja secara aktif mengevaluasi inovasi teknologi dan potensi peningkatan operasional untuk meningkatkan nilai bisnis.	✓		
Level 4	1	Pengadilan Negeri Singaraja melakukan evaluasi terhadap efektivitas strategi TI dalam pencapaian nilai organisasi.	✓		
	2	Pengadilan Negeri Singaraja mempertimbangkan dampak investasi TI sejalan dengan nilai organisasi dan manajemen keuangan.	✓		
	3	Pengadilan Negeri Singaraja mempertimbangkan bagaimana investasi TI mendukung nilai organisasi dan manajemen keuangan.	✓		



	4	Pengadilan Negeri Singaraja memastikan investasi TI sejalan dengan tujuan strategis, efektivitas, efisiensi, serta risiko organisasi.	✓		
	5.	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki mekanisme untuk mengukur dan mengawasi pencapaian manfaat dari investasi TI.	✓		
	6	Pengadilan Negeri Singaraja menetapkan dan meninjau tujuan kinerja, metrik, serta tolok ukur yang mencakup indikator awal dan akhir untuk mengukur keseimbangan aspek finansial dan nonfinansial dalam evaluasi TI bersama dengan pihak terkait.	✓		
	7	Pengadilan Negeri Singaraja mengumpulkan data kinerja TI untuk mendukung pengambilan keputusan strategis.	✓		
	8	Pengadilan Negeri Singaraja memastikan adanya laporan berkala terkait kinerja TI dan pencapaian tujuan organisasi.	✓		
Level 5	1	Pengadilan Negeri Singaraja memastikan tindakan korektif dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kinerja TI.	✓		
	2	Pengadilan Negeri Singaraja memastikan manajemen bertindak secara proaktif dalam mengoptimalkan manfaat investasi TI.	✓		

2. Domain APO02 Managed Strategy (Strategi yang Dikelola)

Level Capability	No	Aktifitas	Yes	No	Keterangan
Level 0	1	Pengadilan Negeri Singaraja belum memiliki bukti yang cukup terkait pencapaian tujuan proses dalam pengelolaan strategi TI.	✓		



Level 1	1	Pengadilan Negeri Singaraja memahami dan memantau faktor eksternal yang dapat memengaruhi strategi dan operasional TI.	✓		
	2	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki pemahaman yang jelas tentang cara kerja organisasi saat ini, termasuk operasional, teknologi, dan tantangan yang dihadapi.	✓		
	3	Pengadilan Negeri Singaraja telah mendefinisikan arah strategis dan tingkat ambisi digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan.	✓		
	4	Pengadilan Negeri Singaraja telah mengidentifikasi pemangku kepentingan utama dan memahami kebutuhan mereka terkait strategi TI.	✓		
	5	Pengadilan Negeri Singaraja telah mengidentifikasi kemampuan dan layanan TI yang dimiliki serta menilai layanan eksternal yang digunakan.	✓		
	6	Pengadilan Negeri Singaraja telah menyusun ringkasan strategi organisasi dan menentukan aspek TI yang mendukung pencapaian tujuan strategis.	✓		
	7	Pengadilan Negeri Singaraja telah mendefinisikan tujuan dan sasaran TI serta memastikan kontribusinya terhadap pencapaian strategi organisasi.	✓		
Level 2	1	Pengadilan Negeri Singaraja memahami dan memantau faktor eksternal yang dapat memengaruhi strategi dan operasional TI.	✓		
	2	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki pemahaman yang jelas tentang cara kerja organisasi saat ini, termasuk operasional, teknologi, dan tantangan yang dihadapi.	✓		



	3	Pengadilan Negeri Singaraja telah mendefinisikan arah strategis dan tingkat ambisi digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan.	✓		
	4	Pengadilan Negeri Singaraja telah mengidentifikasi pemangku kepentingan utama dan memahami kebutuhan mereka terkait strategi TI.	✓		
	5	Pengadilan Negeri Singaraja telah mengidentifikasi kemampuan dan layanan TI yang dimiliki serta menilai layanan eksternal yang digunakan.	✓		
	6	Pengadilan Negeri Singaraja telah menyusun ringkasan strategi organisasi dan menentukan aspek TI yang mendukung pencapaian tujuan strategis.	✓		
	7	Pengadilan Negeri Singaraja telah mendefinisikan tujuan dan sasaran TI serta memastikan kontribusinya terhadap pencapaian strategi organisasi.	✓		
Level 3	1	Pengadilan telah melakukan penilaian terhadap kematangan digital di berbagai aspek, termasuk kesiapan kepemimpinan dalam memanfaatkan teknologi.	✓		
	2	Pengadilan telah mengidentifikasi layanan dan produk I&T yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan strategisnya.	✓		
	3	Pengadilan telah menentukan metode pengembangan yang sesuai untuk mendukung pencapaian tujuan I&T.	✓		



4	Pengadilan telah mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan.	✓		
5	Pengadilan telah mendefinisikan perubahan utama dalam arsitektur perusahaan untuk mendukung strategi I&T.	✓		
6	Pengadilan telah melakukan analisis dampak perubahan I&T terhadap bisnis dan model operasional.	✓		
7	Pengadilan telah mengidentifikasi inisiatif strategis untuk menjembatani kesenjangan antara kondisi saat ini dan target.	✓		
8	Pengadilan memiliki peta jalan yang jelas untuk implementasi strategi I&T.	✓		
9	Pengadilan telah mempertimbangkan peran mitra eksternal dalam mendukung implementasi strategi I&T.	✓		
10	Pengadilan telah mengelompokkan inisiatif strategis menjadi program atau proyek dengan tujuan yang jelas.	✓		
11	Pengadilan telah mengidentifikasi prioritas proyek berdasarkan dampak dan ketergantungan antar proyek.	✓		
12	Pengadilan telah menyusun peta jalan final untuk pelaksanaan strategi I&T.	✓		
13	Pengadilan telah menetapkan pemimpin transformasi digital untuk memastikan keberhasilan strategi I&T.	✓		
14	Pengadilan telah mendapatkan dukungan dari pemangku kepentingan terhadap strategi I&T.	✓		
15	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki strategi komunikasi yang jelas untuk menyampaikan rencana pengendalian proses bisnis	✓		



		menggunakan media dan teknologi yang tersedia.	✓		
	16	Pengadilan telah menyiapkan strategi komunikasi untuk menyampaikan rencana implementasi strategi I&T.	✓		
	17	Pengadilan telah membangun jaringan pendukung untuk implementasi strategi I&T.	✓		
Level 4	1	Pengadilan telah mengevaluasi manfaat potensial dan risiko jika perubahan tidak dilakukan.	✓		
	2	Pengadilan telah menyusun pernyataan nilai yang jelas mengenai manfaat lingkungan sasaran.	✓		
	3	Pengadilan telah mengidentifikasi metrik dan target yang relevan untuk mengukur keberhasilan implementasi strategi I&T.	✓		
	4	Pengadilan telah mengintegrasikan umpan balik dari pemangku kepentingan untuk menyempurnakan rencana komunikasi.	✓		
Level 5	1	Tidak ada instrumen pernyataan yang relevan pada level ini.	✓		

3. Domain MEA01 Monitor, Evaluate, and Assess Performance and Conformance (Penentuan Kinerja dan Kesesuaian Terkelola)

Level Capability	No	Aktifitas	Yes	No	Keterangan
Level 0	1	Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa organisasi telah menerapkan proses pemantauan dan evaluasi kinerja serta kesesuaian.	✓		
	1	Pengadilan telah mengidentifikasi pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses pemantauan dan evaluasi kinerja serta kesesuaian.	✓		
	2	Pengadilan telah melibatkan stakeholder dalam penyampaian tujuan dan persyaratan pemantauan	✓		



	kinerja serta kesesuaian dengan menggunakan terminologi yang jelas dan umum digunakan.	✓		
3	Pengadilan telah menyelaraskan metode pemantauan dan evaluasi dengan pendekatan yang digunakan dalam organisasi serta telah menetapkan alat bantu yang digunakan untuk pengumpulan dan pelaporan data.	✓		
4	Pengadilan telah menetapkan jenis tujuan, ukuran kinerja, serta sistem penyimpanan data yang mendukung proses pemantauan dan evaluasi.	✓		
5	Pengadilan telah mengalokasikan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung proses pemantauan dan evaluasi dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi.	✓		
6	Pengadilan telah menetapkan tujuan dan ukuran kinerja serta melakukan tinjauan berkala bersama stakeholder untuk memastikan kelayakan target.	✓		
7	Pengadilan telah memastikan bahwa tujuan dan ukuran kinerja telah sesuai dengan prinsip SMART.	✓		
8	Pengadilan telah menginformasikan kepada stakeholder utama mengenai perubahan yang diusulkan terhadap target dan toleransi kinerja.	✓		
9	Pengadilan telah mendistribusikan informasi perubahan target dan toleransi kinerja kepada pengguna terkait.	✓		
10	Pengadilan telah melakukan pengumpulan data kinerja secara terstruktur, termasuk melalui sistem otomatis jika memungkinkan.	✓		
11	Pengadilan telah mengevaluasi efisiensi dan kegunaan data yang dikumpulkan serta memastikan integritas data tersebut.	✓		



	12	Pengadilan telah mengelola data agregat untuk mendukung pengukuran kinerja secara menyeluruh.	✓		
	13	Pengadilan telah melakukan evaluasi terhadap respons manajemen serta opsi yang diusulkan dalam menangani penyimpangan kinerja.	✓		
	14	Pengadilan telah memastikan bahwa setiap tindakan korektif memiliki penanggung jawab yang jelas.	✓		
	15	Pengadilan telah melakukan pemantauan terhadap hasil dari tindakan korektif yang telah diimplementasikan.	✓		
	16	Pengadilan telah menyusun dan menyampaikan laporan hasil tindakan korektif kepada stakeholder terkait.	✓		
Level 2	1	Pengadilan telah mengidentifikasi pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses pemantauan dan evaluasi kinerja serta kesesuaian.	✓		
	2	Pengadilan telah melibatkan stakeholder dalam penyampaian tujuan dan persyaratan pemantauan kinerja serta kesesuaian dengan menggunakan terminologi yang jelas dan umum digunakan.	✓		
	3	Pengadilan telah menyelaraskan metode pemantauan dan evaluasi dengan pendekatan yang digunakan dalam organisasi serta telah menetapkan alat bantu yang digunakan untuk pengumpulan dan pelaporan data.	✓		
	4	Pengadilan telah menetapkan jenis tujuan, ukuran kinerja, serta sistem penyimpanan data yang mendukung proses pemantauan dan evaluasi.	✓		
	5	Pengadilan telah mengalokasikan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung proses pemantauan dan	✓		



	evaluasi dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi.	✓		
6	Pengadilan telah menetapkan tujuan dan ukuran kinerja serta melakukan tinjauan berkala bersama stakeholder untuk memastikan kelayakan target.	✓		
7	Pengadilan telah memastikan bahwa tujuan dan ukuran kinerja telah sesuai dengan prinsip SMART.	✓		
8	Pengadilan telah menginformasikan kepada stakeholder utama mengenai perubahan yang diusulkan terhadap target dan toleransi kinerja.	✓		
9	Pengadilan telah mendistribusikan informasi perubahan target dan toleransi kinerja kepada pengguna terkait.	✓		
10	Pengadilan telah melakukan pengumpulan data kinerja secara terstruktur, termasuk melalui sistem otomatis jika memungkinkan.	✓		
11	Pengadilan telah mengevaluasi efisiensi dan kegunaan data yang dikumpulkan serta memastikan integritas data tersebut.	✓		
12	Pengadilan telah mengelola data agregat untuk mendukung pengukuran kinerja secara menyeluruh.	✓		
13	Pengadilan telah melakukan evaluasi terhadap respons manajemen serta opsi yang diusulkan dalam menangani penyimpangan kinerja.	✓		
14	Pengadilan telah memastikan bahwa setiap tindakan korektif memiliki penanggung jawab yang jelas.	✓		
15	Pengadilan telah melakukan pemantauan terhadap hasil dari tindakan korektif yang telah diimplementasikan.	✓		



	16	Pengadilan telah menyusun dan menyampaikan laporan hasil tindakan korektif kepada stakeholder terkait.	✓		
Level 3	1	Pendekatan yang digunakan dalam pemantauan dan evaluasi kinerja di Pengadilan Negeri Singaraja telah divalidasi secara berkala, serta pemangku kepentingan, persyaratan, dan sumber daya yang baru atau berubah telah diidentifikasi	✓		
	2	Terdapat proses manajemen siklus hidup dan pengendalian perubahan yang telah disepakati di Pengadilan Negeri Singaraja untuk pemantauan dan pelaporan kinerja, termasuk perbaikan dalam pelaporan, metrik, pendekatan, baseline, dan benchmarking.	✓		
	3	Data agregat dalam sistem informasi Pengadilan Negeri Singaraja telah diselarskan dengan pendekatan dan tujuan pelaporan yang ditetapkan, untuk memastikan akurasi dan konsistensi dalam evaluasi kinerja.	✓		
	4	Laporan kinerja proses di Pengadilan Negeri Singaraja telah dirancang secara ringkas, mudah dipahami, dan disesuaikan dengan kebutuhan pimpinan serta pemangku kepentingan, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang efektif dan tepat waktu.	✓		
	5	Laporan kinerja di Pengadilan Negeri Singaraja telah didistribusikan kepada pemangku kepentingan yang relevan sesuai dengan kebijakan dan prosedur pelaporan yang berlaku.	✓		
Level 4	1	Pengadilan Negeri Singaraja telah menggunakan alat dan sistem yang sesuai untuk pemrosesan dan analisis data guna mendukung evaluasi kinerja secara akurat dan efektif.	✓		



	2	Penyebab penyimpangan terhadap target kinerja di Pengadilan Negeri Singaraja telah dianalisis, serta tindakan perbaikan telah ditetapkan dengan tanggung jawab yang jelas dan terdokumentasi dengan baik.	✓		
	3	Sasaran kinerja individu di Pengadilan Negeri Singaraja telah mengintegrasikan aspek kinerja dan kepatuhan, serta pencapaian target kinerja dikaitkan dengan sistem penghargaan organisasi.	✓		
	4	Hasil kinerja Pengadilan Negeri Singaraja telah dibandingkan dengan target internal serta, jika memungkinkan, dengan standar industri atau pengadilan lain sebagai tolok ukur eksternal.	✓		
	5.	Tren kinerja dan kepatuhan di Pengadilan Negeri Singaraja telah dianalisis secara berkala, serta tindakan yang sesuai telah diambil untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional.	✓		
Level 5	1	Pengadilan Negeri Singaraja secara berkala mengevaluasi sasaran dan metrik kinerja serta memberikan rekomendasi perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pemantauan dan evaluasi.	✓		

4. Domain DSS06 Managed Business Process Controls (Pengendalian Proses Bisnis Terkelola)

Level Capability	No	Aktifitas	Yes	No	Keterangan
Level 0	1	Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa organisasi telah menerapkan proses pengendalian proses bisnis yang terkelola	✓		
Level 1	1	Pengadilan Negeri Singaraja telah mengidentifikasi dan mendokumentasikan aktivitas	✓		



		pengendalian untuk memastikan proses bisnis utama sesuai dengan tujuan strategis, operasional, pelaporan, dan kepatuhan.	✓		
2		Pengadilan Negeri Singaraja menetapkan prioritas pengendalian berdasarkan risiko yang ada serta mengidentifikasi kontrol utama yang diperlukan.	✓		
3		Pengadilan Negeri Singaraja menetapkan pemilik tanggung jawab untuk setiap aktivitas pengendalian utama guna memastikan akuntabilitas.	✓		
4		Setiap transaksi di Pengadilan Negeri Singaraja diautentikasi dan diverifikasi untuk memastikan bahwa hanya individu yang berwenang yang dapat memulai transaksi.	✓		
5		Pengadilan Negeri Singaraja menerapkan pemisahan tugas antara inisiasi dan persetujuan transaksi untuk menghindari konflik kepentingan.	✓		
6		Setiap peran dalam Pengadilan Negeri Singaraja dialokasikan sesuai dengan deskripsi pekerjaan dan aktivitas proses bisnis yang telah ditetapkan.	✓		
7		Kewenangan persetujuan transaksi, batas transaksi, dan keputusan lainnya dalam Pengadilan Negeri Singaraja ditetapkan berdasarkan peran pekerjaan yang telah disetujui.	✓		
8.		Dalam aktivitas sensitif, Pengadilan Negeri Singaraja menetapkan peran yang berbeda untuk memastikan pemisahan tugas secara jelas.	✓		
9		Kesalahan, pengecualian, dan penyimpangan dalam proses bisnis di Pengadilan Negeri Singaraja ditinjau secara berkala.	✓		
10		Dokumen sumber dan transaksi yang mengalami kesalahan diperbaiki, disetujui kembali, dan	✓		



		dikirim ulang oleh Pengadilan Negeri Singaraja.	✓		
	11	Pengadilan Negeri Singaraja menyimpan bukti semua tindakan perbaikan yang telah dilakukan untuk memastikan akuntabilitas.	✓		
	12	Semua informasi sumber, bukti pendukung, dan catatan transaksi terdokumentasi dengan baik di Pengadilan Negeri Singaraja.	✓		
	13	Akses informasi di Pengadilan Negeri Singaraja dibatasi sesuai dengan klasifikasi dan tingkat kerahasiaan yang ditetapkan.	✓		
	14	Pengadilan Negeri Singaraja memberikan pelatihan dan sosialisasi mengenai penggunaan sistem dan informasi yang sesuai dengan kebijakan organisasi.	✓		
Level 2	1	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki dokumentasi aktivitas pengendalian yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan strategis, operasional, pelaporan, dan kepatuhan.	✓		
	2	Pengadilan Negeri Singaraja melakukan analisis risiko untuk menentukan prioritas aktivitas pengendalian dan mengidentifikasi kontrol utama yang diperlukan.	✓		
	3	Setiap aktivitas pengendalian utama memiliki penanggung jawab yang ditetapkan di Pengadilan Negeri Singaraja.	✓		
	4	Setiap transaksi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Singaraja diverifikasi untuk memastikan bahwa hanya pihak yang berwenang yang dapat memulainya.	✓		
	5	Pengadilan Negeri Singaraja menerapkan pemisahan tugas yang jelas antara pembuatan dan persetujuan transaksi.	✓		
	6	Peran dan tanggung jawab dalam proses bisnis dialokasikan berdasarkan deskripsi pekerjaan	✓		



		yang telah disetujui di Pengadilan Negeri Singaraja.	✓		
	7	Kewenangan persetujuan transaksi di Pengadilan Negeri Singaraja ditetapkan berdasarkan peran pekerjaan yang telah disetujui dan terstruktur dengan baik.	✓		
	8	Dalam aktivitas yang bersifat sensitif, Pengadilan Negeri Singaraja menetapkan pemisahan tugas secara jelas untuk menghindari potensi konflik kepentingan.	✓		
	9	Setiap kesalahan, pengecualian, dan penyimpangan dalam proses bisnis direview secara berkala di Pengadilan Negeri Singaraja.	✓		
	10	Dokumen sumber dan transaksi yang mengalami kesalahan diperbaiki, disetujui ulang, dan diserahkan kembali dengan prosedur yang jelas di Pengadilan Negeri Singaraja.	✓		
	11	Bukti tindakan perbaikan atas setiap penyimpangan dalam proses bisnis terdokumentasi dengan baik di Pengadilan Negeri Singaraja.	✓		
	12	Informasi sumber, bukti pendukung, dan catatan transaksi terdokumentasi dengan baik untuk memastikan akuntabilitas di Pengadilan Negeri Singaraja.	✓		
	13	Akses terhadap informasi dibatasi sesuai dengan klasifikasinya untuk menjaga kerahasiaan di Pengadilan Negeri Singaraja.	✓		
	14	Pelatihan dan sosialisasi mengenai penggunaan sistem dan informasi yang sesuai dengan kebijakan organisasi diberikan secara berkala di Pengadilan Negeri Singaraja.	✓		
Level 3	1	Pengadilan Negeri Singaraja telah menerapkan kontrol otomatis untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam proses bisnis.	✓		



		dan dilindungi dengan kebijakan keamanan yang sesuai.	✓		
	15	Proses dan alat audit digunakan untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan regulasi.	✓		
Level 4	1	Pengadilan Negeri Singaraja secara berkala memantau kontrol bisnis untuk mengidentifikasi area yang dapat ditingkatkan.	✓		
	2	Hak akses diperiksa secara rutin untuk memastikan hanya staf yang berwenang yang memiliki akses ke informasi tertentu.	✓		
	3	Kesalahan dalam proses bisnis dilaporkan dan dianalisis untuk menemukan pola dan penyebab utama.	✓		
	4	Setiap pelanggaran dan penyimpangan dalam proses bisnis didokumentasikan dan dilaporkan kepada manajemen serta pemangku kepentingan terkait.	✓		
Level 5	1	Pengadilan Negeri Singaraja secara aktif mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas kontrol dalam proses bisnis.	✓		

5. Domain BAI09 Managed Assets (Aset yang Dikelola)

Level Capability	No	Aktifitas	Yes	No	Catatan
Level 0	1	Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa organisasi telah menerapkan proses aset yang terkelola dengan baik	✓		
Level 1	1	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki daftar aset yang mencatat seluruh aset yang dimiliki beserta statusnya.	✓		
	2	Pengadilan Negeri Singaraja telah mengidentifikasi dan mematuhi semua peraturan hukum dan kontrak terkait pengelolaan aset.	✓		



		dan dilindungi dengan kebijakan keamanan yang sesuai.	✓		
	15	Proses dan alat audit digunakan untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan regulasi.	✓		
Level 4	1	Pengadilan Negeri Singaraja secara berkala memantau kontrol bisnis untuk mengidentifikasi area yang dapat ditingkatkan.	✓		
	2	Hak akses diperiksa secara rutin untuk memastikan hanya staf yang berwenang yang memiliki akses ke informasi tertentu.	✓		
	3	Kesalahan dalam proses bisnis dilaporkan dan dianalisis untuk menemukan pola dan penyebab utama.	✓		
	4	Setiap pelanggaran dan penyimpangan dalam proses bisnis didokumentasikan dan dilaporkan kepada manajemen serta pemangku kepentingan terkait.	✓		
Level 5	1	Pengadilan Negeri Singaraja secara aktif mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas kontrol dalam proses bisnis.	✓		

5. Domain BAI09 Managed Assets (Aset yang Dikelola)

Level Capability	No	Aktifitas	Yes	No	Catatan
Level 0	1	Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa organisasi telah menerapkan proses aset yang terkelola dengan baik	✓		
Level 1	1	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki daftar aset yang mencatat seluruh aset yang dimiliki beserta statusnya.	✓		
	2	Pengadilan Negeri Singaraja telah mengidentifikasi dan mematuhi semua peraturan hukum dan kontrak terkait pengelolaan aset.	✓		



	3	Pengadilan Negeri Singaraja melakukan pengecekan rutin untuk memastikan aset dalam kondisi layak dan siap digunakan sesuai dengan tujuannya.	✓		
	4	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki daftar aset kritis yang diperlukan untuk kelancaran layanan peradilan.	✓		
	5	Pengadilan Negeri Singaraja melakukan evaluasi berkala terhadap risiko kerusakan atau penggantian aset kritis.	✓		
	6	Pengadilan Negeri Singaraja menginformasikan kepada pengguna mengenai dampak dari pemeliharaan aset, seperti pembatasan penggunaan sementara.	✓		
	7	Pengadaan aset di Pengadilan Negeri Singaraja dilakukan berdasarkan permintaan yang telah disetujui dan mengikuti kebijakan yang berlaku.	✓		
	8.	Pengadilan Negeri Singaraja melakukan pencatatan, verifikasi, pengujian, dan pelabelan aset secara sistematis sebelum digunakan	✓		
	9	Proses pembayaran aset di Pengadilan Negeri Singaraja dilakukan sesuai dengan perjanjian kontrak dengan pemasok.	✓		
	10	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki dan memelihara daftar lengkap semua lisensi perangkat lunak yang telah dibeli, termasuk perjanjian lisensinya.	✓		
	Level 2	1	Pengadilan Negeri Singaraja memastikan daftar aset selalu diperbarui dan selaras dengan sistem manajemen perubahan dan konfigurasi.	✓	
		2	Pengadilan Negeri Singaraja memastikan semua aset dikelola sesuai dengan regulasi dan kontrak yang berlaku.	✓	



	3	Pengadilan Negeri Singaraja secara rutin melakukan pemeriksaan aset untuk memastikan bahwa aset tersebut masih layak digunakan sesuai dengan fungsinya.	✓		
	4	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki daftar aset yang sangat penting dalam mendukung operasional peradilan.	✓		
	5	Pengadilan Negeri Singaraja melakukan evaluasi risiko untuk menentukan kebutuhan penggantian aset yang sudah tidak layak.	✓		
	6	Pengadilan Negeri Singaraja selalu memberitahukan kepada pengguna mengenai dampak dari perawatan atau pemeliharaan aset.	✓		
	7	Pengadilan Negeri Singaraja melakukan pengadaan aset dengan mengikuti prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan.	✓		
	8	Pengadilan Negeri Singaraja memastikan bahwa setiap aset yang diperoleh telah melalui proses penerimaan, verifikasi, pengujian, pencatatan, serta diberikan label fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	✓		
	9	Pengadilan Negeri Singaraja menyelesaikan pembayaran kepada pemasok sesuai dengan ketentuan dalam kontrak yang berlaku.	✓		
	10	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki pencatatan lengkap mengenai lisensi perangkat lunak dan perjanjiannya.	✓		
Level 3	1	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki sistem pencatatan akuntansi yang mencakup seluruh aset yang dimiliki dan digunakan.	✓		
	2	Pengadilan Negeri Singaraja merencanakan jadwal downtime dan pemeliharaan aset secara terstruktur untuk mengurangi dampak terhadap layanan peradilan.	✓		



3	Pengadilan Negeri Singaraja melakukan pemeliharaan rutin terhadap aset kritis dan menyediakan alternatif jika terjadi kegagalan.	✓		
4	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki rencana perawatan preventif untuk perangkat keras berdasarkan rekomendasi vendor dan analisis risiko.	✓		
5	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki kontrak layanan pemeliharaan dengan pihak ketiga yang mencakup aspek keamanan dan privasi.	✓		
6	Pengadilan Negeri Singaraja membatasi akses jarak jauh hanya untuk kebutuhan pemeliharaan dan diagnosis tertentu.	✓		
7	Pengadilan Negeri Singaraja menerapkan standar implementasi aset dengan proses pengujian penerimaan sebelum digunakan.	✓		
8	Setiap aset yang dialokasikan di Pengadilan Negeri Singaraja harus mendapatkan persetujuan dan pengguna bertanggung jawab atas penggunaannya.	✓		
9	Pengadilan Negeri Singaraja melakukan alokasi ulang aset jika tidak lagi digunakan untuk mengoptimalkan pemanfaatannya.	✓		
10	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki dokumentasi terkait penghapusan atau penghentian aset sesuai peraturan yang berlaku.	✓		
11	Pengadilan Negeri Singaraja memastikan pembuangan aset dilakukan dengan aman untuk mencegah kebocoran data dan dampak lingkungan.	✓		
12	Pengadilan Negeri Singaraja melakukan evaluasi berkala terhadap aset untuk memastikan	✓		



		kesesuaiannya dengan kebutuhan operasional.	✓		
	13	Pengadilan Negeri Singaraja secara berkala mengaudit perangkat lunak berlisensi untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi.	✓		
Level 4	1	Pengadilan Negeri Singaraja melakukan pemeriksaan berkala terhadap aset yang dimiliki untuk memastikan keberadaannya.	✓		
	2	Pengadilan Negeri Singaraja mengevaluasi apakah aset masih memberikan manfaat dan memperkirakan masa manfaatnya.	✓		
	3	Pengadilan Negeri Singaraja melakukan pemantauan rutin terhadap aset penting dan mengambil tindakan perbaikan jika diperlukan.	✓		
	4	Pengadilan Negeri Singaraja memastikan pembuangan aset dilakukan sesuai dengan regulasi dan mempertimbangkan dampak lingkungan.	✓		
	5	Pengadilan Negeri Singaraja melakukan analisis biaya pemeliharaan dan mempertimbangkan opsi yang lebih hemat.	✓		
	6	Pengadilan Negeri Singaraja melakukan audit perangkat lunak secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap lisensi.	✓		
	7	Pengadilan Negeri Singaraja mengevaluasi kebutuhan terhadap lisensi yang tidak digunakan untuk efisiensi biaya.	✓		
	8	Pengadilan Negeri Singaraja memastikan kepatuhan terhadap lisensi dengan mencopot perangkat lunak yang tidak diperlukan atau membeli lisensi tambahan jika dibutuhkan.	✓		
Level 5	1	Pengadilan Negeri Singaraja melakukan evaluasi jaminan aset	✓		



		dan mempertimbangkan strategi yang memberikan nilai terbaik.	✓		
2		Pengadilan Negeri Singaraja mengevaluasi aset yang kurang dimanfaatkan untuk optimalisasi biaya dan operasional.	✓		
3		Pengadilan Negeri Singaraja melakukan analisis terhadap aset untuk mencari peluang standarisasi guna efisiensi biaya.	✓		
4		Pengadilan Negeri Singaraja mengevaluasi penggunaan teknologi baru atau strategi alternatif untuk efisiensi operasional.	✓		
5		Pengadilan Negeri Singaraja meninjau apakah peningkatan produk atau lisensi dapat memberikan manfaat yang lebih besar.	✓		

Singaraja, 3 - 9 - 2015


Ketut Sumawan, S.H.



Lampiran 13. Hasil Kuesioner 8

Nama Responden : Ni Nyoman Triwahyuningsih, A.Md.Kom., S.Ak.

Jabatan : Penata Layanan Operasional bagian umum

1. Domain BAI09 Managed Assets (Aset yang Dikelola)

Level Capability	No	Aktifitas	Yes	No	Catatan
Level 0	1	Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa organisasi telah menerapkan proses aset yang terkelola dengan baik			
Level 1	1	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki daftar aset yang mencatat seluruh aset yang dimiliki beserta statusnya.	✓		
	2	Pengadilan Negeri Singaraja telah mengidentifikasi dan mematuhi semua peraturan hukum dan kontrak terkait pengelolaan aset.	✓		
	3	Pengadilan Negeri Singaraja melakukan pengecekan rutin untuk memastikan aset dalam kondisi layak dan siap digunakan sesuai dengan tujuannya.	✓		
	4	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki daftar aset kritis yang diperlukan untuk kelancaran layanan peradilan.	✓		
	5	Pengadilan Negeri Singaraja melakukan evaluasi berkala terhadap risiko kerusakan atau penggantian aset kritis.	✓		
	6	Pengadilan Negeri Singaraja menginformasikan kepada pengguna mengenai dampak dari pemeliharaan aset, seperti pembatasan penggunaan sementara.	✓		
	7	Pengadaan aset di Pengadilan Negeri Singaraja dilakukan berdasarkan permintaan yang telah disetujui dan mengikuti kebijakan yang berlaku.	✓		
	8	Pengadilan Negeri Singaraja melakukan pencatatan, verifikasi,	✓		



		pengujian, dan pelabelan aset secara sistematis sebelum digunakan			
	9	Proses pembayaran aset di Pengadilan Negeri Singaraja dilakukan sesuai dengan perjanjian kontrak dengan pemasok.	✓		
	10	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki dan memelihara daftar lengkap semua lisensi perangkat lunak yang telah dibeli, termasuk perjanjian lisensinya.	✓		
Level 2	1	Pengadilan Negeri Singaraja memastikan daftar aset selalu diperbarui dan selaras dengan sistem manajemen perubahan dan konfigurasi.	✓		
	2	Pengadilan Negeri Singaraja memastikan semua aset dikelola sesuai dengan regulasi dan kontrak yang berlaku.	✓		
	3	Pengadilan Negeri Singaraja secara rutin melakukan pemeriksaan aset untuk memastikan bahwa aset tersebut masih layak digunakan sesuai dengan fungsinya.	✓		
	4	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki daftar aset yang sangat penting dalam mendukung operasional peradilan.	✓		
	5	Pengadilan Negeri Singaraja melakukan evaluasi risiko untuk menentukan kebutuhan penggantian aset yang sudah tidak layak.	✓		
	6	Pengadilan Negeri Singaraja selalu memberitahukan kepada pengguna mengenai dampak dari perawatan atau pemeliharaan aset.	✓		
	7	Pengadilan Negeri Singaraja melakukan pengadaan aset dengan mengikuti prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan.	✓		
	8	Pengadilan Negeri Singaraja memastikan bahwa setiap aset yang diperoleh telah melalui proses penerimaan, verifikasi, pengujian, pencatatan, serta diberikan label	✓		



		fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.			
	9	Pengadilan Negeri Singaraja menyelesaikan pembayaran kepada pemasok sesuai dengan ketentuan dalam kontrak yang berlaku.	✓		
	10	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki pencatatan lengkap mengenai lisensi perangkat lunak dan perjanjiannya.	✓		
Level 3	1	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki sistem pencatatan akuntansi yang mencakup seluruh aset yang dimiliki dan digunakan.	✓		
	2	Pengadilan Negeri Singaraja merencanakan jadwal downtime dan pemeliharaan aset secara terstruktur untuk mengurangi dampak terhadap layanan peradilan.	✓		
	3	Pengadilan Negeri Singaraja melakukan pemeliharaan rutin terhadap aset kritis dan menyediakan alternatif jika terjadi kegagalan.	✓		
	4	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki rencana perawatan preventif untuk perangkat keras berdasarkan rekomendasi vendor dan analisis risiko.	✓		
	5	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki kontrak layanan pemeliharaan dengan pihak ketiga yang mencakup aspek keamanan dan privasi.	✓		
	6	Pengadilan Negeri Singaraja membatasi akses jarak jauh hanya untuk kebutuhan pemeliharaan dan diagnosis tertentu.	✓		
	7	Pengadilan Negeri Singaraja menerapkan standar implementasi aset dengan proses pengujian penerimaan sebelum digunakan.	✓		



	8	Setiap aset yang dialokasikan di Pengadilan Negeri Singaraja harus mendapatkan persetujuan dan pengguna bertanggung jawab atas penggunaannya.	✓		
	9	Pengadilan Negeri Singaraja melakukan alokasi ulang aset jika tidak lagi digunakan untuk mengoptimalkan pemanfaatannya.	✓		
	10	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki dokumentasi terkait penghapusan atau penghentian aset sesuai peraturan yang berlaku.	✓		
	11	Pengadilan Negeri Singaraja memastikan pembuangan aset dilakukan dengan aman untuk mencegah kebocoran data dan dampak lingkungan.	✓		
	12	Pengadilan Negeri Singaraja melakukan evaluasi berkala terhadap aset untuk memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan operasional.	✓		
	13	Pengadilan Negeri Singaraja secara berkala mengaudit perangkat lunak berlisensi untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi.	✓		
Level 4	1	Pengadilan Negeri Singaraja melakukan pemeriksaan berkala terhadap aset yang dimiliki untuk memastikan keberadaannya.	✓		
	2	Pengadilan Negeri Singaraja mengevaluasi apakah aset masih memberikan manfaat dan memperkirakan masa manfaatnya.	✓		
	3	Pengadilan Negeri Singaraja melakukan pemantauan rutin terhadap aset penting dan mengambil tindakan perbaikan jika diperlukan.	✓		
	4	Pengadilan Negeri Singaraja memastikan pembuangan aset dilakukan sesuai dengan regulasi dan mempertimbangkan dampak lingkungan.	✓		



	5.	Pengadilan Negeri Singaraja melakukan analisis biaya pemeliharaan dan mempertimbangkan opsi yang lebih hemat.	✓		
	6	Pengadilan Negeri Singaraja melakukan audit perangkat lunak secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap lisensi.	✓		
	7	Pengadilan Negeri Singaraja mengevaluasi kebutuhan terhadap lisensi yang tidak digunakan untuk efisiensi biaya.	✓		
	8	Pengadilan Negeri Singaraja memastikan kepatuhan terhadap lisensi dengan mencopot perangkat lunak yang tidak diperlukan atau membeli lisensi tambahan jika dibutuhkan.	✓		
Level 5	1	Pengadilan Negeri Singaraja melakukan evaluasi jaminan aset dan mempertimbangkan strategi yang memberikan nilai terbaik.	✓		
	2	Pengadilan Negeri Singaraja mengevaluasi aset yang kurang dimanfaatkan untuk optimalisasi biaya dan operasional.	✓		
	3	Pengadilan Negeri Singaraja melakukan analisis terhadap aset untuk mencari peluang standarisasi guna efisiensi biaya.	✓		
	4	Pengadilan Negeri Singaraja mengevaluasi penggunaan teknologi baru atau strategi alternatif untuk efisiensi operasional.	✓		
	5	Pengadilan Negeri Singaraja meninjau apakah peningkatan produk atau lisensi dapat memberikan manfaat yang lebih besar.	✓		



2. Domain MEA01 Monitor, Evaluate, and Assess Performance and Conformance
(Penentuan Kinerja dan Kesesuaian Terkelola)

Level Capability	No	Aktifitas	Yes	No	Keterangan
Level 0	1	Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa organisasi telah menerapkan proses pemantauan dan evaluasi kinerja serta kesesuaian.			
Level 1	1	Pengadilan telah mengidentifikasi pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses pemantauan dan evaluasi kinerja serta kesesuaian.	✓		
	2	Pengadilan telah melibatkan stakeholder dalam penyampaian tujuan dan persyaratan pemantauan kinerja serta kesesuaian dengan menggunakan terminologi yang jelas dan umum digunakan.	✓		
	3	Pengadilan telah menyelaraskan metode pemantauan dan evaluasi dengan pendekatan yang digunakan dalam organisasi serta telah menetapkan alat bantu yang digunakan untuk pengumpulan dan pelaporan data.	✓		
	4	Pengadilan telah menetapkan jenis tujuan, ukuran kinerja, serta sistem penyimpanan data yang mendukung proses pemantauan dan evaluasi.	✓		
	5	Pengadilan telah mengalokasikan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung proses pemantauan dan evaluasi dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi.	✓		
	6	Pengadilan telah menetapkan tujuan dan ukuran kinerja serta melakukan tinjauan berkala bersama stakeholder untuk memastikan kelayakan target.	✓		
	7	Pengadilan telah memastikan bahwa tujuan dan ukuran kinerja telah sesuai dengan prinsip SMART.	✓		



	8.	Pengadilan telah menginformasikan kepada stakeholder utama mengenai perubahan yang diusulkan terhadap target dan toleransi kinerja.	✓		
	9	Pengadilan telah mendistribusikan informasi perubahan target dan toleransi kinerja kepada pengguna terkait.	✓		
	10	Pengadilan telah melakukan pengumpulan data kinerja secara terstruktur, termasuk melalui sistem otomatis jika memungkinkan.	✓		
	11	Pengadilan telah mengevaluasi efisiensi dan kegunaan data yang dikumpulkan serta memastikan integritas data tersebut.	✓		
	12	Pengadilan telah mengelola data agregat untuk mendukung pengukuran kinerja secara menyeluruh.	✓		
	13	Pengadilan telah melakukan evaluasi terhadap respons manajemen serta opsi yang diusulkan dalam menangani penyimpangan kinerja.	✓		
	14	Pengadilan telah memastikan bahwa setiap tindakan korektif memiliki penanggung jawab yang jelas.	✓		
	15	Pengadilan telah melakukan pemantauan terhadap hasil dari tindakan korektif yang telah diimplementasikan.	✓		
	16	Pengadilan telah menyusun dan menyampaikan laporan hasil tindakan korektif kepada stakeholder terkait.	✓		
Level 2	1	Pengadilan telah mengidentifikasi pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses pemantauan dan evaluasi kinerja serta kesesuaian.	✓		
	2	Pengadilan telah melibatkan stakeholder dalam penyampaian tujuan dan persyaratan pemantauan kinerja serta kesesuaian dengan	✓		



	menggunakan terminologi yang jelas dan umum digunakan.			
3	Pengadilan telah menyelaraskan metode pemantauan dan evaluasi dengan pendekatan yang digunakan dalam organisasi serta telah menetapkan alat bantu yang digunakan untuk pengumpulan dan pelaporan data.	✓		
4	Pengadilan telah menetapkan jenis tujuan, ukuran kinerja, serta sistem penyimpanan data yang mendukung proses pemantauan dan evaluasi.	✓		
5	Pengadilan telah mengalokasikan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung proses pemantauan dan evaluasi dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi.	✓		
6	Pengadilan telah menetapkan tujuan dan ukuran kinerja serta melakukan tinjauan berkala bersama stakeholder untuk memastikan kelayakan target.	✓		
7	Pengadilan telah memastikan bahwa tujuan dan ukuran kinerja telah sesuai dengan prinsip SMART.	✓		
8	Pengadilan telah menginformasikan kepada stakeholder utama mengenai perubahan yang diusulkan terhadap target dan toleransi kinerja.	✓		
9	Pengadilan telah mendistribusikan informasi perubahan target dan toleransi kinerja kepada pengguna terkait.	✓		
10	Pengadilan telah melakukan pengumpulan data kinerja secara terstruktur, termasuk melalui sistem otomatis jika memungkinkan.	✓		
11	Pengadilan telah mengevaluasi efisiensi dan kegunaan data yang dikumpulkan serta memastikan integritas data tersebut.	✓		
12	Pengadilan telah mengelola data agregat untuk mendukung	✓		



		pengukuran kinerja secara menyeluruh.			
	13	Pengadilan telah melakukan evaluasi terhadap respons manajemen serta opsi yang diusulkan dalam menangani penyimpangan kinerja.	✓		
	14	Pengadilan telah memastikan bahwa setiap tindakan korektif memiliki penanggung jawab yang jelas.	✓		
	15	Pengadilan telah melakukan pemantauan terhadap hasil dari tindakan korektif yang telah diimplementasikan.	✓		
	16	Pengadilan telah menyusun dan menyampaikan laporan hasil tindakan korektif kepada stakeholder terkait.	✓		
Level 3	1	Pendekatan yang digunakan dalam pemantauan dan evaluasi kinerja di Pengadilan Negeri Singaraja telah divalidasi secara berkala, serta pemangku kepentingan, persyaratan, dan sumber daya yang baru atau berubah telah diidentifikasi	✓		
	2	Terdapat proses manajemen siklus hidup dan pengendalian perubahan yang telah disepakati di Pengadilan Negeri Singaraja untuk pemantauan dan pelaporan kinerja, termasuk perbaikan dalam pelaporan, metrik, pendekatan, baseline, dan benchmarking.	✓		
	3	Data agregat dalam sistem informasi Pengadilan Negeri Singaraja telah diselaraskan dengan pendekatan dan tujuan pelaporan yang ditetapkan, untuk memastikan akurasi dan konsistensi dalam evaluasi kinerja.	✓		
	4	Laporan kinerja proses di Pengadilan Negeri Singaraja telah dirancang secara ringkas, mudah dipahami, dan disesuaikan dengan	✓		



		kebutuhan pimpinan serta pemangku kepentingan, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang efektif dan tepat waktu.			
	5	Laporan kinerja di Pengadilan Negeri Singaraja telah didistribusikan kepada pemangku kepentingan yang relevan sesuai dengan kebijakan dan prosedur pelaporan yang berlaku.	✓		
Level 4	1	Pengadilan Negeri Singaraja telah menggunakan alat dan sistem yang sesuai untuk pemrosesan dan analisis data guna mendukung evaluasi kinerja secara akurat dan efektif.	✓		
	2	Penyebab penyimpangan terhadap target kinerja di Pengadilan Negeri Singaraja telah dianalisis, serta tindakan perbaikan telah ditetapkan dengan tanggung jawab yang jelas dan terdokumentasi dengan baik.	✓		
	3	Sasaran kinerja individu di Pengadilan Negeri Singaraja telah mengintegrasikan aspek kinerja dan kepatuhan, serta pencapaian target kinerja dikaitkan dengan sistem penghargaan organisasi.	✓		
	4	Hasil kinerja Pengadilan Negeri Singaraja telah dibandingkan dengan target internal serta, jika memungkinkan, dengan standar industri atau pengadilan lain sebagai tolok ukur eksternal.	✓		
	5.	Tren kinerja dan kepatuhan di Pengadilan Negeri Singaraja telah dianalisis secara berkala, serta tindakan yang sesuai telah diambil untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional.	✓		
Level 5	1	Pengadilan Negeri Singaraja secara berkala mengevaluasi sasaran dan metrik kinerja serta memberikan rekomendasi perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan	✓		

	efektivitas pemantauan dan evaluasi.			
--	--------------------------------------	--	--	--

Singaraja, 28 Februari 2025

WZM

Ni Nyoman Triwahyuningsih, A.Md.Kom, SAK

Lampiran 14. Hasil Kuesioner 9

Nama Responden : Titik Kurniyati, A.Md.

Jabatan : Pengelola Penanganan Perkara

1. Domain MEA01 Monitor, Evaluate, and Assess Performance and Conformance (Penentuan Kinerja dan Kesesuaian Terkelola)

Level Capability	No	Aktifitas	Yes	No	Keterangan
Level 0	1	Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa organisasi telah menerapkan proses pemantauan dan evaluasi kinerja serta kesesuaian.			
Level 1	1	Pengadilan telah mengidentifikasi pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses pemantauan dan evaluasi kinerja serta kesesuaian.	✓		
	2	Pengadilan telah melibatkan stakeholder dalam penyampaian tujuan dan persyaratan pemantauan kinerja serta kesesuaian dengan menggunakan terminologi yang jelas dan umum digunakan.	✓		
	3	Pengadilan telah menyelaraskan metode pemantauan dan evaluasi dengan pendekatan yang digunakan dalam organisasi serta telah menetapkan alat bantu yang digunakan untuk pengumpulan dan pelaporan data.	✓		
	4	Pengadilan telah menetapkan jenis tujuan, ukuran kinerja, serta sistem penyimpanan data yang mendukung proses pemantauan dan evaluasi.	✓		
	5	Pengadilan telah mengalokasikan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung proses pemantauan dan evaluasi dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi.	✓		
	6	Pengadilan telah menetapkan tujuan dan ukuran kinerja serta melakukan tinjauan berkala bersama	✓		

	stakeholder untuk memastikan kelayakan target.			
7	Pengadilan telah memastikan bahwa tujuan dan ukuran kinerja telah sesuai dengan prinsip SMART.	✓	✗	
8.	Pengadilan telah menginformasikan kepada stakeholder utama mengenai perubahan yang diusulkan terhadap target dan toleransi kinerja.	✓		
9	Pengadilan telah mendistribusikan informasi perubahan target dan toleransi kinerja kepada pengguna terkait.	✓		
10	Pengadilan telah melakukan pengumpulan data kinerja secara terstruktur, termasuk melalui sistem otomatis jika memungkinkan.	✓		
11	Pengadilan telah mengevaluasi efisiensi dan kegunaan data yang dikumpulkan serta memastikan integritas data tersebut.	✓		
12	Pengadilan telah mengelola data agregat untuk mendukung pengukuran kinerja secara menyeluruh.	✓		
13	Pengadilan telah melakukan evaluasi terhadap respons manajemen serta opsi yang diusulkan dalam menangani penyimpangan kinerja.	✓		
14	Pengadilan telah memastikan bahwa setiap tindakan korektif memiliki penanggung jawab yang jelas.	✓		
15	Pengadilan telah melakukan pemantauan terhadap hasil dari tindakan korektif yang telah diimplementasikan.	✓		
16	Pengadilan telah menyusun dan menyampaikan laporan hasil tindakan korektif kepada stakeholder terkait.	✓		



Level 2	1	Pengadilan telah mengidentifikasi pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses pemantauan dan evaluasi kinerja serta kesesuaian.	✓		
	2	Pengadilan telah melibatkan stakeholder dalam penyampaian tujuan dan persyaratan pemantauan kinerja serta kesesuaian dengan menggunakan terminologi yang jelas dan umum digunakan.	✓		
	3	Pengadilan telah menyelaraskan metode pemantauan dan evaluasi dengan pendekatan yang digunakan dalam organisasi serta telah menetapkan alat bantu yang digunakan untuk pengumpulan dan pelaporan data.	✓		
	4	Pengadilan telah menetapkan jenis tujuan, ukuran kinerja, serta sistem penyimpanan data yang mendukung proses pemantauan dan evaluasi.	✓		
	5	Pengadilan telah mengalokasikan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung proses pemantauan dan evaluasi dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi.	✓		
	6	Pengadilan telah menetapkan tujuan dan ukuran kinerja serta melakukan tinjauan berkala bersama stakeholder untuk memastikan kelayakan target.	✓		
	7	Pengadilan telah memastikan bahwa tujuan dan ukuran kinerja telah sesuai dengan prinsip SMART.	✓		
	8	Pengadilan telah menginformasikan kepada stakeholder utama mengenai perubahan yang diusulkan terhadap target dan toleransi kinerja.	✓		
	9	Pengadilan telah mendistribusikan informasi perubahan target dan toleransi kinerja kepada pengguna terkait.	✓		
	10	Pengadilan telah melakukan pengumpulan data kinerja secara	✓		



		terstruktur, termasuk melalui sistem otomatis jika memungkinkan.			
	11	Pengadilan telah mengevaluasi efisiensi dan kegunaan data yang dikumpulkan serta memastikan integritas data tersebut.	✓		
	12	Pengadilan telah mengelola data agregat untuk mendukung pengukuran kinerja secara menyeluruh.	✓		
	13	Pengadilan telah melakukan evaluasi terhadap respons manajemen serta opsi yang diusulkan dalam menangani penyimpangan kinerja.	✓		
	14	Pengadilan telah memastikan bahwa setiap tindakan korektif memiliki penanggung jawab yang jelas.	✓		
	15	Pengadilan telah melakukan pemantauan terhadap hasil dari tindakan korektif yang telah diimplementasikan.	✓		
	16	Pengadilan telah menyusun dan menyampaikan laporan hasil tindakan korektif kepada stakeholder terkait.	✓		
Level 3	1	Pendekatan yang digunakan dalam pemantauan dan evaluasi kinerja di Pengadilan Negeri Singaraja telah divalidasi secara berkala, serta pemangku kepentingan, persyaratan, dan sumber daya yang baru atau berubah telah diidentifikasi	✓		
	2	Terdapat proses manajemen siklus hidup dan pengendalian perubahan yang telah disepakati di Pengadilan Negeri Singaraja untuk pemantauan dan pelaporan kinerja, termasuk perbaikan dalam pelaporan, metrik, pendekatan, baseline, dan benchmarking.	✓		



	3	Data agregat dalam sistem informasi Pengadilan Negeri Singaraja telah diselaraskan dengan pendekatan dan tujuan pelaporan yang ditetapkan, untuk memastikan akurasi dan konsistensi dalam evaluasi kinerja.	✓		
	4	Laporan kinerja proses di Pengadilan Negeri Singaraja telah dirancang secara ringkas, mudah dipahami, dan disesuaikan dengan kebutuhan pimpinan serta pemangku kepentingan, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang efektif dan tepat waktu.	✓		
	5	Laporan kinerja di Pengadilan Negeri Singaraja telah didistribusikan kepada pemangku kepentingan yang relevan sesuai dengan kebijakan dan prosedur pelaporan yang berlaku.	✓		
Level 4	1	Pengadilan Negeri Singaraja telah menggunakan alat dan sistem yang sesuai untuk pemrosesan dan analisis data guna mendukung evaluasi kinerja secara akurat dan efektif.	✓		
	2	Penyebab penyimpangan terhadap target kinerja di Pengadilan Negeri Singaraja telah dianalisis, serta tindakan perbaikan telah ditetapkan dengan tanggung jawab yang jelas dan terdokumentasi dengan baik.	✓		
	3	Sasaran kinerja individu di Pengadilan Negeri Singaraja telah mengintegrasikan aspek kinerja dan kepatuhan, serta pencapaian target kinerja dikaitkan dengan sistem penghargaan organisasi.	✓		
	4	Hasil kinerja Pengadilan Negeri Singaraja telah dibandingkan dengan target internal serta, jika memungkinkan, dengan standar industri atau pengadilan lain sebagai tolok ukur eksternal.	✓		



	5.	Tren kinerja dan kepatuhan di Pengadilan Negeri Singaraja telah dianalisis secara berkala, serta tindakan yang sesuai telah diambil untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional.	✓		
Level 5	1	Pengadilan Negeri Singaraja secara berkala mengevaluasi sasaran dan metrik kinerja serta memberikan rekomendasi perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pemantauan dan evaluasi.	✓		

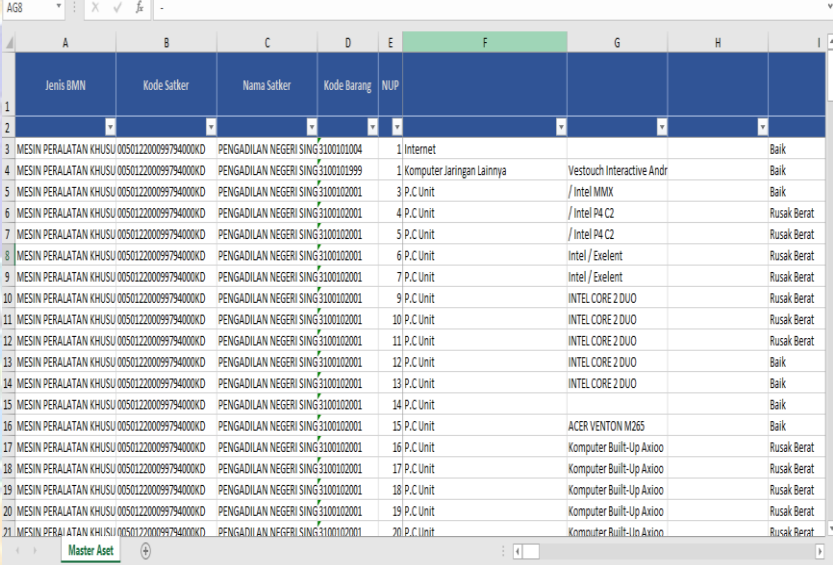
Singaraja, 3 Maret 2025

Titik Kurnivati, A.Md.



Lampiran 15. Hasil Rekapitulasi Kuesioner

Tabel 1. Hasil Rekapitulasi Kuesioner Pada Domain BAI09

Capability Level	No	Pernyataan	Yes	No	Keterangan	Data Dukung
Level 1	1	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki daftar aset yang mencatat seluruh aset yang dimiliki beserta statusnya.	√		Pemutakhiran data aset dilakukan secara rutin dalam bentuk file excel yang disusun dan disimpan oleh Subbagian Umum & Keuangan.	 https://acesse.one/Daftarasetaktif

2	Pengadilan Negeri Singaraja telah mengidentifikasi dan mematuhi semua peraturan hukum dan kontrak terkait pengelolaan aset.	√	Pengelolaan aset mengacu pada aturan pengelolaan BMN dan dipantau secara berkala.	LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2024 TAHUN ANGGARAN 2024 UAPB : 005 UAKPB : 099794 MAHKAMAH AGUNG PENGADILAN NEGERI SINGARAJA Tgl.Data : 12/02/25 8:08 AM Tgl.Cetak : 12/02/25 5:21 PM Halaman : 1 Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_satker_poc <table><tr><th colspan="2">AKUN NERACA</th><th>JUMLAH</th></tr><tr><th>KODE</th><th>URAIAN</th><th></th></tr><tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th></tr><tr><td>117111</td><td>Barang Konsumsi</td><td>47,500</td></tr><tr><td>117113</td><td>Bahan untuk Pemeliharaan</td><td>146,000</td></tr><tr><td>131111</td><td>Tanah</td><td>58,168,011,000</td></tr><tr><td>132111</td><td>Peralatan dan Mesin</td><td>4,360,618,369</td></tr><tr><td>133111</td><td>Gedung dan Bangunan</td><td>11,414,711,026</td></tr><tr><td>135121</td><td>Aset Tetap Lainnya</td><td>33,105,551</td></tr><tr><td>137111</td><td>Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin</td><td>(4,024,822,863)</td></tr><tr><td>137211</td><td>Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan</td><td>(2,774,778,815)</td></tr><tr><td>137411</td><td>Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya</td><td>(5,700,000)</td></tr><tr><td>166112</td><td>Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan</td><td>660,891,790</td></tr><tr><td>166113</td><td>Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional</td><td>4,933,500</td></tr><tr><td>169122</td><td>Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam</td><td>(660,791,790)</td></tr><tr><td>169318</td><td>Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan</td><td>(4,933,500)</td></tr><tr><td colspan="2">J U M L A H</td><td>67,171,437,768</td></tr></table>  Singaraja, 12 Februari 2025 Perangung Jawat UAKPB Sekretaris Gede Mahardika, S.H. 196707311991031002 https://acesse.one/LaporanBarangMilikNegara	AKUN NERACA		JUMLAH	KODE	URAIAN		1	2	3	117111	Barang Konsumsi	47,500	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	146,000	131111	Tanah	58,168,011,000	132111	Peralatan dan Mesin	4,360,618,369	133111	Gedung dan Bangunan	11,414,711,026	135121	Aset Tetap Lainnya	33,105,551	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(4,024,822,863)	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(2,774,778,815)	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(5,700,000)	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	660,891,790	166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	4,933,500	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(660,791,790)	169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan	(4,933,500)	J U M L A H		67,171,437,768
AKUN NERACA		JUMLAH																																																					
KODE	URAIAN																																																						
1	2	3																																																					
117111	Barang Konsumsi	47,500																																																					
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	146,000																																																					
131111	Tanah	58,168,011,000																																																					
132111	Peralatan dan Mesin	4,360,618,369																																																					
133111	Gedung dan Bangunan	11,414,711,026																																																					
135121	Aset Tetap Lainnya	33,105,551																																																					
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(4,024,822,863)																																																					
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(2,774,778,815)																																																					
137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(5,700,000)																																																					
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	660,891,790																																																					
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	4,933,500																																																					
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(660,791,790)																																																					
169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan	(4,933,500)																																																					
J U M L A H		67,171,437,768																																																					

3

Pengadilan Negeri Singaraja melakukan pengecekan rutin untuk memastikan aset dalam kondisi layak dan siap digunakan sesuai dengan tujuannya.

√

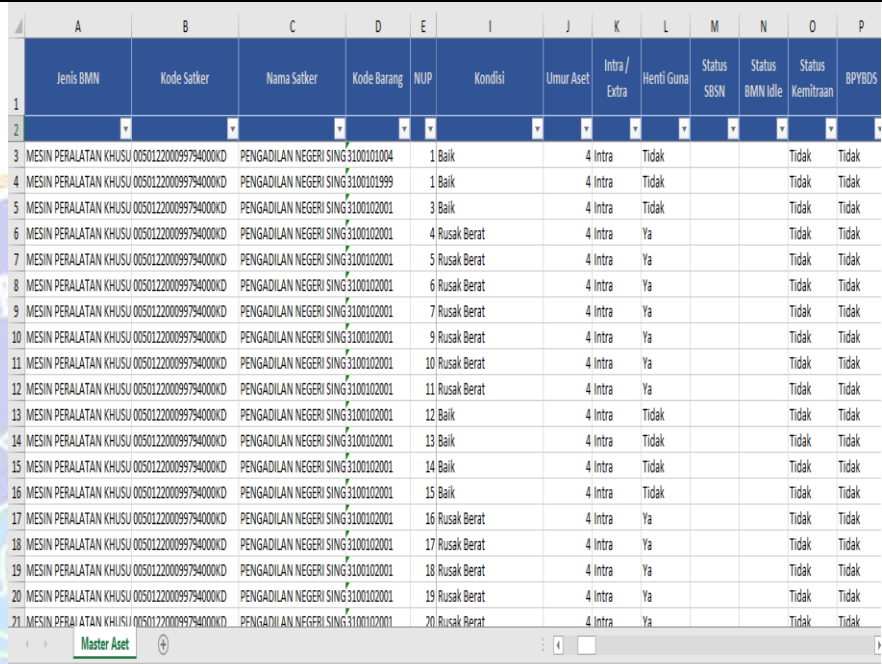
Pemeriksaan dilakukan oleh bagian umum & keuangan untuk menjaga kelayakan aset.

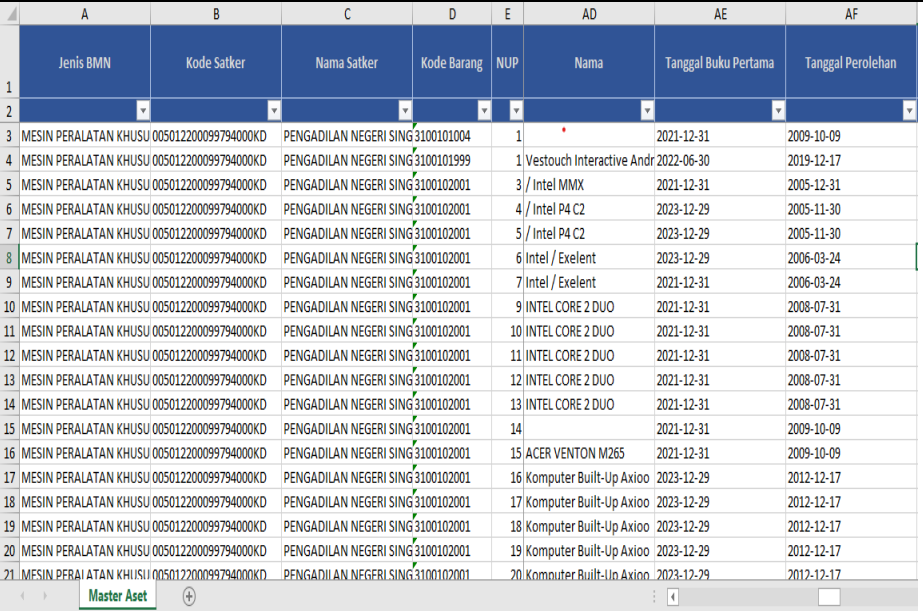
UNIVERSITAS

UNDIKSHA

<https://acesse.one/Daftarasetaktif>

A	B	C	D	E	I	J	K	L	M	N	O	P
Jenis BMN	Kode Satker	Nama Satker	Kode Barang	NUP	Kondisi	Umur Aset	Intra / Extra	Henti Guna	Status SBSN	Status BMN Idle	Status Kemitraan	BPKYS
MESIN PERALATAN KHUSU 005012200099794000KD		PENGADILAN NEGERI SING 3100101004		1	Baik		4 Intra	Tidak			Tidak	Tidak
MESIN PERALATAN KHUSU 005012200099794000KD		PENGADILAN NEGERI SING 3100101999		1	Baik		4 Intra	Tidak			Tidak	Tidak
MESIN PERALATAN KHUSU 005012200099794000KD		PENGADILAN NEGERI SING 3100102001		3	Baik		4 Intra	Tidak			Tidak	Tidak
MESIN PERALATAN KHUSU 005012200099794000KD		PENGADILAN NEGERI SING 3100102001		4	Rusak Berat		4 Intra	Ya			Tidak	Tidak
MESIN PERALATAN KHUSU 005012200099794000KD		PENGADILAN NEGERI SING 3100102001		5	Rusak Berat		4 Intra	Ya			Tidak	Tidak
MESIN PERALATAN KHUSU 005012200099794000KD		PENGADILAN NEGERI SING 3100102001		6	Rusak Berat		4 Intra	Ya			Tidak	Tidak
MESIN PERALATAN KHUSU 005012200099794000KD		PENGADILAN NEGERI SING 3100102001		7	Rusak Berat		4 Intra	Ya			Tidak	Tidak
MESIN PERALATAN KHUSU 005012200099794000KD		PENGADILAN NEGERI SING 3100102001		9	Rusak Berat		4 Intra	Ya			Tidak	Tidak
MESIN PERALATAN KHUSU 005012200099794000KD		PENGADILAN NEGERI SING 3100102001		10	Rusak Berat		4 Intra	Ya			Tidak	Tidak
MESIN PERALATAN KHUSU 005012200099794000KD		PENGADILAN NEGERI SING 3100102001		11	Rusak Berat		4 Intra	Ya			Tidak	Tidak
MESIN PERALATAN KHUSU 005012200099794000KD		PENGADILAN NEGERI SING 3100102001		12	Baik		4 Intra	Tidak			Tidak	Tidak
MESIN PERALATAN KHUSU 005012200099794000KD		PENGADILAN NEGERI SING 3100102001		13	Baik		4 Intra	Tidak			Tidak	Tidak
MESIN PERALATAN KHUSU 005012200099794000KD		PENGADILAN NEGERI SING 3100102001		14	Baik		4 Intra	Tidak			Tidak	Tidak
MESIN PERALATAN KHUSU 005012200099794000KD		PENGADILAN NEGERI SING 3100102001		15	Baik		4 Intra	Tidak			Tidak	Tidak
MESIN PERALATAN KHUSU 005012200099794000KD		PENGADILAN NEGERI SING 3100102001		16	Rusak Berat		4 Intra	Ya			Tidak	Tidak
MESIN PERALATAN KHUSU 005012200099794000KD		PENGADILAN NEGERI SING 3100102001		17	Rusak Berat		4 Intra	Ya			Tidak	Tidak
MESIN PERALATAN KHUSU 005012200099794000KD		PENGADILAN NEGERI SING 3100102001		18	Rusak Berat		4 Intra	Ya			Tidak	Tidak
MESIN PERALATAN KHUSU 005012200099794000KD		PENGADILAN NEGERI SING 3100102001		19	Rusak Berat		4 Intra	Ya			Tidak	Tidak
MESIN PERALATAN KHUSU 005012200099794000KD		PENGADILAN NEGERI SING 3100102001		20	Rusak Berat		4 Intra	Ya			Tidak	Tidak

	4	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki daftar aset kritis yang diperlukan untuk kelancaran layanan peradilan.	√	Aset TI dan operasional yang bersifat vital didata secara terpisah.	 https://acesse.one/Daftarasetaktif
--	---	---	---	---	--

5	Pengadilan Negeri Singaraja melakukan evaluasi berkala terhadap risiko kerusakan atau penggantian aset kritis.	√	Evaluasi dilakukan melalui data pemantauan dan status aset aktif setiap tahunnya.	 https://acesse.one/Daftarasetaktif
---	--	---	---	--

	6 Pengadilan Negeri Singaraja menginformasikan kepada pengguna mengenai dampak dari pemeliharaan aset, seperti pembatasan penggunaan sementara.	√	Informasi disampaikan secara langsung kepada unit kerja yang terdampak.	Rapat Bulanan Periode Bulan Pebruari 2025 27 Februari 2025 oleh Komang Devi  27 FEBRUARI 2025 Rapat Bulanan Periode Pebruari 2025 https://www.pn-singaraja.go.id/berita/rapat-bulanan-periode-bulan-pebruari-2025
--	---	---	---	---

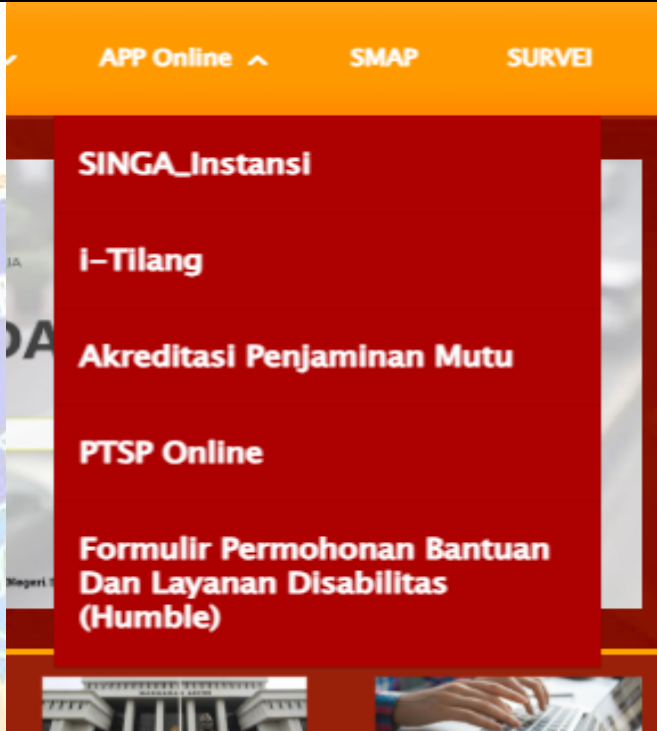
	7. Pengadaan aset di Pengadilan Negeri Singaraja dilakukan berdasarkan permintaan yang telah disetujui dan mengikuti kebijakan yang berlaku.	√	Permohonan dan proses pengadaan dilakukan sesuai dengan SOP BMN.	 MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM PENGADILAN TINGGI DENPASAR PENGADILAN NEGERI SINGARAJA Jalan Yustinus No. 63 Singaraja, Kab. Inohang, Kalt. Inohang, 81116 Telp (0362) 21445 - Fax : (0362) 26447 - www.pn-singaraja.go.id, pnsingaraja@yahoo.co.id Nomor : 404/SEK.PN.W24-U2/PL1.2.3/II/2025 Singaraja, 5 Februari 2025 Sifat : Biasa Lampiran : 1 (satu) gabung Hal : Permohonan Lelang Barang Milik Negara pada Satker Pengadilan Negeri Singaraja Yth. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Singaraja di- Singaraja Berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468/SEK/PL1.2/XI/2024 tanggal 14 November 2024 hal Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan pada Pengadilan Negeri Singaraja, bersama ini kami mengajukan permohonan lelang Barang Milik Negara pada satker Pengadilan Negeri Singaraja sebagaimana daftar terlampir. Sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan persetujuan permohonan lelang Barang Milik Negara pada satker Pengadilan Negeri Singaraja dimaksud, bersama ini kami sertakan kelengkapan data/dokumen pendukung sebagai berikut: 1. Daftar Barang, Nilai Limit, dan Uang Jaminan; 2. Surat berisi informasi tertulis terkait penyetoran hasil bersih lelang; 3. Surat Pernyataan Objek Lelang dalam Penguasaan Fisik; 4. Surat Kuasa Penunjukan Penjual; https://11nk.dev/PermohonanLelang
--	--	---	--	---

8	Pengadilan Negeri Singaraja memastikan bahwa setiap aset yang diperoleh telah melalui proses penerimaan, verifikasi, pengujian, pencatatan, serta diberikan label fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	√	Proses administrasi dilakukan secara tertib dengan pendokumentasian dalam file aset aktif.	MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM PENGADILAN TINGGI DENPASAR PENGADILAN NEGERI SINGARAJA Jalan Kartini No. 02 Singaraja, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Bali 81116 Telp (0362) 21445 - Fax : (0362) 26447. www.pn-singaraja.go.id, pnsingaraja@yahoo.co.id Nomor : 266/SEK.PN.W24-U2/PL1.2/I/2025 Singaraja, 15 Januari 2025 Sifat : Biasa Lampiran : 1 (satu) gabung Hal : Penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) Barang Milik Negara Semester II dan Tahunan Tahun 2024 Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI c.q. Kepala Biro Perlengkapan Mahkamah Agung RI di- Jakarta Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara, serta menindaklanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 37/SEK/PL1.2/I/2025 hal Pelaksanaan, Penyusunan dan Penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian https://acesse.one/LaporanWasdalTahunan2024
---	--	---	---	--

9	Proses pembayaran aset di Pengadilan Negeri Singaraja dilakukan sesuai dengan perjanjian kontrak dengan pemasok.	√	Pembayaran dilakukan oleh bendahara berdasarkan SPM yang telah ditandatangani.	MAHKAMAH AGUNG PENGADILAN NEGERI SINGARAJA SURAT PERINTAH MEMBAYAR Tanggal 11-Jul-2024 Halaman 1 dari 1 Nomor 00063A Kuasa Bendahara Umum KPPN Singaraja (132) Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 18.062.574,00 **** DELAPAN BELAS JUTA ENAM PULUH DUA RIBU LIMA RATUS TUJUH PULUH EMPAT RUPIAH **** Tahun Anggaran 2024 Dasar Pembayaran DIPA No. : DIPA-005.01.2.099794/2024 Tanggal : 28-Nov-2023 UU NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG APBN 2024 Jenis Tagihan : GUP Jatuh Tempo : Segera Cara Bayar : SP2D <table><tr><th>PENGELUARAN</th><th>JUMLAH UANG</th></tr><tr><td>099794.132.521111.00501WA.6986EBA.A000000001.00000.2.2201.2.000000.000000</td><td>2.197.600,00</td></tr><tr><td>099794.132.521114.00501WA.6986EBA.A000000001.00000.2.2201.2.000000.000000</td><td>8.500,00</td></tr><tr><td>099794.132.521811.00501WA.6986EBA.A000000001.00000.2.2201.2.000000.000000</td><td>2.784.600,00</td></tr><tr><td>099794.132.522112.00501WA.6986EBA.A000000001.00000.2.2201.2.000000.000000</td><td>178.374,00</td></tr><tr><td>099794.132.522113.00501WA.6986EBA.A000000001.00000.2.2201.2.000000.000000</td><td>756.500,00</td></tr><tr><td>099794.132.523111.00501WA.6986EBA.A000000001.00000.2.2201.2.000000.000000</td><td>602.000,00</td></tr><tr><td>099794.132.523119.00501WA.6986EBA.A000000001.00000.2.2201.2.000000.000000</td><td>1.000.000,00</td></tr><tr><td>099794.132.523121.00501WA.6986EBA.A000000001.00000.2.2201.2.000000.000000</td><td>8.195.000,00</td></tr><tr><td>099794.132.524111.00501WA.6986EBA.A000000001.00000.2.2201.2.000000.000000</td><td>1.440.000,00</td></tr><tr><td>099794.132.524113.00501WA.6986EBA.A000000001.00000.2.2201.2.000000.000000</td><td>900.000,00</td></tr><tr><td>Jumlah Pengeluaran</td><td>18.062.574,00</td></tr><tr><th>POTONGAN</th><th>JUMLAH UANG</th></tr><tr><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td>Jumlah Potongan</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TOTAL PEMBAYARAN</td><td>18.062.574,00</td></tr></table>	PENGELUARAN	JUMLAH UANG	099794.132.521111.00501WA.6986EBA.A000000001.00000.2.2201.2.000000.000000	2.197.600,00	099794.132.521114.00501WA.6986EBA.A000000001.00000.2.2201.2.000000.000000	8.500,00	099794.132.521811.00501WA.6986EBA.A000000001.00000.2.2201.2.000000.000000	2.784.600,00	099794.132.522112.00501WA.6986EBA.A000000001.00000.2.2201.2.000000.000000	178.374,00	099794.132.522113.00501WA.6986EBA.A000000001.00000.2.2201.2.000000.000000	756.500,00	099794.132.523111.00501WA.6986EBA.A000000001.00000.2.2201.2.000000.000000	602.000,00	099794.132.523119.00501WA.6986EBA.A000000001.00000.2.2201.2.000000.000000	1.000.000,00	099794.132.523121.00501WA.6986EBA.A000000001.00000.2.2201.2.000000.000000	8.195.000,00	099794.132.524111.00501WA.6986EBA.A000000001.00000.2.2201.2.000000.000000	1.440.000,00	099794.132.524113.00501WA.6986EBA.A000000001.00000.2.2201.2.000000.000000	900.000,00	Jumlah Pengeluaran	18.062.574,00	POTONGAN	JUMLAH UANG		0,00	Jumlah Potongan	0,00	TOTAL PEMBAYARAN	18.062.574,00
PENGELUARAN	JUMLAH UANG																																			
099794.132.521111.00501WA.6986EBA.A000000001.00000.2.2201.2.000000.000000	2.197.600,00																																			
099794.132.521114.00501WA.6986EBA.A000000001.00000.2.2201.2.000000.000000	8.500,00																																			
099794.132.521811.00501WA.6986EBA.A000000001.00000.2.2201.2.000000.000000	2.784.600,00																																			
099794.132.522112.00501WA.6986EBA.A000000001.00000.2.2201.2.000000.000000	178.374,00																																			
099794.132.522113.00501WA.6986EBA.A000000001.00000.2.2201.2.000000.000000	756.500,00																																			
099794.132.523111.00501WA.6986EBA.A000000001.00000.2.2201.2.000000.000000	602.000,00																																			
099794.132.523119.00501WA.6986EBA.A000000001.00000.2.2201.2.000000.000000	1.000.000,00																																			
099794.132.523121.00501WA.6986EBA.A000000001.00000.2.2201.2.000000.000000	8.195.000,00																																			
099794.132.524111.00501WA.6986EBA.A000000001.00000.2.2201.2.000000.000000	1.440.000,00																																			
099794.132.524113.00501WA.6986EBA.A000000001.00000.2.2201.2.000000.000000	900.000,00																																			
Jumlah Pengeluaran	18.062.574,00																																			
POTONGAN	JUMLAH UANG																																			
	0,00																																			
Jumlah Potongan	0,00																																			
TOTAL PEMBAYARAN	18.062.574,00																																			

<https://l1nk.dev/LaporanSPM>

<https://l1nk.dev/LaporanSPM>

	10	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki dan memelihara daftar lengkap semua lisensi perangkat lunak yang telah dibeli, termasuk perjanjian lisensinya.	√	Daftar perangkat lunak dan lisensinya dikelola oleh bagian IT.	 The screenshot shows a website with an orange header containing the text 'APP Online ^', 'SMAP', and 'SURVEI'. Below the header, a red box contains the text 'SINGA_Instansi'. Underneath this box, several services are listed: 'I-Tilang', 'Akreditasi Penjaminan Mutu', 'PTSP Online', and 'Formulir Permohonan Bantuan Dan Layanan Disabilitas (Humble)'. At the bottom of the screenshot, there is a small image of a person's hands typing on a keyboard. https://www.pn-singaraja.go.id/
--	----	---	---	--	--

Level 3	1	Pengadilan Negeri Singaraja mencatat seluruh aset yang dimiliki dan digunakan dalam sistem akuntansi untuk memastikan pengelolaan yang terstruktur dan terdokumentasi dengan baik.	√	Pencatatan dilakukan secara terstruktur dan tercatat dalam sistem BMN	 MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM PENGADILAN TINGGI DENPASAR PENGADILAN NEGERI SINGARAJA Jalan Kartini No. 02 Singaraja, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Bali 81116 Telp 0362/ 21445 - Fax : 0362/ 26447, www.pn-singaraja.go.id, pn-singaraja@yahoo.co.id DAFTAR BARANG MILIK NEGARA, NILAI LIMIT, DAN UANG JAMINAN YANG DILELANG PADA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA Nomor: 405/SEK.PN.W24-U2/PL.1.2.3/II/2025 <table><tr><th>No</th><th>Nama Barang</th><th>NUP</th><th>Tahun Perolehan</th><th>Jumlah</th><th>Nilai Limit (Rp)</th><th>Uang Jaminan (Rp)</th></tr><tr><th>(1)</th><th>(2)</th><th>(3)</th><th>(4)</th><th>(5)</th><th>(6)</th><th>(7)</th></tr><tr><td>1.</td><td>Mesin Hitung Elektronik/Calculator</td><td>1</td><td>2000</td><td>1</td><td rowspan="15">6.629.200</td><td rowspan="15">3.314.600</td></tr><tr><td>2.</td><td>Mesin Stensil Manual Folio</td><td>2</td><td>2005</td><td>1</td></tr><tr><td>3.</td><td>Lemari Besi/Metal</td><td>11</td><td>1999</td><td>1</td></tr><tr><td>4.</td><td>Lemari Besi/Metal</td><td>12</td><td>2013</td><td>1</td></tr><tr><td>5.</td><td>Rak Besi</td><td>12</td><td>2018</td><td>1</td></tr><tr><td>6.</td><td>Rak Kayu</td><td>34</td><td>2012</td><td>1</td></tr><tr><td>7.</td><td>Filing Cabinet Besi</td><td>13</td><td>2000</td><td>1</td></tr><tr><td>8.</td><td>Filing Cabinet Besi</td><td>16</td><td>1999</td><td>1</td></tr><tr><td>9.</td><td>Filing Cabinet Besi</td><td>17</td><td>2012</td><td>1</td></tr><tr><td>10.</td><td>Brandkas</td><td>2</td><td>2008</td><td>1</td></tr><tr><td>11.</td><td>Papan Visual/Papan Nama</td><td>1</td><td>2000</td><td>1</td></tr><tr><td>12.</td><td>Papan Visual/Papan Nama</td><td>4</td><td>2007</td><td>1</td></tr><tr><td>13.</td><td>White Board</td><td>1</td><td>2000</td><td>1</td></tr><tr><td>14.</td><td>White Board</td><td>2</td><td>2000</td><td>1</td></tr><tr><td>15.</td><td>White Board</td><td>3</td><td>2000</td><td>1</td></tr></table> https://acesse.one/DaftarBarangMilikNegara	No	Nama Barang	NUP	Tahun Perolehan	Jumlah	Nilai Limit (Rp)	Uang Jaminan (Rp)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	1.	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	1	2000	1	6.629.200	3.314.600	2.	Mesin Stensil Manual Folio	2	2005	1	3.	Lemari Besi/Metal	11	1999	1	4.	Lemari Besi/Metal	12	2013	1	5.	Rak Besi	12	2018	1	6.	Rak Kayu	34	2012	1	7.	Filing Cabinet Besi	13	2000	1	8.	Filing Cabinet Besi	16	1999	1	9.	Filing Cabinet Besi	17	2012	1	10.	Brandkas	2	2008	1	11.	Papan Visual/Papan Nama	1	2000	1	12.	Papan Visual/Papan Nama	4	2007	1	13.	White Board	1	2000	1	14.	White Board	2	2000	1	15.	White Board	3	2000	1
No	Nama Barang	NUP	Tahun Perolehan	Jumlah	Nilai Limit (Rp)	Uang Jaminan (Rp)																																																																																										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)																																																																																										
1.	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	1	2000	1	6.629.200	3.314.600																																																																																										
2.	Mesin Stensil Manual Folio	2	2005	1																																																																																												
3.	Lemari Besi/Metal	11	1999	1																																																																																												
4.	Lemari Besi/Metal	12	2013	1																																																																																												
5.	Rak Besi	12	2018	1																																																																																												
6.	Rak Kayu	34	2012	1																																																																																												
7.	Filing Cabinet Besi	13	2000	1																																																																																												
8.	Filing Cabinet Besi	16	1999	1																																																																																												
9.	Filing Cabinet Besi	17	2012	1																																																																																												
10.	Brandkas	2	2008	1																																																																																												
11.	Papan Visual/Papan Nama	1	2000	1																																																																																												
12.	Papan Visual/Papan Nama	4	2007	1																																																																																												
13.	White Board	1	2000	1																																																																																												
14.	White Board	2	2000	1																																																																																												
15.	White Board	3	2000	1																																																																																												
	2	Pengadilan Negeri Singaraja menjadwalkan downtime saat sistem akan diperbarui dan melakukan pemeliharaan aset	√	Belum ada jadwal downtime dan dokumentasi pemeliharaan sistem secara terstruktur.	-																																																																																											

		secara terstruktur untuk mengurangi dampak terhadap layanan peradilan.																																																															
3	√	Pengadilan Negeri Singaraja melakukan pemeliharaan rutin terhadap aset kritis dan menyediakan alternatif jika terjadi kegagalan.	√	Pemeliharaan dan perawatan dilakukan secara berkala terhadap aset penting.	B.5. Pemeliharaan Selama tahun 2024, terdapat beberapa pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung pada kantor Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB yaitu: <table><tr><th>No.</th><th>Nama</th><th>Pagu (Rp)</th><th>Realisasi (Rp)</th><th>Persentase (%)</th></tr><tr><td>I</td><td colspan="4">Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</td></tr><tr><td>1</td><td>Pemeliharaan Gedung Kantor</td><td>306.736.000</td><td>306.736.000</td><td>100%</td></tr><tr><td>2</td><td>Pemeliharaan Rumah Dinas</td><td>47.000.000</td><td>47.000.000</td><td>100%</td></tr><tr><td>II</td><td colspan="4">Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</td></tr><tr><td>1</td><td>Kendaraan Bermotor Roda 4</td><td>97,000,000</td><td>96,999,728</td><td>100%</td></tr><tr><td>2</td><td>Kendaraan Bermotor Roda 2</td><td>22,500,000</td><td>22,499,291</td><td>100%</td></tr><tr><td>3</td><td>Genset</td><td>1,500,000</td><td>1,500,000</td><td>100%</td></tr><tr><td>4</td><td>AC Split dan Standing</td><td>73,355,000</td><td>73,355,000</td><td>100%</td></tr><tr><td>5</td><td>Printer</td><td>15,659,000</td><td>15,659,000</td><td>100%</td></tr><tr><td>6</td><td>Laptop</td><td>14,710,000</td><td>14,710,000</td><td>100%</td></tr><tr><td>7</td><td>PC</td><td>30,500,000</td><td>30,500,000</td><td>100%</td></tr></table>	No.	Nama	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	I	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				1	Pemeliharaan Gedung Kantor	306.736.000	306.736.000	100%	2	Pemeliharaan Rumah Dinas	47.000.000	47.000.000	100%	II	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				1	Kendaraan Bermotor Roda 4	97,000,000	96,999,728	100%	2	Kendaraan Bermotor Roda 2	22,500,000	22,499,291	100%	3	Genset	1,500,000	1,500,000	100%	4	AC Split dan Standing	73,355,000	73,355,000	100%	5	Printer	15,659,000	15,659,000	100%	6	Laptop	14,710,000	14,710,000	100%	7	PC	30,500,000	30,500,000	100%
No.	Nama	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)																																																													
I	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan																																																																
1	Pemeliharaan Gedung Kantor	306.736.000	306.736.000	100%																																																													
2	Pemeliharaan Rumah Dinas	47.000.000	47.000.000	100%																																																													
II	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin																																																																
1	Kendaraan Bermotor Roda 4	97,000,000	96,999,728	100%																																																													
2	Kendaraan Bermotor Roda 2	22,500,000	22,499,291	100%																																																													
3	Genset	1,500,000	1,500,000	100%																																																													
4	AC Split dan Standing	73,355,000	73,355,000	100%																																																													
5	Printer	15,659,000	15,659,000	100%																																																													
6	Laptop	14,710,000	14,710,000	100%																																																													
7	PC	30,500,000	30,500,000	100%																																																													
4	√	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki rencana perawatan preventif untuk perangkat keras berdasarkan rekomendasi	√	Belum tersedia rencana preventif yang terdokumentasi secara formal.	-																																																												

		vendor dan analisis risiko.			
--	--	--------------------------------	--	--	--



5	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki kontrak layanan pemeliharaan dengan pihak ketiga yang mencakup aspek keamanan dan privasi.	√	Kontrak kerja sama pihak ketiga	f. Fasilitas yang Memudahkan Pegawai dan Masyarakat untuk Memperoleh Informasi Untuk website, Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB menyewa space hosting pada CV. Rumah Media. Untuk domain https://pn-singaraja.go.id mempergunakan layanan dari PANDI (Pengelola Alamat Domain Indonesia). Pilihan untuk menempatkan website pada penyedia layanan hosting swasta adalah menganut konsep <i>cost-effective and maintenance free</i>, dengan artian bahwa Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB tidak perlu mengeluarkan biaya yang mahal untuk koneksi internet berkecepatan tinggi dan tidak perlu menyediakan perangkat server yang mahal untuk melayani akses website Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB. https://11nk.dev/LaporanPelaksanaanKegiatanTahunan
6	Pengadilan Negeri Singaraja membatasi akses jarak jauh hanya untuk kebutuhan pemeliharaan dan diagnosis tertentu.	√	Aktivitas ini belum dilakukan	-

	7	Pengadilan Negeri Singaraja menerapkan standar implementasi aset dengan proses pengujian penerimaan sebelum digunakan.	√	Proses verifikasi penerimaan dilakukan sebelum pendistribusian aset.	 Tampilan Perangkat Keras Pengelola Data dan Jaringan Komputer
--	---	--	---	--	--

	8	Setiap aset yang dialokasikan di Pengadilan Negeri Singaraja harus mendapatkan persetujuan dan pengguna bertanggung jawab atas penggunaannya.	√	Tercatat pada dokumen distribusi aset dan penerimaan tiap ruangan.	 SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 1450/SEK/SK/X/2022 T E N T A N G PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA YANG DIGUNAKAN OLEH PENGADILAN NEGERI SINGARAJA SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara dilakukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kuasa Pengguna Barang; b. bahwa Sekretaris Mahkamah Agung berwenang dan bertanggung jawab menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Singaraja. https://l1nk.dev/PenetapanPenggunaanBarangMilikNegara
--	---	---	---	--	--

9	Pengadilan Negeri Singaraja melakukan alokasi ulang aset jika tidak lagi digunakan untuk mengoptimalkan pemanfaatannya.	√	Aset tidak terpakai dialihkan atau diusulkan untuk penghapusan.	5. Pelaksanaan penjualan secara lelang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima paling lama 1 (satu) bulan setelah tanggal pelaksanaan lelang; 6. Keputusan Penghapusan Barang Milik Negara ditetapkan oleh pengguna barang paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima ditandatangani; 7. Kuasa pengguna barang menyampaikan laporan pelaksanaan penjualan secara lelang dan pelaksanaan penghapusan barang kepada Pengelola Barang cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang setempat paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan penghapusan Barang Milik Negara ditandatangani dengan melampirkan risalah lelang, Berita Acara Serah Terima, Keputusan penghapusan yang ditetapkan oleh Pengguna Barang dan bukti setor ke rekening kas umum negara; 8. Kebenaran materiil atas jenis, jumlah, tahun dan nilai Barang Milik Negara yang dijual tersebut menjadi tanggung jawab Kuasa Pengguna Barang; 9. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam persetujuan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia,  Sugiyanto
---	---	---	---	---

10	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki dokumentasi terkait penghapusan atau penghentian aset sesuai peraturan yang berlaku.	√	Prosedur penghapusan dilaksanakan melalui tim penilai resmi.	 KETUA PENGADILAN TINGGI DENPASAR KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI DENPASAR NOMOR : 05/KPT.W24-U/SK.PL1.2.3/I/2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI BARANG MILIK NEGARA DAN PENGHAPUSAN PADA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KETUA PENGADILAN TINGGI DENPASAR Menimbang : a. Bahwa Barang Milik Negara yang dikategorikan dalam aset Lain-lain merupakan Aset dengan kondisi rusak berat sehingga sudah tidak layak pakai dan tidak efisien jika dipertahankan; b. Bahwa ada Barang Milik Negara dalam pengelolaan Pengadilan Negeri Singaraja dalam keadaan rusak berat yang perlu untuk segera dilakukan penghapusan karena sudah tidak efisien dalam penggunaannya; c. Bahwa untuk melakukan proses penghapusan Barang Milik Negara perlu dibentuk Panitia yang bertanggung jawab untuk menginventarisir barang-barang yang dikategorikan rusak berat; d. Bahwa nama-nama pejabat dan pegawai yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Panitia Penghapusan Barang Milik Negara yang sudah rusak berat untuk dihapuskan. Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan https://acesse.one/SuratKeputusanPembentukanPanitiaLelang
----	---	---	--	---

11	Pengadilan Negeri Singaraja memastikan pembuangan aset dilakukan dengan aman untuk mencegah kebocoran data dan dampak lingkungan.	√	Penghapusan dilakukan dengan memperhatikan aspek keamanan.	 KETUA PENGADILAN TINGGI DENPASAR KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI DENPASAR NOMOR : 05/KPT.W24-U/SK.PL1.2.3/I/2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI BARANG MILIK NEGARA DAN PENGHAPUSAN PADA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KETUA PENGADILAN TINGGI DENPASAR Menimbang : a. Bahwa Barang Milik Negara yang dikategorikan dalam aset Lain-lain merupakan Aset dengan kondisi rusak berat sehingga sudah tidak layak pakai dan tidak efisien jika dipertahankan; b. Bahwa ada Barang Milik Negara dalam pengelolaan Pengadilan Negeri Singaraja dalam keadaan rusak berat yang perlu untuk segera dilakukan penghapusan karena sudah tidak efisien dalam penggunaannya; c. Bahwa untuk melakukan proses penghapusan Barang Milik Negara perlu dibentuk Panitia yang bertanggung jawab untuk menginventarisir barang-barang yang dikategorikan rusak berat; d. Bahwa nama-nama pejabat dan pegawai yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Panitia Penghapusan Barang Milik Negara yang sudah rusak berat untuk dihapuskan. Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan https://acesse.one/SuratKeputusanPembentukanPanitiaLelang
----	---	---	--	---

	12	Pengadilan Negeri Singaraja melakukan evaluasi berkala terhadap aset untuk memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan operasional.	√	Evaluasi aset dilakukan, namun bukti audit perlu dikonfirmasi.	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS IB BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI A. PENGELOLAAN KEUANGAN Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB memperoleh Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada tahun 2024 yang terdiri dari DIPA 01 (099794) Badan Urusan Administrasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal dengan Nomor: No. SP DIPA-005.01.2.099794/2024 Tanggal 27 November 2023 dan DIPA 03 (099795) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dengan nomor: No. SP DIPA-005.03.2.099795/2024 Tanggal 27 November 2023. Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB tahun anggaran 2024, rincian pagu awal, pagu revisi dan realisasi anggaran untuk DIPA 01 (099794) dan DIPA 03 (099795) adalah sebagai berikut: A.1. Rekapitulasi Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024 https://l1nk.dev/LaporanPelaksanaanKegiatanTahunan
--	----	---	---	--	---

13	Pengadilan Negeri Singaraja secara berkala mengaudit perangkat lunak berlisensi untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi.	√	Pengawasan perangkat lunak dilaporkan oleh tim PTIP.	II.C. SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG PTIP INFORMASI DAN PELAPORAN 1.Kondisi: Web PN Singaraja tersusupi Judi Online Sebab: Kecanggihan Hacker dalam membobol System Website PN Singaraja Akibat: Terdapat Link Judi Online pada situs Wen PN Singaraja Rekomendasi : Melakukan Koordinasi secara berkala dengan vendor Hosting web agar segera di hilangkan link judol tsb dan memulihkan Web PN Singaraja Tindak Lanjut : Sudah Melakukan koordinasi dengan Vendor Hosting Web untuk menghapus iklan judol dan memulihkan Web PN Singaraja https://11nk.dev/LaporanPengawasanPTIP
----	---	---	--	--

Level 4	1	Pengadilan Negeri Singaraja melakukan pemeriksaan berkala terhadap aset yang dimiliki untuk memastikan keberadaannya.	√	Pemeriksaan dilakukan secara rutin melalui kegiatan pengawasan dan audit aset.	 PENGADILAN NEGERI SINGARAJA Jalan Kartini No. 02 Singaraja, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Bali 81116 Telp (0362) 21445 - Fax : (0362) 26447. www.pn-singaraja.go.id, pnsingaraja@yahoo.co.id Nomor : 266/SEK.PN.W24-U2/PL1.2/II/2025 Singaraja, 15 Januari 2025 Sifat : Biasa Lampiran : 1 (satu) gabung Hal : Penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) Barang Milik Negara Semester II dan Tahunan Tahun 2024 Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI c.q. Kepala Biro Perlengkapan Mahkamah Agung RI di- Jakarta Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara, serta menindaklanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 37/SEK/PL1.2/II/2025 hal Pelaksanaan, Penyusunan dan Penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Semester II dan Tahunan Tahun 2024 tanggal 10 Januari 2025, bersama dengan ini kami sampaikan Laporan Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) BMN Semester II dan Tahunan Tahun 2024 pada Pengadilan Negeri Singaraja. Demikian laporan ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. https://acesse.one/LaporanWasdalTahunan2024
------------	---	---	---	--	---

2	Pengadilan Negeri Singaraja mengevaluasi apakah aset masih memberikan manfaat dan memperkirakan masa manfaatnya.	√	Evaluasi dilakukan melalui proses audit dan pengawasan aset secara berkala.	 PENGADILAN NEGERI SINGARAJA Jalan Kartini No. 02 Singaraja, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Bali 81116 Telp (0362) 21445 - Fax : (0362) 26447. www.pn-singaraja.go.id, pnsingaraja@yahoo.co.id Nomor : 266/SEK.PN.W24-U2/PL1.2/II/2025 Singaraja, 15 Januari 2025 Sifat : Biasa Lampiran : 1 (satu) gabung Hal : Penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) Barang Milik Negara Semester II dan Tahunan Tahun 2024 Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI c.q. Kepala Biro Perlengkapan Mahkamah Agung RI di- Jakarta Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara, serta menindaklanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 37/SEK/PL1.2/II/2025 hal Pelaksanaan, Penyusunan dan Penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Semester II dan Tahunan Tahun 2024 tanggal 10 Januari 2025, bersama dengan ini kami sampaikan Laporan Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) BMN Semester II dan Tahunan Tahun 2024 pada Pengadilan Negeri Singaraja. Demikian laporan ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. https://acesse.one/LaporanWasdalTahunan2024
---	--	---	---	---

3	Pengadilan Negeri Singaraja melakukan pemantauan rutin terhadap aset penting dan mengambil tindakan perbaikan jika diperlukan.	√	Terdapat monitoring berkala dan perawatan aset sesuai data pemeliharaan.	 PENGADILAN NEGERI SINGARAJA Jalan Kartini No. 02 Singaraja, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Bali 81116 Telp (0362) 21445 - Fax : (0362) 26447. www.pn-singaraja.go.id, pnsingaraja@yahoo.co.id Nomor : 266/SEK.PN.W24-U2/PL1.2/II/2025 Singaraja, 15 Januari 2025 Sifat : Biasa Lampiran : 1 (satu) gabung Hal : Penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) Barang Milik Negara Semester II dan Tahunan Tahun 2024 Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI c.q. Kepala Biro Perlengkapan Mahkamah Agung RI di- Jakarta Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara, serta menindaklanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 37/SEK/PL1.2/II/2025 hal Pelaksanaan, Penyusunan dan Penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Semester II dan Tahunan Tahun 2024 tanggal 10 Januari 2025, bersama dengan ini kami sampaikan Laporan Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) BMN Semester II dan Tahunan Tahun 2024 pada Pengadilan Negeri Singaraja. Demikian laporan ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. https://acesse.one/LaporanWasdalTahunan2024
---	---	---	---	--

4	Pengadilan Negeri Singaraja memastikan pembuangan aset dilakukan sesuai dengan regulasi dan mempertimbangkan dampak lingkungan.	√	Aset dihapuskan sesuai prosedur hukum dan lingkungan	 KETUA PENGADILAN TINGGI DENPASAR KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI DENPASAR NOMOR : 05/KPT.W24-U/SK.PL1.2.3/I/2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI BARANG MILIK NEGARA DAN PENGHAPUSAN PADA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KETUA PENGADILAN TINGGI DENPASAR Menimbang : a. Bahwa Barang Milik Negara yang dikategorikan dalam aset Lain-lain merupakan Aset dengan kondisi rusak berat sehingga sudah tidak layak pakai dan tidak efisien jika dipertahankan; b. Bahwa ada Barang Milik Negara dalam pengelolaan Pengadilan Negeri Singaraja dalam keadaan rusak berat yang perlu untuk segera dilakukan penghapusan karena sudah tidak efisien dalam penggunaannya; c. Bahwa untuk melakukan proses penghapusan Barang Milik Negara perlu dibentuk Panitia yang bertanggung jawab untuk menginventarisir barang-barang yang dikategorikan rusak berat; d. Bahwa nama-nama pejabat dan pegawai yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Panitia Penghapusan Barang Milik Negara yang sudah rusak berat untuk dihapuskan. Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan https://acesse.one/SuratKeputusanPembentukanPanitiaLelang
---	---	---	--	---

6	Pengadilan Negeri Singaraja melakukan audit perangkat lunak secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap lisensi.	√	Audit perangkat lunak tercatat dalam hasil audit TI.	2. Kondisi: Web Sipp PN Singaraja di Suppend sementara oleh Rekanan (Rumah Media) di Karenakan di lihat ada yang mencurigakan mencoba mengakses / masuk melebihi kapasitas (Diduga Hacker) Sebab: Kecanggihan Hacker dalam membobol System Website PN Singaraja dan Tidak Adanya Pegawai Jafung Prakom di PN Singaraja Akibat: Terdapat hacker yang mencoba masuk / megakses pada situs Wen PN Singaraja Rekomendasi: Melakukan Koordinasi secara berkala dengan vendor Hosting web agar segera memulihkan Web PN Singaraja Tindak Lanjut: Sudah Melakukan koordinasi dengan Vendor Hosting Web untuk memulihkan Web PN Singaraja https://11nk.dev/RapatPengawasanPTIP
7	Pengadilan Negeri Singaraja mengevaluasi kebutuhan terhadap lisensi yang tidak digunakan untuk efisiensi biaya.	√	Aktivitas ini belum dilakukan	
8	Pengadilan Negeri Singaraja memastikan	√	Aktivitas ini belum dilakukan	

		kepatuhan terhadap lisensi dengan mencopot perangkat lunak yang tidak diperlukan atau membeli lisensi tambahan jika dibutuhkan.			
Level 5	1	Pengadilan Negeri Singaraja melakukan evaluasi jaminan aset dan mempertimbangkan strategi yang memberikan nilai terbaik.	√	Aktivitas ini belum dilakukan	

2	Pengadilan Negeri Singaraja mengevaluasi aset yang kurang dimanfaatkan untuk optimalisasi biaya dan operasional.	√	Evaluasi dilakukan dalam audit aset	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th><th>I</th><th>J</th><th>K</th><th>L</th><th>M</th><th>N</th><th>O</th><th>P</th></tr><tr><th>Jenis BMN</th><th>Kode Satker</th><th>Nama Satker</th><th>Kode Barang</th><th>NUP</th><th>Kondisi</th><th>Umur Aset</th><th>I</th><th></th><th>Status SBSN</th><th>Status BMN Idle</th><th>Status Kemitraan</th><th></th></tr><tr><td>MESIN PERALATAN KHUSU 005012200099794000KD</td><td>PENGADILAN NEGERI SING 3100102001</td><td></td><td></td><td>3</td><td>Baik</td><td></td><td>4</td><td>Intra</td><td>Tidak</td><td></td><td>Tidak</td><td>Tidak</td></tr><tr><td>MESIN PERALATAN KHUSU 005012200099794000KD</td><td>PENGADILAN NEGERI SING 3100102001</td><td></td><td></td><td>4</td><td>Rusak Berat</td><td></td><td>4</td><td>Intra</td><td>Ya</td><td></td><td>Tidak</td><td>Tidak</td></tr><tr><td>MESIN PERALATAN KHUSU 005012200099794000KD</td><td>PENGADILAN NEGERI SING 3100102001</td><td></td><td></td><td>5</td><td>Rusak Berat</td><td></td><td>4</td><td>Intra</td><td>Ya</td><td></td><td>Tidak</td><td>Tidak</td></tr><tr><td>MESIN PERALATAN KHUSU 005012200099794000KD</td><td>PENGADILAN NEGERI SING 3100102001</td><td></td><td></td><td>6</td><td>Rusak Berat</td><td></td><td>4</td><td>Intra</td><td>Ya</td><td></td><td>Tidak</td><td>Tidak</td></tr><tr><td>MESIN PERALATAN KHUSU 005012200099794000KD</td><td>PENGADILAN NEGERI SING 3100102001</td><td></td><td></td><td>7</td><td>Rusak Berat</td><td></td><td>4</td><td>Intra</td><td>Ya</td><td></td><td>Tidak</td><td>Tidak</td></tr><tr><td>MESIN PERALATAN KHUSU 005012200099794000KD</td><td>PENGADILAN NEGERI SING 3100102001</td><td></td><td></td><td>9</td><td>Rusak Berat</td><td></td><td>4</td><td>Intra</td><td>Ya</td><td></td><td>Tidak</td><td>Tidak</td></tr><tr><td>MESIN PERALATAN KHUSU 005012200099794000KD</td><td>PENGADILAN NEGERI SING 3100102001</td><td></td><td></td><td>10</td><td>Rusak Berat</td><td></td><td>4</td><td>Intra</td><td>Ya</td><td></td><td>Tidak</td><td>Tidak</td></tr><tr><td>MESIN PERALATAN KHUSU 005012200099794000KD</td><td>PENGADILAN NEGERI SING 3100102001</td><td></td><td></td><td>11</td><td>Rusak Berat</td><td></td><td>4</td><td>Intra</td><td>Ya</td><td></td><td>Tidak</td><td>Tidak</td></tr><tr><td>MESIN PERALATAN KHUSU 005012200099794000KD</td><td>PENGADILAN NEGERI SING 3100102001</td><td></td><td></td><td>12</td><td>Baik</td><td></td><td>4</td><td>Intra</td><td>Tidak</td><td></td><td>Tidak</td><td>Tidak</td></tr><tr><td>MESIN PERALATAN KHUSU 005012200099794000KD</td><td>PENGADILAN NEGERI SING 3100102001</td><td></td><td></td><td>13</td><td>Baik</td><td></td><td>4</td><td>Intra</td><td>Tidak</td><td></td><td>Tidak</td><td>Tidak</td></tr><tr><td>MESIN PERALATAN KHUSU 005012200099794000KD</td><td>PENGADILAN NEGERI SING 3100102001</td><td></td><td></td><td>14</td><td>Baik</td><td></td><td>4</td><td>Intra</td><td>Tidak</td><td></td><td>Tidak</td><td>Tidak</td></tr><tr><td>MESIN PERALATAN KHUSU 005012200099794000KD</td><td>PENGADILAN NEGERI SING 3100102001</td><td></td><td></td><td>15</td><td>Baik</td><td></td><td>4</td><td>Intra</td><td>Tidak</td><td></td><td>Tidak</td><td>Tidak</td></tr><tr><td>MESIN PERALATAN KHUSU 005012200099794000KD</td><td>PENGADILAN NEGERI SING 3100102001</td><td></td><td></td><td>16</td><td>Rusak Berat</td><td></td><td>4</td><td>Intra</td><td>Ya</td><td></td><td>Tidak</td><td>Tidak</td></tr><tr><td>MESIN PERALATAN KHUSU 005012200099794000KD</td><td>PENGADILAN NEGERI SING 3100102001</td><td></td><td></td><td>17</td><td>Rusak Berat</td><td></td><td>4</td><td>Intra</td><td>Ya</td><td></td><td>Tidak</td><td>Tidak</td></tr><tr><td>MESIN PERALATAN KHUSU 005012200099794000KD</td><td>PENGADILAN NEGERI SING 3100102001</td><td></td><td></td><td>18</td><td>Rusak Berat</td><td></td><td>4</td><td>Intra</td><td>Ya</td><td></td><td>Tidak</td><td>Tidak</td></tr><tr><td>MESIN PERALATAN KHUSU 005012200099794000KD</td><td>PENGADILAN NEGERI SING 3100102001</td><td></td><td></td><td>19</td><td>Rusak Berat</td><td></td><td>4</td><td>Intra</td><td>Ya</td><td></td><td>Tidak</td><td>Tidak</td></tr><tr><td>MESIN PERALATAN KHUSU 005012200099794000KD</td><td>PENGADILAN NEGERI SING 3100102001</td><td></td><td></td><td>20</td><td>Rusak Berat</td><td></td><td>4</td><td>Intra</td><td>Ya</td><td></td><td>Tidak</td><td>Tidak</td></tr><tr><td>MESIN PERALATAN KHUSU 005012200099794000KD</td><td>PENGADILAN NEGERI SING 3100102001</td><td></td><td></td><td>21</td><td>Rusak Berat</td><td></td><td>4</td><td>Intra</td><td>Ya</td><td></td><td>Tidak</td><td>Tidak</td></tr><tr><td>MESIN PERALATAN KHUSU 005012200099794000KD</td><td>PENGADILAN NEGERI SING 3100102001</td><td></td><td></td><td>22</td><td>Rusak Berat</td><td></td><td>4</td><td>Intra</td><td>Ya</td><td></td><td>Tidak</td><td>Tidak</td></tr></table> https://acesse.one/Daftarasetaktif	A	B	C	D	E	I	J	K	L	M	N	O	P	Jenis BMN	Kode Satker	Nama Satker	Kode Barang	NUP	Kondisi	Umur Aset	I		Status SBSN	Status BMN Idle	Status Kemitraan		MESIN PERALATAN KHUSU 005012200099794000KD	PENGADILAN NEGERI SING 3100102001			3	Baik		4	Intra	Tidak		Tidak	Tidak	MESIN PERALATAN KHUSU 005012200099794000KD	PENGADILAN NEGERI SING 3100102001			4	Rusak Berat		4	Intra	Ya		Tidak	Tidak	MESIN PERALATAN KHUSU 005012200099794000KD	PENGADILAN NEGERI SING 3100102001			5	Rusak Berat		4	Intra	Ya		Tidak	Tidak	MESIN PERALATAN KHUSU 005012200099794000KD	PENGADILAN NEGERI SING 3100102001			6	Rusak Berat		4	Intra	Ya		Tidak	Tidak	MESIN PERALATAN KHUSU 005012200099794000KD	PENGADILAN NEGERI SING 3100102001			7	Rusak Berat		4	Intra	Ya		Tidak	Tidak	MESIN PERALATAN KHUSU 005012200099794000KD	PENGADILAN NEGERI SING 3100102001			9	Rusak Berat		4	Intra	Ya		Tidak	Tidak	MESIN PERALATAN KHUSU 005012200099794000KD	PENGADILAN NEGERI SING 3100102001			10	Rusak Berat		4	Intra	Ya		Tidak	Tidak	MESIN PERALATAN KHUSU 005012200099794000KD	PENGADILAN NEGERI SING 3100102001			11	Rusak Berat		4	Intra	Ya		Tidak	Tidak	MESIN PERALATAN KHUSU 005012200099794000KD	PENGADILAN NEGERI SING 3100102001			12	Baik		4	Intra	Tidak		Tidak	Tidak	MESIN PERALATAN KHUSU 005012200099794000KD	PENGADILAN NEGERI SING 3100102001			13	Baik		4	Intra	Tidak		Tidak	Tidak	MESIN PERALATAN KHUSU 005012200099794000KD	PENGADILAN NEGERI SING 3100102001			14	Baik		4	Intra	Tidak		Tidak	Tidak	MESIN PERALATAN KHUSU 005012200099794000KD	PENGADILAN NEGERI SING 3100102001			15	Baik		4	Intra	Tidak		Tidak	Tidak	MESIN PERALATAN KHUSU 005012200099794000KD	PENGADILAN NEGERI SING 3100102001			16	Rusak Berat		4	Intra	Ya		Tidak	Tidak	MESIN PERALATAN KHUSU 005012200099794000KD	PENGADILAN NEGERI SING 3100102001			17	Rusak Berat		4	Intra	Ya		Tidak	Tidak	MESIN PERALATAN KHUSU 005012200099794000KD	PENGADILAN NEGERI SING 3100102001			18	Rusak Berat		4	Intra	Ya		Tidak	Tidak	MESIN PERALATAN KHUSU 005012200099794000KD	PENGADILAN NEGERI SING 3100102001			19	Rusak Berat		4	Intra	Ya		Tidak	Tidak	MESIN PERALATAN KHUSU 005012200099794000KD	PENGADILAN NEGERI SING 3100102001			20	Rusak Berat		4	Intra	Ya		Tidak	Tidak	MESIN PERALATAN KHUSU 005012200099794000KD	PENGADILAN NEGERI SING 3100102001			21	Rusak Berat		4	Intra	Ya		Tidak	Tidak	MESIN PERALATAN KHUSU 005012200099794000KD	PENGADILAN NEGERI SING 3100102001			22	Rusak Berat		4	Intra	Ya		Tidak	Tidak
A	B	C	D	E	I	J	K	L	M	N	O	P																																																																																																																																																																																																																																																																									
Jenis BMN	Kode Satker	Nama Satker	Kode Barang	NUP	Kondisi	Umur Aset	I		Status SBSN	Status BMN Idle	Status Kemitraan																																																																																																																																																																																																																																																																										
MESIN PERALATAN KHUSU 005012200099794000KD	PENGADILAN NEGERI SING 3100102001			3	Baik		4	Intra	Tidak		Tidak	Tidak																																																																																																																																																																																																																																																																									
MESIN PERALATAN KHUSU 005012200099794000KD	PENGADILAN NEGERI SING 3100102001			4	Rusak Berat		4	Intra	Ya		Tidak	Tidak																																																																																																																																																																																																																																																																									
MESIN PERALATAN KHUSU 005012200099794000KD	PENGADILAN NEGERI SING 3100102001			5	Rusak Berat		4	Intra	Ya		Tidak	Tidak																																																																																																																																																																																																																																																																									
MESIN PERALATAN KHUSU 005012200099794000KD	PENGADILAN NEGERI SING 3100102001			6	Rusak Berat		4	Intra	Ya		Tidak	Tidak																																																																																																																																																																																																																																																																									
MESIN PERALATAN KHUSU 005012200099794000KD	PENGADILAN NEGERI SING 3100102001			7	Rusak Berat		4	Intra	Ya		Tidak	Tidak																																																																																																																																																																																																																																																																									
MESIN PERALATAN KHUSU 005012200099794000KD	PENGADILAN NEGERI SING 3100102001			9	Rusak Berat		4	Intra	Ya		Tidak	Tidak																																																																																																																																																																																																																																																																									
MESIN PERALATAN KHUSU 005012200099794000KD	PENGADILAN NEGERI SING 3100102001			10	Rusak Berat		4	Intra	Ya		Tidak	Tidak																																																																																																																																																																																																																																																																									
MESIN PERALATAN KHUSU 005012200099794000KD	PENGADILAN NEGERI SING 3100102001			11	Rusak Berat		4	Intra	Ya		Tidak	Tidak																																																																																																																																																																																																																																																																									
MESIN PERALATAN KHUSU 005012200099794000KD	PENGADILAN NEGERI SING 3100102001			12	Baik		4	Intra	Tidak		Tidak	Tidak																																																																																																																																																																																																																																																																									
MESIN PERALATAN KHUSU 005012200099794000KD	PENGADILAN NEGERI SING 3100102001			13	Baik		4	Intra	Tidak		Tidak	Tidak																																																																																																																																																																																																																																																																									
MESIN PERALATAN KHUSU 005012200099794000KD	PENGADILAN NEGERI SING 3100102001			14	Baik		4	Intra	Tidak		Tidak	Tidak																																																																																																																																																																																																																																																																									
MESIN PERALATAN KHUSU 005012200099794000KD	PENGADILAN NEGERI SING 3100102001			15	Baik		4	Intra	Tidak		Tidak	Tidak																																																																																																																																																																																																																																																																									
MESIN PERALATAN KHUSU 005012200099794000KD	PENGADILAN NEGERI SING 3100102001			16	Rusak Berat		4	Intra	Ya		Tidak	Tidak																																																																																																																																																																																																																																																																									
MESIN PERALATAN KHUSU 005012200099794000KD	PENGADILAN NEGERI SING 3100102001			17	Rusak Berat		4	Intra	Ya		Tidak	Tidak																																																																																																																																																																																																																																																																									
MESIN PERALATAN KHUSU 005012200099794000KD	PENGADILAN NEGERI SING 3100102001			18	Rusak Berat		4	Intra	Ya		Tidak	Tidak																																																																																																																																																																																																																																																																									
MESIN PERALATAN KHUSU 005012200099794000KD	PENGADILAN NEGERI SING 3100102001			19	Rusak Berat		4	Intra	Ya		Tidak	Tidak																																																																																																																																																																																																																																																																									
MESIN PERALATAN KHUSU 005012200099794000KD	PENGADILAN NEGERI SING 3100102001			20	Rusak Berat		4	Intra	Ya		Tidak	Tidak																																																																																																																																																																																																																																																																									
MESIN PERALATAN KHUSU 005012200099794000KD	PENGADILAN NEGERI SING 3100102001			21	Rusak Berat		4	Intra	Ya		Tidak	Tidak																																																																																																																																																																																																																																																																									
MESIN PERALATAN KHUSU 005012200099794000KD	PENGADILAN NEGERI SING 3100102001			22	Rusak Berat		4	Intra	Ya		Tidak	Tidak																																																																																																																																																																																																																																																																									
3	Pengadilan Negeri Singaraja melakukan analisis terhadap aset untuk mencari peluang standarisasi guna efisiensi biaya.	√	Aktivitas ini belum dilakukan																																																																																																																																																																																																																																																																																		
4	Pengadilan Negeri Singaraja mengevaluasi penggunaan	√	Aktivitas ini belum dilakukan																																																																																																																																																																																																																																																																																		

		teknologi baru atau strategi alternatif untuk efisiensi operasional.			
	5	Pengadilan Negeri Singaraja meninjau apakah peningkatan produk atau lisensi dapat memberikan manfaat yang lebih besar.	√	Aktivitas ini belum dilakukan	



Tabel 2. Hasil Rekapitulasi Kuesioner Pada Domain EDM02

Capabilit y Level	N o	Pernyataan	Ye s	N o	Keterangan	Data Dukung																																																																																																																																	
Level 1	1	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki dokumen perencanaan investasi TI yang mendukung strategi organisasi.	√		Dokumen perencanaan disusun melalui RKA-KL sebagai dasar penganggaran yang selaras dengan strategi organisasi.	KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi UNIT KERJA (099794) PENGADILAN NEGERI SINGARAJA ALOKASI Rp. 7.821,425,000 Halaman: 1 <table><tr><th rowspan="2">KODE</th><th rowspan="2">PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL</th><th colspan="3">PERHITUNGAN TAHUN 2025</th><th rowspan="2">SD/ CP</th></tr><tr><th>VOLUME</th><th>HARGA SATUAN</th><th>JUMLAH BIAYA</th></tr><tr><th>(1)</th><th>(2)</th><th>(3)</th><th>(4)</th><th>(5)</th><th>(6)</th></tr><tr><td>005.01.WA</td><td>Program Dukungan Manajemen</td><td></td><td></td><td>7,821,425,000</td><td></td></tr><tr><td>1071</td><td>Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung</td><td></td><td></td><td>123,110,000</td><td></td></tr><tr><td>1071.EBB</td><td>Layanan Sarana dan Prasarana Internal[Base Line]</td><td>2.0 Unit, m2, Paket</td><td></td><td>123,110,000</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Lokasi : KAB. BULELENG</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1071.EBB.951</td><td>Layanan Sarana Internal</td><td>1.0 Unit</td><td></td><td>88,110,000</td><td></td></tr><tr><td>053</td><td>Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran</td><td></td><td></td><td>88,110,000</td><td></td></tr><tr><td>A</td><td>Pengadaan sarana disabilitas</td><td></td><td></td><td>5,000,000</td><td></td></tr><tr><td>532111</td><td>Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KPPN 132-Singaraja)</td><td></td><td></td><td>5,000,000</td><td>RM</td></tr><tr><td></td><td>- Alat Bantu Dengar</td><td>1.0 unit</td><td>1,500,000</td><td>1,500,000</td><td></td></tr><tr><td></td><td>- Kacamata baca</td><td>1.0 Unit</td><td>1,500,000</td><td>1,500,000</td><td></td></tr><tr><td></td><td>- Kursi roda</td><td>1.0 Unit</td><td>2,000,000</td><td>2,000,000</td><td></td></tr><tr><td>B</td><td>Fasilitas Perkantoran</td><td></td><td></td><td>83,110,000</td><td></td></tr><tr><td>532111</td><td>Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KPPN 132-Singaraja)</td><td></td><td></td><td>83,110,000</td><td>RM</td></tr><tr><td></td><td>- AC Split</td><td>5.0 Unit</td><td>6,064,000</td><td>30,320,000</td><td></td></tr><tr><td></td><td>- AC standing</td><td>1.0 Unit</td><td>52,790,000</td><td>52,790,000</td><td></td></tr><tr><td>1071.EBB.971</td><td>Layanan Prasarana Internal</td><td>1.0 Unit</td><td></td><td>35,000,000</td><td></td></tr><tr><td>051</td><td>Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan</td><td></td><td></td><td>35,000,000</td><td></td></tr><tr><td>A</td><td>Pengadaan prasarana disabilitas</td><td></td><td></td><td>35,000,000</td><td></td></tr><tr><td>533121</td><td>Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan</td><td></td><td></td><td>35,000,000</td><td>RM</td></tr></table>	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	005.01.WA	Program Dukungan Manajemen			7,821,425,000		1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung			123,110,000		1071.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal[Base Line]	2.0 Unit, m2, Paket		123,110,000			Lokasi : KAB. BULELENG					1071.EBB.951	Layanan Sarana Internal	1.0 Unit		88,110,000		053	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran			88,110,000		A	Pengadaan sarana disabilitas			5,000,000		532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KPPN 132-Singaraja)			5,000,000	RM		- Alat Bantu Dengar	1.0 unit	1,500,000	1,500,000			- Kacamata baca	1.0 Unit	1,500,000	1,500,000			- Kursi roda	1.0 Unit	2,000,000	2,000,000		B	Fasilitas Perkantoran			83,110,000		532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KPPN 132-Singaraja)			83,110,000	RM		- AC Split	5.0 Unit	6,064,000	30,320,000			- AC standing	1.0 Unit	52,790,000	52,790,000		1071.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	1.0 Unit		35,000,000		051	Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan			35,000,000		A	Pengadaan prasarana disabilitas			35,000,000		533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan			35,000,000	RM
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP																																																																																																																																		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA																																																																																																																																			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)																																																																																																																																		
005.01.WA	Program Dukungan Manajemen			7,821,425,000																																																																																																																																			
1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung			123,110,000																																																																																																																																			
1071.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal[Base Line]	2.0 Unit, m2, Paket		123,110,000																																																																																																																																			
	Lokasi : KAB. BULELENG																																																																																																																																						
1071.EBB.951	Layanan Sarana Internal	1.0 Unit		88,110,000																																																																																																																																			
053	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran			88,110,000																																																																																																																																			
A	Pengadaan sarana disabilitas			5,000,000																																																																																																																																			
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KPPN 132-Singaraja)			5,000,000	RM																																																																																																																																		
	- Alat Bantu Dengar	1.0 unit	1,500,000	1,500,000																																																																																																																																			
	- Kacamata baca	1.0 Unit	1,500,000	1,500,000																																																																																																																																			
	- Kursi roda	1.0 Unit	2,000,000	2,000,000																																																																																																																																			
B	Fasilitas Perkantoran			83,110,000																																																																																																																																			
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KPPN 132-Singaraja)			83,110,000	RM																																																																																																																																		
	- AC Split	5.0 Unit	6,064,000	30,320,000																																																																																																																																			
	- AC standing	1.0 Unit	52,790,000	52,790,000																																																																																																																																			
1071.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	1.0 Unit		35,000,000																																																																																																																																			
051	Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan			35,000,000																																																																																																																																			
A	Pengadaan prasarana disabilitas			35,000,000																																																																																																																																			
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan			35,000,000	RM																																																																																																																																		

https://acesse.one/RKAKLPNSGR

	2	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki pemahaman yang jelas tentang bagaimana investasi TI mendukung tujuan bisnis dan strategis organisasi.	√	Dokumen RENSTRA menunjukkan integrasi antara arah kebijakan strategis dan perencanaan TI.	RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 PENGADILAN NEGERI SINGARAJA 6. Penguatan Akuntabilitas Pada Pengadilan Negeri Singaraja telah melakukan upaya untuk meningkatkan akuntabilitas manajemen keperkaraan maupun manajemen kesekretariatan (administrasi umum, kepegawaian, keuangan) yang didukung dengan penggunaan aplikasi seperti SIPP, e-Court, Simak BMN, SAIBA, SIKEP, e-monev bappenas, e-monev anggaran DJA, dan aplikasi lainnya. 7. Penguatan Pengawasan Pengawasan Internal pada Pengadilan Negeri Singaraja telah dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang yang dikoordinir oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja. Hasil dari pengawasan sebulan sekali di laporkan kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja melalui rapat bulanan yang rutin dilaksanakan. Selanjutnya akan dilakukan perbaikan-perbaikan yang dikoordinir oleh Panitera untuk bidang kepaniteraan dan Sekretaris untuk bidang kesekretariatan bilamana ada yang perlu diperbaiki. Selanjutnya hasil-hasil perbaikan tersebut dilaporkan kembali kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sebagai bahan evaluasi lebih lanjut. 8. Peningkatan Kualitas Pelayan Publik Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung https://acesse.one/Renstra2025-2029
--	---	--	---	---	---

	3	Pengadilan Negeri Singaraja mengidentifikasi dan mendokumentasikan berbagai aset dan sumber daya TI yang diperlukan untuk mendukung strategi organisasi.	√	Website Pengadilan Negeri Singaraja mendokumentasikan berbagai informasi	 The screenshot shows the official website of the Pengadilan Negeri Singaraja. The header is orange with navigation links: BERANDA, Tentang Pengadilan, Layanan Publik, Layanan Hukum, Hubungi Kami, Reformasi Birokrasi, Berita, APP Online, SMAP, and SURVEI. The main content area features a large banner for 'ULAS KAMI DI GOOGLE MAPS' with a date of 01 Januari 2023. Below the banner, there's a list of services: Laporan, Pengumuman, Pengadilan Layanan Publik, E-Brosur, E-raterang, Prosedur Peringatan Dini dan Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat, e Court, Awasi Pelayanan Kami Dengan Mengisi Survei Disini, and Jam Pelayanan Hari Senin s/d Hari Kamis. A sidebar menu on the left contains links to 'Ulasan Pengadil Singaraja', 'Laporan', 'Pengumuman', 'Pengadilan Layanan Publik', 'E-Brosur', 'E-raterang', 'Prosedur Peringatan Dini dan Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat', 'e Court', 'Awasi Pelayanan Kami Dengan Mengisi Survei Disini', and 'Jam Pelayanan Hari Senin s/d Hari Kamis'. The footer includes the text 'singaraja.go.id/#' and a large watermark of the UNDISHA logo. https://www.pn-singaraja.go.id/
--	---	--	---	--	---

4	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki proses persetujuan formal untuk rencana investasi TI yang mempertimbangkan hubungan dengan strategi organisasi.	√	Pengajuan investasi TI melalui Dokumen Rencana Strategis mengikuti prosedur dan disesuaikan dengan arah strategi.	Lima sasaran strategis tersebut merupakan arahan dari Mahkamah Agung untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi, misi serta sasaran, perlu ditetapkan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun program, kegiatan pokok dan kebijakan yang dibuat Pengadilan Negeri Singaraja mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut: 1. Program: Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Kegiatan: Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Program dan kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis: 1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel 2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara 3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan 4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan 2. Program: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Kegiatan Pokok: Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung Program dan kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis: https://acesse.one/Renstra2025-2029
5	Pengadilan Negeri Singaraja memahami dan mengelola isu-isu	√	Aktivitas ini belum didokumentasikan secara jelas dan	

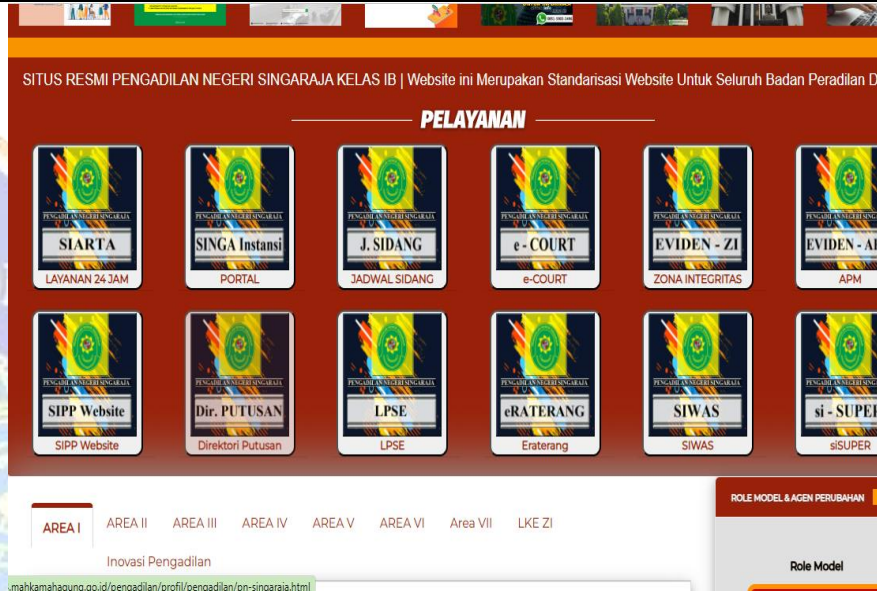
		strategis terkait TI serta dampaknya terhadap organisasi.			belum ada bukti pendukung.	
	6	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki mekanisme pelaporan dan komunikasi yang jelas terkait investasi TI dan kriteria evaluasinya.	√		Terdapat pelaporan dalam dokumen RENSTRA dan laporan tahunan terkait evaluasi investasi TI.	7. Penguatan Pengawasan Pengawasan Internal pada Pengadilan Negeri Singaraja telah dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang yang dikoordinir oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja. Hasil dari pengawasan sebulan sekali di laporkan kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja melalui rapat bulanan yang rutin dilaksanakan. Selanjutnya akan dilakukan perbaikan-perbaikan yang dikoordinir oleh Panitera untuk bidang kepaniteraan dan Sekretaris untuk bidang kesekretariatan bilamana ada yang perlu diperbaiki. Selanjutnya hasil-hasil perbaikan tersebut dilaporkan kembali kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sebagai bahan evaluasi lebih lanjut. 8. Peningkatan Kualitas Pelayan Publik Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor : 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi Di Lingkungan Peradilan Umum maka Pengadilan Negeri Singaraja juga menyelenggarakan pelayanan meja informasi, dimana meja informasi membantu mempermudah para pencari keadilan dalam berurusan dengan Pengadilan. Petugas Meja Informasi dilengkapi dengan telepon serta berada di tempat yang mudah. 3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan dan Peraturan Mahkamah Agung https://acesse.one/Renstra2025-2029

Level 3	1	Pengadilan Negeri Singaraja menetapkan investasi TI dengan mempertimbangkan keuntungan jangka pendek dan panjang, serta potensi risiko.	√	Perencanaan investasi mempertimbangkan manfaat jangka pendek dan panjang melalui dokumen RENSTRA dan RKA-KL.	negara hukum dan jaminan fundamental terhadap peradilan yang adil. Seorang hakim harus menjunjung tinggi independensi peradilan baik dari aspek individu maupun institusi. Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Singaraja. Rancangan Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rancangan Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Singaraja, baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variabel strategis. Pengadilan Negeri Singaraja dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Pengadilan Negeri Singaraja sebagai bagian dari unit organisasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Dalam menjalankan tugas utama tersebut, Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB menyelenggarakan fungsi utama, yaitu: https://acesse.one/Renstra2025-2029
	2	Pengadilan Negeri Singaraja memahami prinsip-prinsip tata kelola TI yang diperlukan untuk mencapai nilai	√	Aktivitas ini belum sepenuhnya dilaksanakan dan belum ada bukti dokumentasi formal.	-

		optimal bagi organisasi.				
	3	Pengadilan Negeri Singaraja melakukan evaluasi berkala terhadap peluang inovasi teknologi dan dampaknya terhadap proses bisnis.	√		Evaluasi dilakukan melalui laporan monitoring TI.	II.C. SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG PTIP INFORMASI DAN PELAPORAN 1.Kondisi: Web PN Singaraja tersusupi Judi Online Sebab: Kecanggihan Hacker dalam membobol System Website PN Singaraja Akibat: Terdapat Link Judi Online pada situs Wen PN Singaraja Rekomendasi : Melakukan Koordinasi secara berkala dengan vendor Hosting web agar segera di hilangkan link judol tsb dan memulihkan Web PN Singaraja Tindak Lanjut : Sudah Melakukan koordinasi dengan Vendor Hosting Web untuk menghapus iklan judol dan memulihkan Web PN Singaraja 2. Kondisi: Plafon Ruang PTIP Lembab dan Jamuran sehingga terlihat Kotor Kriteria: https://11nk.dev/LaporanPengawasanPTIP

	4	Pengadilan Negeri Singaraja melakukan evaluasi berkala terhadap peluang inovasi teknologi dan dampaknya terhadap proses bisnis.	√	Evaluasi dilakukan melalui laporan monitoring TI.	2. Kondisi: Web Sipp PN Singaraja di Suppend sementara oleh Rekanan (Rumah Media) di Karenakan di lihat ada yang mencurigakan mencoba mengakses / masuk melebihi kapasitas (Diduga Hacker) Sebab: Kecanggihan Hacker dalam membobol System Website PN Singaraja dan Tidak Adanya Pegawai Jafung Prakom di PN Singaraja Akibat: Terdapat hacker yang mencoba masuk / megakses pada situs Wen PN Singaraja Rekomendasi: Melakukan Koordinasi secara berkala dengan vendor Hosting web agar segera memulihkan Web PN Singaraja Tindak Lanjut: Sudah Melakukan koordinasi dengan Vendor Hosting Web untuk memulihkan Web PN Singaraja https://l1nk.dev/RapatPengawasanPTIP
--	---	---	---	---	--

	5	Pengadilan Negeri Singaraja menerapkan proses evaluasi bertahap dalam setiap keputusan investasi TI untuk mengelola risiko secara optimal.	√	Evaluasi bertahap tercermin dalam laporan monitoring TI, perlu konfirmasi lebih lanjut.	https://www.pn-singaraja.go.id/berita/rapat-bulanan-periode-bulan-pebruari-2025
--	---	--	---	---	---

	6	Pengadilan Negeri Singaraja mendorong pemanfaatan TI untuk meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing organisasi.	✓	Salah satu wujudnya dengan adanya Website Resmi dan hasil Monev Survey Kepuasan Pengguna.	 https://www.pn-singaraja.go.id/
	7	Pengadilan Negeri Singaraja memastikan adanya distribusi tanggung jawab yang jelas dalam pengelolaan investasi TI dan layanan bisnis.	✓	Aktivitas ini belum sepenuhnya dilaksanakan dan belum ada bukti dokumentasi formal.	-

	8	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki mekanisme penyesuaian rencana investasi berdasarkan perubahan kebutuhan organisasi.	√	Penyesuaian tercermin dalam Dokumen Rencana Strategis yang diperbaharui setiap 5 tahun	Singaraja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersedianya dokumen Rancangan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025- 2029 yang lebih akuntabel. Dengan tersusunnya Rancangan Rencana Strategis (Renstra) 2025 - 2029 ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Pengadilan Negeri Singaraja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersedianya dokumen Rancangan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025-2029 yang lebih akuntabel dan diharapkan adanya suatu Langkah yang nyata dalam meningkatkan kinerja Pengadilan Negeri Singaraja sebaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang berada di Kabupaten Singaraja, Bali Rancangan Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal, namun kami menyadari apabila masih ada kekurangannya, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan kebutuhan mendesak/prioritas dan kebijakan pimpinan Pengadilan Negeri Singaraja semoga Rancangan Rencana Strategis (Renstra) ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung visi Pengadilan Negeri Singaraja yaitu Mewujudkan Pengadilan Negeri Singaraja yang Agung. i https://acesse.one/Renstra2025-2029
--	---	--	---	--	--

	9	Pengadilan Negeri Singaraja secara aktif mengevaluasi inovasi teknologi dan potensi peningkatan operasional untuk meningkatkan nilai bisnis.	√	Laporan Monitoring TI, Cetak Biru	E. Arahan Pembaruan Pengelolaan Aset Unsur penunjang lain yang penting dalam mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang agung adalah, bila Badan Peradilan mampu mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan. Hal itu mencakup pengelolaan barang milik negara atau daerah yang biasa dikenal dengan manajemen aset milik negara. Sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah, cakupan manajemen aset milik negara meliputi: 1. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran; 2. Pengadaan; 3. Penggunaan; 4. Pemanfaatan; 5. Pengamanan dan pemeliharaan; 6. Penilaian; 7. Penghapusan; 8. Pemindahtanganan; 9. Penatausahaan; dan
--	---	--	---	-----------------------------------	---

Level 4	1	Pengadilan Negeri Singaraja melakukan evaluasi terhadap efektivitas strategi TI dalam pencapaian nilai organisasi.	√	Evaluasi dilakukan melalui survei kepuasan pengguna untuk menilai pemanfaatan TI.	Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pengguna Layanan Pengadilan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B, diperoleh kesimpulan : - Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) : 99,56% / 3,98; - Kualifikasi Mutu Pelayanan : A ; - Kategori Kinerja Unit Pelayanan : Sangat Baik Tiga unsur terendah Survey Kepuasan Masyarakat yaitu: 1. Indikator/unsur Prosedur Pelayanan dengan nilai 673 dengan indeks 3,959. 2. Indikator/unsur Waktu Pelayanan mendapat nilai 673 dengan indeks 3,959. 3. Indikator/unsur Persyaratan Pelayanan mendapat nilai 676 dengan indeks 3,976. https://11nk.dev/SurveyKepuasanPelayanan
	2	Pengadilan Negeri Singaraja mempertimbangkan dampak investasi TI sejalan dengan nilai organisasi dan manajemen keuangan.	√	Aktivitas ini belum terlaksana dan belum terdapat bukti pendukung.	-

	3	Pengadilan Negeri Singaraja mempertimbangkan bagaimana investasi TI mendukung nilai organisasi dan manajemen keuangan.	√	Aktivitas ini belum dilakukan dan tidak terdokumentasi secara formal.	-
--	---	--	---	---	---



	4	Pengadilan Negeri Singaraja memastikan investasi TI sejalan dengan tujuan strategis, efektivitas, efisiensi, serta risiko organisasi.	√	Kesesuaian tercermin dalam dokumen RENSTRA dan RKA-KL.	Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Singaraja. Rancangan Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rancangan Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Singaraja, baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variable strategis. Pengadilan Negeri Singaraja dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Pengadilan Negeri Singaraja sebagai bagian dari unit organisasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Dalam menjalankan tugas utama tersebut, Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB menyelenggarakan fungsi utama, yaitu: Fungsi Mengadili (Judicial Power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan dalam Tingkat https://acesse.one/Renstra2025-2029
	5	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki mekanisme untuk mengukur dan	√	Aktivitas ini belum terlaksana	-

		mengawasi pencapaian manfaat dari investasi TI.				
	6	Pengadilan Negeri Singaraja menetapkan dan meninjau tujuan kinerja serta indikator pengukuran yang mencakup berbagai aspek, baik keuangan maupun nonkeuangan, untuk memastikan evaluasi TI dilakukan secara seimbang dan sesuai dengan kebutuhan organisasi.		√	Aktivitas ini belum terlaksana	-
	7	Pengadilan Negeri Singaraja mengumpulkan data kinerja TI untuk mendukung		√	Aktivitas ini belum terlaksana	-

		pengambilan keputusan strategis.				
	8	Pengadilan Negeri Singaraja memastikan adanya laporan berkala terkait kinerja TI dan pencapaian tujuan organisasi.	√		Monitoring dilakukan melalui laporan TI yang rutin.	BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK A. Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB sebagai salah satu Pelaksana Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum pada Mahkamah Agung RI, bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas pokok serta fungsi di dalam penyelenggaraan Penegakan Hukum dan Keadilan. Dalam hal ini juga dituntut untuk memberikan Pelayanan Hukum bagi Publik atau khususnya bagi masyarakat Pencari Keadilan dengan lebih baik dan prima Di dalam proses pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, dan sebagai respon atas hal tersebut maka Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB juga telah melakukan upaya – upaya perbaikan di segala unit. Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB terus giat melakukan pembenahan perbaikan sistem kerja yang nantinya akan berdampak pada peningkatan efisiensi, efektifitas, serta produktifitas SDM Aparatur yang transparan dan akuntabel, serta memiliki Standar Pelayanan yang sesuai dengan kaidah manajemen modern yang dipraktekkan secara konsisten, hingga mempermudah dan memperlancar pelayanan prima. Namun demikian untuk melakukan perbaikan yang https://11nk.dev/LaporanPelaksanaanKegiatanTahunan

Level 5	1	Pengadilan Negeri Singaraja memastikan tindakan korektif dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kinerja TI.		√	Aktivitas ini belum terlaksana	
	2	Pengadilan Negeri Singaraja memastikan manajemen bertindak secara proaktif dalam mengoptimalkan manfaat investasi TI.		√	Aktivitas ini belum terlaksana	



Tabel 3. Hasil Rekapitulasi Kuesioner Pada Domain APO02

Capability Level	No	Pernyataan	Yes	No	Keterangan	Data Dukung
Level 1	1	Pengadilan Negeri Singaraja memahami dan memantau faktor eksternal yang dapat memengaruhi strategi dan operasional TI.	√		Diperkuat dengan dokumen perencanaan strategis.	D. TANTANGAN YANG DIHADAPI (<i>THREATS</i>) Berikut adalah tantangan - tantangan yang akan dihadapi Pengadilan Negeri Singaraja dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan. 1. Aspek Proses Peradilan - Memastikan semua proses perkara yang ada dimasukkan ke Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) tepat waktu; - Memastikan semua data perkara yang sudah di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Singaraja sudah sinkron minimal 3 kali dalam 1 hari ke Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung; - Memastikan data perkara yang dimasukkan ke Sistem Informasi Penelusuran Perkara sudah benar. 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan - Masih diperlukannya pelatihan - pelatihan untuk menghadapi berbagai regulasi dan perkembangan teknologi lainnya. 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan - Belum rutin melakukan pembuatan dokumen monitoring dan evaluasi dari berbagai pekerjaan yang dilakukan. 4. Aspek Sarana dan Prasarana https://acesse.one/Renstra2025-2029

	2	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki pemahaman yang jelas tentang cara kerja organisasi saat ini, termasuk operasional, teknologi, dan tantangan yang dihadapi.	√	Dijelaskan dalam perencanaan strategis.	Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang- Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada undang- undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dengan tersusunnya Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) 2025-2029 ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Pengadilan Negeri Singaraja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersedianya dokumen Rancangan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025- 2029 yang lebih akuntabel. Dengan tersusunnya Rancangan Rencana Strategis (Renstra) 2025 - 2029 ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Pengadilan Negeri Singaraja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersedianya dokumen Rancangan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025-2029 yang lebih akuntabel dan diharapkan adanya suatu Langkah yang nyata dalam meningkatkan kinerja Pengadilan Negeri Singaraja sebaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang berada di Kabupaten Singaraja, Bali Rancangan Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal, namun kami menyadari apabila masih ada kekurangannya, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan kebutuhan mendesak/prioritas dan kebijakan pimpinan Pengadilan Negeri Singaraja semoga Rancangan Rencana Strategis (Renstra) ini benar benar bermanfaat dalam mendukung visi Pengadilan https://acesse.one/Renstra2025-2029
--	---	---	---	---	---

	3	Pengadilan Negeri Singaraja telah mendefinisikan arah strategis dan tingkat ambisi digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan.	√	Tertuang dalam perencanaan strategis.	C. PELUANG (OPPORTUNITIES) Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Singaraja untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek: 1. Aspek Proses Peradilan • Adanya Website Pengadilan Negeri Singaraja yang memberikan informasi kepada masyarakat khususnya masyarakat pencari keadilan mengenai prosedur pengajuan perkara, layanan publik, layanan hukum, jadwal sidang, dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Singaraja yang memberikan informasi kepada masyarakat umum tentang proses perkara; • Adanya e-Court yaitu layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online dan pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik; • Adanya inovasi bernama SIARTA (Sistem Informasi Auto Respon dan Tanggap) yang dapat memberikan informasi berkaitan dengan jadwal sidang, data realisasi, data survei, dan bentuk keterbukaan informasi lainnya yang dapat diakses melalui <i>Whatsapp</i> sekaligus memberikan notifikasi terkait pengawasan terhadap penggunaan SIPP; • Adanya inovasi bernama HUMBLE (Halo Kaum Difabel) sebagai media https://acesse.one/Renstra2025-2029
--	---	---	---	---------------------------------------	---

	4	Pengadilan Negeri Singaraja telah mengidentifikasi pemangku kepentingan utama dan memahami kebutuhan mereka terkait strategi TI.	√	Dibuktikan melalui simulasi aplikasi e-Berpadu kepada APH di Buleleng.	e-Berpadu Masuk Fase Training, Pengadilan Negeri Singaraja Bergerak Melakukan Sosialisasi Ke Kejaksaan, Kepolisian, dan Lembaga Pemasyarakatan 07 September 2022 oleh Irfan  https://www.pn-singaraja.go.id/berita/e-berpadu-masuk-fase-training-pengadilan-negeri-singaraja-bergerak-melakukan-sosialisasi-ke-kejaksaan-kepolisian-dan-lembaga-pemasyarakatan
--	---	--	---	--	---

5	Pengadilan Negeri Singaraja telah mengidentifikasi kemampuan dan layanan TI yang dimiliki serta menilai layanan eksternal yang digunakan.	√	Berdasarkan hasil survei kepuasan pengguna.	BAB III PENGOLAHAN SURVEI A. Analisis Hasil Survei Berdasarkan analisis data hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan Unit PTSP pada Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B, diperoleh : - Nilai Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) : 99,77 / 3,99 ; - Kualifikasi Mutu Pelayanan : A ; - Kategori Kinerja Unit Pelayanan : Sangat Baik. Analisis selanjutnya disajikan berdasarkan masing - masing aspek pelayanan diuraikan sebagaimana tersebut di bawah ini. 1. Ketersediaan Informasi Hasil analisis pada aspek ketersediaan informasi secara ringkas disajikan dalam tabel dan grafik berikut ini: <table><tr><th></th><th>Frequency</th><th>Percent</th><th>Valid Percent</th><th>Cumulative Percent</th></tr><tr><td>Valid</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Tidak Tersedia</td><td>0</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Hanya Media Elektronik</td><td>0</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Hanya Media Non Elektronik</td><td>0</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Tersedia Elektronik dan Non</td><td>35</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td></tr></table> https://11nk.dev/SurveyKepuasanPelayanan		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent	Valid					Tidak Tersedia	0	0,00	0,00	0,00	Hanya Media Elektronik	0	0,00	0,00	0,00	Hanya Media Non Elektronik	0	0,00	0,00	0,00	Tersedia Elektronik dan Non	35	100	100	100
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent																														
Valid																																		
Tidak Tersedia	0	0,00	0,00	0,00																														
Hanya Media Elektronik	0	0,00	0,00	0,00																														
Hanya Media Non Elektronik	0	0,00	0,00	0,00																														
Tersedia Elektronik dan Non	35	100	100	100																														

	6	Pengadilan Negeri Singaraja telah menyusun ringkasan strategi organisasi dan menentukan aspek TI yang mendukung pencapaian tujuan strategis.	√	Implementasi melalui SPPT-TI.	Sosialisasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPTI-TI) Pada Pengadilan Negeri Singaraja 22 Juli 2022 oleh PN Singaraja  https://www.pn-singaraja.go.id/berita/sosialisasi-sistem-peradilan-pidana-terpadu-berbasis-teknologi-informasi-sppti-ti-pada-pengadilan-negeri-singaraja
--	---	--	---	-------------------------------	---

	7	Pengadilan Negeri Singaraja telah mendefinisikan tujuan dan sasaran TI serta memastikan kontribusinya terhadap pencapaian strategi organisasi.	✓	Tercermin dalam RENSTRA dan website resmi.	 https://www.pn-singaraja.go.id/
--	---	--	---	--	--

Level 3	1	Pengadilan telah melakukan penilaian terhadap kematangan digital di berbagai aspek, termasuk kesiapan kepemimpinan dalam memanfaatkan teknologi.	√	Sudah dilakukan dalam evaluasi TI.	LAPORAN HASIL PENGAWASAN BIDANG PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN (PTIP) PENGADILAN NEGERI SINGARAJA Oleh : HAKIM PENGAWAS PTIP PENGADILAN NEGERI SINGARAJA BULAN : JANUARI TAHUN 2025 https://11nk.dev/RapatPengawasanPTIP
---------	---	--	---	------------------------------------	--

	2	Pengadilan telah mengidentifikasi layanan dan produk I&T yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan strategisnya.	√	Sistem dan aplikasi TI sudah diidentifikasi.	Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Singaraja untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek: 1. Aspek Proses Peradilan - Adanya Website Pengadilan Negeri Singaraja yang memberikan informasi kepada masyarakat khususnya masyarakat pencari keadilan mengenai prosedur pengajuan perkara, layanan publik, layanan hukum, jadwal sidang, dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Singaraja yang memberikan informasi kepada masyarakat umum tentang proses perkara; - Adanya e-Court yaitu layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online dan pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik; - Adanya inovasi bernama SIARTA (Sistem Informasi Auto Respon dan Tanggap) yang dapat memberikan informasi berkaitan dengan jadwal sidang, data realisasi, data survei, dan bentuk keterbukaan informasi lainnya yang dapat diakses melalui <i>Whatsapp</i> sekaligus memberikan notifikasi terkait pengawasan terhadap penggunaan SIPP; - Adanya inovasi bernama HUMBLE (Halo Kaum Difabel) sebagai media reservasi sarana dan prasarana yang terdapat pada Pengadilan Negeri Singaraja. https://acesse.one/Renstra2025-2029
	3	Pengadilan telah menentukan metode pengembangan yang sesuai untuk mendukung	√	Aktivitas ini belum dilaksanakan	

		pencapaian tujuan IT				
	4	Pengadilan telah mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan.	√		Dituliskan dalam Dokumen Rencana Strategis	B. KELEMAHAN (<i>WEAKNESS</i>) Kelemahan – kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Singaraja dirinci dalam beberapa aspek: 1. Aspek Proses Peradilan - Masih kurangnya disiplin waktu untuk proses persidangan. 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan - Masih terdapat kekurangan sumber daya manusia baik di bagian Kepaniteraan maupun Kesekretariatan; - Sebagian pegawai Pengadilan Negeri Singaraja kurang menguasai teknologi informasi / aplikasi komputer, sedangkan pada kenyataan banyak pekerjaan pada Pengadilan Negeri Singaraja yang menggunakan teknologi informasi / aplikasi komputer. 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan - Pada Pengadilan Negeri Singaraja belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja secara optimal. 4. Aspek Sarana dan Prasarana - Pengadilan Negeri Singaraja di tahun 2020 sudah menempati gedung kantor baru, meskipun gedung kantor tersebut belum direhab 100%. Sehingga ruang tunggu anak, ruang sidang anak, ruang mediasi, ruang menyuisi dan ruang kesehatan masih menempati gedung lama dibagian sayap kanan. https://acesse.one/Renstra2025-2029
	5	Pengadilan telah mendefinisikan perubahan utama dalam arsitektur perusahaan untuk		√	Aktivitas ini belum dilaksanakan	

		mendukung strategi IT				
	6	Pengadilan telah melakukan analisis dampak perubahan IT terhadap bisnis dan model operasional.	√		Terlihat pada hasil audit TI.	2. Kondisi: Web Sipp PN Singaraja di Suppend sementara oleh Rekanan (Rumah Media) di Karenakan di lihat ada yang mencurigakan mencoba mengakses / masuk melebihi kapasitas (Diduga Hacker) Sebab: Kecanggihan Hacker dalam membobol System Website PN Singaraja dan Tidak Adanya Pegawai Jafung Prakom di PN Singaraja Akibat: Terdapat hacker yang mencoba masuk / megakses pada situs Wen PN Singaraja Rekomendasi: Melakukan Koordinasi secara berkala dengan vendor Hosting web agar segera memulihkan Web PN Singaraja Tindak Lanjut: Sudah Melakukan koordinasi dengan Vendor Hosting Web untuk memulihkan Web PN Singaraja https://l1nk.dev/RapatPengawasanPTIP
	7	Pengadilan telah mengidentifikasi inisiatif strategis untuk menjembatani		√	Aktivitas ini belum dilaksanakan	

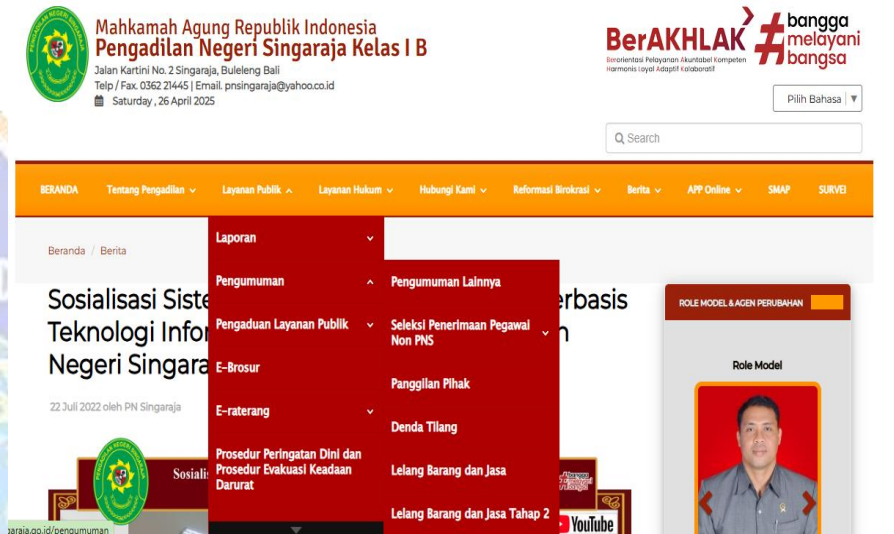
		kesenjangan antara kondisi saat ini dan target.				
	8	Pengadilan memiliki peta jalan yang jelas untuk implementasi strategi IT		√	Aktivitas ini belum dilaksanakan	
	9	Pengadilan telah mempertimbangkan peran mitra eksternal dalam mendukung implementasi strategi IT.	√		Dibuktikan dengan kontrak kerja.	f. Fasilitas yang Memudahkan Pegawai dan Masyarakat untuk Memperoleh Informasi Untuk website, Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB menyewa space hosting pada CV. Rumah Media. Untuk domain https://pn-singaraja.go.id mempergunakan layanan dari PANDI (Pengelola Alamat Domain Indonesia). Pilihan untuk menempatkan website pada penyedia layanan hosting swasta adalah menganut konsep <i>cost-effective and maintenance free</i>, dengan artian bahwa Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB tidak perlu mengeluarkan biaya yang mahal untuk koneksi internet berkecepatan tinggi dan tidak perlu menyediakan perangkat server yang mahal untuk melayani akses website Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB. https://11nk.dev/LaporanPelaksanaanKegiatanTahunan
	10	Pengadilan telah mengelompokkan inisiatif strategis menjadi program		√	Aktivitas ini belum dilaksanakan	

		atau proyek dengan tujuan yang jelas.				
	11	Pengadilan telah mengidentifikasi prioritas proyek berdasarkan dampak dan ketergantungan antar proyek.		√	Aktivitas ini belum dilaksanakan	
	12	Pengadilan telah menyusun peta jalan final untuk pelaksanaan strategi IT.		√	Aktivitas ini belum dilaksanakan	



	13	Pengadilan telah menetapkan pemimpin transformasi digital untuk memastikan keberhasilan strategi I&T.	√	Ada SK pegawai yang bertugas.	 KETUA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA NOMOR : 012 /KPN/SK.TI1.3.2/1/2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE PADA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KETUA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA, Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi dan untuk menunjang proses peradilan yang transparan dan akuntabel di Pengadilan Negeri Singaraja, diperlukan pengelolaan website secara profesional; https://l1nk.dev/SKTimPengelolaWebsite
--	----	---	---	-------------------------------	--

	14	Pengadilan telah mendapatkan dukungan dari pemangku kepentingan terhadap strategi IT.	√	Adanya SPPTI	SINGARAJA – Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B sebagai salah satu satuan kerja yang terpilih sebagai <i>pilot project</i> dari program SPPT-TI, pada 21 Juli 2022 bertempat di Ruang Pertemuan Pengadilan Negeri Singaraja, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja memaparkan tentang SPPT-TI kepada tiga instansi lainnya yang berhubungan dengan SPPT-TI. Tiga instansi tersebut antara lain, Kejaksaan, Kepolisian, dan juga Lembaga Pemasyarakatan. Kelak jika SPPT-TI ini sudah resmi dirilis, maka pertukaran data antar empat instansi ini diharapkan semakin cepat dan transparan.  https://www.pn-singaraja.go.id/berita/sosialisasi-sistem-peradilan-pidana-terpadu-berbasis-teknologi-informasi-sppti-ti-pada-pengadilan-negeri-singaraja
--	----	---	---	--------------	--

	15	Pengadilan Negeri Singaraja memiliki strategi komunikasi yang jelas untuk menyampaikan rencana pengendalian proses bisnis menggunakan media dan teknologi yang tersedia.	√	Diterapkan melalui website dan SPPT-TI.	
--	----	---	---	--	---

	16	Pengadilan telah menyiapkan strategi komunikasi untuk menyampaikan rencana implementasi strategi IT.	√	Tertuang dalam dokumen RENSTRA.	 https://acesse.one/Renstra2025-2029
	17	Pengadilan telah membangun jaringan pendukung untuk implementasi strategi I&T.	√	Aktivitas ini belum dilaksanakan	

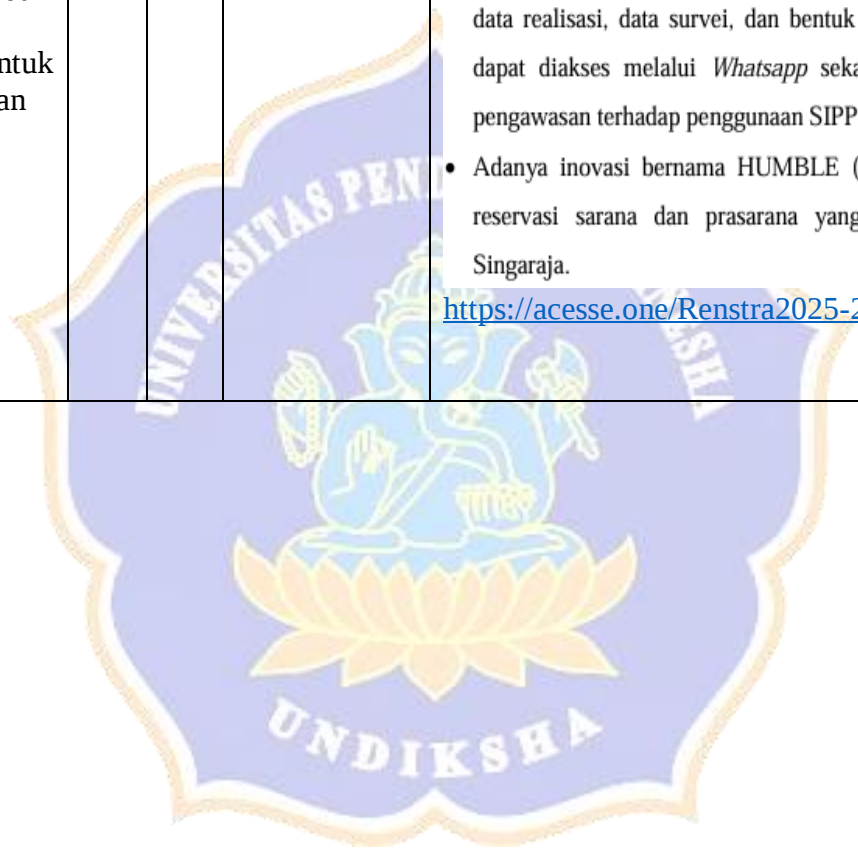
Level 4	1	Pengadilan telah mengevaluasi manfaat potensial dan risiko jika perubahan tidak dilakukan.		√	Aktivitas ini belum dilaksanakan	
	2	Pengadilan telah menyusun pernyataan nilai yang jelas mengenai manfaat lingkungan sasaran.		√	Aktivitas ini belum dilaksanakan	



	3	Pengadilan telah mengidentifikasi metrik dan target yang relevan untuk mengukur keberhasilan implementasi strategi I&T.	√			<table> <tr> <th>NO</th><th>KINERJA UTAMA</th><th>INDIKATOR KINERJA</th><th>FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN</th><th>PENANGGUNG JAWAB</th><th>SUMBER DATA</th><th>TARGET</th></tr> <tr> <td>1.</td><td>Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel</td><td>a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu</td><td> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - Surat Edaran Ketua MA RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tk. Pertama dan Tk. Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. - Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. - Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. - Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. - Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. </td><td>Panitera</td><td>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</td><td>93%</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.</td><td> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100\%$ Catatan : - SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan <i>Restorative Justice</i> di Lingkungan </td><td>Panitera</td><td>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</td><td>1%</td></tr> </table>	NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	TARGET	1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - Surat Edaran Ketua MA RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tk. Pertama dan Tk. Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. - Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. - Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. - Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. - Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	93%			b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100\%$ Catatan : SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan <i>Restorative Justice</i> di Lingkungan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	1%
NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	TARGET																					
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - Surat Edaran Ketua MA RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tk. Pertama dan Tk. Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. - Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. - Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. - Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. - Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	93%																					
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100\%$ Catatan : SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan <i>Restorative Justice</i> di Lingkungan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	1%																					

<https://11nk.dev/ReviuIKU2025>

	4	Pengadilan telah mengintegrasikan umpan balik dari pemangku kepentingan untuk menyempurnakan rencana komunikasi.	√		• Adanya inovasi bernama SIARTA (Sistem Informasi Auto Respon dan Tanggap) yang dapat memberikan informasi berkaitan dengan jadwal sidang, data realisasi, data survei, dan bentuk keterbukaan informasi lainnya yang dapat diakses melalui <i>Whatsapp</i> sekaligus memberikan notifikasi terkait pengawasan terhadap penggunaan SIPP; • Adanya inovasi bernama HUMBLE (Halo Kaum Difabel) sebagai media reservasi sarana dan prasarana yang terdapat pada Pengadilan Negeri Singaraja. https://acesse.one/Renstra2025-2029
--	---	--	---	--	---



Tabel 4. Hasil Rekapitulasi Kuesioner Pada Domain MEA01

Capability Level	No	Pernyataan	Yes	No	Keterangan	Data Dukung
Level 1	1	Pengadilan telah mengidentifikasi pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses pemantauan dan evaluasi kinerja serta kesesuaian.	√		Telah dilakukan identifikasi stakeholder.	

	2	Pengadilan telah melibatkan stakeholder dalam penyampaian tujuan dan persyaratan pemantauan kinerja serta kesesuaian dengan menggunakan terminologi yang jelas dan umum digunakan.	√	Stakeholder sudah dilibatkan dalam komunikasi tujuan.	SINGARAJA - Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB sebagai salah satu peradilan umum tingkat pertama mengikuti monitoring kinerja dan pelaksanaan eksekusi yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum secara daring melalui Ruang Pertemuan Pengadilan Negeri Singaraja pada 14 Oktober 2024. Pada kegiatan tersebut dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan eksekusi di beberapa satuan kerja peradilan umum yang bisa dilakukan melalui aplikasi SatuJari.  14 OKTOBER 2024 Monitoring Kinerja dan Pelaksanaan Eksekusi Melalui Aplikasi SatuJari https://www.pn-singaraja.go.id/berita/monitoring-kinerja-dan-pelaksanaan-eksekusi-melalui-aplikasi-satujari
--	---	---	---	--	---

	3	Pengadilan telah menyelaraskan metode pemantauan dan evaluasi dengan pendekatan yang digunakan dalam organisasi serta telah menetapkan alat bantu yang digunakan untuk pengumpulan dan pelaporan data.	√		Metode pemantauan telah diselaraskan dan alat bantu tersedia.	REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA <table> <tr> <th>NO</th><th>KINERJA UTAMA</th><th>INDIKATOR KINERJA</th><th>FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN</th><th>PENANGGUNG JAWAB</th><th>SUMBER DATA</th><th>TARGET</th></tr> <tr> <td>1.</td><td>Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel</td><td>a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu</td><td> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - Surat Edaran Ketua MA RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tk. Pertama dan Tk. Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. - Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. - Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. - Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. - Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. </td><td>Panitera</td><td>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</td><td>93%</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan</td><td> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100\%$ Catatan : </td><td>Panitera</td><td>Laporan Bulanan dan Laporan</td><td>1%</td></tr> </table>	NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	TARGET	1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - Surat Edaran Ketua MA RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tk. Pertama dan Tk. Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. - Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. - Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. - Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. - Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	93%			b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100\%$ Catatan :	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan	1%
NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	TARGET																					
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - Surat Edaran Ketua MA RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tk. Pertama dan Tk. Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. - Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. - Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. - Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. - Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	93%																					
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100\%$ Catatan :	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan	1%																					

<https://11nk.dev/ReviuIKU2025>

4	Pengadilan telah menetapkan jenis tujuan, ukuran kinerja, serta sistem penyimpanan data yang mendukung proses pemantauan dan evaluasi.	√	Ukuran kinerja dan sistem pendukung telah ditentukan	RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 PENGADILAN NEGERI SINGARAJA Hubungan Tujuan dan Sasaran <table><tr><th>No</th><th colspan="2">Tujuan</th><th colspan="2">Sasaran</th></tr><tr><th></th><th>Uraian</th><th>Indikator Kinerja</th><th>Uraian</th><th>Indikator Kinerja</th></tr><tr><td>1.</td><td>Masyarakat pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi</td><td>Persentase perkara yang mengajukan upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali</td><td>1. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel</td><td>a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>2. Peningkatan</td><td>a. Persentase Isi Putusan</td></tr></table> https://acesse.one/Renstra2025-2029	No	Tujuan		Sasaran			Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja	1.	Masyarakat pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	Persentase perkara yang mengajukan upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali	1. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan				2. Peningkatan	a. Persentase Isi Putusan
No	Tujuan		Sasaran																					
	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja																				
1.	Masyarakat pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	Persentase perkara yang mengajukan upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali	1. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan																				
			2. Peningkatan	a. Persentase Isi Putusan																				

<https://acesse.one/Renstra2025-2029>

	5	Pengadilan telah mengalokasikan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung proses pemantauan dan evaluasi dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi.	√	Sumber daya telah dialokasikan, termasuk pegawai PTIP.	LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA NOMOR : 012 /KPN/SK.T11.3.2/1/2025 TANGGAL : 2 Januari 2025 TIM PENGELOLA WEBSITE PADA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA <table><tr><th>NO</th><th>NAMA, PANGKAT/GOL RUANG & NIP</th><th>JABATAN</th><th>JABATAN DALAM TIM</th></tr><tr><td>1</td><td>I GEDE MAHARDIKA, S.H. Pangkat/Gol Ruang: PEMBINA (IV/a) NIP. 196707311991031002</td><td>SEKRETARIS</td><td>PENANGGUNG JAWAB KESEKRETARIATAN</td></tr><tr><td>2</td><td>SJARIFUDIN RASIJID, S.H. Pangkat/Gol Ruang: PEMBINA (IV/a) NIP. 197111112006041001</td><td>PANITERA</td><td>PENANGGUNG JAWAB KEPANITERAAN</td></tr><tr><td>3</td><td>KOMANG DEVI MAHARDIANI, S.H. Pangkat/Gol Ruang: PENATA (III/c) NIP. 199006192009122001</td><td>KEPALA SUBBAGIAN PTIP</td><td>KOORDINATOR</td></tr><tr><td>4</td><td>AHBABTA SHOHI, S.EI. Pangkat/Gol Ruang: PENATA MUDA (III/a) NIP. 199207242022031006</td><td>KLEREK – PENELAHH TEKNIS KEBIJAKAN</td><td>PENGELOLA</td></tr><tr><td>5</td><td>NI NYOMAN TRIWAHYUNINGSIH, S.Ak. Pangkat/Gol Ruang: PENATA MUDA (III/a) NIP. 199503282022032015</td><td>OPERATOR - PENATA LAYANAN OPERASIONAL</td><td>PELAKSANA</td></tr><tr><td>6</td><td>PUTU EKA YULIA AMBARAWATI, S.H. Pangkat/Gol Ruang: PENATA MUDA (III/a) NIP. 199907292024052001</td><td>KLEREK – ANALIS PERKARA PERADILAN</td><td>PELAKSANA</td></tr><tr><td>7</td><td>I DEWA AYU DIAH ANJANI, S.H. Pangkat/Gol Ruang: PENATA MUDA (III/a) NIP. 200107162024052001</td><td>KLEREK – ANALIS PERKARA PERADILAN</td><td>PELAKSANA</td></tr><tr><td>8</td><td>MARETA PRAMESTI AYUNINGTYAS, A.Md. Pangkat/Gol Ruang: PENGATUR (II/c) NIP. 199703112020122002</td><td>ARSIPARIS</td><td>PELAKSANA</td></tr></table> https://11nk.dev/SKTimPengelolaWebsite	NO	NAMA, PANGKAT/GOL RUANG & NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	1	I GEDE MAHARDIKA, S.H. Pangkat/Gol Ruang: PEMBINA (IV/a) NIP. 196707311991031002	SEKRETARIS	PENANGGUNG JAWAB KESEKRETARIATAN	2	SJARIFUDIN RASIJID, S.H. Pangkat/Gol Ruang: PEMBINA (IV/a) NIP. 197111112006041001	PANITERA	PENANGGUNG JAWAB KEPANITERAAN	3	KOMANG DEVI MAHARDIANI, S.H. Pangkat/Gol Ruang: PENATA (III/c) NIP. 199006192009122001	KEPALA SUBBAGIAN PTIP	KOORDINATOR	4	AHBABTA SHOHI, S.EI. Pangkat/Gol Ruang: PENATA MUDA (III/a) NIP. 199207242022031006	KLEREK – PENELAHH TEKNIS KEBIJAKAN	PENGELOLA	5	NI NYOMAN TRIWAHYUNINGSIH, S.Ak. Pangkat/Gol Ruang: PENATA MUDA (III/a) NIP. 199503282022032015	OPERATOR - PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PELAKSANA	6	PUTU EKA YULIA AMBARAWATI, S.H. Pangkat/Gol Ruang: PENATA MUDA (III/a) NIP. 199907292024052001	KLEREK – ANALIS PERKARA PERADILAN	PELAKSANA	7	I DEWA AYU DIAH ANJANI, S.H. Pangkat/Gol Ruang: PENATA MUDA (III/a) NIP. 200107162024052001	KLEREK – ANALIS PERKARA PERADILAN	PELAKSANA	8	MARETA PRAMESTI AYUNINGTYAS, A.Md. Pangkat/Gol Ruang: PENGATUR (II/c) NIP. 199703112020122002	ARSIPARIS	PELAKSANA
NO	NAMA, PANGKAT/GOL RUANG & NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM																																						
1	I GEDE MAHARDIKA, S.H. Pangkat/Gol Ruang: PEMBINA (IV/a) NIP. 196707311991031002	SEKRETARIS	PENANGGUNG JAWAB KESEKRETARIATAN																																						
2	SJARIFUDIN RASIJID, S.H. Pangkat/Gol Ruang: PEMBINA (IV/a) NIP. 197111112006041001	PANITERA	PENANGGUNG JAWAB KEPANITERAAN																																						
3	KOMANG DEVI MAHARDIANI, S.H. Pangkat/Gol Ruang: PENATA (III/c) NIP. 199006192009122001	KEPALA SUBBAGIAN PTIP	KOORDINATOR																																						
4	AHBABTA SHOHI, S.EI. Pangkat/Gol Ruang: PENATA MUDA (III/a) NIP. 199207242022031006	KLEREK – PENELAHH TEKNIS KEBIJAKAN	PENGELOLA																																						
5	NI NYOMAN TRIWAHYUNINGSIH, S.Ak. Pangkat/Gol Ruang: PENATA MUDA (III/a) NIP. 199503282022032015	OPERATOR - PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PELAKSANA																																						
6	PUTU EKA YULIA AMBARAWATI, S.H. Pangkat/Gol Ruang: PENATA MUDA (III/a) NIP. 199907292024052001	KLEREK – ANALIS PERKARA PERADILAN	PELAKSANA																																						
7	I DEWA AYU DIAH ANJANI, S.H. Pangkat/Gol Ruang: PENATA MUDA (III/a) NIP. 200107162024052001	KLEREK – ANALIS PERKARA PERADILAN	PELAKSANA																																						
8	MARETA PRAMESTI AYUNINGTYAS, A.Md. Pangkat/Gol Ruang: PENGATUR (II/c) NIP. 199703112020122002	ARSIPARIS	PELAKSANA																																						

6	Pengadilan telah menetapkan tujuan dan ukuran kinerja serta melakukan tinjauan berkala bersama stakeholder untuk memastikan kelayakan target.	√	Tinjauan berkala telah dilakukan.	<table><tr><th>NO</th><th>KINERJA UTAMA</th><th>INDIKATOR KINERJA</th><th>FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN</th><th>PENANGGUNG JAWAB</th><th>SUMBER DATA</th><th>TARGET</th></tr><tr><td>1.</td><td>Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel</td><td>a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu</td><td>$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - Surat Edaran Ketua MA RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tk. Pertama dan Tk. Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. - Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. - Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. - Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. - Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. </td><td>Panitera</td><td>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</td><td>93%</td></tr><tr><td></td><td></td><td>b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.</td><td>$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100 \%$ Catatan : - SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan </td><td>Panitera</td><td>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</td><td>1%</td></tr></table>	NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	TARGET	1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - Surat Edaran Ketua MA RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tk. Pertama dan Tk. Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. - Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. - Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. - Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. - Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	93%			b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100 \%$ Catatan : SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	1%
NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	TARGET																			
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - Surat Edaran Ketua MA RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tk. Pertama dan Tk. Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. - Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. - Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. - Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. - Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	93%																			
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100 \%$ Catatan : SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	1%																			

<https://11nk.dev/ReviuIKU2025>

<https://11nk.dev/ReviuIKU2025>

	7	Pengadilan Negeri Singaraja memastikan bahwa setiap tujuan dan indikator kinerja telah ditetapkan secara jelas, dapat diukur, realistis, relevan dengan kebutuhan organisasi, dan memiliki batas waktu yang jelas untuk dicapai.	√	Indikator telah dirumuskan secara SMART.	<table><tr><th>No</th><th>Catatan</th></tr><tr><td colspan="2">Perencanaan Kinerja</td></tr><tr><td>1.a</td><td>Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia</td></tr><tr><td></td><td>TIDAK ADA CATATAN</td></tr><tr><td>1.b</td><td>Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)</td></tr><tr><td>1.b.3</td><td>Kebutuhan kinerja pada Dokumen Perencanaan Kinerja yang telah disusun belum sepenuhnya tergambar pada eviden Pohon Kinerja., sampai dengan Level Pelaksana</td></tr></table>	No	Catatan	Perencanaan Kinerja		1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia		TIDAK ADA CATATAN	1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	1.b.3	Kebutuhan kinerja pada Dokumen Perencanaan Kinerja yang telah disusun belum sepenuhnya tergambar pada eviden Pohon Kinerja., sampai dengan Level Pelaksana
No	Catatan																
Perencanaan Kinerja																	
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia																
	TIDAK ADA CATATAN																
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)																
1.b.3	Kebutuhan kinerja pada Dokumen Perencanaan Kinerja yang telah disusun belum sepenuhnya tergambar pada eviden Pohon Kinerja., sampai dengan Level Pelaksana																
	8.	Pengadilan telah menginformasikan kepada stakeholder utama mengenai perubahan yang diusulkan terhadap target dan toleransi kinerja.	√	Aktivitas ini belum dilakukan													

	9	Pengadilan telah mendistribusikan informasi perubahan target dan toleransi kinerja kepada pengguna terkait.	√	Informasi telah didistribusikan	Sosialisasi Program Kerja Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bebas Korupsi (WBBM) Tahun 2025 08 Januari 2025 oleh Komang Devi 
--	---	---	---	---------------------------------	--

	10	Pengadilan telah melakukan pengumpulan data kinerja secara terstruktur, termasuk melalui sistem otomatis jika memungkinkan.	√		Pengumpulan data dilakukan, termasuk melalui SIPP. 1. Aspek Proses Peradilan - Adanya Website Pengadilan Negeri Singaraja yang memberikan informasi kepada masyarakat khususnya masyarakat pencari keadilan mengenai prosedur pengajuan perkara, layanan publik, layanan hukum, jadwal sidang, dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Singaraja yang memberikan informasi kepada masyarakat umum tentang proses perkara; - Adanya e-Court yaitu layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online dan pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik; - Adanya inovasi bernama SIARTA (Sistem Informasi Auto Respon dan Tanggap) yang dapat memberikan informasi berkaitan dengan jadwal sidang, data realisasi, data survei, dan bentuk keterbukaan informasi lainnya yang dapat diakses melalui <i>Whatsapp</i> sekaligus memberikan notifikasi terkait pengawasan terhadap penggunaan SIPP; - Adanya inovasi bernama HUMBLE (Halo Kaum Difabel) sebagai media reservasi sarana dan prasarana yang terdapat pada Pengadilan Negeri Singaraja. https://acesse.one/Renstra2025-2029
	11	Pengadilan telah mengevaluasi efisiensi dan kegunaan data yang dikumpulkan serta memastikan	√		Aktivitas ini belum dilaksanakan

		integritas data tersebut.																								
	12	Pengadilan telah mengelola data agregat untuk mendukung pengukuran kinerja secara menyeluruh.		√	Aktivitas ini belum dilaksanakan																					
	13	Pengadilan telah melakukan evaluasi terhadap respons manajemen serta opsi yang diusulkan dalam menangani penyimpangan kinerja.		√	Evaluasi telah dilakukan	<table><tr><th colspan="2">Pelaporan Kinerja</th></tr><tr><td>3.a</td><td>Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja</td></tr><tr><td>3.a.6</td><td>Dokumen PKT dan LKjIP tidak disampaikan tepat waktu</td></tr><tr><td>3.b</td><td>Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya</td></tr><tr><td>3.b.1</td><td>Agar uraian per Sub Bab disesuaikan dengan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah</td></tr><tr><td>3.b.2</td><td>Agar ditambahkan eviden Summary Executive</td></tr><tr><td>3.b.6</td><td>Agar dalam LKjIP menginfokan perbandingan target kinerja satker dengan Mahkamah Agung RI</td></tr><tr><td>3.b.7</td><td>Agar diuraikan pada LKjIP Bab III.A.5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;</td></tr><tr><td>3.c</td><td>Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya</td></tr><tr><td>3.c.1</td><td>Agar dilengkapi dengan dokumen Monev dan Tindaklanjut</td></tr></table> https://11nk.dev/LaporanHasilEvaluasiAkuntabilitasKinerjaInstansi	Pelaporan Kinerja		3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3.a.6	Dokumen PKT dan LKjIP tidak disampaikan tepat waktu	3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	3.b.1	Agar uraian per Sub Bab disesuaikan dengan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	3.b.2	Agar ditambahkan eviden Summary Executive	3.b.6	Agar dalam LKjIP menginfokan perbandingan target kinerja satker dengan Mahkamah Agung RI	3.b.7	Agar diuraikan pada LKjIP Bab III.A.5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;	3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	3.c.1	Agar dilengkapi dengan dokumen Monev dan Tindaklanjut
Pelaporan Kinerja																										
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja																									
3.a.6	Dokumen PKT dan LKjIP tidak disampaikan tepat waktu																									
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya																									
3.b.1	Agar uraian per Sub Bab disesuaikan dengan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah																									
3.b.2	Agar ditambahkan eviden Summary Executive																									
3.b.6	Agar dalam LKjIP menginfokan perbandingan target kinerja satker dengan Mahkamah Agung RI																									
3.b.7	Agar diuraikan pada LKjIP Bab III.A.5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;																									
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya																									
3.c.1	Agar dilengkapi dengan dokumen Monev dan Tindaklanjut																									

14	Pengadilan telah memastikan bahwa setiap tindakan korektif memiliki penanggung jawab yang jelas.	√	Penanggung jawab telah ditetapkan	LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA NOMOR : 012 /KPN/SK.T11.3.2/1/2025 TANGGAL : 2 Januari 2025 TIM PENGELOLA WEBSITE PADA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA <table><tr><th>NO</th><th>NAMA, PANGKAT/GOL RUANG & NIP</th><th>JABATAN</th><th>JABATAN DALAM TIM</th></tr><tr><td>1</td><td>I GEDE MAHARDIKA, S.H. Pangkat/Gol Ruang: PEMBINA (IV/a) NIP. 196707311991031002</td><td>SEKRETARIS</td><td>PENANGGUNG JAWAB KESEKRETARIATAN</td></tr><tr><td>2</td><td>SJARIFUDIN RASKJD, S.H. Pangkat/Gol Ruang: PEMBINA (IV/a) NIP. 197111112006041001</td><td>PANITERA</td><td>PENANGGUNG JAWAB KEPANITERAAN</td></tr><tr><td>3</td><td>KOMANG DEVI MAHARDIANI, S.H. Pangkat/Gol Ruang: PENATA (III/c) NIP. 199006192009122001</td><td>KEPALA SUBBAGIAN PTIP</td><td>KOORDINATOR</td></tr><tr><td>4</td><td>AHBABTA SHOHI, S.EI. Pangkat/Gol Ruang: PENATA MUDA (III/a) NIP. 199207242022031006</td><td>KLEREK – PENELAAH TEKNIK KEBIJAKAN</td><td>PENGELOLA</td></tr><tr><td>5</td><td>NI NYOMAN TRIWAHYUNINGSIH, S.Ak. Pangkat/Gol Ruang: PENATA MUDA (III/a) NIP. 199503282022032015</td><td>OPERATOR - PENATA LAYANAN OPERASIONAL</td><td>PELAKSANA</td></tr><tr><td>6</td><td>PUTU EKA YULIA AMBARAWATI, S.H. Pangkat/Gol Ruang: PENATA MUDA (III/a) NIP. 199907292024052001</td><td>KLEREK – ANALIS PERKARA PERADILAN</td><td>PELAKSANA</td></tr><tr><td>7</td><td>I DEWA AYU DIAH ANJANI, S.H. Pangkat/Gol Ruang: PENATA MUDA (III/a) NIP. 200107162024052001</td><td>KLEREK – ANALIS PERKARA PERADILAN</td><td>PELAKSANA</td></tr><tr><td>8</td><td>MARETA PRAMESTI AYUNINGTYAS, A.Md. Pangkat/Gol Ruang: PENGATUR (II/c) NIP. 199703112020122002</td><td>ARSIPARIS</td><td>PELAKSANA</td></tr></table> https://11nk.dev/SKTimPengelolaWebsite	NO	NAMA, PANGKAT/GOL RUANG & NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	1	I GEDE MAHARDIKA, S.H. Pangkat/Gol Ruang: PEMBINA (IV/a) NIP. 196707311991031002	SEKRETARIS	PENANGGUNG JAWAB KESEKRETARIATAN	2	SJARIFUDIN RASKJD, S.H. Pangkat/Gol Ruang: PEMBINA (IV/a) NIP. 197111112006041001	PANITERA	PENANGGUNG JAWAB KEPANITERAAN	3	KOMANG DEVI MAHARDIANI, S.H. Pangkat/Gol Ruang: PENATA (III/c) NIP. 199006192009122001	KEPALA SUBBAGIAN PTIP	KOORDINATOR	4	AHBABTA SHOHI, S.EI. Pangkat/Gol Ruang: PENATA MUDA (III/a) NIP. 199207242022031006	KLEREK – PENELAAH TEKNIK KEBIJAKAN	PENGELOLA	5	NI NYOMAN TRIWAHYUNINGSIH, S.Ak. Pangkat/Gol Ruang: PENATA MUDA (III/a) NIP. 199503282022032015	OPERATOR - PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PELAKSANA	6	PUTU EKA YULIA AMBARAWATI, S.H. Pangkat/Gol Ruang: PENATA MUDA (III/a) NIP. 199907292024052001	KLEREK – ANALIS PERKARA PERADILAN	PELAKSANA	7	I DEWA AYU DIAH ANJANI, S.H. Pangkat/Gol Ruang: PENATA MUDA (III/a) NIP. 200107162024052001	KLEREK – ANALIS PERKARA PERADILAN	PELAKSANA	8	MARETA PRAMESTI AYUNINGTYAS, A.Md. Pangkat/Gol Ruang: PENGATUR (II/c) NIP. 199703112020122002	ARSIPARIS	PELAKSANA
NO	NAMA, PANGKAT/GOL RUANG & NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM																																					
1	I GEDE MAHARDIKA, S.H. Pangkat/Gol Ruang: PEMBINA (IV/a) NIP. 196707311991031002	SEKRETARIS	PENANGGUNG JAWAB KESEKRETARIATAN																																					
2	SJARIFUDIN RASKJD, S.H. Pangkat/Gol Ruang: PEMBINA (IV/a) NIP. 197111112006041001	PANITERA	PENANGGUNG JAWAB KEPANITERAAN																																					
3	KOMANG DEVI MAHARDIANI, S.H. Pangkat/Gol Ruang: PENATA (III/c) NIP. 199006192009122001	KEPALA SUBBAGIAN PTIP	KOORDINATOR																																					
4	AHBABTA SHOHI, S.EI. Pangkat/Gol Ruang: PENATA MUDA (III/a) NIP. 199207242022031006	KLEREK – PENELAAH TEKNIK KEBIJAKAN	PENGELOLA																																					
5	NI NYOMAN TRIWAHYUNINGSIH, S.Ak. Pangkat/Gol Ruang: PENATA MUDA (III/a) NIP. 199503282022032015	OPERATOR - PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PELAKSANA																																					
6	PUTU EKA YULIA AMBARAWATI, S.H. Pangkat/Gol Ruang: PENATA MUDA (III/a) NIP. 199907292024052001	KLEREK – ANALIS PERKARA PERADILAN	PELAKSANA																																					
7	I DEWA AYU DIAH ANJANI, S.H. Pangkat/Gol Ruang: PENATA MUDA (III/a) NIP. 200107162024052001	KLEREK – ANALIS PERKARA PERADILAN	PELAKSANA																																					
8	MARETA PRAMESTI AYUNINGTYAS, A.Md. Pangkat/Gol Ruang: PENGATUR (II/c) NIP. 199703112020122002	ARSIPARIS	PELAKSANA																																					

	16	Pengadilan telah menyusun dan menyampaikan laporan hasil tindakan korektif kepada stakeholder terkait.	√	Laporan telah disampaikan	 Pengadilan Negeri Singaraja LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Tahun 2023 https://acesse.one/LaporanKinerjaInstansiPemerintah2024
--	----	--	---	---------------------------	--

Level 3	1	Pendekatan yang digunakan dalam pemantauan dan evaluasi kinerja di Pengadilan Negeri Singaraja telah divalidasi secara berkala, serta pemangku kepentingan, persyaratan, dan sumber daya yang baru atau berubah telah diidentifikasi	√	Validasi dan identifikasi pemangku kepentingan dilakukan secara berkala melalui rapat rutin.	Rapat Bulanan Periode Bulan Pebruari 2025 27 Februari 2025 oleh Komang Devi  27 FEBRUARI 2025 Rapat Bulanan Periode Pebruari 2025
	2	Terdapat proses manajemen siklus hidup dan pengendalian perubahan yang telah disepakati di Pengadilan Negeri Singaraja untuk pemantauan dan pelaporan kinerja, termasuk perbaikan dalam pelaporan, metrik, pendekatan,	√	Aktivitas ini belum dilaksanakan	

		baseline, dan benchmarking.				
	3	Data agregat dalam sistem informasi Pengadilan Negeri Singaraja telah diselaraskan dengan pendekatan dan tujuan pelaporan yang ditetapkan, untuk memastikan akurasi dan konsistensi dalam evaluasi kinerja.		√	Aktivitas ini belum dilaksanakan	



	4	Laporan kinerja proses di Pengadilan Negeri Singaraja telah dirancang secara ringkas, mudah dipahami, dan disesuaikan dengan kebutuhan pimpinan serta pemangku kepentingan, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang efektif dan tepat waktu.	√	Laporan sudah disesuaikan dengan kebutuhan pimpinan.	 Pengadilan Negeri Singaraja LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Tahun 2023 https://acesse.one/LaporanKinerjaInstansiPemerintah2024
--	---	---	---	---	--

	5	Laporan kinerja di Pengadilan Negeri Singaraja telah didistribusikan kepada pemangku kepentingan yang relevan sesuai dengan kebijakan dan prosedur pelaporan yang berlaku.	√	Distribusi laporan dilakukan sesuai dengan ketentuan melalui kegiatan kunjungan dan pelaporan.	Kunjungan Kerja Tim Penilai Dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Dalam Rangka Penilaian Lomba PTSP & AMPUH 05 September 2024 oleh Irfan Hanandra 
--	---	--	---	--	--

Level 4	1	Pengadilan Negeri Singaraja telah menggunakan alat dan sistem yang sesuai untuk pemrosesan dan analisis data guna mendukung evaluasi kinerja secara akurat dan efektif.	√		Pemrosesan data kinerja dilakukan menggunakan sistem aplikasi SIPP.	
	2	Penyebab penyimpangan terhadap target kinerja di Pengadilan Negeri Singaraja telah		√	Aktivitas ini belum dilaksanakan	

Tampilan SIPP/CTS Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB

		dianalisis, serta tindakan perbaikan telah ditetapkan dengan tanggung jawab yang jelas dan terdokumentasi dengan baik.				
	3	Sasaran kinerja individu di Pengadilan Negeri Singaraja telah mengintegrasikan aspek kinerja dan kepatuhan, serta pencapaian target kinerja dikaitkan dengan sistem penghargaan organisasi.	√		Terdapat dokumentasi pemberian penghargaan kepada pegawai berprestasi. Pemberian Reward Semester II Tahun 2024 02 Januari 2025 oleh Komang Devi 	

	4	Hasil kinerja Pengadilan Negeri Singaraja telah dibandingkan dengan target internal serta, jika memungkinkan, dengan standar industri atau pengadilan lain sebagai tolok ukur eksternal.		√	Aktivitas ini belum dilaksanakan	

	5.	Tren kinerja dan kepatuhan di Pengadilan Negeri Singaraja telah dianalisis secara berkala, serta tindakan yang sesuai telah diambil untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional.	√		Analisis dilakukan berkala untuk meningkatkan efisiensi.	Audit Kinerja Pada Pengadilan Negeri Singaraja 19 September 2024 oleh Irfan Hanandra 
Level 5	1	Pengadilan Negeri Singaraja secara berkala mengevaluasi sasaran dan metrik kinerja serta memberikan rekomendasi perubahan yang	√		Aktivitas ini belum dilaksanakan	

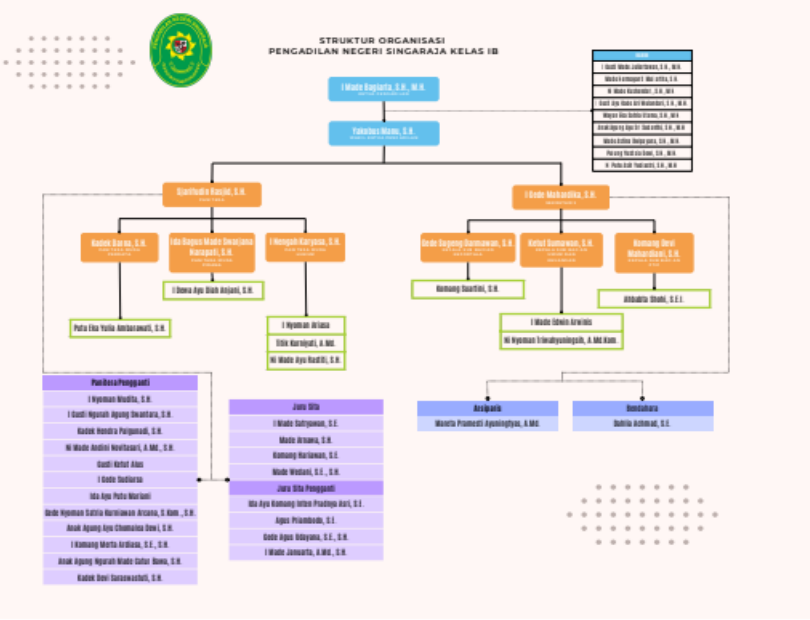
		diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pemantauan dan evaluasi.				
--	--	--	--	--	--	--



Tabel 5. Hasil Rekapitulasi Kuesioner Pada Domain DSS06

Capability Level	No	Pernyataan	Yes	No	Keterangan	Data Dukung
Level	1	Pengadilan Negeri Singaraja telah mengidentifikasi dan mendokumentasikan aktivitas pengendalian untuk memastikan proses bisnis utama sesuai dengan tujuan strategis, operasional, pelaporan, dan kepatuhan.	√		Pengendalian proses dilakukan melalui SOP pengajuan perkara.	Prosedur Pengajuan Permohonan <pre> graph LR subgraph "Prosedur Pengajuan Permohonan" direction LR A[Penggugat/Pemohon Pendaftaran Surat Gugatan/Permohonan] --> B[Meja 1 Menerima Surat Gugatan/Permohonan dan Menghitung Panjar Perkara] B --> C[Penggugat/Pemohon Pembayaran Panjar Perkara Pada BANK Yang Ditunjuk] C --> D[Kasir Menerima Slip Pembayaran Panjar Perkara, membuat SKUM, menyerahkan SKUM Lembar I kepada Penggugat/Pemohon, Lembar II untuk Arsip dan membukukannya] D --> E[Meja 2 Menyerahkan 1 Salinan Gugatan/Permohonan yang telah dibubuhi tandatangan Panitera kepada Penggugat/Pemohon] E --> F[Panitera Membubuhkan tandatangan pada Surat Gugatan/Permohonan] F --> G[Panmud Perdata Memeriksa berkas perkara dan merekam perkara Gugatan/Permohonan kedalam Aplikasi SIPP] G --> H[Meja 2 Menerima SKUM lembar III, Surat Gugatan/Permohonan untuk Penomoran dan mencatatkan kedalam buku Register dan Aplikasi SIPP] H --> I[Penggugat/Pemohon Menunggu Panggilan Sidang Untuk Pemeriksaan Persidangan] end </pre> Prosedur Penerimaan Perkara Pidana Biasa MEJA PERTAMA https://www.pn-singaraja.go.id/page/prosedur-pengajuan-perkara

	2	Pengadilan Negeri Singaraja menetapkan prioritas pengendalian berdasarkan risiko yang ada serta mengidentifikasi kontrol utama yang diperlukan.	√	Prioritas kontrol tercermin dalam dokumen tata urutan persidangan.	Kepaniteraan Pidana Tata Urutan Persidangan Perkara Pada Pengadilan Negeri 1. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum (kecuali perkara tertentu dinyatakan tertutup untuk umum); 2. PU diperintahkan untuk menghadapkan terdakwa ke depan persidangan dalam keadaan bebas; 3. Terdakwa ditanyakan <i>identitasnya</i> dan ditanya apakah sudah menerima salinan surat dakwaan; 4. Terdakwa ditanya pula apakah dalam keadaan <i>sehat</i> dan bersedia untuk diperiksa di depan persidangan (kalau bersedia sidang dilanjutkan); 5. Terdakwa ditanyakan apakah akan didampingi oleh Penasihat Hukum (apabila didampingi apakah akan membawa sendiri, kalau tidak membawa sendiri akan ditunjuk PH oleh Majelis Hakim dalam hal terdakwa diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih/pasal 56 KUHP ayat (1)); 6. Dilanjutkan pembacaan surat dakwaan; 7. Atas pembacaan surat dakwaan tadi terdakwa (PH) ditanya akan mengajukan eksepsi atau tidak; 8. Dalam terdakwa/PH mengajukan eksepsi maka diberi kesempatan dan sidang ditunda; 9. Apabila ada eksepsi dilanjutkan tanggapan JPU atas eksepsi (<i>replik</i>); 10. Selanjutnya dibacakan putusan sela oleh Majelis Hakim; 11. Apabila eksepsi ditolak dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara (pembuktian) 12. Pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan oleh PU (dimulai dari saksi korban); 13. Dilanjutkan saksi lainnya; 14. Apabila ada saksi yang meringankan diperiksa pula, saksi ahli (<i>Witness/expert</i>) 15. Pemeriksaan terhadap terdakwa; 16. Tuntutan (<i>requisitoir</i>); 17. Pembelaan (<i>pledoi</i>); 18. Replik dari PU; 19. Duplik 20. Putusan oleh Majelis Hakim. https://www.pn-singaraja.go.id/page/tata-urutan-persidangan-perkara-pada-pengadilan-negeri#!
--	---	---	---	--	--

	3	Pengadilan Negeri Singaraja menetapkan pemilik tanggung jawab untuk setiap aktivitas pengendalian utama guna memastikan akuntabilitas.	✓	Tanggung jawab dijabarkan dalam struktur organisasi.	 https://11nk.dev/StrukturOrganisasiPNSgr
--	---	---	---	---	--

	4	Setiap transaksi di Pengadilan Negeri Singaraja diautentikasi dan diverifikasi untuk memastikan bahwa hanya individu yang berwenang yang dapat memulai transaksi.	√	Tugas dipisahkan melalui struktur kerja dan unit pelayanan.	 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS IB #ptspbadium2021 Priorities For Disabilities PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS IB www.pn-singaraja.go.id Pengadilan Negeri Singaraja Pengadilan.Negeri.Singaraja (0362) - 21445 pnsingaraja@yahoo.com
--	---	---	---	---	---

	5	Pengadilan Negeri Singaraja menerapkan pemisahan tugas antara inisiasi dan persetujuan transaksi untuk menghindari konflik kepentingan.	√	Tugas dipisahkan melalui struktur kerja dan unit pelayanan.	  PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS IB #ptspbadilum2021   PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS IB www.pn-singaraja.go.id  Pengadilan Negeri Singaraja  Pengadilan.Negeri.Singaraja  (0362) - 21445  pnsingaraja@yahoo.com
--	---	---	---	---	---

	6	Setiap peran dalam Pengadilan Negeri Singaraja dialokasikan sesuai dengan deskripsi pekerjaan dan aktivitas proses bisnis yang telah ditetapkan.	√	Penjabaran tugas terdapat dalam dokumen tupoksi.	Profile Pengadilan Tugas Pokok dan Fungsi A. Tugas Pengadilan Negeri Singaraja merupakan lingkungan peradilan umum tingkat pertama di bawah Pengadilan Tinggi Denpasar di Provinsi Bali yang menjadi kawal depan (Voorj post) Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan. Pengadilan Negeri Singaraja sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang masuk di tingkat pertama. B. Fungsi Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Singaraja antara lain: Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi perencanaan/teknologi informasi, umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum https://www.pn-singaraja.go.id/page/tugas-pokok-dan-fungsi
--	---	--	---	--	---

	7	Kewenangan persetujuan transaksi, batas transaksi, dan keputusan lainnya dalam Pengadilan Negeri Singaraja ditetapkan berdasarkan peran pekerjaan yang telah disetujui.	√	Pengaturan wewenang dijabarkan dalam kebijakan PTSP.	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS 1B Dengan adanya kelembagaan pelayanan terpadu satu pintu, seluruh pelayanan masyarakat yang berhubungan proses peradilan dan pelayanan hukum lainnya dapat terlayani dalam satu sistem. Harapan yang ingin dicapai adalah untuk meningkatkan kepuasan pengguna peradilan. serta untuk terwujud pelayanan publik yang cepat murah, mudah, transparan, pasti, dan terjangkau, di samping untuk meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B memiliki total 7 loket dengan rincian sebagai berikut: Meja Inzage, Meja e-court, Meja Perdata, Meja Pidana, Meja Hukum, Meja Layanan Informasi, dan Meja Umum & keuangan. Kesemuanya siap dan tanggap dalam melayani kebutuhan masyarakat pencari keadilan. PTSP Singaraja juga telah dilengkapi fasilitas sarana dan prasaranya untuk menunjang kenyamanan pengunjung yakni: ruangan ber-ac, kursi ruang tunggu, mesin antrian online, layar informasi layanan publik, ruang tunggu prioritas untuk difabel, charging station, air minum, dll. Petugas PTSP Pengadilan Negeri Singaraja juga telah dibekali pengetahuan pelayanan prima dan pelatihan-pelatihan lain yang dapat menunjang pelayanan masyarakat pencari keadilan. Pada tahun 2024, sesuai Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Tentang Penetapan Pemenang Lomba Bagi Satuan Kerja di Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2024 menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B mendapat Juara https://l1nk.dev/LaporanPelaksanaanKegiatanTahunan
--	---	---	---	--	---

	9	Kesalahan, pengecualian, dan penyimpangan dalam proses bisnis di Pengadilan Negeri Singaraja ditinjau secara berkala.	√	Tinjauan dilakukan melalui audit TI.	II.C. SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG PTIP INFORMASI DAN PELAPORAN 1.Kondisi: Web PN Singaraja tersusupi Judi Online Sebab: Kecanggihan Hacker dalam membobol System Website PN Singaraja Akibat: Terdapat Link Judi Online pada situs Wen PN Singaraja Rekomendasi : Melakukan Koordinasi secara berkala dengan vendor Hosting web agar segera di hilangkan link judol tsb dan memulihkan Web PN Singaraja Tindak Lanjut : Sudah Melakukan koordinasi dengan Vendor Hosting Web untuk menghapus iklan judol dan memulihkan Web PN Singaraja 2. Kondisi: Plafon Ruang PTIP Lembab dan Jamuran sehingga terlihat Kotor Kriteria: https://l1nk.dev/LaporanPengawasanPTIP
--	---	---	---	--------------------------------------	---

	10	Dokumen sumber dan transaksi yang mengalami kesalahan diperbaiki, disetujui kembali, dan dikirim ulang oleh Pengadilan Negeri Singaraja.	√	Proses dokumentasi dikendalikan secara internal.	A. INTERNAL Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. : KMA/ 080 / SK / VIII / 2006 tanggal 24 Agustus 2006, yang dimaksud dengan Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri, yang merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. Dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. : KMA/ 080 / SK / VIII / 2006 tersebut, selanjutnya telah diuraikan secara lebih jelas mengenai maksud, tujuan dan fungsi pengawasan itu, sebagai berikut : 1. Maksud Pengawasan : - Untuk memperoleh informasi apakah penyelenggaraan teknis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. - Untuk memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan, dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan. - Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, mal administrasi, dan ketidakefisienan penyelenggaraan peradilan. - Untuk menilai kinerja. https://l1nk.dev/LaporanPelaksanaanKegiatanTahunan
--	----	--	---	--	--

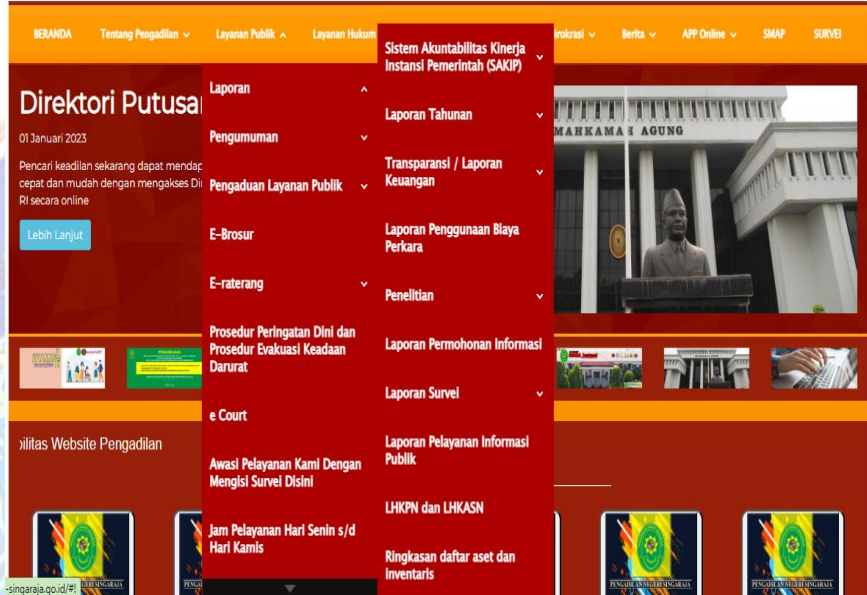
	11	Pengadilan Negeri Singaraja menyimpan bukti semua tindakan perbaikan yang telah dilakukan untuk memastikan akuntabilitas.	√	Terdapat dokumentasi penyimpanan internal.	TINDAK LANJUT PENGAWASAN BIDANG PTIP MARET 2025 Terdapat beberapa CCTV Kantor Yang Mati / Rusak <table><tr><th>Before</th><th>After</th></tr><tr><td></td><td></td></tr></table> Web Sipp di Suspend <table><tr><th>Before</th><th>After</th></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	Before	After			Before	After		
Before	After												
													
Before	After												
													

<https://11nk.dev/TindakLanjutBulanMaret>

	12	Semua informasi sumber, bukti pendukung, dan catatan transaksi terdokumentasi dengan baik di Pengadilan Negeri Singaraja.	√		Bukti dokumentasi tercatat dalam rencana kerja aksi.	<table><tr><th rowspan="2">NO</th><th rowspan="2">AKSI/KEGIATAN</th><th colspan="4">JADWAL PELAKSANAAN</th><th rowspan="2">KELUARAN</th><th rowspan="2">PROGRAM</th><th rowspan="2">KEGIATAN</th><th rowspan="2">DANA (Rp)</th></tr><tr><th>I</th><th>II</th><th>III</th><th>IV</th></tr><tr><td>1.</td><td>POS BANTUAN HUKUM - Belanja Jasa Konsultan</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>250 orang</td><td>Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum</td><td>Layanan Pos Bantuan Hukum</td><td>44.000.000 44.000.000</td></tr><tr><td>2.</td><td>DUKUNGAN PENYELESAIAN PERKARA (KIMWASMAT) - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2 kegiatan</td><td>Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum</td><td>Percepatan Penyelesaian Perkara</td><td>1.500.000 1.500.000</td></tr><tr><td>3.</td><td>PERKARA PRODEO - Biaya Perkara</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>15 perkara</td><td>Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum</td><td>Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara</td><td>5.000.000 5.000.000</td></tr><tr><td>4.</td><td>SIDANG DI LUAR GEDUNG PENGADILAN - Belanja perjalanan dinas biasa</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>13 perkara</td><td>Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum</td><td>Sidang diluar gedung pengadilan</td><td>10.000.000 10.000.000</td></tr><tr><td>5.</td><td>PENDAFTARAN BERKAS PERKARA - Belanja Bahan - Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>160 perkara</td><td rowspan="7">Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum</td><td rowspan="7">Perkara Pidana yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding yang tepat waktu</td><td>47.945.000 6.400.000 41.545.000</td></tr><tr><td>6.</td><td>PENETAPAN HARI SIDANG - Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4.650.000 4.650.000</td></tr><tr><td>7.</td><td>PENGIRIMAN SURAT PENAHANAN DAN PERPANJANGAN PENAHANAN - Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4.000.000 4.000.000</td></tr><tr><td>8.</td><td>PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN - Belanja Bahan</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>68.000.000 68.000.000</td></tr><tr><td>9.</td><td>PENGIRIMAN PETIKAN/SALINAN PUTUSAN KEPADA JPU DAN TERDAKWA - Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3.480.000 3.480.000</td></tr><tr><td>10.</td><td>MINUTASI UPAYA HUKUM - Belanja Bahan</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4.400.000 4.400.000</td></tr><tr><td>11.</td><td>PENANGANAN PERKARA BANDING DI</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5.400.000 5.400.000</td></tr></table>	NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)	I	II	III	IV	1.	POS BANTUAN HUKUM - Belanja Jasa Konsultan					250 orang	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Layanan Pos Bantuan Hukum	44.000.000 44.000.000	2.	DUKUNGAN PENYELESAIAN PERKARA (KIMWASMAT) - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					2 kegiatan	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Percepatan Penyelesaian Perkara	1.500.000 1.500.000	3.	PERKARA PRODEO - Biaya Perkara					15 perkara	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	5.000.000 5.000.000	4.	SIDANG DI LUAR GEDUNG PENGADILAN - Belanja perjalanan dinas biasa					13 perkara	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Sidang diluar gedung pengadilan	10.000.000 10.000.000	5.	PENDAFTARAN BERKAS PERKARA - Belanja Bahan - Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi					160 perkara	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Pidana yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding yang tepat waktu	47.945.000 6.400.000 41.545.000	6.	PENETAPAN HARI SIDANG - Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat						4.650.000 4.650.000	7.	PENGIRIMAN SURAT PENAHANAN DAN PERPANJANGAN PENAHANAN - Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat						4.000.000 4.000.000	8.	PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN - Belanja Bahan						68.000.000 68.000.000	9.	PENGIRIMAN PETIKAN/SALINAN PUTUSAN KEPADA JPU DAN TERDAKWA - Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat						3.480.000 3.480.000	10.	MINUTASI UPAYA HUKUM - Belanja Bahan						4.400.000 4.400.000	11.	PENANGANAN PERKARA BANDING DI						5.400.000 5.400.000
NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN			PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)																																																																																																											
		I	II	III	IV																																																																																																																	
1.	POS BANTUAN HUKUM - Belanja Jasa Konsultan					250 orang	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Layanan Pos Bantuan Hukum	44.000.000 44.000.000																																																																																																													
2.	DUKUNGAN PENYELESAIAN PERKARA (KIMWASMAT) - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					2 kegiatan	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Percepatan Penyelesaian Perkara	1.500.000 1.500.000																																																																																																													
3.	PERKARA PRODEO - Biaya Perkara					15 perkara	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	5.000.000 5.000.000																																																																																																													
4.	SIDANG DI LUAR GEDUNG PENGADILAN - Belanja perjalanan dinas biasa					13 perkara	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Sidang diluar gedung pengadilan	10.000.000 10.000.000																																																																																																													
5.	PENDAFTARAN BERKAS PERKARA - Belanja Bahan - Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi					160 perkara	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Pidana yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding yang tepat waktu	47.945.000 6.400.000 41.545.000																																																																																																													
6.	PENETAPAN HARI SIDANG - Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat								4.650.000 4.650.000																																																																																																													
7.	PENGIRIMAN SURAT PENAHANAN DAN PERPANJANGAN PENAHANAN - Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat								4.000.000 4.000.000																																																																																																													
8.	PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN - Belanja Bahan								68.000.000 68.000.000																																																																																																													
9.	PENGIRIMAN PETIKAN/SALINAN PUTUSAN KEPADA JPU DAN TERDAKWA - Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat								3.480.000 3.480.000																																																																																																													
10.	MINUTASI UPAYA HUKUM - Belanja Bahan								4.400.000 4.400.000																																																																																																													
11.	PENANGANAN PERKARA BANDING DI								5.400.000 5.400.000																																																																																																													

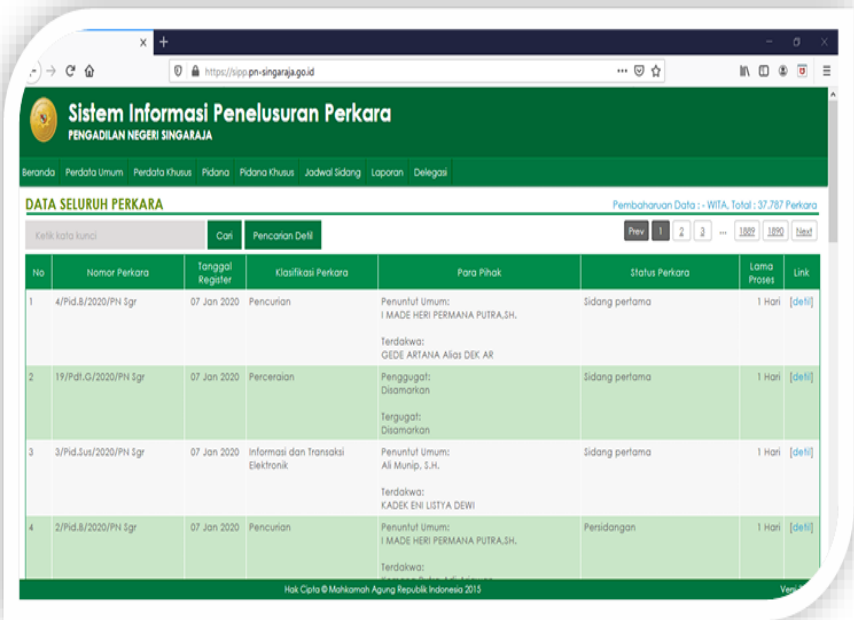
<https://11nk.dev/LaporanRencanaKerjaAksi2025>

<https://l1nk.dev/LaporanRencanaKerjaAksi2025>

	13	Akses informasi di Pengadilan Negeri Singaraja dibatasi sesuai dengan klasifikasi dan tingkat kerahasiaan yang ditetapkan.	√		Website resmi memuat informasi terbatas sesuai wewenang.	
--	----	--	---	--	--	---

	14	Pengadilan Negeri Singaraja memberikan pelatihan dan sosialisasi mengenai penggunaan sistem dan informasi yang sesuai dengan kebijakan organisasi.	√	Tersedia dokumentasi kegiatan pelatihan dan sosialisasi.	e-Berpadu Masuk Fase Training, Pengadilan Negeri Singaraja Bergerak Melakukan Sosialisasi Ke Kejaksaan, Kepolisian, dan Lembaga Pemasyarakatan 07 September 2022 oleh Irfan 
--	----	--	---	--	--

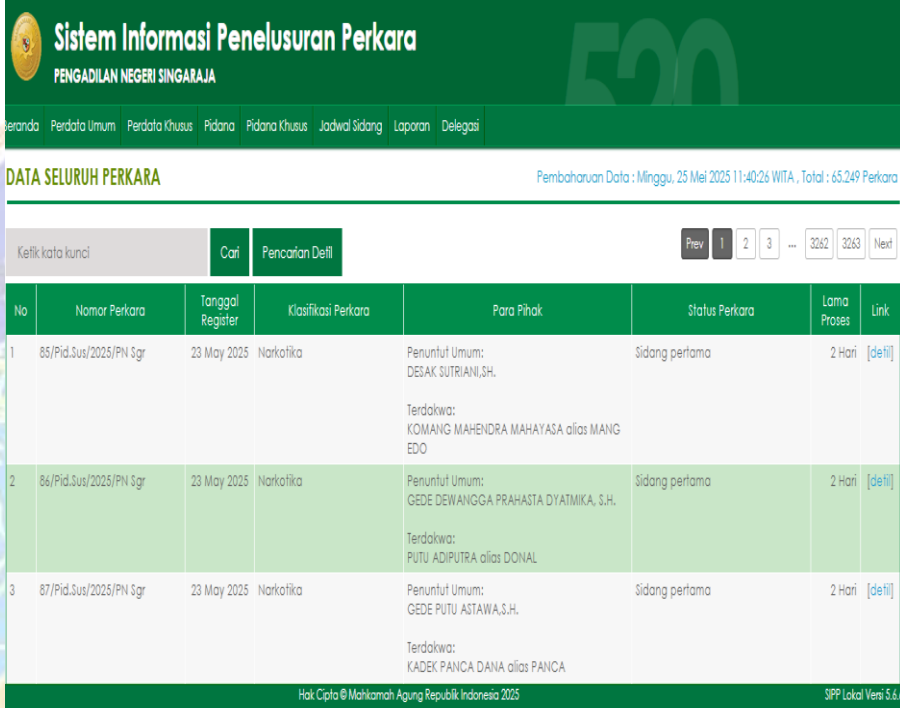
Level 3	1	Pengadilan Negeri Singaraja telah menerapkan kontrol otomatis untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam proses bisnis.	√	Sistem informasi digunakan untuk mempercepat proses layanan dan verifikasi.	1. Aspek Proses Peradilan - Adanya Website Pengadilan Negeri Singaraja yang memberikan informasi kepada masyarakat khususnya masyarakat pencari keadilan mengenai prosedur pengajuan perkara, layanan publik, layanan hukum, jadwal sidang, dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Singaraja yang memberikan informasi kepada masyarakat umum tentang proses perkara; - Adanya e-Court yaitu layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online dan pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik; - Adanya inovasi bernama SIARTA (Sistem Informasi Auto Respon dan Tanggap) yang dapat memberikan informasi berkaitan dengan jadwal sidang, data realisasi, data survei, dan bentuk keterbukaan informasi lainnya yang dapat diakses melalui <i>Whatsapp</i> sekaligus memberikan notifikasi terkait pengawasan terhadap penggunaan SIPP; - Adanya inovasi bernama HUMBLE (Halo Kaum Difabel) sebagai media reservasi sarana dan prasarana yang terdapat pada Pengadilan Negeri Singaraja.
---------	---	---	---	---	--

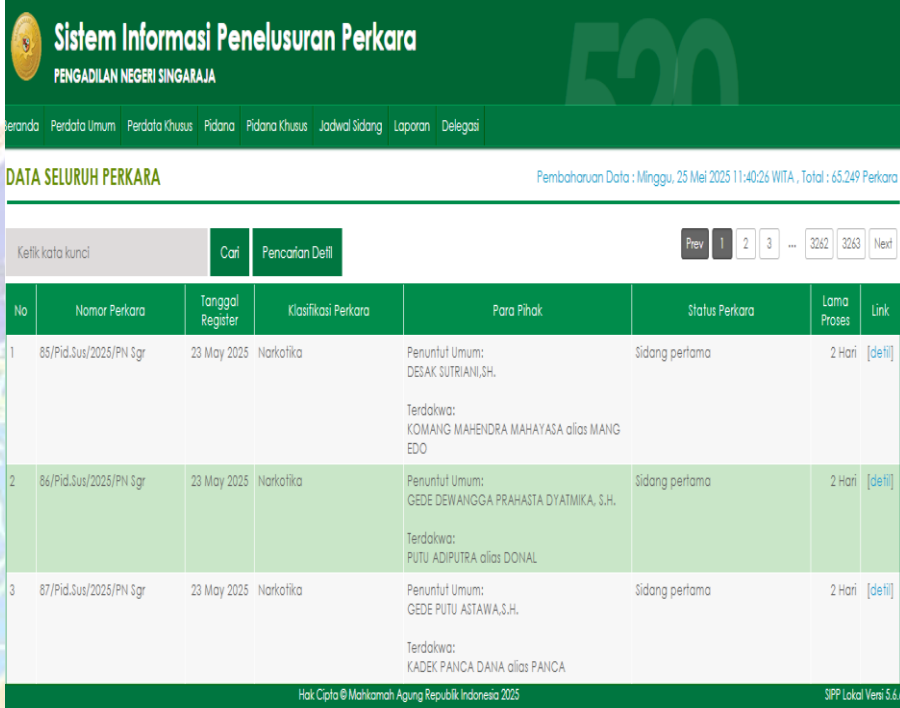
	2	Setiap transaksi diverifikasi melalui kontrol otomatis dan manual untuk memastikan akurasi, kelengkapan, dan validitasnya.	√	Validasi transaksi dilakukan melalui sistem dan oleh petugas manual.	 Tampilan SIPP/CTS Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB
--	---	--	---	--	---

	3	Kesalahan dalam transaksi dikoreksi dan diajukan ulang tanpa mengubah tingkat otorisasi aslinya.	√		SOP keuangan dan administrasi mengatur koreksi transaksi.	Laporan RKAKL SatuDJA Tahun 2024 *DIPA 099794 1. Data Awal 2. Revisi Ke - 1 (satu) 3. Revisi Ke - 2 (dua) 4. Revisi Ke - 3 (tiga) 5. Revisi Ke - 4 (empat) 6. Revisi Ke - 5 (lima) 7. Revisi Ke - 6 (enam) 8. Revisi Ke - 7 (tujuh) 9. Revisi Ke - 8 (delapan) 10. Revisi Ke - 9 (sembilan) *DIPA 099795 1. Data Awal 2. Revisi Ke - 1 (satu) 3. Revisi Ke - 2 (dua) 4. Revisi Ke - 3 (tiga) 5. Revisi Ke - 4 (empat) 6. Revisi Ke - 5 (lima) 7. Revisi Ke - 6 (enam) https://www.pn-singaraja.go.id/page/laporan-rkakl-satudja
	4	Sistem di Pengadilan Negeri Singaraja		√	Aktivitas belum dilaksanakan	

		memastikan transaksi yang valid tetap berjalan meskipun ada kesalahan dalam transaksi lainnya.				
	5	Dokumen hasil proses bisnis dikirimkan dengan metode yang aman dan diverifikasi sebelum diserahkan kepada penerima.	√		Pengiriman dilakukan melalui protokol internal yang terverifikasi.	Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (MOU) tentang pemberian layanan POSBAKUM Tahun Anggaran 2025 06 Januari 2025 oleh Komang Devi 

	6	Sistem memiliki mekanisme pemulihan data untuk memastikan data tetap valid setelah kegagalan sistem.	√	Tersedia instruksi pengelolaan backup dan pemeliharaan arsip.	INSTRUKSI DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM NOMOR 3102/DJU/SK/HM02.3/9/2019 TENTANG PENGELOLAAN BACKUP DATA REGISTER, ARSIP PERKARA SECARA ELEKTRONIK SERTA PEMELIHARAAN REGISTER DAN ARSIP PERKARA MANUAL DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM, Dalam rangka penerapan e-register pada pengadilan – pengadilan di lingkungan peradilan umum dengan ini memberi instruksi Kepada : 1. Yth. Seluruh Ketua Pengadilan Tinggi 2. Yth. Seluruh Ketua Pengadilan Negeri Untuk : KESATU : Seluruh Pengadilan Negeri wajib : a. Melaksanakan back up database SIPP setidaknya / minimal sekali dalam sehari. https://badilum.mahkamahagung.go.id/publik/peraturan/kebijakan-dirjen-badilum/2835-instruksi-tentang-pengelolaan-backup-data-register-arsip-perkara-secara-elektronik-serta-pemeliharaan-register-dan-arsip-perkara-manual.html
--	---	--	---	---	---

	7	Data transaksi diperiksa sebelum diteruskan untuk memastikan alamat, keaslian, dan integritasnya.	√		Verifikasi dilakukan lewat sistem seperti SIPP dan E-Court.	
--	---	---	---	--	---	---

	8	Hak akses diberikan hanya sesuai kebutuhan pekerjaan, dan segera dicabut jika peran pekerjaan berubah.	√		Log penggunaan dan surat tugas digunakan untuk pengaturan akses.	
--	---	--	---	--	--	---

	9	Pelatihan berkala diberikan kepada staf mengenai peran mereka dalam kontrol bisnis dan keamanan data.	√	Instruksi khusus mengatur pelatihan keamanan data.	LAMPIRAN I BACKUP DATABASE SIPP Proses Pengiriman data dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi menggunakan cara sinkronisasi (SQLYog) dimana penggunaan sinkronisasi membutuhkan tunnel php yang tersedia dalam paket aplikasi SQLYog. Kebutuhan Hardware: • Processor: minimal 4 vCore/Thread • Memory: minimal 8 GB • Hardisk/Media Penyimpanan: minimal 600 GB • Kartu Jaringan/Lan Card: 1 Gbs • Sistem Operasi: Linux Centos • Paket Aplikasi: Mysql (mariaDB, percona, dll), apache, PHP (php 5.6) • Koneksi Internet: Minimal 50 Mbps (dedicated)/ Minimal 100 Mbs (shared) • IP Publik yang dapat diakses oleh pengguna internet
--	---	---	---	--	---

	10	Hak administratif dikelola dengan ketat dan diaudit secara berkala untuk mencegah penyalahgunaan	√	Audit Kinerja dilakukan secara berkala	Audit Kinerja Pada Pengadilan Negeri Singaraja 19 September 2024 oleh Irfan Hanandra  17 - 19 SEPTEMBER 2024 Audit Kinerja Pada Pengadilan Negeri Singaraja
	11	Ada prosedur jelas untuk menangani kesalahan, pengecualian, dan ketidakseimbangan dalam proses bisnis.	√	Aktivitas ini belum dilaksanakan	

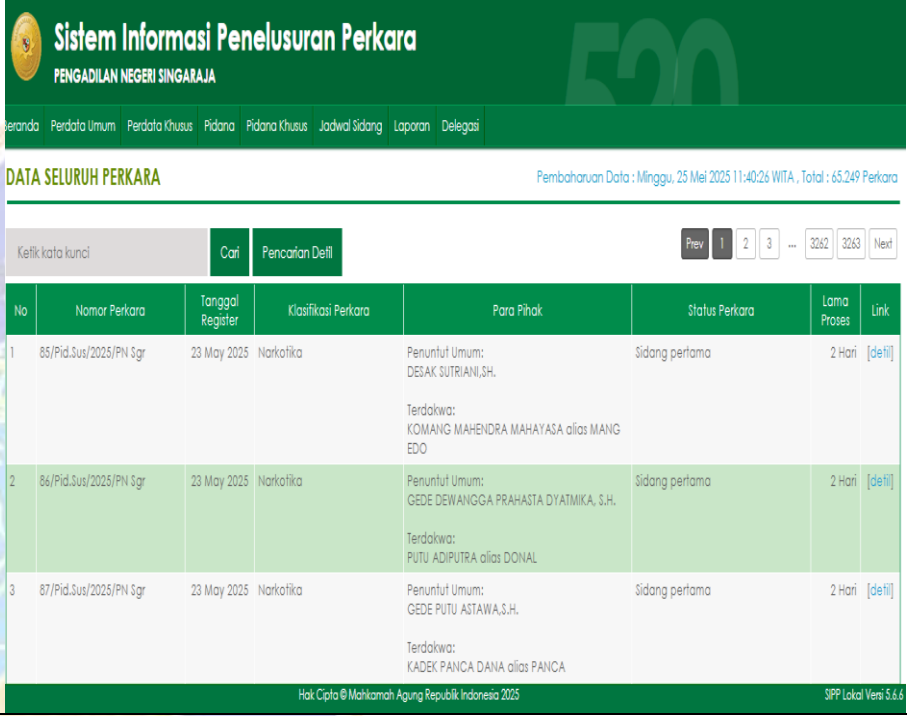
	12	Dokumen dan data disimpan sesuai dengan kebijakan retensi yang telah ditetapkan.	√	Terdapat prosedur pengelolaan arsip.	LAMPIRAN II PROSEDUR RETENSI REGISTER MANUAL DAN ARSIP PERKARA Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan pada pasal 65 ayat (2) huruf d, <i>pemusnahan arsip dikecualikan terhadap arsip yang berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara.</i> Prosedur retensi register manual dan arsip perkara dilaksanakan dengan tatacara sebagai berikut : 1. Pembentukan panitia penilai register manual dan arsip perkara yang akan diretensi; 2. Penyeleksian register manual dan arsip perkara yang telah berusia 30 tahun ke atas; 3. Pembuatan daftar register manual dan arsip perkara yang akan diretensi; 4. Penilaian oleh panitia penilai register manual dan arsip perkara; 5. Penetapan register manual dan arsip perkara yang akan dilaksanakan
--	----	--	---	--------------------------------------	---

	13	Data yang tidak diperlukan lagi dimusnahkan sesuai kebijakan retensi dan keamanan informasi.	√	Penghapusan data dilakukan berdasarkan laporan internal.	 KETUA PENGADILAN TINGGI DENPASAR KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI DENPASAR NOMOR : 05/KPT.W24-U/SK.PL1.2.3/II/2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI BARANG MILIK NEGARA DAN PENGHAPUSAN PADA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KETUA PENGADILAN TINGGI DENPASAR Menimbang : a. Bahwa Barang Milik Negara yang dikategorikan dalam aset Lain-lain merupakan Aset dengan kondisi rusak berat sehingga sudah tidak layak pakai dan tidak efisien jika dipertahankan; b. Bahwa ada Barang Milik Negara dalam pengelolaan Pengadilan Negeri Singaraja dalam keadaan rusak berat yang perlu untuk segera dilakukan penghapusan karena sudah tidak efisien dalam penggunaannya; c. Bahwa untuk melakukan proses penghapusan Barang Milik Negara perlu dibentuk Panitia yang bertanggung jawab untuk menginventarisir barang-barang yang dikategorikan rusak berat; d. Bahwa nama-nama pejabat dan pegawai yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Panitia Penghapusan Barang Milik Negara yang sudah rusak berat untuk dihapuskan. Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
--	----	--	---	--	--

	14	Informasi diklasifikasikan berdasarkan tingkat kepentingan dan dilindungi dengan kebijakan keamanan yang sesuai.	√	Website dan sistem dilengkapi kebijakan klasifikasi informasi.	
--	----	--	---	--	---

	15	Proses dan alat audit digunakan untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan regulasi.	√	Audit berkala dilakukan untuk memastikan kontrol berjalan baik.	Rapat Bulanan Periode Bulan Pebruari 2025 27 Februari 2025 oleh Komang Devi  27 FEBRUARI 2025
--	----	---	---	---	--

Level 4	1	Pengadilan Negeri Singaraja secara berkala memantau kontrol bisnis untuk mengidentifikasi area yang dapat ditingkatkan.	√	Audit berkala dilakukan untuk memastikan kontrol berjalan baik.	Rapat Bulanan Periode Bulan Pebruari 2025 27 Februari 2025 oleh Komang Devi  27 FEBRUARI 2025
---------	---	---	---	---	--

	2	Hak akses diperiksa secara rutin untuk memastikan hanya staf yang berwenang yang memiliki akses ke informasi tertentu.	√		Pemantauan Log aktivitas sistem	
	3	Kesalahan dalam proses bisnis dilaporkan dan dianalisis untuk menemukan pola dan penyebab utama.	√		Aktivitas ini belum dilaksanakan	

	4	Setiap pelanggaran dan penyimpangan dalam proses bisnis didokumentasikan dan dilaporkan kepada manajemen serta pemangku kepentingan terkait.	√	Aktivitas ini belum dilaksanakan	
Level 5	1	Pengadilan Negeri Singaraja secara aktif mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas kontrol dalam proses bisnis.	√	Dilakukan Audit TI setiap bulan	DOKUMENTASI RAPAT PENGAWASAN PTIP MARET 2025 PADA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA 



Lampiran 16. Daftar Hadir FGD

BERITA ACARA

FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)

EVALUASI TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI (TI) MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT 2019 PADA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS IB

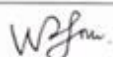
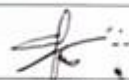
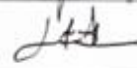
Pada hari ini 08 April 2025 bertempat di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB, telah dilaksanakan Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka pengumpulan data dan validasi hasil penelitian untuk penyusunan skripsi dengan judul "Evaluasi Tata Kelola Teknologi Informasi (TI) Menggunakan Framework COBIT 2019 pada Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB".

Adapun hal-hal yang menjadi hasil pelaksanaan FGD yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat adalah sebagai berikut:

1. Pemaparan hasil evaluasi tata kelola TI di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB menggunakan framework COBIT 2019 telah disampaikan oleh Putu Diah Maharanny dan ditanggapi oleh peserta FGD.
2. Peserta FGD memberikan validasi terhadap temuan penelitian, termasuk capaian *Capability level* pada setiap domain COBIT 2019 dan analisis kesenjangan.
3. Peserta FGD memberikan masukan dan saran terkait rekomendasi perbaikan tata kelola TI yang diusulkan oleh peneliti.
4. Notulensi hasil pembahasan FGD terlampir dalam Lampiran I Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disetujui oleh pihak-pihak yang terlibat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Daftar Hadir Peserta FGD

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	KOMANG DEWI MAHARDYANI	KERALA BAGIAN PTIP	
2	Ni Nyoman Triwangwangih	Perata layanan Operasional	
3	Akhatha snahi, S.T.I	Penatah Teknik Kebidanan	
4	Marela Pranesti Ayuningtyas, A.Md	Arsparis Polaksana	
5	Tihik brngati, A.Md.	Pengabala Penanganan Perkara	

Lampiran 17. Dokumentasi Kegiatan

No.	Nama Kegiatan	Gambar/Dokumentasi
1.	Proses Wawancara Awal	
2.	Wawancara Data Aset	
3.	Diskusi Penentuan Responden	
4.	Proses Studi Dokumen	
5.	Proses Studi Dokumen	

No.	Nama Kegiatan	Gambar/Dokumentasi
6.	Penyampaian hasil penelitian	
7.	<i>Focus Group Discussion</i> penyampaian hasil penelitian dan rekomendasi penelitian	
8.	Foto bersama pegawai diskominfo yang hadir pada FGD	

RIWAYAT HIDUP



Putu Diah Maharanny lahir di Denpasar pada tanggal 16 Oktober 2002. Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak Made Werdiasa dan Ibu Kadek Nunuk Arisani, SE. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Penulis beralamat di Nuansa Tunjung Garden, Peguyangan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kabupaten Kota Denpasar, Provinsi Bali. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SDN 4 Ubung Kaja dan lulus pada tahun 2015, kemudian penulis melanjutkan di SMPN 12 Denpasar dan lulus pada tahun 2018. Pada tahun 2021 penulis lulus dari SMA PGRI 4 Denpasar jurusan MIPA dan melanjutkan Pendidikan S1 Program Studi Sistem Informasi di Universitas Pendidikan Ganesha dan sampai dengan penulisan skripsi ini, penulis masih terdaftar aktif sebagai mahasiswa S1 Program Studi Sistem Informasi di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada bulan Juni tahun 2025, penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Evaluasi Tata Kelola Teknologi Informasi (TI) Menggunakan Framework COBIT 2019 pada Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B”.